Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Aviasi Pariwisata Indonesia
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2025
and for the year then ended
with independent auditor's report

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi | ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Director's Statement Letter*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-6	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	7	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8-9	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	10-311	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PT PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) AVIASI PARIWISATA INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA

DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR THEN ENDED PT PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) AVIASI PARIWISATA INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

1. Nama/*Name* : Maya Carolina Watono
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung Sarinah Lantai 14, Jl. M. H. Thamrin No. 11, Kota Jakarta Pusat, 10350
   Nomor Telepon/*Phone Number* : +62 21 21393654
   Jabatan/*Position* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Yudi Rizkyardie Darun
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung Sarinah Lantai 14, Jl. M. H. Thamrin No. 11, Kota Jakarta Pusat, 10350
   Nomor Telepon/*Phone Number* : +62 21 21393654
   Jabatan/*Position* : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko /*Director of Finance and Risk Management*

menyatakan bahwa*:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Perseroan (Persero) Aviasi Pariwisata Indonesia dan entitas anaknya ("Grup") pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;

2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Perusahaan Perseroan (Persero) Aviasi Pariwisata Indonesia and its subsidiaries (the "Group") as of December 31, 2025 and for the year then ended;*

2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards;*

3. *a. All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;*

   b. The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and

4. *We are responsible for the Group's internal control systems.*

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 27 Maret 2026 / *March 27, 2026*



Maya Carolina Watono
Direktur Utama/*President Director*

Yudi Rizkyardie Darun
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
/*Director of Finance and Risk Management*

Shape the future with confidence

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026

The Shareholder and the Boards of Commissioners and Directors
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2025 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026 (lanjutan)

Report No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026 (continued)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material Perpmisstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00377/2.1505/AU.1/10/0697-3/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Moch. Dadang Syachruna
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/*Public Accountant Registration No. AP.0697*

27 Maret 2026/*March 27, 2026*

00377

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2025/ *December 31,* 2025	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4,45,49	9.517.234	12.092.579	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya - bagian lancar	5,45,49	422.140	2.730.444	*Restricted cash - current portion*
Investasi jangka pendek	6	131.431	142.374	*Short-term investment*
Piutang usaha	7,45,49	2.483.421	2.272.800	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	8,45,49	184.305	98.672	*Other receivables*
Persediaan	9	124.859	84.995	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	13a	152.324	137.488	*Prepaid taxes*
Uang muka	10	231.507	367.922	*Advances*
Biaya dibayar di muka	11	87.653	55.979	*Prepaid expenses*
Aset kontrak	12	630.766	719.210	*Contract assets*
Aset lancar lainnya		11	8.879	*Other current assets*
JUMLAH ASET LANCAR		**13.965.651**	**18.711.342**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang usaha - tidak lancar	7,45,49	395.975	341.827	*Trade receivables - non-current*
Piutang lain-lain - tidak lancar	8,45,49	6.430	5.954	*Other receivables - non-current*
Investasi jangka panjang	14	79.879	74.837	*Long-term investments*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	15	6.230.148	576.826	*Investment in associates and joint venture*
Properti investasi	16	2.027.082	1.756.251	*Investment properties*
Aset tetap	17	79.999.312	79.053.635	*Fixed assets*
Aset hak-guna	18	1.338.963	983.566	*Right-of-use assets*
Aset takberwujud	19	128.015	119.952	*Intangible assets*
Estimasi tagihan pajak	13b	1.398.985	1.280.673	*Estimated claims for refundable tax*
Aset pajak tangguhan	13f	680.953	646.707	*Deferred tax assets*
Kas yang dibatasi penggunaannya - bagian tidak lancar	5,45,49	129.500	129.500	*Restricted cash - non-current portion*
Aset tidak lancar lain-lain	20	259.184	137.880	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**92.674.426**	**85.107.608**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**106.640.077**	**103.818.950**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2025/ *December 31,* 2025	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	21,45,49	1.388.501	1.380.663	*Trade payables*
Utang lain-lain	22,45,49	2.182.359	2.807.726	*Other payables*
Beban akrual	24,45,49	4.549.174	3.811.539	*Accrued expenses*
Utang pajak	13c	656.343	612.051	*Taxes payable*
Liabilitas tunjangan hari tua dan dana pensiun	26	68.485	68.089	*Retirement and pension fund liabilities*
Liabilitas kontrak	25	878.826	656.172	*Contract liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	31	1.370.190	905.698	*Short-term employee benefit liabilities*
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek	23,45,49	73.946	193.047	*Short-term bank and other financial institution loans*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	27,45,49	4.747.011	4.491.948	*Long-term bank and other financial institutions loans*
Utang obligasi dan sukuk	28,45,49	2.302.000	159.000	*Bonds payable and sukuk*
Liabilitas sewa	18	166.773	141.165	*Lease liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**18.383.608**	**15.227.098**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				*Long-term liabilities - net of current maturities:*
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	27,45,49	32.755.078	37.590.065	*Long-term bank and other financial institutions loans*
Utang obligasi dan sukuk	28,45,49	6.698.886	8.905.087	*Bonds payable and sukuk*
Liabilitas sewa	18	1.063.360	816.958	*Lease liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	13f	995.537	437.108	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	31	2.857.249	2.621.459	*Employee benefits liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	29	318.331	971.264	*Other non-current liabilities*
Liabilitas kontrak jangka panjang	30	1.278.914	1.173.656	*Long-term contract liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**45.967.355**	**52.515.597**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**64.350.963**	**67.742.695**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2025/ *December 31,* 2025	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				*Equity attributable to the owner of the parent entity*
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B				*Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively*
Modal dasar - 260.000.000 saham, terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 259.999.999 saham Seri B (2024:260.000.000, saham tanpa seri)				*Authorized capital - 260,000,000 shares, consist of 1 A Series Dwiwarna share and 259,999.999 B Series shares (2024: 260,000,000 shares)*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 78.656.758 saham, terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 78.656.757 saham Seri B (2024: 78.656.758 saham tanpa seri)	32	78.656.758	78.656.758	*Issued and fully paid capital - 78,656,758 shares, consist of 1 A Series Dwiwarna share and 78,656,757 B Series share (2024: 78,656,758 shares)*
Tambahan modal disetor	33	(45.973.009)	(45.946.380)	*Additional paid-in capital*
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali		(9.116)	(9.116)	*Difference in transaction with non-controlling entity*
Modal disetor lainnya	34	-	-	*Other paid-in capital*
Komponen ekuitas lainnya		-	-	*Other equity component*
Penghasilan komprehensif lain		(340.391)	(341.614)	*Other comprehensive income*
Saldo laba				*Retained earnings*
Dicadangkan		2.111	2.111	*Appropriated*
Belum dicadangkan		8.597.247	2.471.812	*Unappropriated*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		40.933.600	34.833.571	*Equity attributable to the owner of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	35	1.355.514	1.242.684	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**42.289.114**	**36.076.255**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**106.640.077**	**103.818.950**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
PENDAPATAN USAHA	**28.579.616**	36,45	**30.539.346**	***OPERATING REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	**(18.002.139)**	37	**(17.778.740)**	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**10.577.477**		**12.760.606**	***GROSS PROFIT***
Beban pegawai	(1.223.523)	38	(1.132.531)	*Employee expenses*
Beban umum dan administrasi	(3.662.462)	39	(3.557.071)	*General and administrative expenses*
Beban pemasaran	(145.524)		(98.711)	*Marketing expenses*
Pendapatan lain-lain	6.024.153	40	850.579	*Other income*
Beban lain-lain	(203.821)	41	(508.212)	*Other expenses*
LABA USAHA	**11.366.300**		**8.314.660**	***OPERATING PROFIT***
Penghasilan keuangan	429.878	42	423.305	*Finance income*
Beban keuangan	(3.577.412)	43	(3.708.333)	*Finance costs*
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi	20.348	15	(16.254)	*Equity income (loss) of associates*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	**8.239.114**		**5.013.378**	***PROFIT BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak final	(638.182)		(429.855)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**7.600.932**		**4.583.523**	***PROFIT BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan badan, neto	(687.739)	13d	(2.013.897)	*Corporate income tax expense, net*
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*	**6.913.193**		**2.569.626**	***PROFIT FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S PROFIT ADJUSTMENT***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:				***Item that will be reclassified to profit or loss in subsequent period:***
Keuntungan (kerugian) atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.583	6	(2.532)	*Gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya				***Item that will not be reclassified to profit or loss in subsequent period***
Keuntungan (kerugian) atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(5.042)	14	18.311	*Gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Pengukuran kembali program imbalan pasti	15.249		(73.897)	*Remeasurement of defined benefit plans*
Efek beban pajak penghasilan	(3.343)		16.258	*Effect on income tax expense*
Bagian laba (rugi) komprehensif dari entitas asosiasi	(5.881)		446	*Other comprehensive income (loss) from associates entities*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	**3.566**		**(41.414)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*	**6.916.759**		**2.528.212**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***PROFIT FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY's INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	6.775.947		2.492.786	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	137.246		76.840	*Non-controlling interests*
	6.913.193		**2.569.626**	
Penyesuaian atas laba *merging entity*:				***Adjustment of merging entity's profit:***
Pemilik entitas induk	-		93.056	*Owner of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	-		-	*Non-controlling interests*
	-		**93.056**	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***PROFIT FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	6.775.947		2.399.730	*Owner of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	137.246		76.840	*Non-controlling interests*
	6.913.193		**2.476.570**	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	6.777.170		2.450.216	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	139.589		77.996	*Non-controlling interests*
	6.916.759		**2.528.212**	
Penyesuaian penghasilan komprehensif lainnya atas *merging entity*:				***Adjustment of merging entity's other comprehensive income:***
Pemilik entitas induk	-		93.056	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	-		-	*Non-controlling interests*
	-		**93.056**	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	6.777.170		2.357.160	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	139.589		77.996	*Non-controlling interests*
	6.916.759		**2.435.156**	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/*Equity Attributable to The Owner of Parent Entity*											
		Modal saham/ *Share capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional paid-in capital*	Modal disetor lainnya/*Other paid-in capital*	Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali/ *Difference in transactions with non-controlling entity*	Ekuitas merging entity/ *Equity merging entity*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah/ *Total*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
								Dicadangkan/ *Appropriated*	Belum dicadangkan/ *Unappropriated*				
Saldo tanggal 1 Januari 2024		**76.843.739**	**(45.281.624)**	**1.813.019**	**-**	**1.869.451**	**(381.109)**	**2.111**	**252.099**	**35.117.686**	**196.795**	**35.314.481**	***Balance as of January 1, 2024***
Penyertaan modal negara	32	1.813.019	-	(1.813.019)	-	-	-	-	-	-	-	-	*Proceed of capital from government*
Dividen		-	-	-	-	-	-	-	(101.000)	(101.000)	-	(101.000)	*Dividend*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	2.399.730	2.399.730	76.840	2.476.570	*Profit for the year*
Laba dari *merging entity*		-	-	-	-	93.056	-	-	-	93.056	-	93.056	*Profit from merging entity*
Pembelian saham kepentingan nonpengendali		-	-	-	(9.116)	-	(12)	-	3.060	(6.068)	6.068	-	*Acquisition of non-controlling interest*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:													*Other comprehensive income (loss):*
Pengukuran kembali program imbalan pasti	31	-	-	-	-	-	(58.795)	-	-	(58.795)	1.156	(57.639)	*Remeasurement of defined benefit plan*
Perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6,14	-	-	-	-	-	15.779	-	-	15.779	-	15.779	*Changes in value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Bagian rugi komprehensifif dari entitas asosiasi		-	-	-	-	-	446	-	-	446	-	446	*Other comprehensive loss from associate*
Pembalikan ekuitas *merging entity*		-	-	-	-	(1.962.507)	-	-	-	(1.962.507)	-	(1.962.507)	*Reversal of equity merging entity*
Kombinasi bisnis entitas sepengendali		-	(664.756)	-	-	-	-	-	-	(664.756)	-	(664.756)	*Business combination of entites under common control*
Kombinas bisnis entitas anak		-	-	-	-	-	82.077	-	(82.077)	-	961.825	961.825	*Business combination of subsidiary*
Saldo tanggal 31 Desember 2024		**78.656.758**	**(45.946.380)**	**-**	**(9.116)**	**-**	**(341.614)**	**2.111**	**2.471.812**	**34.833.571**	**1.242.684**	**36.076.255**	***Balance as of December 31, 2024***
Dividen		-	-	-	-	-	-	-	(650.512)	(650.512)	(26.759)	(677.271)	*Dividend*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	6.775.947	6.775.947	137.246	6.913.193	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:													*Other comprehensive income:*
Pengukuran kembali program imbalan pasti	31	-	-	-	-	-	9.512	-	-	9.512	2.343	11.855	*Remeasurement of defined benefit plan*
Perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6,14	-	-	-	-	-	(2.408)	-	-	(2.408)	-	(2.408)	*Changes in value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Bagian rugi komprehensifif dari entitas asosiasi		-	-	-	-	-	(5.881)	-	-	(5.881)	-	(5.881)	*Other comprehensive loss from associate*
Kombinasi bisnis entitas sepengendali		-	(26.629)	-	-	-	-	-	-	(26.629)	-	(26.629)	*Business combination of entites under common control*
Saldo tanggal 31 Desember 2025		**78.656.758**	**(45.973.009)**	**-**	**(9.116)**	**-**	**(340.391)**	**2.111**	**8.597.247**	**40.933.600**	**1.355.514**	**42.289.114**	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	34.096.055		28.414.696	*Receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya	(13.346.244)		(11.616.730)	*Payments to suppliers and other third parties*
Pembayaran kepada karyawan	(8.497.427)		(6.703.793)	*Payments to employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(890.594)		(1.669.048)	*Payments for taxes*
Pembayaran beban bunga	(3.565.253)		(3.708.334)	*Payment of interest expense*
Penerimaan pendapatan bunga	421.070		423.308	*Receipt of interest income*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**8.217.607**		**5.140.099**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap dan properti investasi	(5.136.882)	17,18	(3.851.371)	*Acquisition of fixed assets and investment property*
Penambahan pada investasi asosiasi	(152.202)	15	(31.264)	*Additional investment in associates*
Pembelian saham non-pengendali	-		(12.731)	*Purchase of non-controlling's interest shares*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	-	5	(125.000)	*Placement of restricted cash*
Penerimaan investasi aset keuangan	10.943		25.306	*Receipts from financial assets investments*
Pelepasan saham entitas asosiasi	-		705.000	*Sales of shares in associate*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(5.278.141)**		**(3.290.060)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan utang bank jangka pendek	-	24	175.638	*Proceed from short-term bank loan*
Pembayaran utang bank jangka pendek	(119.101)	28	(363.842)	*Payment of short-term bank loans*
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	28	1.388.272	*Proceeds from long-term bank loans*
Pembayaran utang bank jangka panjang	(4.579.924)	26	(2.659.093)	*Payment of long-term bank loans*
Penerimaan utang sukuk	-	29	2.000.000	*Proceeds from sukuk*
Pembayaran utang sukuk	-	29	(296.000)	*Payments for sukuk*
Penerimaan utang obligasi	-	29	254.760	*Proceeds from bonds payable*
Pembayaran utang obligasi	(159.000)	29	(736.500)	*Payments for bonds payable*
Pelepasan kas yang dibatasi penggunaannya	477.582	5	-	*Released of restricted cash*
Pembayaran insentif dan biaya pendanaan lainnya	-	29	(59.884)	*Payments for incentives and other financing expenses*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN (lanjutan)				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES (continued)***
Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham	(650.512)		(101.000)	*Cash dividend paid to shareholder*
Pembayaran dividen tunai kepada kepentingan nonpengendali	(26.759)		(38)	*Cash dividend paid to non-controlling interest*
Pembayaran liabilitas sewa	(438.092)	19	(380.457)	*Payments of lease liabilities*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(5.495.806)**		**(778.144)**	***Net cash used in financing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(2.556.340)**		**1.071.895**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
DAMPAK DARI PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	**(19.005)**		**10.766**	***EXCHANGE RATES FLUCTUATION ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**12.092.579**	**4**	**11.009.918**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**9.517.234**	**4**	**12.092.579**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau disingkat PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebelumnya bernama PT Survai Udara Penas (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 31 Mei 1961 sesuai Peraturan Pemerintah No. 197 tahun 1961 dengan status Perusahaan Negara (PN) bernama Perusahaan Negara Aerial Survey disingkat Penas. Pada tahun 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46/1974 bentuk perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Penas. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48, status perusahaan ditingkatkan menjadi Perusahaan Terbatas (Persero) bernama PT Survai Udara Penas (Persero) yang berorientasi profit. Badan hukum PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai Perusahaan Terbatas (Persero) dimuat dalam Akta Notaris Muhani Salim, S.H., No. 203 tanggal 30 Desember 1992. Perubahan nama PT Survai Udara Penas (Persero) menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dilakukan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 9 Agustus 2021 oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan AHU-AH.01.03-0438677 tanggal 19 Agustus 2021.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan melalui Akta No.70 tanggal 18 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta. Akta notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0206906 tanggal 5 Agustus 2025 (Catatan 32).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama Perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding di bidang pariwisata dan pendukung, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen pada sektor transportasi, pariwisata, retail, dan sektor lain yang terkait dengan kegiatan usaha, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia or shortened PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) previously named PT Survai Udara Penas (Persero) (the "Company") was established on May 31, 1961 in accordance with Government Regulation No. 197 year 1961 with the status of a State Company (PN) named the State Company Aerial Survey abbreviated Penas. In 1974, based on Government Regulation no. 46/1974 the form of the Company changed to Public Company (Perum) Penas. In 1991, based on Government Regulation No. 48, the status of the Company was upgraded to a Limited Company (Persero) named PT Survai Udara Penas (Persero) which was profit oriented. The legal entity of PT Survai Udara Penas (Persero) as a Limited Liability Company (Persero) is contained in the Notary Deed of Muhani Salim, S.H., No. 203 dated December 30, 1992. The name change of PT Survai Udara Penas (Persero) to PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) was based on Deed No. 23 dated August 9, 2021 by Desman, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta. The name change has been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree AHU-AH.01.03-0438677 dated August 19, 2021.

The Company's articles of association have undergone several amendments, the latest regarding the increase in issued and paid up share capital of the Company through Deed No. 70 dated July 18, 2025, which was made before Desman, S.H., M.Hum., a Notary in Jakarta. This notarial deed has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.03-0206906 dated August 5, 2025 (Note 32).

Based on article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's main activities are to carry out business activities as a holding company in the tourism and supporting sectors, carry out investment and management consulting activities in the transportation, tourism, retail and other sectors related to business activities, as well as optimize utilization of the Company resources based on the principles of good corporate governance.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan berkedudukan di Gedung Sarinah Lt. 14, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat.

b. *Holding* BUMN Pariwisata dan Pendukung

Pada tahun 2021, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi membentuk Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) yang sebelumnya bernama PT Survai Udara Penas (Persero), yang berganti nama seiring dengan penunjukkan PENAS sebagai induk Holding Pariwisata. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara ("Penas") menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Tugas dan tujuan *Holding* BUMN Pariwisata dalam PP Nomor 72 Tahun 2021 tersebut, dijelaskan mengenai maksud dan tujuan pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), yaitu melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan *holding* di bidang pariwisata dan pendukung, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen pada sektor transportasi, pariwisata, retail, dan sektor lain yang terkait dengan kegiatan usaha, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk tahap pertama, Perusahaan menjadi pemimpin Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang beranggotakan PT Angkasa Pura I ("AP I"), PT Angkasa Pura Indonesia (dahulu PT Angkasa Pura II ("AP Indonesia" dahulu "AP II"), PT Hotel Indonesia Natour ("HIN"), PT Sarinah ("Sarinah") dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC"). Perusahaan (Persero) akan menjadi pemimpin dari *Holding* BUMN Pariwisata dan Pendukung yang merupakan *Holding* bersifat ekosistem untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dalam menunjang sektor pariwisata.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company is domiciled at Sarinah Building 14th Floor, Jl. MH Thamrin, Central Jakarta.

b. SOEs Holding for Tourism and Supporting

In 2021, the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) officially formed a Tourism and Supporting SOEs Holding under PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) previously named PT Survai Udara Penas (Persero), which changed its name along with the appointment of PENAS as the holding company for Tourism. This refers to Government Regulation (PP) Number 72 of 2021 dated July 1, 2021 concerning Amendments to Government Regulation Number 48 of 1991 concerning the Transfer of the Form of a Public Company (Perum) Survai Udara ("Penas") to a State Owned Enterprises (Persero). Duties and objectives of Holding Tourism SOEs in PP Number 72 in 2021, it is explained about the tasks and objectives of establishing Tourism and Supporting SOEs Holdings under PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), namely carrying out business activities as holding companies in the tourism and supporting sectors, carrying out activities investment and management consulting in the transportation, tourism, retail, and other sectors related to business activities, as well as optimizing the utilization of Company resources based on the principles of good corporate governance.

For the first stage, the Company became the leader of the Tourism and Supporting SOEs Holding consisting of PT Angkasa Pura I ("AP I"), PT Angkasa Pura Indonesia (formerly PT Angkasa Pura II ("AP Indonesia" formerly "AP II"), PT Hotel Indonesia Natour ("HIN"), PT Sarinah ("Sarinah") and PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC"). The Company will be the leader of the Tourism and Supporting SOEs Holding which is an ecosystem holding to integrate various functions in supporting the tourism sector.

1. UMUM (lanjutan)

b. Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung (lanjutan)

Selanjutnya untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan, ditetapkanlah PP No. 104 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada AP I, AP Indonesia (dahulu AP II), HIN, Sarinah dan TWC yang kemudian dinilai penyertaan tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. 498/KMK.06/2021 tanggal 6 Desember 2021 sebesar total Rp65.151.

Setelah melalui Perjanjian tanggal 14 Desember 2021 tentang Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada AP I, AP Indonesia (dahulu AP II), HIN, Sarinah dan TWC kepada dan dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan ("inbreng"), dibuatlah Akta No.65 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, dimana Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0076120.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Per tahun 2021, Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung efektif terbentuk setelah Perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas dan menerima Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-107/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 dari Pemerintah RI terkait pemberian kuasa khusus kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada AP I, AP Indonesia (dahulu AP II), HIN, Sarinah dan TWC.

1. GENERAL (continued)

b. SOEs Holding for Tourism and Supporting (continued)

Furthermore, to strengthen the capital structure and increase the Company's business capacity, Government Regulation No. 104 of 2021 dated October 6, 2021 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation to the Share Capital of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) was enacted from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia's in AP I, AP Indonesia (formerly AP II), HIN, Sarinah and TWC which assessed for participation through the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 498/KMK.06/2021 dated December 6, 2021, amounting to a total of Rp65,151.

After going through the Agreement dated December 14, 2021 regarding the Agreement on the Transfer of Rights to the Shares of the Republic of Indonesia at AP I, AP Indonesia (formerly AP II), HIN, Sarinah and TWC to and in the context of adding the Republic of Indonesia State Equity Participation to the Company's Share Capital ("inbreng"), a Deed No. 65 dated December 15, 2021 was made in presence of Desman, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta, which the Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0076120.AH.01.02.TAHUN 2021 on December 28, 2021.

As of 2021, the Tourism and Supporting SOEs Holding is effectively formed after the Company becomes the majority shareholder and receives a Special Power of Attorney Number: SKK-107/MBU/12/2021 dated December 14, 2021 from the Government of the Republic of Indonesia regarding the granting of special powers to the Company to take actions that become the authority and/or rights of Series A Dwiwarna Shareholder in AP I, AP Indonesia (formerly AP II), HIN, Sarinah and TWC.

1. UMUM (lanjutan)

b. Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung (lanjutan)

Pada awal tahun 2023, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan, dilakukan kembali penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan dengan mengalihkan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ("ITDC").

Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan pada ITDC dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia dengan penambahan sebesar 2.147.659 lembar saham seri B.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/KMK.06/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Penempatan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia ditetapkan bahwa nilai penambahan penyertaan modal adalah sebesar Rp11.679.372 yang merupakan perhitungan nilai wajar saham per tanggal 30 Juni 2022 yang berasal dari 2.147.659 lembar pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Berkaitan dengan peralihan saham seri B tersebut, maka dibuatlah Akta No.85 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, di mana Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0083469 tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023.

1. GENERAL (continued)

b. SOEs Holding for Tourism and Supporting (continued)

At the beginning of the 2023, with the aim of strengthening the capital structure and enhancing the business capacity of the Company, there was a recapitalization through an additional injection of capital by the Republic of Indonesia into the share capital of the Company by transferring all series B shares owned by the Republic of Indonesia in PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ("ITDC").

The increase in the Republic of Indonesia's participation in the share capital of the Company in ITDC is stipulated in the Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 dated January 18, 2023 concerning the Increase of the Republic of Indonesia's Capital Participation in the Share Capital of the State-Owned Company (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, with an additional issuance of 2,147,659 shares of series B.

Through the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 53/KMK.06/2023 dated February 10, 2023 concerning the Placement of the Value of the Increase of the Republic of Indonesia's Capital Participation in the Share Capital of the State-Owned Company (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, it was determined that the value of the additional capital participation is Rp11,679,372, calculated based on the fair value of shares as of June 30, 2022, originating from the transfer of 2,147,659 series B shares owned by the Republic of Indonesia in PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Regarding the transfer of the series B shares, Deed No.85 was executed on May 31, 2023, before Desman, S.H., M.Hum., a Notary in Jakarta, and the deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-AH.01.03-0083469 year 2023 dated June 26, 2023.

1. UMUM (lanjutan)

b. Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung (lanjutan)

Berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia ("API") (saat ini PT Taman Wisata Borobudur ("TWB")) No. 106 oleh Notaris Surjadi, SH., MKn., MM., MH. Tanggal 28 Desember 2023 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0099070.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan melakukan penyetoran modal sebesar modal sebesar 9 lembar saham atau setara Rp9.000.000 (nilai penuh) dari total 10 lembar saham atau setara Rp10.000.000 (nilai penuh) pada API (saat ini TWB).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 2 Februari 2024 oleh Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, para pemegang saham diantaranya menyetujui pemindahan hak atas saham seri B AP I milik Perusahaan kepada TWB dengan cara dilakukannya inbreng dari Perusahaan kepada TWB sebanyak 3.143.061 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp3.143.061.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 17 tanggal 2 Februari 2024 oleh Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, para pemegang saham diantaranya menyetujui pemindahan hak atas saham seri B AP II milik Perusahaan kepada TWB dengan cara dilakukannya inbreng dari Perusahaan kepada TWB sebanyak 7.826.109 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp7.826.109.

Akta tersebut di atas telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Februari 2024.

Berdasarkan Akta Penyertaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 06 tanggal 6 September 2024 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, pemegang saham menyetujui diantaranya perubahan Anggaran Dasar, logo, dan nama perusahaan dari sebelumnya PT Angkasa Pura Indonesia menjadi PT Angkasa Pura Nusantara ("APN") (saat ini TWB). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0056666.AH.01.02 tahun 2024 tanggal 6 September 2024.

1. GENERAL (continued)

b. SOEs Holding for Tourism and Supporting (continued)

Based on the deed of establishment of the Limited Liability Company PT Angkasa Pura Indonesia ("API") (currently PT Taman Wisata Borobudur ("TWB")) No. 106 by Notary Surjadi, SH., MKn., MM., MH. dated December 28, 2023, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0099070.AH.01.01.Year 2023 dated December 29, 2023, the Company made a capital contribution of 9 shares or equivalent to Rp9,000,000 (full amount) out of a total of 10 shares or equivalent to Rp10,000,000 (full amount) at API (currently TWB).

Based on Deed of the Shareholders Decision No. 16 dated February 2, 2024 of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., the shareholders agreed among others to transfer the rights of series B shares of the AP I owned by the Company to TWB through inbreng from the Company to TWB amounting to 3,143,061 shares or Rp3,143,061.

Based on Deed of the Shareholders Decision No. 17 dated February 2, 2024 of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., the shareholders agreed among others to transfer the rights of series B shares of AP II owned by the Company to TWB through inbreng from the Company to TWB amounting to 7,826,109 shares or Rp7,826,109.

The Deed as mentioned above has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated February 16, 2024.

Based on the Deed of Inclusion of the General Meeting of Shareholders' Resolutions No. 06 dated September 6, 2024 from Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, the Company's shareholders approved, among other things, the amendment of the Company's Articles of Association, logo, and name of the Company from PT Angkasa Pura Indonesia to PT Angkasa Pura Nusantara ("APN") (currently TWB). The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0056666.AH.01.02.year 2024 dated September 6, 2024.

1. UMUM (lanjutan)

b. Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung (lanjutan)

Berdasarkan Akta Penyertaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal 7 Oktober 2024 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, pemegang saham menyetujui diantaranya perubahan tempat kedudukan dan alamat, logo, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, Anggaran Dasar, dan nama perusahaan dari sebelumnya PT Angkasa Pura Nusantara menjadi PT Taman Wisata Borobudur ("TWB"). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0063942.AH.01.02. tahun 2024 tanggal 8 Oktober 2024.

Berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 7 tanggal 12 Desember 2024 TWB telah mengalihkan seluruh Saham Seri B AP Indonesia (dahulu AP II) kepada Perusahaan. Pengalihan saham tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0221033 dan AHU-AH.01.09-0287543 tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian TWB menjadi tidak memiliki kepemilikan saham di AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II).

Berdasarkan akta keputusan para pemegang saham TWB No. 8 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn tanggal 12 Desember 2024 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0081158.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, terdapat peningkatan modal disetor TWB di mana setoran modal Perusahaan menjadi 50 lembar saham atau setara Rp50.000.000 (nilai penuh) dari total 5.000 lembar saham atau setara Rp4.950.000.000 (nilai penuh). Peningkatan saham TWB tersebut diambil oleh Perusahaan dan TWC pada tanggal 12 Desember 2024 sehingga Perusahaan dan TWC masing-masing memiliki 1,00% dan 99,00% kepemilikan saham di TWB. Hal ini membuat Perusahaan telah kehilangan pengendalian atas TWB sejak tanggal akta tersebut.

1. GENERAL (continued)

b. SOEs Holding for Tourism and Supporting (continued)

Based on the Deed of Shareholder's General Meeting Resolution No. 01 dated October 7, 2024, from Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, the shareholders approved, among other things, changes in the location and address, logo, purpose and objectives, business activities, Articles of Association, and the company's name from PT Angkasa Pura Nusantara to PT Taman Wisata Borobudur ("TWB"). These changes were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-0063942.AH.01.02. year 2024 dated October 8, 2024.

Based on the Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 7 dated December 12, 2024, TWB has transferred all of its Series B Shares in AP Indonesia (formerly AP II) to the Company. The share transfer has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0221033 and AHU-AH.01.09-0287543 dated December 12, 2024. Therefore, TWB no longer has ownership of share capital in AP Indonesia (formerly AP I and AP II).

Based on the deed of decision of the shareholders of TWB No. 8 by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn dated December 12, 2024 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0081158.AH.01.02.Tahun 2024 dated December 12, 2024, there was an increase in paid-up capital of TWB in which the Company's capital deposit became 50 shares or equivalent to Rp50,000,000 (full amount) from a total of 5,000 shares or equivalent to Rp4,950,000,000 (full amount). The increase in shares of TWB was acquired by the Company and TWC on December 12, 2024, resulting in the Company and TWC holding 1.00% and 99.00% ownership in TWB, respectively. Consequently, the Company has lost control over TWB since the date of the deed.

1. UMUM (lanjutan)

b. Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengaturan BUMN No. S-185/BPU/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, telah disetujui:

1. Penambahan penyertaan modal ITDC sebesar Rp275.000 yang bersumber dari konversi piutang pokok yaitu *shareholder loan* (Catatan 47).
2. Peningkatan modal dasar pada HIN dari semula Rp400.000 menjadi Rp2.500.000
3. Penambahan penyertaan modal HIN sebesar Rp586.000, yang bersumber dari konversi piutang pokok yaitu *shareholder loan* sebesar Rp432.858 dan setoran tunai dari Perusahaan kepada HIN sebesar Rp153.142 (Catatan 47).
4. Penambahan penyertaan modal HIN kepada PT Hotel Internasional Sanur Indonesia ("HISI") sebesar Rp501.600 yang bersumber dari konversi piutang pokok HIN kepada HISI sebesar Rp348.458 dan setoran tunai dari HIN kepada HISI sebesar Rp153.142
5. Penambahan penyertaan modal HIN kepada PT Hotel Indonesia Properti ("HIPRO") sebesar Rp83.000 yang bersumber dari konversi piutang pokok HIN kepada HIPRO sebesar Rp83.000.
6. Peningkatan modal dasar Sarinah dari semula Rp100.000 menjadi Rp700.000
7. Penambahan penyertaan modal Sarinah sebesar Rp529.279 yang bersumber dari konversi piutang pokok yaitu *shareholder loan*.
8. Penambahan penyertaan modal TWC yang dteruskan kepada PT Bhumi Visatanda Indonesia ("BHIVA") sebesar Rp60.500 yang bersumber dari setoran tunai, termasuk menyetujui tindakan di luar RKAP tahun 2025 sebesar Rp33.000 yang merupakan bagian dari penyertaan modal TWC kepada BHIVA.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki 6 (enam) entitas anak yang terdiri dari AP Indonesia, IAS, HIN, Sarinah, TWC, dan ITDC.

1. GENERAL (continued)

b. SOEs Holding for Tourism and Supporting (continued)

Based on the Decision Letter from Head of Regulatory of BUMN No. S-185/BPU/12/2025 dated December 31, 2025, which has been approved:

1. *The increase of issued and paid-up share capital of ITDC of Rp275,000, which come from convertion of the principal of shareholder loan (Note 47)*
2. *The increase of authorized capital of HIN from an initial value of Rp400,000 to Rp2,500,0000*
3. *The increase of issued and paid-up share capital of HIN totalling to Rp586,000, which come from convertion of the principal of shareholder loan of Rp432,858 and cash injection from the Company to HIN of Rp153,142 (Note 47).*
4. *The increase of issued and paid-up share capital from HIN to PT Hotel Internasional Sanur Indonesia ("HISI") totalling to Rp501,600, which come from convertion of the principal of shareholder loan of Rp348,458 and cash injection from the Company to HIN of Rp153,142.*
5. *The increase of issued and paid-up share capital from HIN to PT Hotel Indonesia Properti ("HIPRO") amounting to Rp83,000, which come from convertion of the principal of shareholder loan of Rp83,000.*
6. *The increase of authorized capital of Sarinah from an initial value of Rp100,000 to Rp700,000.*
7. *The increase of issued and paid-up share capital of Sarinah of Rp529,279, which come from convertion of the principal of shareholder loan (Note 47).*
8. *The increase of issued and paid-up share capital from TWC to PT Bhumi Visatanda Indonesia ("BHIVA") of Rp60,500 which come from cash injection, including approves action outside 2025 RKAP of Rp33,000, which is part of issued and paid-up share capital from TWC to BHIVA.*

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has 6 (six) subsidiary entities, consist of AP Indonesia, IAS, HIN, Sarinah, TWC, and ITDC, respectively.

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025/ *December 31,* 2025	31 Desember 2024/ *December 31,* 2024	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Iwan Setyawan	Triawan Munaf	*President Commissioner and Independent Commissioner*
Komisaris	Allan Tandiono	Odo Rene Mathew Manuhutu	*Commissioner*
Komisaris	Dameria Chaterina Magdalena	Wihana Kirana Jaya	*Commissioner*
Komisaris	Tubagus Fiki Chikara Satari	Tubagus Fiki Chikara Satari	*Commissioner*
Komisaris	Ni Luh Enik Ermawati	-	*Commissioner*
Dewan Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Maya Carolina Watono	Maya Carolina Watono	*President Director*
Direktur SDM dan Digital	Herdy Rosadi Harman	Herdy Rosadi Harman	*Human Capital and Digital Director*
Direktur Komersial	Henny Sisilia	-	*Commerical Director*
Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata	Maya Carolina Watono (Plt.)	Maya Carolina Watono (Plt.)	*Director of Marketing and Tourism Programs*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Yudi Rizkyardie Darun	Yudi Rizkyardie Darun	*Director of Finance and Risk Management*

Berdasarkan Surat Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia No. SK-30/MBU/01/2024 tanggal 31 Januari 2024, Perusahaan memberhentikan Bapak Elwin Chandra Mochsin sebagai Komisaris Independen serta mengangkat Bapak Tubagus Fiki Chikara Satari sebagai Komisaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia No. SK-282/MBU/11/2024 tanggal 21 November 2024, Perusahaan memberhentikan Bapak Dony Oskaria sebagai Direktur Utama Perusahaan serta mengangkat Ibu Maya Carolina Watono menjadi Direktur Utama Perusahaan, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata.

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee, and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Based on the Copy of the Decision Letter from the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia No. SK-30/MBU/01/2024 dated January 31, 2024, the Company terminates Mr. Elwin Chandra Mochsin as Independent Commissioner and appointed Mr. Tubagus Fiki Chikara Satari as Commissioner of the Company.

Based on the Copy of the Decision Letter from the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia No. SK-282/MBU/11/2024 dated November 21, 2024, the Company confirms the termination of Mr. Dony Oskaria as President Director and appointed Ms. Maya Carolina Watono as the President Director of the Company, which previously serving as Director of Marketing and Tourism Programs.

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia No. SK-162/MBU/06/2025 dan SK.020/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 Juni 2025, Perusahaan memberhentikan Bapak Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan dan memberhentikan Ibu Wihana Kirana Jaya dan Bapak Ono Manuhutu sebagai Komisaris Perusahaan, serta mengangkat Bapak Iwan Setyawan menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan dan mengangkat Bapak Allan Tandiono, Ibu Dameria Chaterina Magdalena dan Ibu Ni Luh Enik Ermawati sebagai Komisaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia No. SK-161/MBU/06/2025 dan SK.019/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 Juni 2025, Perusahaan mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan yang semula tidak ada menjadi Direktur Komersial, serta mengangkat Ibu Henny Sisilia menjadi Direktur Komersial Perusahaan.

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee, and Employees (continued)

Based on the Copy of the Decision Letter from the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia No. SK-162/MBU/06/2025 and SK.020/DI-DAM/DO/2025 dated June 19, 2025, the Company confirms the termination of Mr. Triawan Munaf as President Commissioner and Independent Commissioner and confirms the termination of Mrs. Wihana Kirana Jaya and Mr. Ono Manuhutu as Commissioners of the Company, along appointed Mr. Iwan Setyawan as President Commissioner and Independent Commissioner and appointed Mr. Allan Tandiono, Mrs. Dameria Chaterina Magdalena and Mrs Ni Luh Enik Ermawati as Commissioners of the Company.

Based on the Copy of the Decision Letter from the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia No. SK-161/MBU/06/2025 and SK.019/DI-DAM/DO/2025 dated June 19, 2025, the Company changed the nomenclature of a member of the Board of Directors from unspecified to Commercial Director and appointed Mrs. Henny Sisillia as Commerical Director of the Company.

The composition of The Company's Audit Committee as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Ketua	Tubagus Fiki Chikara Satari	Tubagus Fiki Chikara Satari	*Chairman*
Wakil Ketua	Dameria Chaterina Magdalena	-	*Vice Chairman*
Anggota	Rachman Gifar	Odo Rene M. Manuhutu	*Member*
Anggota	Adi Prasetyana Mahendradani	Wihana Kirana Jaya	*Member*
Anggota	-	Yeti Wulandari	*Member*
Anggota	-	Herwan Ng	*Member*

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit, Dewan Komisaris mengukuhkan pemberhentian Herwan Ng sebagai anggota komite audit dan mengangkat kembali Yeti Wulandari sebagai anggota komite audit dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 13 Februari 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, Dewan Komisaris mengangkat Adi Prasetyana Mahendradani sebagai anggota Komite Audit Perusahaan dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan memberhentikan dengan hormat Wihana Kirana Jaya sebagai Anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) tanggal 24 Februari 2025, Dewan Komisaris memberhentikan dengan hormat Yeti Wulandari sebagai anggota Komite Audit Perusahaan dan mengangkat Rachman Gifar sebagai anggota Komite Audit Perusahaan dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) tanggal 8 Juli 2025, Dewan Komisaris mengangkat Tubagus Fiki C. Satari sebagai Ketua Komite Audit dan Dameria Chaterina Magdalena sebagai Wakil Ketua Komite Audit.

Total manfaat yang dibayarkan oleh Grup untuk Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp312.913 dan Rp433.564 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah karyawan tetap Grup masing-masing sebanyak 11.513 dan 12.300.

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee, and Employees (continued)

Based on the Decision of the Board of Commissioners of the Company dated January 3, 2025, regarding the Dismissal and Reappointment of Audit Committee Members, the Board of Commissioners has confirmed the dismissal of Herwan Ng as a member of the audit committee and reappointed Yeti Wulandari as a member of the audit committee for a term of 2 (two) years.

Based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dated February 13, 2025, regarding the Appointment of Members of the Audit Committee, the Board of Commissioners has appointed Adi Prasetyana Mahendradani as a member of the Audit Committee of the Company for a term of 3 (three) years and respectfully dismiss Wihana Kirana Jaya as a Member of the Audit Committee.

Based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dated February 24, 2025, the Board of Commissioners respectfully dismisses Yeti Wulandari from her position as a member of the Audit Committee of the Company and appoints Rachman Gifar as a member of the Audit Committee of the Company for a term of 3 (three) years.

Based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dated July 8, 2025, the Board of Commissioners appointed Tubagus Fiki C. Satari as Chair of the Audit Committee and Dameria Chaterina Magdalena as Vice Chair of Audit Committe.

Total benefits paid by the Group for the Boards of Commissioners and Board of Directors amounted to Rp312,913 and Rp433,564 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

On December 31, 2025 and 2024, the number of permanent employees of the Group are 11.513 and 12,300, respectively.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Grup") berikut ini, dimana Perusahaan mempunyai pengendalian:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and the following Subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group"), over which the Company has control:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Kegiatan Usaha Utama/ *Business Activities*	Domisili/ *Domicile*	Kepemilikan (%)/ *Ownership (%)* 31 Desember/*December 31,* 2025	Kepemilikan (%)/ *Ownership (%)* 31 Desember/*December 31,* 2024	Total Aset sebelum Eliminasi/ *Total Assets before Elimination* 31 Desember/*December 31,* 2025	Total Aset sebelum Eliminasi/ *Total Assets before Elimination* 31 Desember/*December 31,* 2024
Kepemilikan Langsung/*Direct Ownership*						
PT Angkasa Pura Indonesia ("AP Indonesia")	Operator bandara/*Airport operator*	Tangerang	99,99	99,99	90.573.089	86.168.988
PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (dahulu/*formerly* PT Angkasa Pura Kargo ("APK")) [ii) iii) x)]	Penunjang bandara/*Airport support*	Tangerang	0,0001	0,0001	6.150.149	6.207.895
PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")	Hotel/*Hotel*	Jakarta	99,99	99,99	5.274.174	5.146.407
PT Sarinah ("Sarinah")	Perdagangan/ *Trading*	Jakarta	99,99	99,99	1.331.230	1.492.874
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")	Manajemen tujuan pariwisata/*Tourism destination management*	Yogyakarta	99,99	99,99	1.220.906	1.081.321
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ("ITDC")	Pengembangan pariwisata/ *Tourism development*	Jakarta	99,99	99,99	8.094.750	9.506.685
PT Taman Wisata Borobudur ("TWB") (dahulu/*formerly* PT Angkasa Pura Nusantara ("APN")) [iv) v) vi)]	Manajemen tujuan pariwisata/ *Tourism destination management*	Jakarta	1,00	0,10	6.877	8.940

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Grup") berikut ini, dimana Perusahaan mempunyai pengendalian (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and the following Subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group"), over which the Company has control (continued):

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Kegiatan Usaha Utama/ *Business Activities*	Domisili/ *Domicile*	Kepemilikan (%)/ *Ownership (%)* 31 Desember/*December 31,* 2025	Kepemilikan (%)/ *Ownership (%)* 31 Desember/*December 31,* 2024	Total Aset sebelum Eliminasi/ *Total Assets before Elimination* 31 Desember/*December 31,* 2025	Total Aset sebelum Eliminasi/ *Total Assets before Elimination* 31 Desember/*December 31,* 2024
Kepemilikan Tidak Langsung Dimiliki Melalui AP Indonesia (dahulu AP II)/*Indirect Ownership Owned through AP Indonesia (formerly AP II)*						
PT Angkasa Pura Aviasi ("AVI")	Operator bandara/*Airport operator*	Tangerang	51,00	51,00	3.127.960	2.945.575
PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (dahulu/*formerly* PT Angkasa Pura Kargo ("APK")) [ii) iii) x)]	Penunjang bandara/*Airport support*	Tangerang	99,99	99,99	6.150.149	6.197.196
PT Angkasa Pura Propertindo ("APP2") [ii) vii)]	Kontraktor dan penunjang operasi/ *Contractor and operation support*	Tangerang	-	-	-	-
Kepemilikan Tidak Langsung Dimiliki Melalui AP I/Indirect Ownership Owned through AP I						
PT Angkasa Pura Logistik ("APL") [ii) x)]	Logistik/*Logistics*	Jakarta	-	-	-	-
PT Angkasa Pura Hotel ("APH") [viii) xii)]	Hotel/*Hotel*	Jakarta	-	-	-	-
PT Angkasa Pura Properti ("APP1") [viii) xi]	Kontraktor dan penunjang operasi/ *Contractor and operation support*	Jakarta	-	-	-	-
PT Angkasa Pura Suport ("APS1") [ii)]	Penunjang bandara/*Airport support*	Jakarta	-	-	-	-
PT IAS Hospitality Indonesia ("IASH") (dahulu/*formerly* PT Angkasa Pura Retail ("APR")) [ix)]	Penunjang bandara/*Airport support*	Jakarta	-	-	-	-
Kepemilikan Tidak Langsung Dimiliki Melalui IASS (dahulu APS2)/*Indirect Ownership Owned through IASS (formerly APS2)*						
PT Angkasa Pura Solusi Integra ("APSI") [vii)]	Penunjang bandara/*Airport support*	Tangerang	-	-	-	-
PT Angkasa Pura Sarana Digital ("APSD") [vii)]	Penunjang bandara/*Airport support*	Tangerang	-	-	-	-

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Grup") berikut ini, dimana Perusahaan mempunyai pengendalian (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and the following Subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group"), over which the Company has control (continued):

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Kegiatan Usaha Utama/ *Business Activities*	Domisili/ *Domicile*	Kepemilikan (%)/ *Ownership (%)* 31 Desember/*December 31,* 2025	2024	Total Aset sebelum Eliminasi/ *Total Assets before Elimination* 31 Desember/*December 31,* 2025	2024
Kepemilikan Tidak Langsung Dimiliki Melalui IAS (dahulu APK)/*Indirect Ownership Owned through IAS (formerly APK)*						
PT IAS Support Indonesia ("IASS") (dahulu/*formerly* PT Angkasa Pura Solusi ("APS2")) [ii]	Penunjang bandara/*Airport support*	Tangerang	99,99	100,00	1.114.130	969.013
PT IAS Hospitality Indonesia (dahulu/ *formerly* PT Angkasa Pura Retail) ("IASH") [ix]	Penunjang bandara/*Airport support*	Tangerang	100,00	100,00	462.845	424.765
PT Gapura Angkasa ("GAPURA")	Penunjang bandara/*Airport support*	Jakarta	54,38	54,36	1.345.822	1.466.957
PT Angkasa Pura Suport ("APS1")	Penunjang bandara/*Airport support*	Tangerang	99,81	100,00	1.122.885	1.132.349
PT IAS Property Indonesia ("IASP") (dahulu PT Angkasa Pura Properti ("APP1") [viii]	Hotel, kontraktor dan penunjang operasi/ *Hotel, Contractor and operation support*	Tangerang	99,90	99,96	849.560	627.956
PT Angkasa Pura Hotel ("APH") [viii] [xii]	Hotel/*Hotel*	Jakarta	-	99,99	-	943.857
Kepemilikan Tidak Langsung Dimiliki Melalui HIN/*Indirect Ownership Owned through HIN*						
PT Hotel Indonesia Group ("HIG")	Operator hotel/*Hotel operator*	Denpasar	51,00	51,00	78.069	73.987
PT Hotel Internasional Sanur Indonesia ("HISI")	Hotel/*Hotel*	Denpasar	99,99	99,99	2.342.865	2.473.859
PT Hotel Indonesia Properti ("HIPRO") [xiii]	Hotel/*Hotel*	Denpasar	50,99	51,00	2.909.773	2.809.725
Kepemilikan Tidak Langsung Dimiliki Melalui Sarinah/*Indirect Ownership Owned through Sarinah*						
PT Sari Valuta Asing ("Sari Valas")	Perdagangan valuta asing/ *Foreign exchange trading*	Jakarta	99,00	99,99	544	895
Kepemilikan Tidak Langsung Dimiliki Melalui TWC/*Indirect Ownership Owned through TWC*						
PT Bhumi Visatanda Indonesia ("BHIVA")	Operator Taman Mini/*Taman Mini operator*	Jakarta	99,996	99,996	260.918	257.004
PT Taman Wisata Borobudur ("TWB") (dahulu/*formerly* PT Angkasa Pura Nusantara ("APN")) [iv] [v] [vi]	Manajemen tujuan pariwisata/ *Tourism destination management*	Yogyakarta	99,00	99,90	6.877	8.940

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Grup") berikut ini, dimana Perusahaan mempunyai pengendalian (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and the following Subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group"), over which the Company has control (continued):

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Kegiatan Usaha Utama/ *Business Activities*	Domisili/ *Domicile*	Kepemilikan (%)/ *Ownership (%)* 31 Desember/*December 31,* 2025	Kepemilikan (%)/ *Ownership (%)* 31 Desember/*December 31,* 2024	Total Aset sebelum Eliminasi/ *Total Assets before Elimination* 31 Desember/*December 31,* 2025	Total Aset sebelum Eliminasi/ *Total Assets before Elimination* 31 Desember/*December 31,* 2024
Kepemilikan Tidak Langsung Dimiliki Melalui BHIVA/*Indirect Ownership Owned through BHIVA*						
PT Manajemen CBT Nusantara ("MCN")	Biro wisata/*Travel agent*	Sleman	51,22	51,22	88	120
Kepemilikan Tidak Langsung Dimiliki Melalui ITDC/*Indirect Ownership Owned through ITDC*						
PT ITDC Nusantara Properti ("INP")	Utilitas/*Utilities*	Jakarta	99,96	99,96	247.570	183.260
PT ITDC Nusantara Utilitas ("INU")	Properti/*Property*	Bali	99,88	99,88	50.578	43.652
Kepemilikan Tidak Langsung Dimiliki Melalui INP dan INU/*Indirect Ownership Owned through INP dan INU*						
PT MGPA Nusantara Jaya ("MGPA")	Operator event di Sirkuit Mandalika/*Event organizer in Mandalika Circuit*	Mandalika	99,95	99,95	245.033	170.432
PT Merese Mandalika Nusantara ("MMN")	Hotel/*Hotel*	Jakarta	98,96	98,96	3.078	13.773
PT ITDC Nusantara Xplorin ("INX")	Agen tiket online/*Online ticket agent*	Jakarta	74,97	74,97	5.243	6.072

[i]) Pada tanggal 9 September 2024, AP I melakukan penggabungan ke dalam AP Indonesia (Catatan 1d).

[ii]) Pada tanggal 4 Januari 2024, terdapat:
i. pengalihan seluruh saham APL, APS1 dan Gapura milik AP Indonesia (dahulu AP I) kepada IAS; dan
ii. pengalihan seluruh saham IASS, APP2 dan Gapura milik AP Indonesia (dahulu AP II) kepada IAS (Catatan 1d).

[iii]) Pada tanggal 4 Januari 2024, IAS menerbitkan saham baru sebanyak 1 lembar saham Seri I yang diambil bagian oleh Perusahaan dan 1.086.907 lembar saham Seri J yang diambil bagian oleh AP Indonesia (dahulu AP II) dan AP Indonesia (dahulu AP I) masing-masing sebanyak 566.841 lembar saham dan 520.066 lembar saham.

[iv]) Pada tanggal 15 Februari 2024, terdapat pengalihan saham dari AP Indonesia (dahulu AP I) dan AP Indonesia (dahulu AP II) dari Perusahaan ke TWB (Catatan 1b).

[v]) Pada tanggal 12 Desember 2024, terdapat pengalihan saham dari AP Indonesia (dahulu AP II) dari TWB ke Perusahaan (Catatan 1b).

[vi]) Pada tanggal 12 Desember 2024, terdapat peningkatan modal saham dari TWC ke TWB yang membuat TWC menjadi pemegang saham mayoritas dan Perusahaan kehilangan pengendalian pada TWB (Catatan 1b).

[i]) On September 9, 2024, AP I merged to AP Indonesia (Note 1d).

[ii]) On January 4, 2024, there were:
a) transfer of all APL, APS1 and Gapura shares owned by the AP Indonesia (formerly AP I) to IAS; and
b) transfer of all IASS, APP2 and Gapura shares owned by AP Indonesia (formerly AP II) to IAS (Note 1d).

[iii]) On January 4, 2024, IAS issued new shares of 1 Series I share which was taken by the Company and 1,086,907 Series J shares which was taken by AP Indonesia (formerly AP II) and the AP Indonesia (formerly AP I) amounting to 566,841 shares and 520,066 shares, respectively.

[iv]) On February 15, 2024, there was a transfor of AP Indonesia (formerly AP I) and AP Indonesia (formerly AP II) shares owned by the Company to TWB (Note 1b).

[v]) On December 12, 2024, there was a transfer of AP Indonesia (formerly AP II) shares owned by TWB to the Company (Note 1b).

[vi]) On December 12, 2024, there was an increase in share capital from TWC to TWB, which resulted in TWC becoming the majority shareholder and the Company losing control over TWB (Note 1b).

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Grup") berikut ini, dimana Perusahaan mempunyai pengendalian (lanjutan):

vii) Pada tanggal 1 Oktober 2024, APP2, APSI dan APSD melakukan penggabungan ke dalam IASS.

viii) Pada tanggal 7 Februari 2025, APH melakukan penggabungan ke dalam APP1 (Catatan 51).

ix) Pada tanggal 29 Januari 2024, terdapat pengalihan seluruh saham IASH milik AP Indonesia (dahulu AP I) kepada IAS (Catatan 1d).

x) Pada tanggal 1 Desember 2024, APL melakukan penggabungan ke dalam IAS.

xi) Pada tanggal 21 November 2024, terdapat pengalihan seluruh saham APP1 milik AP Indonesia (dahulu AP I) kepada IAS (Catatan 1d).

xii) Pada tanggal 21 November 2024, terdapat pengalihan seluruh saham APH milik AP Indonesia (dahulu AP I) kepada IAS (Catatan 1d).

xiii) Pada tanggal 19 Desember 2024, terdapat pengalihan seluruh saham APH milik AP Indonesia (dahulu AP I) kepada IAS (Catatan 1d).

PT Angkasa Pura Indonesia ("AP Indonesia") (dahulu PT Angkasa Pura II ("AP II"))

AP Indonesia sebelumnya bernama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1984.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 14 tanggal 7 September 2024 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., AP I setuju dan sepakat untuk menggabungkan diri dengan AP Indonesia (dahulu AP II), dimana AP Indonesia (dahulu AP II) sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha. Rancangan penggabungan telah disetujui oleh pemegang saham masing-masing perusahaan pada tanggal yang sama sebagai berikut:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Angkasa Pura I No. 12 tanggal 7 September 2024.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Angkasa Pura Indonesia (dahulu PT Angkasa Pura II) No. 13 tanggal 7 September 2024.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and the following Subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group"), over which the Company has control (continued):

vii) On October 1, 2024, APP2, APSI and APSD merged into IASS.

viii) Effective February 7, 2025, APH merged into APP1 (Note 51).

ix) On January 29, 2024, there was a transfer of all IASH shares owned by AP Indonesia (formerly AP I) to IAS (Note 1d).

x) On December 1, 2024, APL merged into IAS.

xi) On November 21, 2024, there was a transfer of all APP1 shares owned by the AP Indonesia (formerly AP I) to IAS (Note 1d).

xii) On November 21, 2024, there was a transfer of all APH shares owned by the AP Indonesia (formerly AP I) to IAS (Note 1d).

xiii) On December 19, 2024, there was a transfer of all APH shares owned by the AP Indonesia (formerly AP I) to IAS (Note 1d).

PT Angkasa Pura Indonesia ("AP Indonesia") (formerly PT Angkasa Pura II ("AP II"))

AP Indonesia previously named Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng, was established by Government Regulation (PP) No. 20 Year 1984.

Based on the Deed of Merger No. 14 dated September 7, 2024 from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., AP I agreed to merge with AP Indonesia (formerly AP II), where AP Indonesia (formerly AP II) as the surviving entity. The plan design of merger was approved by the shareholders of each company on the same date as follows:

- *Deed of Shareholders Decree of PT Angkasa Pura I No. 12 dated September 7, 2024.*
- *Deed of Shareholders Decree of PT Angkasa Pura Indonesia (formerly PT Angkasa Pura II) No. 13 dated September 7, 2024.*

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Angkasa Pura Indonesia ("AP Indonesia") (dahulu PT Angkasa Pura II ("AP II")) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 14 tersebut, seluruh pihak menyetujui penggabungan dengan kondisi diantaranya sebagai berikut:

1. Semua operasi, usaha, kegiatan, dan aktivitas dari AP I beralih kepada AP Indonesia (dahulu AP II).

2. Semua izin, konsesi, fasilitas, lisensi, persetujuan, dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada AP I beralih ke AP Indonesia (dahulu AP II).

3. Sejak tanggal efektif, seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki oleh AP I beralih ke AP Indonesia (dahulu AP II).

4. Seluruh pekerja AP I akan menjadi pekerja AP Indonesia (dahulu AP II) dengan tetap memperhitungkan masa kerja karyawan yang bersangkutan selama menjadi karyawan AP I.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 14 tersebut, seluruh pihak menyetujui penggabungan dimana pada tanggal efektif penggabungan, semua kegiatan pengusahaan, operasional usaha, kekayaan, tagihan-tagihan, aktiva, pasiva, hak dan kewajiban dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan penerima penggabungan dan seluruh hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan yang menggabungkan diri akan dilanjutkan oleh perusahaan penerima penggabungan.

Komposisi modal saham AP I dan AP Indonesia (dahulu AP II) sebelum dan setelah penggabungan adalah sebagai berikut:

Sebelum Penggabungan	
AP I	
Modal Dasar	12.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	
Negara Republik Indonesia Seri A Dwiwarna	1
Injourney Seri B	3.271.350
TWB Seri B	3.143.061
Jumlah	**6.414.412**

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Angkasa Pura Indonesia ("AP Indonesia") (formerly PT Angkasa Pura II ("AP II")) (continued)

Based on the Deed of Merger No. 14, all parties agreed to the merger with the following conditions among others:

1. *All operations, businesses, and activities of AP I are transferred to AP Indonesia (formerly AP II).*

2. *All permits, concessions, facilities, licenses, approvals, and utilizations that have been granted by the authorities to AP I are transferred to AP Indonesia (formerly AP II).*

3. *Since the effective date, all assets and liabilities owned by AP I are transferred to AP Indonesia (formerly AP II).*

4. *All AP I workers will become AP Indonesia (AP II) workers by continuing the work period of the related employees during services as AP I employees.*

Based on the Deed of Merger No. 14, all parties agreed to the merger where on effective date of merger, all operational activities, operation, wealth, billings, assets, liabilities, rights and obligation of the dissolving entity are transferred by law to the surviving entity and all work relationships between employees and the dissolving entity will be continued by the surviving entity.

The composition of the share capital of AP I and AP Indonesia (formerly AP II) before and after the merger are as follows:

Before Merger	
AP I	
Authorized capital	12.000.000
Issued and fully-paid capital	
Negara Republik Indonesia Seri A Dwiwarna	1
Injourney B Series	3.271.350
TWB B Series	3.143.061
Total	**6.414.412**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Angkasa Pura Indonesia ("AP Indonesia") (dahulu PT Angkasa Pura II ("AP II")) (lanjutan)

Komposisi modal saham AP I dan AP Indonesia (dahulu AP II) sebelum dan setelah penggabungan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Angkasa Pura Indonesia ("AP Indonesia") (formerly PT Angkasa Pura II ("AP II")) (continued)

The composition of the share capital of AP I and AP Indonesia (formerly AP II) before and after the merger are as follows: (continued)

Sebelum Penggabungan (lanjutan)		***Before Merger (continued)***
AP Indonesia (dahulu AP II)		***AP Indonesia (formerly AP II)***
Modal Dasar	63.886.608	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh		*Issued and fully-paid capital*
Negara Republik Indonesia Seri A Dwiwarna	1	*Negara Republik Indonesia Seri A Dwiwarna*
Injourney Seri B	8.944.361	*Injourney B Series*
TWB Seri B	7.826.109	*TWB B Series*
Jumlah	**16.770.471**	***Total***

Setelah Penggabungan		***After Merger***
AP Indonesia (dahulu AP II)		***AP Indonesia (formerly AP II)***
Modal Dasar	63.886.608	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh		*Issued and fully-paid capital*
Negara Republik Indonesia Seri A Dwiwarna	2	*Negara Republik Indonesia Seri A Dwiwarna*
Injourney Seri B	13.269.560	*Injourney B Series*
TWB Seri B	11.981.691	*TWB B Series*
Jumlah	**25.251.253**	***Total***

Saham AP I dan AP Indonesia (dahulu AP II) memiliki nilai nominal saham yang sama, yaitu sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Sehubungan penggabungan, AP Indonesia (dahulu AP II) menerbitkan saham baru kepada Perusahaan dan TWB sesuai dengan nilai wajar hasil penilai independen KJPP Suwendho Rinaldi dan Rekan.

The shares of AP I and AP Indonesia (formerly AP II) have the same nominal value, which is Rp1,000,000 (full amount) per share. In connection with the merger, AP Indonesia (formerly AP II) issued new shares to the Company and TWB in accordance with the fair value of determined by an independent appraisal of KJPP Suwendho Rinaldi dan Rekan.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 14 tersebut, dinyatakan bahwa tanggal efektif penggabungan adalah pada saat terbitnya persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu masing-masing melalui surat persetujuan No. AHU-0056929.AH.01.02 Tahun 2024 dan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0190518, tanggal 9 September 2024. Dengan efektifnya penggabungan ini, maka AP I menjadi bubar demi hukum sejak tanggal tersebut.

Based on the above Deed of Merger No. 14, it is stated that the effective date of the merger is the date of issuance of the approval and the receipt notification from the Minister of Law and Human Rights, which are through its approval letter No. AHU-0056929.AH.01.02 Tahun 2024 and its receipt notification letter No. AHU-AH.01.03-0190518, dated September 9, 2024. With the commencement of this merger, AP I is was dissolved by law since that date.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Angkasa Pura Indonesia ("AP Indonesia") (dahulu PT Angkasa Pura II ("AP II")) (lanjutan)

Pada tanggal 4 Maret 2025, manajemen AP Indonesia (dahulu AP II) mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan pengggunaan nilai buku atas pengalihan aset AP I ke AP Indonesia (dahulu AP II) untuk tujuan perpajakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Perubahan kedua atas PMK No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan mengenai Penggunaan Nilai Buku. Permohonan penggunaan nilai buku tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar berdasarakan Surat Keputusan tanggal 20 Maret 2025.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham AP Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Angkasa Pura Indonesia ("AP Indonesia") (formerly PT Angkasa Pura II ("AP II")) (continued)

On March 4, 2025, AP Indonesia's management submitted a request to to General Director of Tax to obtain approval for use book values on the transfers of assets of AP I to the AP Indonesia (formerly AP II) for tax purposes, in accordance with Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 dated June 4, 2021 regarding Second Amendment on PMK No. 52/PMK.010/2017 regarding The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover and General Director of Tax Regulation No. PER-21/PJ/2021 dated December 9, 2021 regarding Amendment on General Director of Tax Regulation No. PER-03/PJ/2021 regarding Procedures of Proposal and Issuance for Using Book Value. The request for the use of the book value has received approval from the Head of the Large Taxpayers Regional Office of the Directorate General of Taxes based on the Decree dated March 20, 2025.

The follows details of the shareholders and their share ownerships of AP Indonesia as of December 31, 2025 and 2024 are as:

31 Desember 2025 dan 2024/*December 31, 2025 and 2024*

Pemegang saham/*Shareholders*	**Jenis saham/ *Type of shares***	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of share issued and fully paid***	**% Kepemilikan/ *% Ownership***	**Jumlah/*Total***
Negara Republik Indonesia/ *Republic of Indonesia*	Seri A Dwiwarna	2	0,00001%	2
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	25.251.251	99,99999%	25.251.251
		25.251.253	**100%**	**25.251.253**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

HIN merupakan perubahan nama dari PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) setelah bergabungnya PT National Hotel & Tourism (Persero) ("PT Natour") ke dalam PT Hotel Indonesia Natour (Persero). Kedua Perusahaan tersebut merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa kepariwisataan, khususnya hotel dan restoran. Penggabungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1998.

Pada tahun 2021, anggaran dasar HIN mengalami perubahan berdasarkan Akta Penyesuaian Kegiatan Usaha KBLI HIN, Notaris Lenny Faisyah, S.H.,M.Kn No. 69 tanggal 25 Agustus 2021 yang berisikan penambahan jenis usaha dan perubahan pada pasal 3, maksud dan tujuan HIN adalah melakukan usaha dibidang industri jasa perhotelan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh HIN untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai HIN dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan, kepemilikan Perusahaan di HIN adalah sebanyak 101.699 lembar saham atau 99% kepemilikan dengan valuasi nilai terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 498/KMK.06/2021 sebesar Rp8.736.217.

Berdasarkan surat No.S-46/MBU/01/2024 tertanggal 25 Januari 2024, Kementerian BUMN menyetujui penambahan modal saham Perusahaan di HIN sebesar Rp142.110.000.000 (nilai penuh) yang bersumber dari penambahan Penyertaan Modal Negara ("PMN") Republik Indonesia ke Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2023. Penambahan penyertaan modal Perusahaan di HIN tersebut telah diaktakan berdasarkan akta notaris No.17 oleh Titiek Irawati Sugianto,S.H., tanggal 21 Februari 2024 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0047994 tanggal 26 Februari 2024.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN")

HIN is a name change from PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) after the joining of PT National Hotel & Tourism (Persero) ("PT Natour") into PT Hotel Indonesia Natour (Persero). The two companies are State-Owned Enterprises (SOEs) engaged in tourism services, especially hotels and restaurants. The merger was carried out based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 1998.

In 2021, the articles of association of HIN underwent changes based on the Deed of Adjustment of KBLI Business Activities of HIN, Notary Lenny Faisyah, S.H., M.Kn No. 69 dated August 25, 2021 which contains additional types of business and changes to article 3, the aims and objectives of HIN are to conduct business in the hospitality service industry and optimize the use of resources owned by HIN to produce high quality and powerful goods and/or services. strong competitiveness to gain/pursue profits in order to increase the value of HIN by applying the principles of a Limited Liability Company.

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2021 regarding the Increase of State Equity Participation in Company Share Capital, the ownership of the company in HIN amounts to 101,699 shares or 99% ownership with a last valuation based on the Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 498/KMK.06/2021 amounting to Rp8,736,217.

Based on letter No.S-46/MBU/01/2024 dated January 25, 2024, the Ministry of SOE approved the increase in the share capital of the Company in HIN amounted Rp142,110,000,000 (full amount) which come from the addition of Penyertaan Modal Negara ("PMN") of the Republic of Indonesia to the Company based on Government Regulation Number 65 of 2023. The addition of share capital of the Company in HIN has been notified by Notarial deed No.17 by Titiek Irawati Sugianto,S.H. dated February 21, 2024 and has been accepted by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its letter No. AHU-AH.01.03-0047994 dated February 26, 2024.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No 19 tanggal 19 Desember 2024 yang disahkan oleh Akta Kemenkumham No AHU-AH.01.09-0290782 tanggal 19 Desember 2024, terdapat pengalihan penyertaan saham HIPRO dari PT Wijaya Karya Realty ("WIKA-R") ke HIN sebesar 1.005.911 lembar saham yang mewakili 50,99% dari total modal saham HIPRO. Pengalihan ini dilakukan dengan menukarkan saham HIN di WIKA-R.

Pengambilalihan saham HIPRO oleh HIN, entitas anak, merupakan kombinasi bisnis antar entitas sepengendali sesuai diuraikan di dalam PSAK 338 (dahulu PSAK 38) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Dengan demikian, transaksi pengalihan saham HIPRO tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto HIPRO diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024.

Perhitungan tambahan modal disetor pada tanggal transaksi adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") (continued)

Based on Notarial Deed No. 19 dated December 19, 2024 which was approved by the Deed of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.09-0290782 dated December 19, 2024, there was a transfer of HIPRO shares from PT Wijaya Karya Realty ("WIKA-R") to HIN amounting to 1,005,911 shares representing 50.99% of the total share capital of HIPRO. This transfer is carried out by exchanging HIN's shares in WIKA-R.

The acquisition of HIPRO by HIN, a subsidiary, is a business combination entities under common control in accordance with PSAK 338 (formerly PSAK 38) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control". Therefore, the shares transfer transaction is recognized using the pooling of interest method. The difference between the consideration transferred and the carrying amount of the net assets of HIPRO is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024.

The calculation of additional paid-in capital as at the date of transaction were:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ *Amount recognized on transaction*	
Bagian atas nilai tercatat aset neto HIPRO yang diakuisisi	1.000.681	*Share in carrying amount of the acquired HIPRO's net assets*
Imbalan yang dialihkan berupa nilaiwajar saham WIKA-R yang dilepas	(1.214.750)	*Consideration transferred in form of fair value of the sold WIKA-R shares*
Tambahan modal disetor	**(214.069)**	***Additional paid-in capital***

HIPRO merupakan entitas di bawah pengendalian yang sama dengan Perusahaan. Hubungan sepengendali antara Perusahaan dan HIPRO tidak bersifat sementara.

HIPRO is an entity under common control as the Company. The relationship under common control between the Company and HIPRO is not temporary.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HIN No. 44 tanggal 31 Desember 2025 dari Notaris Dwitya Aziza, S.H., M.Kn, para pemegang saham diantaranya menyetujui:

1. Peningkatan modal dasar pada HIN dari semula Rp400.000 menjadi Rp2.500.000.000.
2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor HIN yang bersumber dari konversi pokok saldo pinjaman pemegang saham sebesar Rp432.858 dan setoran uang dari Perusahaan kepada HIN sebesar Rp153.142, sehingga total peningkatan modal ditempatkan dan disetor HIN adalah sebesar Rp586.000 (Catatan 47)
3. Penambahan penyertaan modal HIN yang diteruskan kepada anak HIN, yaitu:
   - Penambahan penyertaan modal HIN kepada HISI sebesar Rp501.600 yang bersumber dari konversi piutang pokok HIN kepada HISI sebesar Rp348.458 dan setoran tunai dari HIN kepada HISI sebesar Rp153.142.
   - Penambahan penyertaan modal HIN kepada HIPRO sebesar Rp83.000 yang bersumber dari konversi piutang pokok HIN kepada HIPRO sebesar Rp83.000.

Akta notaris tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0002865.AH.01.02 TAHUN 2026 tanggal 23 Januari 2026.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham HIN pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") (continued)

Based on Deed of Shareholders Decreee of HIN No. 44 dated December 31, 2025 from Notary Dwitya Aziza, S.H., M.Kn, the shareholders agreed among others:

1. *The increase of authorized capital of HIN from an initial value of Rp400,000 to Rp2,500,0000*
2. *The increase in the issued and paid-up capital of HIN which come from convertion of the principal of shareholder loan of Rp432,858 and cash injection from the Company to HIN of Rp153,142, therefore total of the increased of issued and paid-up capital of HIN amounting to Rp586,000 (Note 47).*
3. *The increase in the issued and paid-up capital of HIN which forwarded to HIN's subsidiaries, with:*
   - *The increase of issued and paid-up share capital from HIN to HISI totalling to Rp501,600, which come from convertion of the principal of shareholder loan of Rp348,458 and cash injection from the Company to HIN of Rp153,142*
   - *The increase of issued and paid-up share capital from HIN to HIPRO amounting to Rp83,000, which come from convertion of the principal of shareholder loan of Rp83,000.*

The notarial deed has been acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. No. AHU-0002865.AH.01.02 TAHUN 2026 dated January 23, 2026.

The details of the shareholders and their share ownerships of HIN as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

31 Desember 2025 dan 2024/*December 31, 2025 and 2024*

Pemegang saham/*Shareholders*	**Jenis saham/ *Type of shares***	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of share issued and fully paid***	**% Kepemilikan/ *% Ownership***	**Jumlah/*Total***
Negara Republik Indonesia/ *Republic of Indonesia*	Seri A Dwiwarna	1	0,001%	1
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	243.809	99,999%	243.809
		243.810	**100%**	**243.810**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") (lanjutan)

Melalui surat keputusan pemegang saham di luar rapat PT Hotel Indonesia Group ("HIG") nomor 3.002/CR/HIG/VII/2025 tanggal 15 Agustus 2025, Entitas anak PT Hotel Indonesia Natour, HIG menetapkan pembagian dividen atas laba bersih tahun 2024 dan melakukan pembayaran dividen tersebut kepada pemegang saham, yaitu PT Hotel Indonesia Natour sebesar Rp10.710 dan PT Wijaya Karya Realty sebesar Rp10.290.

PT Sarinah ("Sarinah")

Sarinah didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Departement Store Indonesia dan diubah dengan nama PT Departement Store Indonesia (DSI) Sarinah dengan Akta No. 50 tanggal 18 Oktober 1962 dan Akta No. 89 tanggal 29 Januari 1963 ketiganya dari Notaris Eliza Pondaag.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan No. S-973/MBU/12/2021 dan No. S-081/PD/12/2021 tentang perubahan anggaran dasar, telah diputuskan bahwa Negara Republik Indonesia mengalihkan seluruh saham seri B pada perseroan dalam rangka penambahan modal Negara Republik Indonesia pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Perubahan tersebut telah dituangkan dalam Akta No. 5 tanggal 12 Januari 2022 dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 4 Februari 2022 melalui keputusan No. AHU-008604. AH.01.02.Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan, kepemilikan Perusahaan di Sarinah adalah sebanyak 46.849 lembar saham atau 99% kepemilikan dengan valuasi nilai terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 498/KMK.06/2021 sebesar Rp448.527.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") (continued)

Based on the shareholders' circular resolution of PT Hotel Indonesia Group ("HIG") number 3.002/CR/HIG/VII/2025 date August 15, 2025 the subsidiary of PT Hotel Indonesia Natour, HIG, approved the distribution of dividends from the 2024 net profit and executed the divident payment to its shareholders, namely PT Hotel Indonesia Natour amounted Rp10,710 and PT Wijaya Karya Realty in the amount of Rp10,290.

PT Sarinah ("Sarinah")

Sarinah was established based on Deed No. 33 dated August 17, 1962 under the name PT Department Store Indonesia and changed to PT Department Store Indonesia (DSI) Sarinah with Deed No. 50 dated October 18, 1962 and Deed No. 89 dated January 29, 1963 all three from Notary Eliza Pondaag.

Based on the Decision of the Company's Shareholders No. S-973/MBU/12/2021 and No. S-081/PD/12/2021 concerning changes to the articles of association, it has been decided that Republic of Indonesia will transfer all Series B shares in the company as part of the Republic of Indonesia's capital injection into PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). The change in the article of association has been notarized by the Deed No. 5 dated January 12, 2022 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights on February 4, 2022 through decision No. AHU-008604.AH.01.02.Year 2022.

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2021 regarding the Increase of State Equity Participation in Company Share Capital, the ownership of the company in Sarinah amounts to 46,849 shares or 99% ownership with a last valuation based on the Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 498/KMK.06/2021 amounting to Rp448,527.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Sarinah ("Sarinah") (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sarinah No. 92 tanggal 31 Desember 2025 dari Notaris Desman, S.H., M.Hum., para pemegang saham diantaranya menyetujui:

1. Peningkatan modal dasar Sarinah dari semula Rp100.000 menjadi Rp700.000.

2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Sarinah sebesar Rp529.279 yang bersumber dari konversi pokok saldo pinjaman pemegang saham.

Akta notaris tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0003260.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Januari 2026.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Sarinah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Sarinah ("Sarinah") (continued)

Based on Deed of Shareholders Decreee of Sarinah No. 92 dated December 31, 2025 from Notary Desman, S.H., M.Hum., the shareholders agreed among others:

1. *The increase of authorized capital of Sarinah from an initial value of Rp100,000 to Rp700,000.*
2. *The increase in the issued and paid-up capital of Sarinah of Rp529,279, which come from convertion of the principal of shareholder loan.*

The notarial deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-0003260.AH.01.02.TAHUN 2026 dated January 23, 2026.

The details of the shareholders and their share ownerships of Sarinah as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

31 Desember 2025 dan 2024/*December 31, 2025 and 2024*

Pemegang saham/*Shareholders*	Jenis saham/ *Type of shars*	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of share issued and fully paid*	% Kepemilikan/ *% Ownership*	Jumlah/*Total*
Negara Republik Indonesia/ *Republic of Indonesia*	Seri A Dwiwarna	1	0,002%	1
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	46.849	99,998%	46.849
		46.850	**100%**	**46.850**

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")

TWC didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1980 dengan Akta Notaris No. 19 tanggal 15 Juli 1980 oleh Soeleman Ardjosasmita S.H., Notaris di Jakarta, semula dengan nama PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan. Dengan masuknya kawasan Ratu Boko menjadi bagian dari Taman Wisata, maka nama Perusahaan berubah menjadi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) sesuai dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 3 Agustus 1994 oleh Soekeimi, S.H.

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")

TWC was established based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 7 year 1980 with Notarial Deed No. 19 dated July 15, 1980 by Soeleman Ardjosasmita S.H., Notary in Jakarta, originally under the name PT Taman Wisata Candi Borobudur and Prambanan. With the inclusion of the Ratu Boko area as part of the Taman Wisata, the Company's name changed to PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko (Persero) in accordance with Notarial Deed No. 15 dated August 3, 1994 by Soekeimi, S.H.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC") (lanjutan)

Anggaran dasar TWC telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham TWC No. S-974/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan telah dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2022 oleh Ir. Edwin Rusdy, S.H., M.Kn., M.Hum., Notaris di Bantul dan telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0014673.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 dan telah diterbitkan dalam Berita Negara No. 018 tambahan Berita Negara RI No.007968 tanggal 4 Maret 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan, kepemilikan Perusahaan di TWC adalah sebanyak 249.999 lembar saham atau 99% kepemilikan dengan valuasi nilai terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 498/KMK.06/2021 sebesar Rp3.015.084.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham TWC No. 153 tanggal 31 Desember 2025 dari Notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., M.Hum, para pemegang saham menyetujui penambahan penyertaan modal TWC yang dteruskan kepada BHIVA sebesar Rp60.500 yang bersumber dari setoran tunai dari Perusahaan, termasuk menyetujui tindakan di luar RKAP tahun 2025 sebesar Rp33.000 yang merupakan bagian dari penyertaan modal TWC kepada BHIVA.

Akta notaris tersebut telah diberitahukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0018861 tanggal 23 Januari 2026.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC") (continued)

TWC's articles of association have been amended several times. The last amendment based on TWC Shareholders Decree No. S-974/MBU/12/2021 dated 14 December 2021 and has been contained in Deed No. 1 March 1, 2022 by Ir. Edwin Rusdy, S.H., M.Kn., M.Hum., Notary in Bantul and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-0014673.AH.01.02.Tahun 2022 dated March 1, 2022 and has been published in State Gazette No. 018 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.007968 dated March 4, 2022.

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2021 regarding the Increase of State Equity Participation in Company Share Capital, the ownership of the company in Sarinah amounts to 249,999 shares or 99% ownership with a last valuation based on the Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 498/KMK.06/2021 amounting to Rp3,015,084.

Based on Deed of Shareholders Decreee of Sarinah No. 153 dated December 31, 2025 from Notary Desman, S.H., M.Hum., the shareholders agreed to increase of issued and paid-up share capital from TWC to BHIVA of Rp60,500 which come from cash injection from the Company, including approves action outside 2025 RKAP of Rp33,000, which is part of issued and paid-up share capital from TWC to BHIVA.

The notarial deed has been acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.03-0018861 dated January 23, 2026.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC") (lanjutan)

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham TWC pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ("TWC")(continued)

The details of the shareholders and their share ownerships of TWC as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

31 Desember 2025 dan 2024/*December 31, 2025 and 2024*

Pemegang saham/*Shareholders*	**Jenis saham/ *Type of shares***	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of share issued and fully paid***	**% Kepemilikan/ *% Ownership***	**Jumlah/*Total***
Negara Republik Indonesia/ *Republic of Indonesia*	Seri A Dwiwarna	1	0,0004%	1.000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	249.999	99,9996%	249.999.000
		250.000	**100%**	**250.000.000**

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia-Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC'')

ITDC didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1972 dengan Akta Notaris Soelaiman Ardjasasmita, S.H., No.33 tanggal 12 November 1973 di Jakarta, semula dengan nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)-Bali Tourism Development Corporation ("BTDC") yang kemudian berubah nama menjadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)-Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) melalui Akta Notaris No.63 dari Evi Susanti Panjaitan, S.H., tertanggal 24 Maret 2014 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-15415.AH.01.02 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014.

Perubahan Anggaran Dasar ITDC telah dilakukan beberapa kali diantaranya terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1993 tanggal 3 Desember 1993 tentang perubahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1998.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia - Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC")

ITDC was established based on Government Regulation No. 27 of 1972, with the Notarial Deed of Soelaiman Ardjasasmita, S.H., No.33 dated November 12, 1973, in Jakarta. Originally named PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)-Bali Tourism Development Corporation ("BTDC"), it later changed its name to PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)-Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) through Notarial Deed No.63 by Evi Susanti Panjaitan, S.H., dated March 24, 2014, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in Decree No. AHU-15415.AH.01.02 of May 16, 2014.

ITDC Articles of Association has been amended several times in connection with Government Regulation No. 55 year 1993 dated December 3, 1993, concerning the changes in the capital contribution and amended by Government Regulation No. 44 Year 1998.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia-Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC'') (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar ITDC telah dilakukan beberapa kali diantaranya terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1993 tanggal 3 Desember 1993 tentang perubahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2023. Perubahan terakhir dengan Akta No. 02 tanggal 2 Juni 2023 dari Notaris Desman, S.H., M.Hum. tentang Perubahan Anggaran Dasar ITDC. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0036732.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan, kepemilikan Perusahaan di ITDC adalah sebanyak 2.147.659 lembar saham atau 99% kepemilikan dengan valuasi nilai terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/KMK.06/2023 sebesar Rp11.679.372.

Berdasarkan surat No.S-46/MBU/01/2024 tertanggal 25 Januari 2024, Kementerian BUMN menyetujui penambahan modal saham Perusahaan di ITDC sebesar Rp872.090.000.000 (nilai penuh) yang bersumber dari penambahan Penyertaan Modal Negara ("PMN") Republik Indonesia ke Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2023. Penambahan penyertaan modal Perusahaan di ITDC tersebut telah diaktakan berdasarkan akta notaris No.40 oleh Desman S.H., M.Hum., tanggal 22 Februari 2024 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03.0067601 tanggal 20 Maret 2024.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia - Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC") (continued)

ITDC Articles of Association has been amended several times in connection with Government Regulation No. 55 year 1993 dated December 3, 1993, concerning the changes in the capital contribution and amended by Government Regulation No. 44 Year 1998, Government Regulation No. 50 Year 2008, Government Regulation No. 33 Year 2009 and Government Regulation No. 3 Year 2023. The latest amendment was through Notarial Deed No. 02 of Desman, S.H., M.Hum. dated June 2, 2023, concerning Amendments to ITDC Articles of Association. The deed was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Acknowledgement Letter No. AHU-0036732.AH.01.02 Year 2023 dated June 27, 2023.

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 regarding the Increase of State Equity Participation in Company Share Capital, the ownership of the company in ITDC amounts to 2,147,659 shares or 99% ownership with a last valuation based on the Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 53/KMK.06/2023 amounting to Rp11,679,372.

Based on letter No.S-46/MBU/01/2024 dated January 25 2024, the Ministry of SOE approved an increase in the share capital of the Company in ITDC amounted Rp872,090,000,000 (full amount) which come from the addition of Penyertaan Moda Negara ("PMN") of the Republic of Indonesia to the Company based on Government Regulation Number 65 of 2023. The addition of share capital of the Company in ITDC has been notified by Notarial deed No.40 by Desman S.H., M.Hum., dated February 22, 2024 and has been accepted by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its letter No. AHU-AH.01.03.0067601 dated March 20, 2024.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia-Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC'') (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ITDC No. 91 tanggal 31 Desember 2025 dari Notaris Desman, S.H., M.Hum., Perusahaan menyetujui penambahan/peningkatan modal ditempatkan dan disetor ITDC sebesar Rp275.000 yang bersumber dari konversi pokok saldo pinjaman pemegang saham (Catatan 47).

Akta notaris tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0019462 tanggal 23 Januari 2026.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham ITDC pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia - Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC") (continued)

Based on Deed of Shareholders Decreee of ITDC No. 91 dated December 31, 2025 from Notary Desman, S.H., M.Hum., the Company approved the increase in the issued and paid-up capital of ITDC of Rp275,000, which come from convertion of the principal of shareholder loan (Note 47).

The notarial deed has been acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.03-0019462 dated January 23, 2026.

The details of the shareholders and their share ownerships of ITDC as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

31 Desember 2025 dan 2024/*December 31, 2025 and 2024*

Pemegang saham/*Shareholders*	**Jenis saham/ *Type of shares***	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of share issued and fully paid***	**% Kepemilikan/ *% Ownership***	**Jumlah/*Total***
Negara Republik Indonesia/ *Republic of Indonesia*	Seri A Dwiwarna	1	0,00003%	1.000
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri B	3.019.749	99,99997%	3.019.749.000
		3.019.750	**100%**	**3.019.750**

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS")

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") sebelumnya bernama PT Angkasa Pura Kargo, didirikan berdasarkan Akta Notaris Maya Veronica, SH., M.Kn., No. 8, tanggal 20 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 April 2016 dengan Surat Keputusan No. AHU-0020686.AH.01.01 tahun 2016.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Nabila Mazaya Putri, S.H., M.Kn. sebagai pengganti dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 280 tanggal 28 Desember 2023 mengenai perubahan nama Perusahaan dan struktur pemegang saham Perubahan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000569.AH.01.02 tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024.

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS")

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") previously named PT Angkasa Pura Kargo, was established by Notarial Deed of Maya Veronica, S.H., M.Kn., No. 8, dated April 20, 2016 and approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in April 22, 2016 with Decision Letter No. AHU-0020686.AH.01.01 year 2016.

The Company's Articles of Association have amended several times. The latest amendment is stated in the Notarial Deed of Nabila Mazaya Putri, S.H., M.Kn., as a replacement for Notary Jose Dima Satri, S.H., M.Kn. No. 280 dated December 28, 2023, regarding the change of the Company name and the Company's shareholder structure. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0000569.AH.01.02 year 2024 dated January 4, 2024.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah operator pergudangan/ kargo dan pos, pelayanan kargo dan pos, pengembangan prasarana dan sarana pergudangan/kargo dan pos, dan aktivitas holding.

Berdasarkan Akta No. 280 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham IAS antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:

a. Menyetujui pembelian seluruh saham milik Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura II Satya Ardhia dalam IAS sejumlah 100 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000 (nilai penuh) oleh AP Indonesia (dahulu AP II).

b. Menyetujui perubahan klasifikasi saham IAS menjadi:
   - Saham Seri I - merupakan saham dengan klasifikasi khusus yang memberikan hak kepada pemegang saham Seri I, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar IAS, yang tidak dimiliki oleh pemegang saham Seri J; dan
   - Saham Seri J.

c. Menyetujui untuk merubah klasifikasi saham biasa yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh AP Indonesia (dahulu AP II) sejumlah 200.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000 untuk diklasifikasikan menjadi lembar Saham Seri J.

d. Menyetujui peningkatan modal dasar IAS yang semula senilai Rp800.000 yang terbagi atas 800.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham menjadi senilai Rp5.000.000 yang terbagi atas 5.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the main business activities of the Company include being a warehouse/cargo and postal operator, providing cargo and postal services, developing infrastructure and facilities for warehousing/cargo and posta, and holding activities.

Based on the Deed No. 280 dated December 28, 2023 made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the shareholders of IAS approved to the following matters, among others:

a. Approving the purchase of all shares owned by Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura II Satya Ardhia in IAS amounting to 100 shares with a total nominal value of Rp100,000,000 (full amount) by AP Indonesia (formerly AP II).

b. Approve the classification alteration of IAS shares to:
   - *Series I shares - represent shares with a special classification that offers rights to Series I shareholders, guided by the IAS's Articles of Association, which is not available to Series J shareholders; and*
   - *Series J shares.*

c. Approval to change the classification of ordinary shares that have been issued and fully paid by AP Indonesia (formerly AP II) totaling 200,000 shares with a total nominal value of Rp200,000 to be classified as Series J shares.

d. Agree to increase the IAS's authorized capital from an initial value of Rp800,000 divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share to a value of Rp5,000,000 divided into 5,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 280 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham IAS antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut (lanjutan):

e. Menyetujui penerbitan saham baru dalam IAS sebanyak 1 lembar saham Seri I dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 1.086.907 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.086.907 atau setara dengan Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham.

f. Menyetujui untuk menerima pengambilbagian atas penerbitan saham baru oleh:
   - Perusahaan sebanyak 1 lembar saham Seri I dengan niai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) yang dilakukan secara tunai;
   - AP Indonesia (dahulu AP II) sebanyak 566.841 lembar saham Seri J dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp566.841; dan
   - AP Indonesia (dahulu AP I) sebanyak 520.066 lembar saham Seri J dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp520.066.

g. Menyetujui untuk menerima pembayaran atas harga Pengambilbagian Saham Baru oleh AP Indonesia (dahulu AP II) dan AP Indonesia (dahulu AP I) dengan cara pengalihan saham melalui mekanisme inbreng saham milik AP Indonesia (dahulu AP II) dan AP Indonesia (dahulu AP I) di dalam masing-masing anak perusahaannya kepada IAS dengan rincian sebagai berikut:
   - Saham milik AP Indonesia (dahulu AP II) di dalam:
     a. IASS sebanyak 467.539 lembar saham atau sebesar 99,997% kepemilikan saham, dengan nilai valuasi sebesar Rp814.998.214.526 (nilai penuh) atau senilai dengan Rp1.743.166 (nilai penuh) per lembar saham untuk pengambilbagian saham baru IAS oleh AP Indonesia (dahulu AP II) sebanyak 309.003 lembar saham.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

Based on the Deed No. 280 dated December 28, 2023 made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the shareholders of IAS approved to the following matters, among others (continued):

e. Approve the issuance of new shares in IAS amounting to 1 Series I share with a total nominal value of Rp1,000,000 (full amount) and 1,086,907 shares with a total nominal value of Rp1,086,907 equivalent to Rp1,000,000 (full amount) per share.

f. Approval to accept allocation of new share issuance by:
   - *The Company for 1 Series I share with a total nominal value of Rp1,000,000 (full amount), made in cash;*
   - *AP Indonesia (formerly AP II) for 566,841 Series J shares with a total nominal value of Rp566,841; and*
   - *AP Indonesia (formerly AP I) for 520,066 Series J shares with a total nominal value of Rp520,066.*

g. Approve to accept payment for the price of the new Share Allocation by AP Indonesia (formerly AP II) and AP Indonesia (formerly AP I) by transferring shares through the inbreng mechanism of shares owned by the AP Indonesia (formerly AP II) and AP Indonesia (formerly AP I) in each of its subsidiaries to IAS with the following details:
   - *Shares owned by the AP Indonesia (formerly AP II) in:*
     a. IASS for 467,539 shares or 99.997% share ownership, with a valuation value of Rp814,998,214,526 (full amount) or equivalent to Rp1,743,166 (full amount) per share for the allocation of new IAS shares by AP Indonesia (formerly AP II) amounting to 309,003 shares.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 280 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham IAS antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

g. Menyetujui untuk menerima pembayaran atas harga Pengambilbagian Saham Baru oleh AP Indonesia (dahulu AP II) dan AP Indonesia (dahulu AP I) dengan cara pengalihan saham melalui mekanisme inbreng saham milik AP Indonesia (dahulu AP II) dan AP Indonesia (dahulu AP I) di dalam masing-masing anak perusahaannya kepada IAS dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)
   - Saham milik AP Indonesia (dahulu AP II) di dalam: (lanjutan)
     b. APP2 sebanyak 149.900 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp149.900.000.000 (nilai penuh) atau sebesar 99,933% kepemilikan saham, dengan nilai valuasi sebesar Rp329.756.299.747 (nilai penuh) atau senilai dengan Rp2.199.842 (nilai penuh) per lembar saham untuk pengambilbagian saham baru IAS oleh AP Indonesia (dahulu AP II) sebanyak 125.026 lembar saham.
     c. Gapura sebanyak 1.291.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp129.100.000.000 (nilai penuh) atau sebesar 46,62% kepemilikan saham, dengan nilai valuasi sebesar Rp350.292.589.519 (nilai penuh) atau senilai dengan Rp271.334 (nilai penuh) per lembar saham untuk pengambilbagian saham baru IAS oleh AP Indonesia (dahulu AP II) sebanyak 132.812 lembar saham.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

Based on the Deed No. 280 dated December 28, 2023 made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the shareholders of IAS approved to the following matters, among others: (continued)

g. Approve to accept payment for the price of the new Share Allocation by AP Indonesia (formerly AP II) and AP Indonesia (formerly AP I) by transferring shares through the inbreng mechanism of shares owned by the AP Indonesia (formerly AP II) and AP Indonesia (formerly AP I) in each of its subsidiaries to IAS with the following details: (continued)
   - *Shares owned by the AP Indonesia (formerly AP II) in: (continued)*
     b. APP2 for 149,900 shares with a total nominal value of Rp149,900,000,000 (full amount) or 99.933% share ownership, with a valuation value of Rp329,756,299,747 (full amount) or equivalent to Rp2,199,842 (full amount) per share for the allocation of new IAS shares by AP Indonesia (formerly AP II) amounting to 125,026 shares.
     c. Gapura for 1,291,000 shares with a total nominal value of Rp129,100,000,000 (full amount) or 46.62% share ownership, with a valuation value of Rp350,292,589,519 (full amount) or equivalent to Rp271,334 (full amount) per share for the allocation of new IAS shares by AP Indonesia (formerly AP II) amounting to 132,812 shares.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 280 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham IAS antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

g. Menyetujui untuk menerima pembayaran atas harga Pengambilbagian Saham Baru oleh AP Indonesia (dahulu AP II) dan AP Indonesia (dahulu AP I) dengan cara pengalihan saham melalui mekanisme inbreng saham milik AP Indonesia (dahulu AP II) dan AP Indonesia (dahulu AP I) di dalam masing-masing anak perusahaannya kepada IAS dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)
   - Saham milik AP Indonesia (dahulu AP I) di dalam:
     a. APL sebanyak 263.520 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp263.520.000.000 (nilai penuh) atau sebesar 99,72% kepemilikan saham, dengan nilai valuasi sebesar Rp545.464.062.936 (nilai penuh) atau senilai dengan Rp2.069.915 (nilai penuh) per lembar saham untuk pengambilbagian saham baru IAS oleh AP Indonesia (dahulu AP I) sebanyak 206.810 lembar saham.
     b. APS1 sebanyak 378.750 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp378.350.000.000 (nilai penuh) atau sebesar 99,81% kepemilikan saham, dengan nilai valuasi sebesar Rp767.867.987.991 (nilai penuh) atau senilai dengan Rp2.027.034 (nilai penuh) per lembar saham untuk pengambilbagian saham baru IAS oleh AP Indonesia (dahulu AP I) sebanyak 291.134 lembar saham.
     c. Gapura sebanyak 215.040 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp21.504.000.000 (nilai penuh) atau sebesar 7,76% kepemilikan saham, dengan nilai valuasi sebesar Rp58.347.729.241 (nilai penuh) atau senilai dengan Rp271.334 (nilai penuh) per lembar saham untuk pengambilbagian saham baru IAS oleh AP Indonesia (dahulu AP I) sebanyak 22.122 lembar saham.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

Based on the Deed No. 280 dated December 28, 2023 made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the shareholders of IAS approved to the following matters, among others: (continued)

g. Approve to accept payment for the price of the new Share Allocation by AP Indonesia (formerly AP II) and AP Indonesia (formerly AP I) by transferring shares through the inbreng mechanism of shares owned by AP Indonesia (formerly AP II) and AP Indonesia (formerly AP I) in each of its subsidiaries to IAS with the following details: (continued)
   - *Shares owned by AP Indonesia (formerly AP I) in:*
     a. APL for 263,520 shares with a total nominal value of Rp263,520,000,000 (full amount) or 99.72% share ownership, with a valuation value of Rp545,464,062,936 (full amount) or equivalent to Rp2,069,915 (full mount) per share for the allocation of new IAS shares by AP Indonesia (formerly AP I) amounting to 206,810 shares.
     b. APS1 for 378,750 shares with a total nominal value of Rp378,350,000,000 (full amount) or 99.81% share ownership, with a valuation value of Rp767,867,987,991 (full amount) or equivalent to Rp2,027,034 (full amount) per share for the allocation of new IAS shares by AP Indonesia (formerly AP I) amounting to 291,134 shares.
     c. Gapura for 215,040 shares with a total nominal value of Rp21,504,000,000 (full amount) or 7.76% share ownership, with a valuation value of Rp58,347,729,241 (full amount) or equivalent to Rp271,334 (full amount) per share for the allocation of new IAS shares by AP Indonesia (formerly AP I) amounting to 22,122 shares.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 280 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham IAS antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

h. Menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan pada IAS yang semula senilai Rp200.000.000 terbagi atas 200.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham menjadi senilai Rp1.286.908.000.000 (nilai penuh) terbagi atas 1 lembar saham Seri I dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham dan 1.286.907 lembar saham Seri J dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham.

i. Menyetujui pengambilalihan IAS oleh Perusahaan melalui pengambilalihan saham baru oleh Perusahaan, dan oleh karenanya terjadi perubahan pengendalian dari yang sebelumnya dikendalikan oleh AP Indonesia (dahulu AP II) menjadi dikendalikan oleh Perusahaan.

j. Menyetujui bahwa sehubungan dengan perubahan pengendalian atas IAS, AP Indonesia (dahulu AP II) dengan ini sepakat untuk memindahkan konsolidasi laporan keuangan IAS menjadi terkonsolidasi kepada Perusahaan.

k. Menyetujui perubahan anggaran dasar IAS termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nama IAS, perubahan pasal 3 mengenai maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha IAS dalam bentuk perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar IAS.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

Based on the Deed No. 280 dated December 28, 2023 made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the shareholders of IAS approved to the following matters, among others: (continued)

h. Agree to increase the issued and paid-up capital in IAS from an initial value of Rp200,000,000 divided into 200,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share to become Rp1,286,908,000,000 (full amount) divided into 1 Series I share with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share and 1,286,907 Series J shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

i. Approve the acquisition of IAS by the Company through the acquisition of new shares by the Company, causing a change of control from previously controlled by the AP Indonesia (formerly AP II) to being controlled by the Company.

j. Agree that in connection with the change of control over IAS, AP Indonesia (formerly AP II) hereby agrees to move the consolidation of IAS financial statements to be consolidated by the Company.

k. Approve changes to the articles of association of IAS including but not limited to changes in the IAS name, changes to article 3 regarding the purpose and objectives, and the business activities of IAS in the form of revisions and restatement of the IAS articles of association.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 280 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham IAS antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

l. Menyetujui bahwa pengalihan saham anak perusahaan milik AP Indonesia (dahulu AP II) dan AP Indonesia (dahulu AP I) yang dilakukan melalui mekanisme inbreng akan berlaku pada saat efektifnya pengambilbagian saham baru yaitu pada tanggal diterbitkannya persetujuan dan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan anggaran dasar dan data IAS.

Perubahan anggaran dasar IAS tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Keputusan yang keduanya tertanggal 4 Januari 2024.

Sehingga susunan pemegang saham dan kepemilikan saham IAS setelah 4 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

Based on the Deed No. 280 dated December 28, 2023 made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the shareholders of IAS approved to the following matters, among others: (continued)

l. Approved that the transfer of shares in subsidiaries owned by AP Indonesia (formerly AP II) and AP Indonesia (formerly AP I) carried out through the inbreng mechanism will take effect at the effective time of the acquisition of new shares, namely on the date of issuance of approval and receipt of notification from the Minister of Law and Human Rights regarding changes to the articles of association and IAS data.

The amendments to the articles of association of IAS have been acknowledged and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, respectively, through Letter of Acceptance of Notification of Amendment to the Articles of Association and Decision Letter both dated January 4, 2024.

Therefore, the details of the shareholders and their ownerships of IAS after January 4, 2024 is as follow:

Pemegang saham/*Shareholders*	**Jenis saham/ *Type of shares***	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of share issued and fully paid***	**% Kepemilikan/ *% Ownership***	**Jumlah/*Total***
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Seri I	1	0,0001%	1
PT Angkasa Pura Indonesia (dahulu/*formerly* PT Angkasa Pura II)	Seri J	766.841	54,7393%	766.841
PT Angkasa Pura Indonesia (dahulu/*formerly* PT Angkasa Pura I)	Seri J	634.054	45,2606%	634.054
		1.400.896	**100%**	**1.400.896**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Angkasa Pura Retail No. 112 tanggal 29 Januari 2024 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pengalihan seluruh saham IASH milik AP Indonesia (dahulu AP I) sebanyak 406.836 lembar saham dengan nilai nominal Rp406.836 melalui mekanisme inbreng kepada IAS.

Akta tersebut di atas telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0040721 tanggal 29 Januari 2024.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham IAS No. 110 tanggal 29 Januari 2024 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, nilai valuasi pengalihan saham IASH tersebut di atas sebesar Rp300.645 dengan pengambilbagian saham baru IAS oleh AP Indonesia (dahulu AP1) sebanyak 113.988 lembar saham.

Akta tersebut di atas telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0026800 tanggal 29 Januari 2024.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar IASH No. 32 tanggal 6 Februari 2025 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham telah mengambil keputusan dengan persetujuan secara tertulis antara lain sebagai berikut:

a. Menyetujui penerbitan 1 saham baru dalam IASH untuk kemudian diambil bagian oleh IASP (dahulu PT Angkasa Pura Properti) dengan total nilai sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh).
b. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor yang semula senilai Rp425.194.000.000 (nilai penuh) yang terdiri atas 425.194 lembar saham menjadi senilai Rp425.195.000.000 (nilai penuh) yang terdiri atas 425.195 lembar saham.
c. Menyetujui perubahan komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Decree of PT Angkasa Pura Retail No. 112 dated January 29, 2024 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the shareholders approved the transfer of all IASH shares owned by AP Indonesia (formerly AP1) amounting to 406,836 shares with nominal value of Rp406,836 through inbreng mechanism to IAS.

The above deed has been notified to and received by the Ministry of Law and Human Rights through its Notification Receipt Letter of the Company's Data Change No. AHU-AH.01.09-0040721 dated January 29, 2024.

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Decree of IAS No. 110 dated January 29, 2024 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the valuation value of IASH amounting to Rp300,645 with allocation of new IAS's shares by the Company (formerly AP1) amounting to 113,988 shares.

The above deed has been notified to and received by the Ministry of Law and Human Rights through its Notification Receipt Letter of the Company's Change of Article of Association No. AHU-AH.01.03-0026800 dated January 29, 2024.

Based on the Deed of Statement of Shareholder Decision regarding the Amendment of the Articles of Association of IASH No 32 dated February 6, 2025 made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders of the Company have made decisions through written consent, including the following:

a. Approve the issuance of 1 new share in IASH to be taken up by IASP (formerly PT Angkasa Pura Properti) with a total value of Rp1,000,000 (full amount).
b. Approved the increase in issued and paid-up. capital which was originally valued at Rp425,194,000,000 (full amount) consisting of 425,194 shares to Rp425,195,000,000 (full amount) consisting of 425,195 shares.
c. Approve changes to the composition of shareholders to be as follows:

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham IASH pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Total*	
IAS (dahulu APK)	425.194	99,99%	425.194.000.000	*IAS (formerly APK)*
IASP (dahulu PT Angkasa Pura Properti)	1	0,01%	1.000.000	*IASP (formerly PT Angkasa Pura Properti)*
Jumlah	**425.195**	**100%**	**425.195.000.000**	***Total***

Akta notaris tersebut telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memperoleh surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0047911 tanggal 17 Februari 2025.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 26 tanggal 6 September 2024 dari notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., PT Angkasa Pura Solusi Integra ("APSI"), PT Angkasa Pura Sarana Digital ("APSD") dan PT Angkasa Pura Propertindo ("APP2") setuju dan sepakat untuk menggabungkan diri dengan PT IAS Support Indonesia ("IASS") (dahulu PT Angkasa Pura Solusi ("APS2"), dimana IASS (dahulu APS2) sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 26 tersebut, dinyatakan bahwa tanggal efektif penggabungan adalah tanggal 1 Oktober 2024.

Sesuai dengan peraturan tersebut, manajemen IASS (dahulu APS2) telah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan pengggunaan nilai buku atas pengalihan harta APSD, APSI, dan APP2 ke IASS pada tanggal 30 Desember 2024. Direktur Jenderal Pajak telah meyetujui permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta APSD, APSI dan APP2 ke IASS (dahulu APS2) tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-33/WPJ.08/2025 tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan Usaha pada tanggal 17 Januari 2025.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

The details of the shareholders and their share ownerships of IASH as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

The notarial deed has been notified to and received by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and has been acknowledged through its letter of knowledgement No. AHU AH.01.03-0047911 dated February 17, 2025.

Based on the Deed of Merger No. 26 dated September 6, 2024 from notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., PT Angkasa Pura Solusi Integra ("APSI"), PT Angkasa Pura Sarana Digital ("APSD") and PT Angkasa Pura Propertindo ("APP2") agreed to merge with PT IAS Support Indonesia ("IASS") (formerly PT Angkasa Pura Solusi ("APS2"), where IASS (formerly APS2) as the surviving entity.

Based on the above Deed of Merger No. 26, it is stated that the effective date of the merger is on October 1, 2024.

In accordance with the regulations, management IASS (formerly APS2) has submitted a request to the Director General of Taxes for approval to use the book value for the transfer of assets APSD, APSI, and APP2 to IASS (formerly APS2) on December 30, 2024. The Director General of Taxes has approved the request for the use of book value for the transfer of the assets of the APSD, APSI, and APP2 to the IASS (formerly APS2) through the Director General of Taxes Decision Number KEP-33/WPJ.08/2025 regarding the Approval of Book Value Use for Asset Transfers in the context of Mergers dated January 17, 2025.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham IASS pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ *Total Shares* (Lembar/*Shares*)	Nominal per Lembar/ *Nominal per Shares*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	*Shareholders*
IAS (dh APK)	467.539	228.550	106.856.038.450	*IAS (formerly APK)*
IASH (dh APR)	15	228.550	3.428.250	*IASH (formerly APR)*
Jumlah	**467.554**	**228.550**	**106.859.466.700**	***Total***

Berdasarkan Akta No. 147 tanggal 21 November 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar IAS oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham IAS menyetujui:

i. Menyetujui penerbitan 351.965 lembar saham baru seri J dalam IAS untuk kemudian diambil bagian oleh AP Indonesia (dahulu AP II) dengan total nilai sebesar Rp351.965 yang berasal dari pemindahan hak atas saham dengan mekanisme inbreng atas seluruh saham yang dimiliki AP Indonesia (dahulu AP II) dalam APP1 dan APH.

ii. Rincian dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
   - APH sebanyak 603.614 lembar saham atau 99,99% porsi kepemilikan dengan nilai valuasi sebesar Rp724.624 untuk mengambil bagian saham baru Seri J IAS sebanyak 275.639 lembar saham; dan
   - APP1 sebanyak 169.930 lembar saham atau sebesar 99,96% porsi kepemilikan dengan nilai valuasi sebesar Rp200.653 untuk mengambil bagian saham baru Seri J IAS sebanyak 76.326 lembar saham.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

The details of the shareholders and their share ownerships of IASS as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

Based on Deed No. 147 dated November 21, 2024, regarding the Statement of Shareholders' Decision and Amendments to the Articles of Association of IAS of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders of IAS agreed to:

i. Approved the issuance of 351,965 new series J shares in IAS, which will then be acquired by AP Indonesia (formerly AP II) with a total value of Rp351,965, originating from the transfer of rights over shares through an inbreng mechanism on all shares owned by AP Indonesia (formerly AP II) in APP1 and APH.

ii. The details of the transaction are as follows:
   - *APH with 603,614 shares or 99.99% ownership, valued at Rp724,624, will acquire 275,639 new Series J shares in IAS; and*
   - *APP1 with 169,930 shares or 99.96% ownership, valued at Rp200,653, will acquire 76,326 new Series J shares in IAS.*

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 147 tanggal 21 November 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar IAS oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham IAS menyetujui: (lanjutan)

iii. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor IAS yang semula senilai Rp1.400.896 yang terbagi atas 1 lembar saham Seri I dan 1.400.895 lembar saham Seri J menjadi senilai Rp1.752.861 yang terbagi atas 1 lembar saham Seri I dan 1.752.860 lembar saham Seri J melalui penerbitan saham Seri J sebanyak 351.965 lembar saham dengan nilai sebesar Rp351.965.

Akta notaris tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memperoleh surat persetujuan No. AHU-0075173.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 21 November 2024.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 146 tanggal 20 November 2024 dari notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., APL setuju dan sepakat untuk menggabungkan diri dengan IAS (dahulu APK), dimana IAS (dahulu APK) sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 146 tersebut, dinyatakan bahwa tanggal efektif penggabungan adalah tanggal 1 Desember 2024.

Sesuai dengan peraturan tersebut, manajemen telah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan pengggunaan nilai buku atas pengalihan harta APL ke IAS (dahulu APK) pada tanggal 30 Desember 2024. Direktur Jenderal Pajak telah meyetujui permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta APL ke Perusahaan tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/WPJ.08/2025 tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan Usaha pada tanggal 20 Januari 2025.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

Based on Deed No. 147 dated November 21, 2024, regarding the Statement of Shareholders' Decision and Amendments to the Articles of Association of IAS of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders of IAS agreed to: (continued)

iii. Approved the increase in the issued and paid-up capital of IAS, which was initially valued at Rp1,400,896, consisting of 1 Series I share and 1,400,895 Series J shares, to Rp1,752,861, consisting of 1 Series I share and 1,752,860 Series J shares, through the issuance of 351,965 Series J shares with a total value of Rp351,965.

The notarial deed has been authorized by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and received the approval letter No. AHU-0075173.AH.01.02.Year 2024 dated November 21, 2024.

Based on the Deed of Merger No. 146 dated November 20, 2024 from notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., APL agreed to merge with IAS (formerly APK), where the IAS (formerly APK) as the surviving entity.

Based on the above Deed of Merger No. 146, it is stated that the effective date of the merger is on December 1, 2024.

In accordance with the regulations, management has submitted a request to the Director General of Taxes for approval to use the book value for the transfer of assets APL to the Company on December 30, 2024. The Director General of Taxes has approved the request for the use of book value for the transfer of the assets of the APL to IAS (formerly APK) through the Director General of Taxes Decision Number KEP-35/WPJ.08/2025 regarding the Approval of Book Value Use for Asset Transfers in the context of Mergers dated January 20, 2025.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham IAS pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

The details of the shareholders and their share ownerships of IAS as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

Pemegang Saham	**Jumlah Saham/ *Total Shares* (Lembar/*Shares*)**	**Nominal per Lembar/ *Nominal per Shares***	**Nilai Nominal/ *Nominal Amount***	***Shareholders***
Perusahaan	1	1.000.000	1.000.000	*The Company*
AP Indonesia	1.752.860	1.000.000	1.752.860.000.000	*AP Indonesia*
Jumlah	**1.752.861**	**1.000.000**	**1.752.861.000.000**	***Total***

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 31 tanggal 6 Februari 2025 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, APH setuju dan sepakat untuk menggabungkan diri dengan IASP, dimana IASP sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha.

Based on the Deed of Merger No. 31 dated February 6, 2024 from Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., APH agreed to merge with IASP, where IASP as the surviving entity.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 31 tersebut, dinyatakan bahwa tanggal efektif penggabungan adalah tanggal 7 Februari 2025.

Based on the above Deed of Merger No. 31, it is stated that the effective date of the merger is on February 7, 2025.

Komposisi modal saham APH dan IASP sebelum dan setelah penggabungan adalah sebagai berikut:

The composition of the share capital of APH and IASP before and after the merger are as follows:

Sebelum Penggabungan		***Before Merger***
APH		***APH***
Modal Dasar	2.000.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh		*Issued and fully-paid capital*
IAS	603.614.000.000	*IAS*
Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I ("Puskokapura")	40.000.000	*Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I ("Puskokapura")*
Jumlah	**603.654.000.000**	***Total***
IASP		***IASP***
Modal Dasar	680.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh		*Issued and fully-paid capital*
IAS	169.930.000.000	*IAS*
Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I ("Puskokapura")	70.000.000	*Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I ("Puskokapura")*
Jumlah	**170.000.000.000**	***Total***

Setelah Penggabungan		***After Merger***
IASP		***IASP***
Modal Dasar	3.100.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh		*Issued and fully-paid capital*
IAS	783.630.000.000	*IAS*
Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I ("Puskokapura")	111.000.000	*Pusat Koperasi Karyawan Angkasa Pura I ("Puskokapura")*
Jumlah	**783.741.000.000**	***Total***

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (lanjutan)

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham IASP pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Total*	
IAS (dh APK)	783.630	99,99%	783.630.000.000	*IAS (formerly APK)*
Puskokapura	111	0,01%	111.000.000	*Puskokapura*
Jumlah	**783.741**	**100%**	**783.741.000.000**	***Total***

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham No. GP/PS/LM-2024/02/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025, pemegang saham Gapura setuju untuk membagikan dividen kas sebesar Rp36.102. Gapura telah melakukan pembayaran dividen senilai Rp19.633 tanggal 24 Desember 2025 kepada IAS dan pembayaran dividen senilai Rp16.469 tanggal 24 Desember 2025 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries (continued)

PT Integrasi Aviasi Solusi ("IAS") (continued)

The details of the shareholders and their share ownerships of IASP as of December 31, 2025 as follow:

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. GP/PS/LM-2024/02/VI/2025 dated June 25, 2025, the shareholders of Gapura approved the distribution of cash dividends totalling to Rp36,102. Gapura has made dividend payments amounting Rp19,633 on December 24, 2025 to IAS and dividend payments amounting Rp16,469 on December 24, 2025 to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan" or " OJK").

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan menjaga kelangsungan usaha.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Amandemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran

Amandemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketertukaran (exchangeability) tidak tersedia. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.

Amandemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

All figures in the consolidated financial statements are expressed in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Changes in accounting principles

Amendment of PSAK 221: Lack of Exchangeability

The amendments specifies how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking. The amendments also require disclosure of information that enables users of its financial statements to understand how the currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows.

This amendment did not have any impact on the Group's consolidated financial statements

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner.

Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan.

PSAK 117 didasarkan pada model umum, yang dilengkapi dengan:
- Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (*variable fee approach*);
- Pendekatan yang disederhanakan (*premium allocation approach*) yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek.

Standar baru tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar akuntansi baru dan amandemen standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal 31 Desember 2025.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

PSAK 117: Insurance Contracts

PSAK 117 is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. PSAK 117 replaces PSAK 104 Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and re-insurance), regardless of the type of entities that issue them as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features.

The overall objective of PSAK 117 is to provide a comprehensive accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers, covering all relevant accounting aspects.

PSAK 117 is based on a general model, supplemented by:
- *A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable fee approach);*
- *A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contracts.*

The new standard had no impact on the Group's consolidated financial statements.

c. Accounting Standards Issued But Not Yet Effective

The new and amended standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of December 31, 2025.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

Amandemen PSAK 109 dan PSAK 107: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Amandemen tersebut mencakup klarifikasi atas suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada "tanggal penyelesaian" serta memperkenalkan pilihan kebijakan akuntansi (apabila kondisi tertentu terpenuhi) untuk menghentikan pengakuan liabilitas keuangan yang diselesaikan melalui sistem pembayaran elektronik sebelum tanggal penyelesaian.

Selain itu, panduan tambahan ditambahkan mengenai bagaimana arus kas kontraktual untuk aset keuangan dengan fitur lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) serta fitur serupa harus dinilai. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa saja yang merupakan fitur non-recourse dan karakteristik instrumen yang terkait secara kontraktual. Selain itu, amandemen tersebut memperkenalkan persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan dengan fitur kontinjensi serta persyaratan pengungkapan tambahan untuk instrumen ekuitas yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (OCI).

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan hanya untuk klasifikasi aset keuangan dan pengungkapan terkait. Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Amandemen tersebut mengklarifikasi penerapan persyaratan own-use untuk kontrak yang berada dalam ruang lingkup, mengubah persyaratan penetapan (designation) atas item yang dilindungi dalam hubungan lindung nilai arus kas untuk kontrak-kontrak tersebut, serta menambahkan persyaratan pengungkapan baru untuk memungkinkan investor memahami dampak kontrak tersebut terhadap kinerja keuangan dan arus kas perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Accounting Standards Issued But Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Classification and Measurement of Financial Instruments

The amendments includes a clarification that a financial liability is derecognised on the 'settlement date' and the introduction of an accounting policy choice (if specific conditions are met) to derecognise financial liabilities settled using an electronic payment system before the settlement date.

Further, additional guidance is added on how the contractual cash flows for financial assets with environmental, social and corporate governance (ESG) and similar features should be assessed. The amendments also clarifiies what constitute 'non-recourse features' and what are the characteristics of contractually linked instruments. The amendments also introduces of disclosures for financial instruments with contingent features and additional disclosure requirements for equity instruments classified at fair value through other comprehensive income (OCI).

The Amendments are effective for annual periods starting on or after January 1, 2026 with early adoption permitted for classification of financial assets and related disclosures only. The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

The amendments clarify the application of the 'own-use' requirements for in-scope contracts, amend the designation requirements for a hedged item in a cash flow hedging relationship for in-scope contracts, and add new disclosure requirements to enable investors to understand the effect of these contracts on a company's financial performance and cash flows.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Kontrak yang Mengacu Pada Listrik Bergantung Alam (lanjutan)

Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan dini diperbolehkan, namun harus diungkapkan. Amandemen terkait pengecualian own-use diterapkan secara retrospektif, sedangkan amandemen akuntansi lindung nilai diterapkan secara prospektif untuk hubungan lindung nilai baru yang ditetapkan sejak tanggal penerapan awal.

Selain itu, amandemen pengungkapan dalam PSAK 107 harus diterapkan bersamaan dengan amandemen PSAK 109. Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (Revisi 2025)

Pada Oktober 2025, DSAK IAI mengesahkan revisi atas PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Revisi ini mencakup ruang lingkup dan penerapan dari metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest) dan pelepasan di ekuitas (disposal in equity) sebagai konsep akuntansi yang digunakan dalam PSAK 338.

Perubahan utama mencakup pengecualian entitas investasi dari ruang lingkup PSAK 338, serta tambahan definisi bisnis alihan, entitas penerima, dan entitas pengalih. Revisi ini juga mencakup rujukan jumlah tercatat bisnis alihan dan penyajian informasi prakombinasi bisnis ketika terjadi ketidakpraktisan dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan. Revisi ini berlaku efektif 1 Januari 2026 dengan opsi penerapan dini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Accounting Standards Issued But Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Contracts Referencing Nature-dependent Electricity (continued)

The amendments will take effect for annual reporting periods starting on or after January 1, 2026. Early adoption is allowed, but it must be disclosed. The amendments concerning the own-use exception are to be applied retrospectively, while the hedge accounting amendments should be applied prospectively to new hedging relationships designated from the initial application date.

Additionally, the PSAK 107 disclosure amendments must be implemented alongside the PSAK 109 amendments. The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

PSAK 338: Business Combination under Common Control (2025 Revision)

On October 2025, DSAK IAI issued revisions to PSAK 338: Business Combinations of Entities Under Common Control. The revisions cover the scope and application of the pooling of interest method and disposal in equity as the accounting concepts used in PSAK 338.

The key changes include the exclusion of investment entities from the scope of PSAK 338, as well as the addition of definitions for transferred business, receiving entity, and transferring entity. The revision also includes references to the carrying amount of the transferred business and the presentation of pre-combination information when applying the pooling of interest method is impracticable. The revision is effective on 1 January 1, 2026 with early adoption permitted.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (Revisi 2025) (lanjutan)

Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Penyesuaian tahunan 2024

DSAK IAI menerbitkan Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia yang merujuk pada IFRS Accounting Standards Annual Improvements – Volume 11. Penyesuaian tahunan mencakup klarifikasi, penyederhanaan, koreksi, atau perubahan untuk meningkatkan konsistensi dalam PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 109 Instrumen Keuangan, PSAK 10 Laporan Keuangan Konsolidasian, dan PSAK 207 Laporan Arus Kas. Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan lebih awal diperkenankan dan harus diungkapkan. Amandemen tersebut tidak diharapkan menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

PSAK 118 akan menggantikan PSAK 201. Standar baru ini memperkenalkan persyaratan baru terkait penyajian dalam laporan laba rugi, termasuk jumlah dan subjumlah tertentu. Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengklasifikasikan seluruh pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam salah satu dari lima kategori: operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan.

Standar ini juga mensyaratkan pengungkapan ukuran kinerja yang didefinisikan manajemen, subjumlah pendapatan dan beban, serta mencakup persyaratan baru terkait agregasi dan disagregasi informasi keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Accounting Standards Issued But Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

PSAK 338: Business Combination under Common Control (2025 Revision) (continued)

The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

Annual Improvements 2024

The DSAK IAI issued Annual Improvements 2024 to SAK Indonesia which refers to IFRS Accounting Standards Annual Improvements – Volume 11. The annual improvements include clarifications, simplifications, corrections or changes to improve consistency in, PSAK 107 Financial instruments: Disclosure, PSAK 109 Financial Instruments, PSAK 110 Consolidated Financial Statements and PSAK 207 Statements of Cash Flows. The amendments will be effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2026. Earlier application is permitted and must be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

Effective beginning on or after January 1, 2027

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements

PSAK 118 will replace PSAK 201. The new standard introduces new requirements for presentation within the statement of profit or loss, including specified totals and subtotals. Furthermore, entities are required to classify all income and expenses within the statement of profit or loss into one of five categories: operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations.

The standard requires disclosure of newly defined management-defined performance measures, subtotals of income and expenses, and it also includes new requirements for aggregation and disaggregation of financial information.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 (lanjutan)

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan (lanjutan)

PSAK 118 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan dan harus diungkapkan. PSAK 118 akan diterapkan secara retrospektif.

Grup saat ini sedang mengidentifikasi seluruh dampak yang akan timbul atas laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan terkait implementasi amandemen tersebut.

PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik - Pengungkapan

Standar baru tersebut memungkinkan entitas yang memenuhi syarat untuk memilih menerapkan pengungkapan yang lebih singkat dan tetap menerapkan persyaratan pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam standar akuntansi lainnya. Untuk memenuhi syarat, pada akhir periode pelaporan, entitas harus merupakan entitas anak sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 110, tidak memiliki akuntabilitas publik, dan memiliki entitas induk (baik entitas induk akhir atau entitas induk perantara) yang menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk penggunaan publik dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK Indonesia, SAK Internasional atau IFRS accounting standards.

PSAK 119 akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan. Grup memperkirakan bahwa standar baru tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Accounting Standards Issued But Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2027 (continued)

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements (continued)

PSAK 118 are effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, but earlier application is permitted and must be disclosed. PSAK 118 will apply retrospectively.

The Group is currently working to identify all impacts the amendments will have on the primary financial statements and notes to the financial statements.

PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability - Disclosures

The new standard allows eligible entities to elect to apply its reduced disclosure requirements and still applying the recognition, measurement and presentation requirements in other accounting standards. To be eligible, at the end of the reporting period, an entity must be a subsidiary as defined in PSAK 110, cannot have public accountability and must have a parent (ultimate or intermediate) that prepares consolidated financial statements, available for public use, which comply with SAK Indonesia, SAK Internasional or IFRS accounting standards.

PSAK 119 will become effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, with early application permitted. The Group anticipates that the new standard will have no material effect on the Group's financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

a. Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

a. Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,
b. Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
c. The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

e. Investasi pada Ventura Bersama

Ventura bersama adalah salah satu tipe pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Bagian Grup atas laba rugi ventura bersama pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas kerugian ventura bersama sama dengan atau melebihi nilai kepemilikannya di ventura bersama, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban hukum atau harus melakukan pembayaran tertentu atas nama ventura bersama tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Principles of Consolidation (continued)

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

e. Investment in Joint Ventures

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group's share of the joint ventures' post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from joint ventures are recognized as reductions in the carrying amount of the investment.

When the Group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture, the Group does not recognize further losses, unless the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the joint venture.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Investasi pada Ventura Bersama (lanjutan)

Laba rugi yang dihasilkan dari transaksi antara Grup dengan ventura bersama diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian venturer lain yang tidak berelasi dalam ventura bersama. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi di ventura bersama.

Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan jumlah tercatat investasi pada ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas laba (rugi) ventura bersama" dalam laba rugi.

f. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Investasi Grup pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan pada saat tanggal perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. Goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi dandiuji untuk penurunan nilai secara terpisah dari investasi terkait. Ketika bagian Grup atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi melebihi biaya perolehan, selisih tersebut diakui sebagai pendapatan dalam bagian laba atau rugi Grup pada periode perolehan.

Setelah tanggal perolehan, Grup melakukan penyesuaian yang diperlukan atas bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi. Penyesuaian ini mencakup depresiasi atas aset yang dapat disusutkan berdasarkan nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehan, serta pengakuan atas setiap rugi penurunan nilai yang berkaitan dengan goodwill atau aset tetap.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Investment in Joint Ventures (continued)

Profits and losses resulting from transactions between the Group and its joint ventures are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of unrelated venturer's interest in the joint ventures. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the joint venture is impaired.

If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the joint venture and its carrying amount and recognizes the amount adjacent to "shares of profit (loss) of joint ventures" in profit or loss.

f. Investments in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost on the date of acquisition. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually. When the Group's share of the net fair value exceeds the cost, the difference is recognised as income in the Group's share of profit or loss in the period of acquisition.

After the date of acquisition, the Group makes the necessary adjustments to its share of the associate's profit or loss. These adjustments include depreciation of the depreciable assets based on their fair values at the acquisition date and recognition of any impairment losses relating to a goodwill or fixed assets.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepemilikan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Investments in Associates (continued)

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas, bank dan deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal penempatannya, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan, memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun dari tanggal penempatannya disajikan sebagai bagian dari "Investasi Jangka Pendek".

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai "Kas yang dibatasi Penggunaannya".

h. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam masing-masing akun.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam "Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian" merupakan pihak tidak berelasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the consolidated statements of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three (3) months or less at the time of placement, that are readily convertible to a known amount of cash, subject to an insignificant risk of changes in value and which are note used as collateral or not restricted.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not exceeding 1 (one) year at the time of placement are presented as part of "Short-term Investments".

Cash and cash equivalents which are restricted are included within "Restricted Cash".

h. Transactions with Related Parties

The Company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 224: Related Party Disclosures.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in each respective notes of the accounts..

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the "Notes to the Consolidated Financial Statements" are unrelated parties.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan metode garis lurus.

k. Penyertaan Saham

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Investasi Perusahaan pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi neto dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika dapat diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

k. Investments In Shares of Stock

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

The Company's investments in associated companies are accounted for using the equity method. An associated company is an entity in which the Company has significant influence. Under the equity method, the cost of investment is increased or decreased by the Company's share in net earnings or losses of, and dividends received from, the associated company since the date of acquisition.

The consolidated statement of profit or loss reflects the share of the results of operations of the associated company. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associated company, the Company recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Penyertaan Saham (lanjutan)

Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Perusahaan dalam entitas asosiasi.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Dalam hal ini, Perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakui penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

l. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Investments In Shares of Stock (continued)

Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Company and the associated company are eliminated to the extent of the Company's interest in the associated company.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

If this is the case, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in the associated company and its carrying value and recognizes the impairment in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive Income.

l. Fixed Assets

Fixed assets, except landrights, are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Apabila terdapat kewajiban untuk membongkar dan memindahkan aset tetap maka beban yang terkait akan ditambahkan ke biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan dan kewajiban atas biaya terkait tersebut diakui.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Aset tetap, kecuali hak atas tanah, disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat masing-masing aset tetap sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Fixed Assets (continued)

Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are met. In the case of mandatory dismantling or asset removals, the related costs are added to the cost of the relevant assets and provisions are recognized to cover the costs.

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred. Depreciation of fixed assets, except for landrights, is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Jenis Aset Tetap	**Umur Ekonomis (Tahun)/ *Economic Age (Years)***	***Types of Fixed Assets***
Bangunan lapangan	10 - 80	*Field buildings*
Bangunan gedung	10 - 50	*Buildings*
Perlengkapan terminal dan gedung	5 - 15	*Terminal and buildings equipment*
Kendaraan bermotor	5 - 10	*Vehicles*
Instalasi dan jaringan	5 - 20	*Installations and networking*
Mesin dan peralatan:		*Machinery and equipment:*
- Alat bantu navigasi	10 - 15	*Navigation supporting equipment* -
- Kantor	3 - 15	*Office* -
- Bengkel	5 - 10	*Workshop* -
- Komputer	3 - 5	*Computer* -
- Parkir	3 - 5	*Parking* -
Lain-lain	1 - 20	*Others*
Overlay	1,5 - 20	*Overlay*

Biaya pengurusan untuk memperpanjang atau memperbaharui hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

The legal cost of landrights to extend or renew the landrights are recognized as intangible assets and amortized, over the shorter of the rights' legal life or the land's economic life.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai.

Maintenance and repair costs are recognized as an expense as incurred. Expenditures that extend the useful lives of fixed assets are capitalized and depreciated in accordance with the applicable depreciation rates.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan yang ditentukan berdasarkan basis akrual dan kemajuan fisik pekerjaan serta disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Biaya perolehan termasuk kapitalisasi beban bunga dan laba/rugi selisih kurs, jika ada, atas pinjaman dan biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan aset dalam penyelesaian tersebut (Catatan 2o, "Kapitalisasi Biaya Pinjaman"). Akrual sehubungan dengan perolehan aset tetap disajikan sebagai bagian dari akun utang lain-lain.

Akumulasi biayanya akan dipindahkan ke dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan ketika aset secara substansial selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya perbaikan yang signifikan dikapitalisasi sebagai penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Nilai kini dari perkiraan biaya pembongkaran aset setelah aset digunakan termasuk dalam nilai perolehan aset tersebut jika kriteria pengakuan untuk penetapannya terpenuhi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Aset tetap tidak diakui lagi pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode penghentian pengakuan aset, yang merupakan selisih antara hasil pelepasan bersih dan jumlah tercatat aset.

Nilai sisa, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika perlu, pada setiap akhir tahun buku.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Fixed Assets (continued)

Assets under construction is stated at cost based on accrual bases and progress on constructions and presented as part of fixed assets. Cost includes capitalized interest charges and gain/losses on foreign exchange, if any, incurred on borrowings and other costs incurred to finance the said asset construction (Note 2o, "Capitalization of Borrowing Costs"). Accrual of acquisition of fixed assets is presented as part of other payables account.

The accumulated cost is reclassified to the relevant fixed assets account when the construction is substantially completed and the constructed asset is ready for its intended use.

The cost of normal maintenance and repair work is charged to operations as incurred. The cost of significant improvements or betterments is capitalized as replacements if the recognition criteria are satisfied. The present value of the expected cost for the decommissioning of the asset after its use is included in the cost of the asset if the recognition criteria are met.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss on derecognition of the asset is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the period the asset is derecognized, which represents the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each financial year.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

m. Properti Investasi

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, kecuali tanah tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran aset properti investasi.

Properti investasi terdiri dari bangunan dan prasarana yang dikuasai Perusahaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Fixed Assets (continued)

Assets under construction are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above

m. Investment Properties

Investment properties are stated at cost, including transaction costs, less accumulated depreciation and impairment, except for land which is not depreciated. The carrying amount includes the cost of replacing part of an existing investment property when the fee is occured, if the recognition criteria are met and excludes the costs of the daily use of an investment property.

The Company has chosen to use the cost model for the measurement of investment property assets.

Investment properties consist of buildings and infrastructure that are controlled by the Company to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

n. Intangible Assets

An intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of the intangible asset is assessed to be either finite or indefinite. An intangible asset with finite life is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year end.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat:
i. dijual; atau
ii. ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Aset takberwujud Perusahaan terdiri dari jasa bantuan instalasi serta implementasi perangkat lunak.

o. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya pinjaman dapat meliputi beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 223: Biaya Pinjaman dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat dimulainya aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

p. Beban Akrual

Beban akrual diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Beban akrual ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi maka provisi dibatalkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Intangible Assets (continued)

An intangible asset is derecognized:

i. on disposal; or
ii. when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

The Company's intangible assets consist of installation assistance and implementation of software.

o. Capitalization of Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. Other borrowing costs are recognized as expenses in the period in which they are incurred. Borrowing costs may include interest, finance charges in respect of finance leases recognized in accordance with PSAK 223: Borrowing Costs and foreign exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as adjustments to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use have started and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are substantially completed.

p. Accrued Expense

Accrued expense is recognized when the Group has a present obligation (legal and constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Accrued expenses are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations, the provisions are reversed.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Beban Akrual (lanjutan)

Beban akrual ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi maka provisi dibatalkan.

q. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.

Imbalan Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Biaya untuk penyediaan manfaat dibawah program pensiun imbalan pasti ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang disebut sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

i. Keuntungan atau kerugian aktuarial;
ii. Imbalan hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset);
iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Kurtailmen terjadi apabila Grup mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, terminasi atau penghentian program.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Accrued Expense (continued)

Accrued expenses are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations, the provisions are reversed.

q. Employee Benefits Liabilities

Short-term Employee Benefits

The Group recognizes short-term employee benefits liability when services are rendered and the compensation for such services are to be paid within twelve months after such services are rendered.

Pension Benefits and Other Post Employment Benefits

The cost of providing benefits under the defined benefit plan is determined using the projected-unit-credit method.

Remeasurement on net deferred benefit liabilities (asset), which recognized as other comprehensive income, consist of:

i. Actuarial gain or losses;
ii. Return on program asset, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest;
iii. Every changes in asset ceiling, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), is recognized as part of other comprehensive income is not reclassified to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the next period.

Past service cost arising from amendment or curtailment programs are recognized as expense in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred.

A curtailment occurs when the Group either significantly reduce the number of employees covered by a plan, termination or suspension of the program.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti tanda penghargaan dan cuti jangka panjang.

Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila pegawai dan anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan di dasari pada peraturan Perusahaan. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

r. Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh Grup di masa depan tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

s. Sewa

Grup menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Employee Benefits Liabilities (continued)

Pension Benefits and Other Post Employment Benefits (continued)

The Company also provides other post-employment benefits, such as long service reward and long service leave.

The long service reward is paid when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the employee or the qualified family members pass away. The separation reward benefit is paid to employees in the event of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

r. Contract Liabilities

Contract liabilities are cash received from other parties in connection with the services that will be performed by the Group in the future but the services not yet delivered to that parties.

s. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Penyewa (lanjutan)

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Leases (continued)

The Group as Lessee (continued)

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah.

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

t. Perpajakan

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Leases (continued)

The Group as Lessee (continued)

Lease liabilities (continued)

In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income.

t. Taxation

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak final (lanjutan)

Mengacu pada revisi PSAK 212 (dahulu PSAK 46) yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212 (dahulu PSAK 46).

Oleh karena itu, Grup memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penjualan tanah, pendapatan sewa tanah dan jasa rekayasa dan konstruksi sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasian dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Umum dan Administrasi".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Taxation (continued)

Final tax (continued)

Referring to revised PSAK 212 (formerly PSAK 46) as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK 212 (formerly PSAK 46).

Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from sales of land, land rent revenue and engineering and construction services as separate line item.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain assets such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Tax Expense - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "General and Administrative Expense".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Grup mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Taxation (continued)

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

u. Pendapatan dan beban

Grup menerapkan PSAK 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Taxation (continued)

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

u. Revenue and expense

The Group has adopted PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin;*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Untuk pendapatan, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat jasa telah diserahkan kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Pada tanggal pelaporan, pendapatan yang sudah diakui namun belum ditagihkan dicatat sebagai "Aset Kontrak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penghasilan sewa

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

v. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada tahun yang bersangkutan.

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Revenue and expense (continued)

For revenues, performance obligation is typically satisfied, and revenue is recognized, when the services has been transferred to the customer (a point in time).

At reporting date, revenues earned but not yet billed to customer are recorded as "Contract Assets" in the consolidated statement of financial position.

Lease income

Lease income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

Expenses recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

v. Foreign Currency Transactions and Balances

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in rupiah at the middle rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average buying and selling rates of exchange quoted by Bank Indonesia at the closing of the last banking day of the year.

The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

The exchange rates used as of December 31, 2025 and December 31, 2024 were as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Dolar AS	16.782	16.162	*US Dollar*
Dolar Singapura	13.069	11.919	*Singapore Dollar*
Euro	19.753	16.851	*Euro*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari suatu akuisisi diukur dari nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi.

Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi.

Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan dicatat dalam "Beban Umum dan Administrasi".

Grup menentukan bahwa mereka telah mengakuisisi bisnis ketika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup input dan proses substantif yang bersama-sama secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk menghasilkan output. Proses yang diperoleh adalah substantif jika penting bagi kemampuan untuk terus menghasilkan output, dan input yang diperoleh mencakup tenaga kerja yang terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melakukan proses itu atau secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk terus menghasilkan output dan dianggap unik atau langka atau tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus menghasilkan *output*.

Ketika Grup melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan atas derivatif yang melekat pada kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepemilikan atas ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang terjadi dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Business Combinations

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree.

For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets.

Transaction costs incurred are directly expensed and included in "General and Administrative Expenses".

The Group determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create outputs. The acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing outputs, and the inputs acquired include an organized workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process or it significantly contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing outputs.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Imbalan kontinjensi yang akan dibayarkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontijensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau sebagai pendapatan komprehensif lain. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontijensinya tidak diukur kembali sampai penyelesaian terakhir dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, pertama kali *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dibayarkan dan jumlah yang diakui untuk KNP dibandingkan dengan jumlah dari aset teridentifikasi dan liabilitas yang diperoleh. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis dialokasikan sejak tanggal akuisisi kepada setiap unit penghasil kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan memperoleh manfaat dari kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang mengakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu dalam UPK tersebut dilepas, maka *goodwill* yang terasosiasi dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dilepas dan porsi UPK yang ditahan.

x. Pelaporan Segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: (1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban; (2) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan (3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Business Combinations (continued)

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized either in profit or loss or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the Subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated from the acquisition date to each of the Group's cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquirer are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

x. Segment Reporting

An operating segment is a component of an entity: (1) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses; (2) whose operating results are regularly reviewed by the entity's operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and value its performance; and (3) for which discrete financial information is available.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Pelaporan Segmen (lanjutan)

Grup mengidentifikasikan segmen operasi berdasarkan pelaporan internal yang direviu secara regular oleh pengambil keputusan operasional dalam mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi Grup.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 46, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

y. Pengukuran Nilai Wajar

Grup juga mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis pada nilai wajar. Grup juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan oleh pelaku pasar pada saat melakukan penilaian aset atau liabilitas, dengan asumsi bahwa pelaku pasar akan bertindak atas kepentingan ekonomi terbaik mereka.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

x. Segment Reporting (continued)

The Group identifies its operating segments on the basis of internal reports that are regularly reviewed by the Group's chief operating decision-maker in order to allocate resources to the segment and assess its performance.

Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 46, including the factors used to identify the reported segments and the measurement basis of segment information.

Segments are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

y. Fair Value Measurement

The Group also initially measures financial instruments, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the assets or transfer the liabilities takes place either:

- *In the principal market for the assets or liabilities, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the assets or liabilities.*

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liabilities, assuming that market participants act in their economic best interest.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan level masukan (input) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- Tingkat 1 - Harga kuotasian (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (input) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (input) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan dalam basis yang berulang, Grup menentukan apakah transfer telah terjadi antara tingkat dalam hierarki dengan menilai ulang kategori (berdasarkan tingkat masukan paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup mementukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan level pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

z. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Fair Value Measurement (continued)

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

z. Provisions

A provision is recognized when Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Provisi (lanjutan)

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

aa. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan nilai terpulihkan dari Unit Penghasil Kas (UPK) yang mana aset tercakup (aset dari UPK).

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

z. Provisions (continued)

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

If some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

aa. Impairment of Non-financial Assets

The Group assesses at the end of each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If such indication exists, recoverable amount is estimated for the individual asset. If it is not possible to estimate the recoverable amount of the individual asset, the Group determines the recoverable amount of the Cash-Generating Unit (CGU) to which the asset belongs (the asset's CGU).

An asset's (either individual asset or CGU) recoverable amount is the higher of the asset's fair value less costs to sell and its value in use. Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment loss are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment loss".

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ada, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut diakui sebagai laba rugi, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

aa. Impairment of Non-financial Assets (continued)

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment loss, if any, are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is made at the end of each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods. Reversal of an impairment loss is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal is recognized in profit or loss, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

ac. Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:

- aset berwujud tertentu;
- manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
- aset proyek tertentu; atau
- kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Grup menerapkan PSAK 410 (dahulu PSAK 110) “Akuntansi Sukuk” untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ab. Business Combination of Entities under Common Control

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the pooling-of-interests method, the components of the financial statements of the combining entity, for the period during which the business combination of entities under common control occurred and for the comparative period, are presented in such a manner as if the combination has occurred since the beginning of the period the combining entity is under common control.

ac. Sukuk

Sukuk are the sharia securities represented by a certificate or evidence of ownership of equal denomination and representing individual ownership interest in (not separated or divided):

- *particular intangible assets;*
- *existing or future benefits of particular intangible assets;*
- *existing or future services;*
- *particular project assets; or*
- *determined investment activity.*

Group adopted PSAK 410 (formerly PSAK 110) "Accounting Sukuk" to an entity who enters sukuk Ijarah sukuk mudaraba transactions, either as sukuk issuers and investors.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Sukuk (lanjutan)

Sukuk ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah.

Grup Sebagai Penerbit

Sukuk Ijarah

Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan. Sukuk ijarah diakui pada saat Grup menjadi pihak terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah.

Sukuk ijarah diakui fsebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya.

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal yang disebabkan karena penyesuaian yang tersebut diatas, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. Amortisasi tersebut tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.

Beban Ijarah diakui pada saat terutang.

Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Grup menyajikan sukuk ijarah menjadi liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek.

ad. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, seperti diungkapkan pada Catatan 2u.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ac. Sukuk (continued)

Sukuk ijarah is a sukuk using ijarah's contract. Sukuk mudaraba is sukuk using a mudaraba's contract.

Group as Issuer

Sukuk Ijarah

Initial recognition is done at the time of sukuk ijarah issued. Sukuk Ijarah is recognized when the Group becomes a party bound by the provisions of sukuk ijarah issuance.

Sukuk Ijarah is recognized at its nominal amount, adjusted with any premium or discount, and the transaction costs related with the issuance.

After initial recognition, if the carrying amount is different from the nominal value due to the adjustments mentioned above, the difference is amortized using a straight line method over the period of sukuk ijarah. Amortization is not recognized as an ijarah's expense, but is recognized as an issuance expense of sukuk ijarah.

Ijarah expense recognized when due.

Sukuk Ijarah is presented as a liability at a net of premium or discount and unamortized transaction costs. Group presents Sukuk Ijarah as long-term liabilities and short-term liabilities.

ad. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115: Revenue from contracts with customers, as disclosed in Note 2u.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Initial Recognition and Measurement (continued)

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL).*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang) (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak dan investasi jangka panjang.

Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Instrumen utang Grup yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada instrumen utang dengan kuotasi yang termasuk dalam investasi jangka pendek.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

Financial assets at amortized cost (debt instruments) (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, restricted cash, short-term investment, trade receivables, other receivables, contract assets, and long-term investments.

Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Group's debt instruments at FVOCI include investments in quoted debt instruments included under short-term investment.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 232 (dahulu PSAK 50): Instrumen keuangan: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 232 (formerly PSAK 50): Financial instruments: Presentation and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR") (lanjutan)

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir; atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") (continued)

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired; or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. ECL ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, ECL diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (ECL sepanjang umurnya).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan ECL. Oleh karena itu, Grup tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Grup menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut.

Instrumen utang Grup pada NWPKL hanya terdiri dari obligasi kuotasi yang dinilai dalam kategori investasi teratas. Oleh karena itu, dianggap sebagai investasi dengan risiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut setiap 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak diterbitkan, penyisihan akan didasarkan pada ECL sepanjang umurnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument.

The Group's debt instruments at FVOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category. Therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan dilklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71): Instrumen keuangan. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entere into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109 (formerly PSAK 71): Financial instruments. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada NWLR (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71) dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

ii) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at FVTPL (continued)

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 109 (formerly PSAK 71) are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset.

Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2l.

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja dan beban pensiun yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pension neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja dan beban pensiun.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Accounting Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets. Estimated useful lifes of fixed assets are disclosed in Note 2k.

Estimated Pension Expenses and Post Employment Benefits

The present value of post-employment benefits obligations and accrued pension expenses depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine net pension cost (income) include the discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits and pension expenses.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi (lanjutan)

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Pascakerja (lanjutan)

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku Bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja dan cadangan dana pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan beban imbalan pascakerja serta dana pensiun diungkapkan pada Catatan 31.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu ketika mengestimasi penyisihan pajak penghasilan Grup. Terdapat transaksi dan perhitungan yang memungkinkan penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam periode penentuan pajak tersebut.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan kembali, penyisihan modal dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah penjualan barang dan jasa, harga komoditas, biaya operasi, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya di masa depan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Accounting Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Pension Expenses and Post Employment Benefits (continued)

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period, this is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related obligation.

Key assumptions for post-employment benefit obligations and other pension fund reserves are based in part on current market conditions. Information regarding the assumptions and Additional information and total liabilities and post-employment benefits expenses and include pension funds are disclosed in Note 31.

Income Tax

Judgements and assumptions are required in determining the deduction of certain costs when estimating the Groups income tax allowances. There are transactions and calculations that allow the determination of the final tax to be uncertain during the normal course of business. Where the final tax calculation of these matters differs from the amount previously recorded, the difference will have an impact on the determination of income tax and with holding tax withheld during the tax determination period.

Deferred tax assets, including those arising from recoverable tax losses, capital allowance, temporary differences are recognized only when they are calculated to be recoverable, depending on the formation of sufficient future taxable profit. The assumption of forming future taxable income depends on management's estimate of future cash flows. This depends on estimated future production, total sales of goods and services, commodity prices, operating costs, capital expenditures, dividends and other capital management transactions.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi (lanjutan)

Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian atas Piutang

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL untuk piutang. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa. Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar Grup yang diamati secara historis.

Grup akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*). Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diekspektasikan akan memburuk pada periode berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

Informasi tentang ECL pada piutang Grup diungkapkan dalam catatan 7 dan 8.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Accounting Estimates and Assumptions (continued)

Provision for Expected Credit Losses of Receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates.

The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next period which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Groups's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

The information about the ECLs on The Group's receivables is disclosed in Notes 7 and 8.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar. Pengungkapan lebih lanjut tentang nilai wajar terdapat dalam Catatan 44.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109: Instrumen Keuangan. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2ad dan 49.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya masing-masing entitas. Penentuan mata uang fungsional bisa membutuhkan pertimbangan karena berbagai kompleksitas, antara lain, suatu entitas dapat bertransaksi dalam lebih dari satu mata uang dalam aktivitas usahanya sehari-hari.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Accounting Estimates and Assumptions (continued)

Fair Value of Financial Instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, management judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions. The other disclosures on fair value are presented in Note 44.

Judgements

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definition set forth in PSAK 109: Financial Instrument. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Notes 2ad and 49.

Determination of Functional Currency

The functional currency of each entity in the Group is the currency of the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of each of the respective entities. The determination of functional currency may require judgment due to various complexity, among others, the entity may transact in more than one currency in its daily business activities.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut: / *The details of cash and cash equivalents are as follows:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Kas	4.097	3.747	*Cash on hand*
Kas di bank	7.201.362	8.948.185	*Cash in banks*
Deposito berjangka	2.311.775	3.140.647	*Time deposits*
Jumlah	**9.517.234**	**12.092.579**	***Total***
Kas			***Cash on Hand***
Rupiah	4.070	3.474	*Rupiah*
Dolar AS	27	92	*US Dollar*
Kas mata uang asing lainnya	-	181	*Other cash in foreign currency*
Jumlah kas	**4.097**	**3.747**	***Total cash on hand***
Kas di Bank			***Cash in Banks***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	2.186.207	2.990.379	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank Syariah Nasional (dahulu Unit Usaha Syariah BTN)	1.792.566	-	*PT Bank Syariah Nasional (formerly Unit Usaha Syariah BTN)*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	744.399	503.535	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	692.966	667.875	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.	194.921	3.103.905	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero)Tbk.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	134.148	384.718	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	-	277	*Others (each below Rp500 million)*
Subjumlah	5.745.207	7.650.689	*Subtotal*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	506.134	508.983	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk.*
PT Bank DKI	222.986	171.040	*PT Bank DKI*
PT Bank Central Asia Tbk.	177.777	86.904	*PT Bank Central Asia Tbk.*
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	47.825	23.927	*PT Bank CIMB Niaga Tbk.*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	37.670	150.139	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	831	111.715	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk.*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10 miliar)	14.224	22.461	*Others (each below Rp10 billion)*
Subjumlah	1.007.447	1.075.169	*Subtotal*
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	410.714	183.687	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	33.968	36.019	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	953	1.190	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
Subjumlah	445.635	220.896	*Subtotal*

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of cash and cash equivalents are as follows: (continued)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Kas di Bank (lanjutan)			***Cash in Banks (continued)***
Dolar AS (lanjutan)			*US Dollar (continued)*
Pihak ketiga			*Third party*
PT Bank Central Asia Tbk.	187	246	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Subjumlah	187	246	*Subtotal*
Dolar Singapura			*Singapore Dollar*
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	2.843	1.014	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	17	16	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	133	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
Subjumlah	2.860	1.163	*Subtotal*
Euro			*Euro*
Pihak berelasi			*Related party*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	26	22	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Subjumlah	26	22	*Subtotal*
Jumlah Kas di Bank	**7.201.362**	**8.948.185**	***Total Cash in Banks***
Deposito Berjangka			***Time Deposits***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Berelasi			*Related parties*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	985.000	989.390	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.	377.000	481.000	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	199.000	186.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	150.000	201.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	85.500	211.500	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Mandiri Taspen	68.310	11.500	*PT Bank Mandiri Taspen*
Subjumlah	1.864.810	2.080.390	*Subtotal*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third parties*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	224.000	-	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk.*
PT Bank Victoria Internasional	77.857	45.201	*PT Bank Victoria Internasional*
PT Bank MNC International Tbk.	24.000	-	*PT Bank MNC International Tbk.*

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *The details of cash and cash equivalents are as follows: (continued)*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Deposito Berjangka (lanjutan)			***Time Deposits (continued)***
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Pihak Ketiga (lanjutan)			*Third parties (continued)*
PT Bank Capital Indonesia	20.650	-	*PT Bank Capital Indonesia*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	27.000	262.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	280.000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	227.000	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Mega Tbk	-	-	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	155.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	50.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10 miliar)	11.800	29.000	*Others (each below Rp10 billion)*
Subjumlah	385.307	1.048.201	*Subtotal*
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak Berelasi			*Related parties*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	48.500	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.158	1.359	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Subjumlah	61.658	1.359	*Subtotal*
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak Ketiga			*Third party*
PT Bank Victoria Internasional	-	10.697	*PT Bank Victoria Internasional*
Subjumlah	-	10.697	*Subtotal*
Jumlah Deposito Berjangka	**2.311.775**	**3.140.647**	***Total Time Deposits***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**9.517.234**	**12.092.579**	***Total Cash and Cash Equivalents***

Jumlah kas dan setara kas yang ditempatkan pada pihak berelasi merepresentasikan 7,62% dan 9,59% dari jumlah aset Grup masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Total cash and cash equivalents placed on related parties represent 7.62% and 9.59% of total assets of the Group as of December 31, 2025 and 2024.

Rentang suku bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The ranges of annual interest rates of time deposits are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah	2.25%-7.5%	3.75%-7%	*Rupiah*
Dolar AS	0.75%-5%	0.75%-5%	*US Dollar*

Pendapatan bunga yang berasal dari kas di bank dan deposito berjangka disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Interest income from cash in banks and time deposits is presented as part of "Finance Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA / *5. RESTRICTED CASH*

Rincian kas yang dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut:

The details of restricted cash are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Bagian lancar			***Current portion***
Pihak berelasi			*Related parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	32.307	44.808	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	35.397	35.474	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.408	3.348	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.783	1.469	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank DKI	6.567	12.160	*PT Bank DKI*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.047	411.569	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Subjumlah	102.509	508.828	*Subtotal*
Dolar AS			*US Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.531	107.794	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pihak ketiga			*Third party*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Permata Tbk	283.100	2.113.822	*PT Bank Permata Tbk*
Jumlah bagian lancar	**422.140**	**2.730.444**	***Total current portion***
Bagian tidak lancar			***Non-current portion***
Pihak berelasi			*Related parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	125.000	125.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	4.500	4.500	*PT Bank Mandiri Taspen*
Jumlah bagian tidak lancar	**129.500**	**129.500**	***Total non-current portion***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kas yang dibatasi penggunaannya - bagian lancar, terutama terdiri atas :

- Rekening kompensasi ITDC atas pelepasan lahan di PT Bank Permata Tbk merupakan hasil pelepasan lahan Lot S-5 kepada PT Bali Destinasi Lestari pada tahun 2025 dan 2024 serta;
- Rekening AP Indonesia pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN") sebagai jaminan atas fasilitas penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) berdasarkan perjanjian kredit nontunai untuk tagihan pembangunan infrastruktur di Bandar Udara Internasinoal Kulon Progo kepada PP KSO sebesar Rp385.215 (Catatan 22) yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Februari 2025. Pada tanggal 24 Februari 2025, AP Indonesia telah melakukan pelunasan kepada BTN sebesar Rp385.215.

On December 31, 2025 and 2024, restricted cash - current portion, mainly consist of:

- *ITDC's compensation account for land disposal at PT Bank Permata Tbk which represents the proceeds of Lot S-5 land disposal to PT Bali Destinasi Lestari in 2025 and 2024 and;*
- *AP Indonesia's account at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN") as collateral for the issuance of Domestic Documentary Credit (SKBDN) facility based on a non-cash credit agreement for infrastructure development bills at Kulon Progo International Airport to PP KSO amounting to Rp385,215 (Note 22) which was due on February 24, 2025. On February 24, 2025, AP Indonesia made a repayment to BTN amounting to Rp385,215.*

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, bagian tidak lancar dari kas yang dibatasi penggunaannya terutama terdiri atas dana Perusahaan pada BTN, yang merupakan dana yang ditempatkan oleh Perusahaan sebagai jaminan atas fasilitas penerbitan *Standby Letter of Credit* (SBLC) berdasarkan Akta Gadai tanggal 17 Mei 2024 antara BTN sebagai bank penerbit dan Perusahaan sebagai pemohon, serta IAS, APS, dan IASS sebagai nasabah pemilik dana, untuk fasilitas pembiayaan kredit HISI sebesar Rp125.000 yang akan jatuh tempo pada 31 Desember 2035.

5. RESTRICTED CASH (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the non-current portion of restricted cash primarily consists of the Company's funds held at BTN. These funds were placed by the Company as collateral for the issuance of a Standby Letter of Credit (SBLC) under the Pledge Deed dated May 17, 2024, between BTN as the issuing bank and the Company as the applicant, with IAS, APS, and IASS as the account holders. The collateral relates to the HISI credit financing facility amounting to Rp125,000, which will mature on December 31, 2035.

6. INVESTASI JANGKA PENDEK / *6. SHORT-TERM INVESTMENTS*

Investasi jangka pendek terdiri dari: / *Short-term investments consists of:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Obligasi	72.089	69.506	*Bonds*
Reksadana	49.442	40.488	*Mutual funds*
Deposito berjangka > 3 Bulan	1.400	1.400	*Time deposits > 3 month*
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	8.500	30.980	*Restricted time deposits*
Jumlah	**131.431**	**142.374**	***Total***

Obligasi - Nilai Wajar Diukur Melalui Penghasilan Komprehensif Lain / *Bonds - Fair Value Through Other Comprehensive Income*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah			***Rupiah***
Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0047	30.000	30.000	*Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0047*
Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0045	15.150	15.150	*Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0045*
Obligasi Negara Tahun 2005 Seri FR0082	5.000	5.000	*Obligasi Negara Tahun 2005 Seri FR0082*
Dolar AS			***US Dollar***
Obligasi Negara Tahun 2018 Seri RI0148	15.416	15.416	*Obligasi Negara Tahun 2018 Series RI0148*
Jumlah	**65.566**	**65.566**	***Total***

6. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan) / *6. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)*

Obligasi - Nilai Wajar Diukur Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (lanjutan) / ***Bonds - Fair Value Through Other Comprehensive Income (continued)***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Kenaikan neto aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6.523	3.940	*Net increase in value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Jumlah	**72.089**	**69.506**	***Total***
Keuntungan yang belum direalisasi dari aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain:			*Unrealized gain from financial assets measure from fair value through other comprehensive income:*
31 Desember 2025	6.523	-	*December 31, 2025*
31 Desember 2024	(3.940)	3.940	*December 31, 2024*
31 Desember 2023	-	(6.472)	*December 31, 2023*
Jumlah	**2.583**	**(2.532)**	***Total***

Rincian nilai wajar obligasi adalah sebagai berikut: / *The details of fair value for bonds are as follows:*

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*			
	Nilai perolehan/ *Acquisition value*	**Nilai pasar/ *Market value***	**Kenaikan (Penurunan)/ *Increase (Decrease)***	
Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0047	30.000	32.871	2.871	*Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0047*
Obligasi Negara Tahun 2018 Seri RI0148	15.416	14.575	(841)	*Government Bond Year 2018 Series RI0148*
Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0045	15.150	19.380	4.230	*Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0045*
Obligasi Negara Tahun 2005 Seri FR0082	5.000	5.263	263	*Government Bond Year 2005 Series FR0082*
Jumlah	**65.566**	**72.089**	**6.523**	***Total***

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*			
	Nilai perolehan/ *Acquisition value*	**Nilai pasar/ *Market value***	**Kenaikan (Penurunan)/ *Increase (Decrease)***	
Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0047	30.000	32.565	2.565	*Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0047*
Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0045	15.150	18.417	3.267	*Obligasi Negara Tahun 2007 Seri FR0045*
Obligasi Negara Tahun 2005 Seri FR0082	5.000	4.985	(15)	*Government Bond Year 2005 Series FR0082*
Obligasi Negara Tahun 2018 Seri RI0148	15.416	13.539	(1.877)	*Government Bond Year 2018 Series RI0148*
Jumlah	**65.566**	**69.506**	**3.940**	***Total***

6. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan) / *6. SHORT TERM INVESTMENTS (continued)*

Reksadana Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi / *Mutual Fund - Fair Value Through Profit or Loss*

Rincian nilai wajar reksadana adalah sebagai berikut: / *The details of fair value for mutual funds are as follows:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Rupiah					*Rupiah*
Pihak ketiga					*Third parties*
SAM Indonesia	31.087	37.759	31.087	31.660	*SAM Indonesia*
HPAM Flexi Plus	10.117	11.683	10.117	8.828	*HPAM Flexi Plus*
Jumlah	**41.204**	**49.442**	**41.204**	**40.488**	***Total***

Deposito yang Dibatasi Penggunaannya / *Restricted Time Deposits*

Rincian deposito yang dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut: / *The details of restricted time deposits are as follows:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	25.880	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	5.100	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	-	30.980	*Total*

Deposito Berjangka Lebih dari 3 Bulan sampai dengan 1 Tahun - Biaya Perolehan Diamortisasi / *Time Deposits Above 3 Months up to 1 Year - Amortized Cost*

Rincian deposito berjangka lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun adalah sebagai berikut: / *The details of time deposits above 3 months up to 1 year are as follows:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Rupiah					*Rupiah*
Pihak Berelasi					*Related Parties*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.400	1.400	400	400	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	-	-	1.000	1.000	*PT Bank Mandiri Taspen*
Jumlah	1.400	1.400	1.400	1.400	*Total*

Tingkat Suku Bunga / *Interest Rate*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Deposito berjangka	2,50%-6,00%	2,25%-3,00%	*Time deposits*
Obligasi	4,35% - 10,00%	4,35% - 10,00%	*Bonds*

7. PIUTANG USAHA / *7. TRADE RECEIVABLES*

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The details of trade receivables are as follow:*

a. Berdasarkan pelanggan / *a. By customer*

	31 Desember 2025/ *Decmber 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Piutang usaha - lancar			***Trade receivables - current***
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	241.654	174.095	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Citilink Indonesia	188.622	201.759	*PT Citilink Indonesia*
PT Pelita Air Service	89.125	60.636	*PT Pelita Air Service*
PT Pertamina (Persero)	67.485	31.765	*PT Pertamina (Persero)*
PT Merpati Nusantara Airlines	57.142	56.973	*PT Merpati Nusantara Airlines*
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk.	38.823	41.014	*PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk.*
PT Pertamina Patra Niaga	32.586	59.950	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	23.332	28.391	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	13.617	9.664	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Kereta Commuter Indonesia	13.514	-	*PT Kereta Commuter Indonesia*
PT Aerofood Indonesia	13.337	14.725	*PT Aerofood Indonesia*
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	12.736	-	*Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan*
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)	12.155	-	*PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)*
PT Purantara Mitra Angkasa Dua	11.751	12.500	*PT Purantara Mitra Angkasa Dua*
PT Telekomunikasi Selular	10.958	7.292	*PT Telekomunikasi Selular*
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	9.648	9.648	*Perum Percetakan Negara Republik Indonesia*
PT Wika Realty	8.591	-	*PT Wika Realty*
PT Indonesia Ferry Property	7.798	6.316	*PT Indonesia Ferry Property*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	7.610	21.500	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Patra Jasa	7.174	1.407	*PT Patra Jasa*
Perum Damri	6.460	-	*Perum Damri*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	6.291	929	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Pertamina Bina Medika IHC	5.908	6.793	*PT Pertamina Bina Medika IHC*
PT Merpati Maintenance Facility	5.883	5.883	*PT Merpati Maintenance Facility*
PT Hutama Karya (Persero)	4.774	6.416	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Pertamina Lubricants	221	5.010	*PT Pertamina Lubricants*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	86.683	96.851	*Others (each below Rp5 billion)*
Subjumlah	983.878	859.517	*Subtotal*
Pihak ketiga	2.837.362	2.824.496	*Third parties*
Piutang usaha - lancar	**3.821.240**	**3.684.013**	***Trade receivables - current***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.337.819)	(1.411.213)	*Allowance for impairment loss*
Piutang usaha - lancar, neto	**2.483.421**	**2.272.800**	***Trade receivables - current, net***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *7. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *The details of trade receivables are as follow: (continued)*

a. Berdasarkan pelanggan (lanjutan) / *a. By customer (continued)*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Piutang usaha tidak lancar			***Trade receivables non-current***
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	1.435.573	1.435.179	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Aerofood Indonesia	111.329	114.381	*PT Aerofood Indonesia*
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk.	78.649	112.852	*PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk.*
PT Barata Indonesia (Persero)	15.085	14.529	*PT Barata Indonesia (Persero)*
PT Sariarthamas Hotel International	1.159	-	*PT Sariarthamas Hotel International*
Subjumlah	1.641.795	1.676.941	*Subtotal*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Sriwijaya Air	85.519	77.065	*PT Sriwijaya Air*
PT Pixel Komunitas	43.544	-	*PT Pixel Komunitas*
PT Taurus Gemilang	15.298	-	*PT Taurus Gemilang*
PT Cardig Air	2.371	-	*PT Cardig Air*
Subjumlah	146.732	77.065	*Subtotal*
Piutang usaha - tidak lancar	**1.788.527**	**1.754.006**	***Trade receivables - non-current***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.392.552)	(1.412.179)	*Allowance for impairment loss*
Piutang usaha - tidak lancar, neto	**395.975**	**341.827**	***Trade receivables - non-current, net***
Piutang usaha, neto	**2.879.396**	**2.614.627**	***Trade receivables, net***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *7. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *The details of trade receivables are as follow: (continued)*

b. Berdasarkan umur / *b. By aging*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Belum jatuh tempo	924.616	1.169.070	*Current*
Lewat jatuh tempo			*Overdue*
1 sampai 30 hari	391.684	483.480	*1 to 30 days*
31 sampai 60 hari	213.136	157.283	*31 to 60 days*
61 sampai 90 hari	123.019	151.545	*61 to 90 days*
91 sampai 180 hari	279.807	206.472	*91 to 180 days*
181 sampai 365 hari	273.894	307.949	*181 to 365 days*
Lebih dari 365 hari	3.403.611	2.962.220	*Over 365 days*
Jumlah	**5.609.767**	**5.438.019**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.730.371)	(2.823.392)	*Allowance for impairment loss*
Jumlah neto	**2.879.396**	**2.614.627**	***Net amount***

c. Berdasarkan mata uang / *c. By currencies*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah	5.339.874	5.167.329	*Rupiah*
Mata uang asing	269.893	270.690	*Foreign currencies*
Jumlah	**5.609.767**	**5.438.019**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.730.371)	(2.823.392)	*Allowance for impairment loss*
Jumlah neto	**2.879.396**	**2.614.627**	***Net amount***

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The movements of the allowance for impairment loss of trade receivables are as follows:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Saldo awal tahun	2.823.292	2.824.041	*Balance at beginning of year*
Penambahan tahun berjalan	43.528	127.394	*Additions during the year*
Pemulihan selama tahun berjalan	(136.449)	(107.546)	*Recovery during the year*
Penghapusan tahun berjalan	-	(20.497)	*Write-off during the year*
Saldo akhir tahun	**2.730.371**	**2.823.392**	***Balance at the end of year***

Piutang kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda") sebesar Rp1.435.573 telah diklasifikasikan sebagai piutang macet dan direklasifikasi ke akun Piutang Usaha Jangka Panjang. sebelumnya telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang disetujui oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2022. Berdasarkan PKPU tersebut, pembayaran piutang oleh Garuda akan dilakukan sekaligus, yaitu pada tahun ke-22 setelah tanggal putusan.

Receivables from PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ("Garuda") amounting to Rp1,435,573 have been classified as non-performing and reclassified to trade receivables – non-current. Garuda previously filed for a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), which was approved by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court on June 20, 2022. Under the PKPU decision, the receivable payment from Garuda will be settled in a one-time payment on year 22nd year after the date of the ruling.

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang dari PT Aerofood Indonesia sebesar Rp111.329 sudah dinyatakan macet dan telah direklasifikasi ke akun piutang usaha - tidak lancar. PT Aerofood Indonesia telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disetujui oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juli 2022. Berdasarkan PKPU tersebut, pembayaran piutang oleh Aerofood akan dilakukan secara angsuran sampai dengan 20 Juli 2032. Pergerakan saldo piutang usaha - tidak lancar pada tahun berjalan disebabkan oleh penerimaan pembayaran pada tahun 2025 serta reklasifikasi ke piutang jangka pendek atas bagian yang jatuh tempo dan akan dibayarkan pada tahun 2026.

Piutang dari PT Barata Indonesia (Persero) ("Barata") sebesar Rp15.085 telah dinyatakan macet dan telah direklasifikasi ke akun piutang usaha - tidak lancar. Barata telah mengajukan PKPU yang telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Desember 2021.

Piutang dari PT Sriwijaya Air ("Sriwijaya") sebesar Rp85.519 telah dinyatakan macet dan telah direklasifikasi ke akun piutang usaha - tidak lancar. Sriwijaya telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disetujui oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Juli 2023. Berdasarkan PKPU tersebut, pembayaran piutang oleh Sriwijaya akan dilakukan secara angsuran sampai dengan tahun 2037.

Piutang dari PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk ("GMF") sebesar Rp78.649 telah dinyatakan macet dan telah direklasifikasi ke akun piutang usaha - tidak lancar. GMF dan AP Indonesia telah menyepakati penjadwalan ulang (reschedule) pembayaran utang pada tanggal 20 Desember 2024 dengan pembayaran awal sebesar Rp40.768. Berdasarkan perjanjian tersebut, pembayaran piutang akan dilakukan secara angsuran sampai dengan tanggal 31 Desember 2028. Pergerakan saldo piutang usaha - tidak lancar pada tahun berjalan disebabkan oleh penerimaan pembayaran pada tahun 2025 serta reklasifikasi ke piutang usaha - lancar atas bagian yang jatuh tempo dan akan dibayarkan pada tahun 2026.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Jumlah piutang usaha dari pihak berelasi merepresentasikan 2,46% dan 2,44% dari total aset Grup masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

Receivables from PT Aerofood Indonesia amounting to Rp111,329 have been classified as non-performing and reclassified into trade receivables - non-current. PT Aerofood Indonesia previously filed for a PKPU, which was approved by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court on July 20, 2022. Under the PKPU decision, the receivable from Aerofood will be settled in installments up to July 20, 2032. The movement in the non current trade receivable balance during the year reflects payments received in 2025 and the reclassification to current receivables for the portion that will fall due and be settled in 2026.

Receivables from PT Barata Indonesia (Persero) ("Barata") amounting Rp15,085 have been classified as non-performing and reclassified into trade receivables - non-current. Barata has filed for a PKPU which has been approved by the Commercial Court at the Surabaya District Court on December 10, 2021.

Receivables from PT Sriwijaya Air ("Sriwijaya") amounting to Rp85,519 have been classified as non-performing and reclassified into trade receivables - non-current. Sriwijaya previously filed for a PKPU, which was approved by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court on July 11, 2023. Under the PKPU decision, the receivable from Sriwijaya will be settled in installments up to the year 2037.

Receivables from GMF amounting to Rp78,649 have been classified as non-performing and reclassified into trade receivables - non-current. GMF and AP Indonesia agreed on a debt rescheduling arrangement on December 20, 2024, which included an initial payment of Rp40,768. Under the agreement, the receivable will be settled in installments up to December 31, 2028. The movement in the trade receivable – non-current balance during the year reflects payments received in 2025 and the reclassification to current receivables for the portion that will fall due and be settled in 2026.

Management believes that the allowance for impairment losses on trade receivables is adequate to cover possible losses from the uncollectible accounts.

Total trade receivables due from related parties represent 2.46% and 2.44% of total assets of the Group as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *8. OTHER RECEIVABLES*

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut: / *The details of other receivables are as follow:*

a. Berdasarkan pelanggan / *a. By customer*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Piutang lain-lain - lancar			***Other receivables - current***
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Perseroda)	81.368	65.757	*PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Perseroda)*
Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi	8.375	-	*Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	53.104	25.670	*Others (each below Rp5 billion)*
Subjumlah	142.847	91.427	*Subtotal*
Pihak ketiga	135.876	131.667	*Third parties*
Piutang lain-lain - lancar	**278.723**	**223.094**	***Other receivables - current***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(94.418)	(124.422)	*Allowance for impairment loss*
Piutang lain-lain - lancar, neto	**184.305**	**98.672**	***Other receivables - current, net***
Piutang lain-lain - tidak lancar			***Other receivables - non-current***
Pihak berelasi			*Related party*
PT Sariarthamas Hotel International	6.430	5.954	*PT Sariarthamas Hotel International*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowance for impairment loss*
Piutang lain-lain - tidak lancar, neto	**6.430**	**5.954**	***Other receivables - non-current ,net***
Piutang lain-lain, neto	**190.735**	**104.626**	***Other receivables, net***

b. Berdasarkan umur / *b. By aging*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Belum jatuh tempo	8.702	14.458	*Current*
Lewat jatuh tempo			*Overdue*
< 1 tahun	58.962	34.071	*< 1 year*
1-2 tahun	64.543	99.665	*1-2 years*
2-3 tahun	76.400	20.015	*2-3 years*
> 3 tahun	76.546	60.839	*> 3 years*
Jumlah	**285.153**	**229.048**	***Total***
Cadangan penurunan nilai	(94.418)	(124.422)	*Allowance for impairment loss*
Neto	**190.735**	**104.626**	***Net***

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / *8. OTHER RECEIVABLES (continued)*

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The movements of the allowance for impairment loss of other receivables are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Saldo awal tahun	124.422	127.108	*Balance at beginning of year*
Penambahan tahun berjalan	5.192	565	*Additions during the year*
Pemulihan selama tahun berjalan	(35.196)	(3.251)	*Recovery during the year*
Saldo akhir tahun	**94.418**	**124.422**	***Balance at the end of year***

Piutang dari BIJB merupakan piutang atas pembayaran gaji karyawan BIJB yang dibayarkan terlebih dahulu oleh AP Indonesia dan akan ditagihkan ke BIJB.

Receivable from BIJB represent salary payment made in advance by AP Indonesia on behalf of BIJB and were subsequently billed to BIJB.

Piutang lain-lain dari pihak ketiga terutama merupakan jumlah piutang yang timbul dari pembayaran pada pegawai, jaminan, talangan, bukti potong pajak, dan transaksi lainnya di luar kegiatan utama Grup.

Other receivables from third parties mainly represent receivables amounts arising from payment to employee, deposits, temporary loan, uncollected income tax slip and other transaction outside the Group's main business.

Berdasarkan hasil penelaahan kolektibilitas akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain di atas adalah cukup.

Based on the review of the collectability of the other receivables at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment loss on other receivables is sufficient.

Jumlah piutang lain-lain dari pihak berelasi merepresentasikan 0,1% dan 0,09% dari total aset Grup masing-masing 31 Desember 2025 dan 2024.

Total other receivables due from related parties represent 0.1% and 0.09% of total assets of the Group as of As of December 31, 2025 and 2024, respectively.

9. PERSEDIAAN / *9. INVENTORIES*

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

The details of inventories are as follow:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Persediaan barang dagang	60.268	32.915	*Merchandise inventories*
Persediaan suku cadang pemeliharaan	22.898	22.724	*Maintenance spareparts inventories*
Persediaan hotel dan lounge	22.456	9.872	*Hotel and lounge inventories*
Persediaan bahan bakar	8.733	7.369	*Fuel inventories*
Persediaan alat tulis kantor dan percetakan	4.334	4.154	*Office stationery and printing inventories*
Persediaan lain-lain (dibawah Rp1 miliar)	11.357	12.571	*Other inventories (each below Rp1 billion)*
Jumlah	**130.046**	**89.605**	***Total***
Cadangan penurunan nilai	(5.187)	(4.610)	*Allowance for impairment loss*
Persediaan, neto	**124.859**	**84.995**	***Inventories, net***

9. PERSEDIAAN (lanjutan) / *9. INVENTORIES (continued)*

Persediaan barang dagang pada 31 Desember 2025 dan 2024 telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat bencana alam, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp29.367 dan Rp1.169.

Merchandise inventories as of December 31, 2025 and 2024 are insured against the risk of loss due to natural disasters, fire and other risks for a total coverage of Rp29,367 and Rp1,169, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

Management believes that the sum insured amount is adequate to cover possible losses from such risk.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Saldo awal tahun	4.610	4.140	*Balance at beginning of year*
Penambahan tahun berjalan	577	470	*Additions during the year*
Saldo akhir tahun	**5.187**	**4.610**	***Balance at the end of year***

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan di atas adalah cukup.

Based on the review at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment loss of inventories is sufficient.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaannya tidak melebihi nilai realisasi netonya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Management believes that the carrying values of its inventories do not exceed their net realizable values as of December 31, 2025 and 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat persediaan yang dijaminkan sehubungan dengan liabilitas apapun.

As of December 31, 2025 and 2024, there are no guaranteed inventories in respect of any liabilities.

10. UANG MUKA / *10. ADVANCES*

Uang muka terdiri dari:

Advances consist of:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Pembelian	78.190	147.180	*Purchases*
Ekspedisi muatan	51.808	51.808	*Freight forwarder*
Dinas dan operasional	47.550	67.697	*Service and operation*
Proyek	20.337	91.607	*Project*
Uang muka karyawan	11.419	7.373	*Advances for employees*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	22.203	2.452	*Others (each below Rp2 billion)*
Jumlah	**231.507**	**368.177**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(195)	*Allowance for impairment loss*
Neto	**231.507**	**367.922**	***Net***

Uang muka pembelian merupakan pembayaran di muka atas pembelian beras, barang retail yang menjadi objek cukai, dan barang *duty free*. Uang muka digunakan untuk pembelian barang dagangan, aset bernilai rendah, operasional dan lain-lain.

Advances for purchases represent payments in made in advance for the procurement of rice, retail goods subject to taxation, and duty free items. Advances are used for the purchase of merchandise, low value assets, operations and others.

11. BIAYA DIBAYAR DI MUKA / *11. PREPAID EXPENSES*

Rincian akun ini adalah sebagai berikut: / *The details of this account is as follow:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Asuransi	28.545	25.500	*Insurance*
Sewa	25.758	6.021	*Rent*
Umum	22.833	6.888	*General*
Pegawai	8.003	9.172	*Employee*
Lain-lain	2.514	8.398	*Others*
Jumlah	**87.653**	**55.979**	***Total***

Asuransi terutama adalah premi asuransi dibayar di muka atas aset tetap Grup (Catatan 17).

Insurance mainly represents insurance premiums paid in advance for the Group's fixed assets. (Note 17).

12. ASET KONTRAK / *12. CONTRACT ASSETS*

Aset kontrak merupakan pendapatan yang masih akan diterima dari pendapatan jasa aeronautika dan non-aeronautika, dengan rincian sebagai berikut:

The contract assets represents the revenues accrued from aeronautical and non-aeronautical services revenues, with the details as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pihak ketiga			*Third parties*
Aeronautika	38.390	50.123	*Aeronautical*
Non-aeronautika	497.566	524.939	*Non-aeronautical*
	535.956	**575.062**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(68.500)	(6.372)	*Allowance for impairment loss*
Aset kontrak - pihak ketiga, neto	**467.456**	**568.690**	***Contract Assets - third parties, net***
Pihak berelasi			*Related parties*
Aeronautika	-	37.333	*Aeronautical*
Non-aeronautika	184.009	171.157	*Non-aeronautical*
	184.009	**208.490**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.699)	(57.970)	*Allowance for impairment loss*
Aset kontrak - pihak berelasi , neto	**163.310**	**150.520**	***Contract Assets - related parties, net***
Jumlah	**630.766**	**719.210**	***Total***

Aset kontrak terkait jasa aeronautika mencakup pendapatan dari jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U), jasa *aviobridge*, *extended fee* dan jasa logistik.

Contract assets related to aeronautical services consist of revenues from Aircraft Landing, Placing and Storing Services (PJP4U), Aircraft Passenger Handling Services (PJP2U), Cargo and Post Services (PJKP2U), aviobridge services, extended fees, and logistics services

Aset kontrak terkait jasa non-aeronautika mencakup pendapatan dari jasa sewa ruang, pemakaian jasa gudang, sewa tanah, konsesi, parkir, utilitas (listrik, telepon, air), pemakaian *premium lounge* dan jasa terkait lainnya.

Contract assets related to non-aeronautical services consist of revenues from space rental, warehouse usage, land rental, concessions, parking, utilities (electricity, telephone, and water), premium lounge usage, and other related services.

12. ASET KONTRAK (lanjutan) / *12. CONTRACT ASSETS (continued)*

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Saldo awal tahun	64.342	161.410	*Balance at beginning of year*
Penambahan tahun berjalan	36.889	6.142	*Additions during the year*
Pemulihan selama tahun berjalan	(12.032)	(42.114)	*Recovery during the year*
Penghapusan tahun berjalan	-	(61.096)	*Write-off during the year*
Saldo akhir tahun	**89.199**	**64.342**	***Balance at the end of year***

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah cukup.

Based on the review at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment loss of inventories is sufficient.

13. PERPAJAKAN / *13. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

Pajak dibayar di muka terdiri dari:

Prepaid taxes consist of:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Perusahaan			*The Company*
Pajak pertambahan nilai	2.237	2.213	*Value added tax*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Pajak pertambahan nilai	110.475	118.376	*Value added tax*
Pajak penghasilan	29.752	6.379	*Income taxes*
Lainnya	9.860	10.520	*Others*
Jumlah	**152.324**	**137.488**	***Total***

b. Estimasi tagihan pajak / *b. Estimated claims for refundable tax*

Estimasi tagihan pajak terdiri dari:

Estimated claims for refundable tax consist of:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Perusahaan			*The Company*
Pajak penghasilan:			*Income taxes*
Tahun pajak 2025	6.942	-	*Fiscal year 2025*
Tahun pajak 2024	14.497	15.018	*Fiscal year 2024*
Tahun pajak 2023	-	6.200	*Fiscal year 2023*
Subjumlah	21.439	21.218	*Subtotal*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pajak penghasilan	1.294.536	1.183.350	*Income taxes*
Pajak pertambahan nilai	83.010	76.105	*Value added tax*
Subjumlah	1.377.546	1.259.455	*Subtotal*
Jumlah	**1.398.985**	**1.280.673**	***Total***

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATION (continued)*

c. Utang pajak / *c. Taxes payable*

Utang pajak terdiri dari: / *Taxes payable consist of:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Perusahaan			*The Company*
Pajak pertambahan nilai	4.795	12.232	*Value added tax*
Pasal 4 (2)	34	2	*Article 4 (2)*
Pasal 21	-	29.247	*Article 21*
Pasal 23	421	153	*Article 23*
Pasal 26	5.349	-	*Article 26*
Lainnya	3	1	*Others*
Subjumlah	10.602	41.635	*Subtotal*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pajak pertambahan nilai	190.078	175.654	*Value added tax*
Pasal 4 (2)	45.224	35.219	*Article 4 (2)*
Pasal 15	-	3	*Article 15*
Pasal 21	43.933	97.334	*Article 21*
Pasal 23	28.520	39.346	*Article 23*
Pasal 25	2.571	3.318	*Article 25*
Pasal 26	24.749	17.505	*Article 26*
Pasal 22	1.003	1.116	*Article 22*
Pasal 29	70.135	163.855	*Article 29*
Lainnya	239.528	37.066	*Others*
Subjumlah	645.741	570.416	*Subtotal*
Jumlah	**656.343**	**612.051**	***Total***

d. (Beban) manfaat pajak penghasilan / *d. Income tax (expense) benefit*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pajak kini			***Current tax***
Perusahaan	(688)	-	*The Company*
Entitas anak	(306.426)	(252.498)	*Subsidiaries*
Subjumlah	(307.114)	(252.498)	*Subtotal*
Pajak tangguhan			***Deferred tax***
Perusahaan	3.092	(31.740)	*The Company*
Entitas anak	(383.717)	(1.729.659)	*Subsidiaries*
Subjumlah	(380.625)	(1.761.399)	*Subtotal*
Jumlah	**(687.739)**	**(2.013.897)**	***Total***

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATION (continued)*

e. Taksiran pajak penghasilan / *e. Estimation for income tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran laba (rugi) fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before corporate income tax, as shown in the consolidated statement of comprehensive income, and estimated taxable income (loss) of the Company is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	**7.600.932**	**4.583.523**	*Profit before corporate income tax in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi: laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan badan dan efek eliminasi	(7.070.011)	(4.009.181)	*Less: profit of subsidiaries before corporate income tax expense and elimination effect*
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan badan	**530.921**	**574.342**	***The Company's profit before corporate income tax***
Beban (penghasilan) yang pajaknya bersifat final			*Expense (income) already subjected to final tax*
Penghasilan bunga	(8.851)	(10.246)	*Interest income*
Pajak final pendapatan bunga	1.768	1.988	*Final tax on interest income*
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan badan setelah beban (penghasilan) yang pajaknya bersifat final	**523.840**	**566.084**	***Profit before corporate income tax after expenses (incomes) subjected to final tax attributable to the Company***
Ditambah (dikurangi):			*Add (deduct):*
Beda temporer			*Temporary differences*
Aset hak-guna	-	834	*Right-of-use asset*
Subjumlah	**-**	**834**	***Subtotal***
Beda tetap			*Permanent differences*
Pendapatan dividen	(855.897)	(778.339)	*Dividend income*
Beban yang tidak dapat dikurangkan:			*Non-deductible expenses:*
Beban pegawai	48.847	30.371	*Employee expense*
Beban umum	132.010	106.367	*General expenses*
Biaya bersama	106.458	-	*Joint costs*
Keuntungan pelepasan saham entitas anak	-	140.557	*Gain from transferred of investment in subsidiaries*
Lain-lain	-	42	*Others*
Subjumlah	**(568.582)**	**(501.002)**	***Subtotal***
Taksiran laba (rugi) fiskal Perusahaan	**(44.742)**	**65.916**	***Estimated taxable income (loss) of the Company***

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATION (continued)*

e. Taksiran pajak penghasilan (lanjutan) / *e. Estimation for income tax (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran laba (rugi) fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The reconciliation between profit before corporate income tax, as shown in the consolidated statement of comprehensive income, and estimated taxable income (loss) of the Company is as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Penggunaan rugi pajak tahun sebelumnya			*Utilization of prior period tax losses*
Tahun fiskal 2022	-	13.763	*Fiscal Year 2022*
Tahun fiskal 2021	-	38.880	*Fiscal Year 2021*
Tahun fiskal 2020	-	4.296	*Fiscal Year 2019*
Tahun fiskal 2019	-	8.977	*Fiscal Year 2019*
Laba pajak setelah penggunaan rugi pajak tahun sebelumnya	**-**	**-**	***Tax profit after utilization of prior period tax loss***
Beban pajak penghasilan badan	**-**	**-**	***Corporate income tax expense***
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			***Less prepayments of income tax***
Pasal 23	6.942	15.018	*Article 23*
Jumlah pajak dibayar di muka	6.942	15.018	*Total prepaid taxes*
Estimasi tagihan pajak (Catatan 13b)	**6.942**	**15.018**	***Estimated claim for tax (Note 13b)***

SPT pajak penghasilan badan tahun 2025 akan dilaporkan sesuai dengan perhitungan pajak di atas.

2025's corporate income tax will be reported based on the computation above.

Akumulasi rugi pajak:

Tax losses carried forward:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Tahun pajak 2025	44.742	-	*Fiscal year 2025*
Tahun pajak 2023	41.016	158.107	*Fiscal year 2023*
Tahun pajak 2022	29.062	39.060	*Fiscal year 2022*
Jumlah	**247.912**	**197.167**	***Total***

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATION (continued)*

e. Taksiran pajak penghasilan (lanjutan) / *e. Provision for income tax (continued)*

Akumulasi rugi pajak: (lanjutan) / *Tax losses carried forward: (continued)*

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Grup menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Based on the applied Taxation Laws in Indonesia, entities within the Group calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

Rekonsiliasi antara hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan badan dengan tarif pajak yang berlaku dan beban pajak penghasilan sebagai berikut:

The reconciliation between the result of the multiplication of accounting income before corporate income tax with the current tax rate and income tax expense is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	**7.600.932**	**4.583.523**	***Profit before corporate income tax in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income***
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku	1.672.205	1.008.374	*Income tax expense based on applicable tax rate*
Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak	(153.114)	(292.214)	*Non-taxable income*
Beban (pendapatan) tidak dapat dikurangkan	(564.269)	523.226	*Non-deductible expenses (income)*
Hasil ketetapan pajak	5.334	25.186	*Tax assessment result*
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(598.675)	(924.389)	*Income subject to final tax*
Pajak tangguhan dari rugi fiskal yang tidak diakui	(9.588)	(86.816)	*Unrecognized deferred tax from tax loss*
Rugi fiskal yang tidak dapat dimanfaatkan	104.667	1.387.507	*Unutilized fiscal loss*
Penyesuaian	231.179	373.023	*Adjustments*
Beban pajak penghasilan	**687.739**	**2.013.897**	***Income tax expense***

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATION (continued)*

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan / *f. Deferred tax assets (liabilities)*

Perhitungan manfaat (beban) pajak dan aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The computation of deferred income tax benefit (expense) and deferred tax assets is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/ *Year ended December 31, 2025*					
	1 Januari 2025/ *January 1, 2025*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dikreditkan ke ekuitas/ *Credited to equity*	Penyesuaian/ *Adjustment*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	
Liabilitas pajak tangguhan						***Deferred tax liabilities***
Perusahaan:						*The Company:*
Sewa aset hak-guna	(3.092)	-	-	3.092	-	*Right-of-use asset lease*
Subjumlah	**(3.092)**	**-**	**-**	**3.092**	**-**	***Subtotal***
Entitas anak:						*The Subsidiaries:*
Liabilitas imbalan kerja	475.327	52.257	(6.597)	-	520.987	*Employee benefits liability*
Penyusutan aset tetap	(2.087.064)	(146.754)	-	(3.019)	(2.236.837)	*Depreciation of fixed assets*
Penyisihan penurunan nilai aset tetap	22.054	66.940	(9.932)	-	79.062	*Allowance for impairment loss of fixed assets*
Provisi penurunan nilai aset keuangan	434.381	(6.373)	-	(137)	427.871	*Allowance for impairment loss of financial assets*
Bonus dan tantiem	69.576	117.460	-	(2.671)	184.365	*Bonus and tantiem*
Sewa aset hak-guna	54.284	(18.793)	-	(6.476)	29.015	*Right-of-use asset lease*
Rugi fiskal	597.426	(564.012)	-	(33.414)	-	*Tax loss*
Subjumlah	**(434.016)**	**(499.275)**	**(16.529)**	**(45.717)**	**(995.537)**	***Subtotal***
Jumlah	**(437.108)**	**(499.275)**	**(16.529)**	**(45.717)**	**(995.537)**	***Total***
Aset pajak tangguhan						***Deferred tax assets***
Entitas anak:						*Subsidiaries:*
Rugi fiskal	79.581	109.738	-	1.845	191.164	*Tax loss*
Provisi penurunan nilai aset keuangan	319.959	(63.122)	(2)	(49.972)	206.863	*Allowance for impairment loss of financial assets*
Liabilitas imbalan kerja	99.049	5.657	2.734	(2.055)	105.385	*Employee benefits liability*
Sewa aset hak-guna	70.711	4.041	(3.200)	(75.521)	(3.969)	*Right-of-use asset lease*
Bonus dan tantiem	14.247	9.707		(531)	23.423	*Bonus and tantiem*
Penyisihan penurunan nilai aset tetap	(23.560)	1.930	-	26.696	5.066	*Allowance for impairment loss of fixed assets*
Penyusutan aset tetap	70.428	21.562	(987)	51.923	142.926	*Depreciation of fixed assets*
Lain-lain	16.292	4.192	-	(10.389)	10.095	*Others*
Jumlah	**646.707**	**93.705**	**(1.455)**	**(58.004)**	**680.953**	***Total***

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATION (continued)*

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan) / *f. Deferred tax assets (liabilities) (continued)*

Perhitungan manfaat (beban) pajak dan aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The computation of deferred income tax benefit (expense) and deferred tax assets is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/ *Year ended December 31, 2024*					
	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dikreditkan ke ekuitas/ *Credited to equity*	Penyesuaian/ *Adjustment*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Liabilitas pajak tangguhan						***Deferred tax liabilities***
Perusahaan:						*The Company:*
Liabilitas imbalan kerja	861	-	(4)	(857)	-	*Employee benefits liability*
Penyisihan penurunan nilai aset tetap	982	-	-	(982)	-	*Allowance for impairment loss of fixed assets*
Provisi penurunan nilai aset keuangan	1.731	-	-	(1.731)	-	*Allowance for impairment loss of financial assets*
Bonus dan tantiem	27.374	-	-	(27.374)	-	*Bonus and tantiem*
Sewa aset hak-guna	(4.857)	1.581		184	(3.092)	*Right-of-use asset lease*
Lain-lain	2.561	-	-	(2.561)	-	*Others*
Subjumlah	**28.652**	**1.581**	**(4)**	**(33.321)**	**(3.092)**	***Subtotal***
Entitas anak:						*The Subsidiaries:*
Liabilitas imbalan kerja	459.969	(688)	16.046	-	475.327	*Employee benefits liability*
Penyusutan aset tetap	(1.894.531)	(192.533)	-	-	(2.087.064)	*Depreciation of fixed assets*
Penyisihan penurunan nilai aset tetap	10.569	11.485	-	-	22.054	*Allowance for impairment loss of fixed assets*
Provisi penurunan nilai aset keuangan	465.739	(31.358)	-	-	434.381	*Allowance for impairment loss of financial assets*
Bonus dan tantiem	48.060	21.516	-	-	69.576	*Bonus and tantiem*
Sewa aset hak-guna	45.127	9.157	-	-	54.284	*Right-of-use asset lease*
Rugi fiskal	2.637.639	(251.707)	(409.780)	(1.378.725)	597.426	*Tax loss*
Lain-lain	(212)	212	-	-	-	*Others*
Subjumlah	**1.772.360**	**(433.916)**	**(393.734)**	**(1.378.725)**	**(434.016)**	***Subtotal***
Jumlah	**1.801.012**	**(432.335)**	**(393.738)**	**(1.435.728)**	**(437.108)**	***Total***
Aset pajak tangguhan						***Deferred tax assets***
Entitas anak:						*Subsidiaries:*
Rugi fiskal	85.620	(7.021)	-	982	79.581	*Tax loss*
Provisi penurunan nilai aset keuangan	230.374	28.590	-	60.995	319.959	*Allowance for impairment loss of financial assets*
Liabilitas imbalan kerja	93.814	673	(2.594)	7.156	99.049	*Employee benefits liability*
Sewa aset hak-guna	3.275	25.817	-	41.619	70.711	*Right-of-use asset lease*
Bonus dan tantiem	(48.060)	(18.939)	-	81.246	14.247	*Bonus and tantiem*
Gaji, upah dan bonus	59.306	-	-	(59.306)	-	*Salaries, wages and bonus*
Penyisihan penurunan nilai FFaset tetap	5.494	(21.056)	-	(7.998)	(23.560)	*Allowance for impairment loss of fixed assets*
Penyusutan aset tetap	73.038	(1.707)	-	(903)	70.428	*Depreciation of fixed assets*
Lain-lain	13.762	(2.905)	-	5.435	16.292	*Others*
Jumlah	**516.623**	**3.452**	**(2.594)**	**129.226**	**646.707**	***Total***

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATION (continued)*

g. Kontribusi Pendapatan Pajak dan PNBP / *g. Contribution of Tax and Non Tax Revenue*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kontribusi Grup terhadap pendapatan negara dari pembayaran pajak, pemungutan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (basis kas) adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the Group's contribution to State income from tax revenue, Witholding Tax and Non Tax Revenue (PNBP) (cash basis) are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pajak			***Tax***
PPh	1.937.705	1.715.600	*Income tax*
PPN & PPnBM	1.927.202	1.901.205	*VAT & LST*
Pajak pemerintah pusat lainnya dan pajak daerah	697.108	767.087	*Other central government taxes and regional taxes*
PNBP			***PNBP***
Dividen	-	101.000	*Dividend*
PNBP lainnya	277.392	855.943	*Other PNBP*
Jumlah kontribusi pembayaran pajak dan PNBP	**4.839.407**	**5.340.835**	***Total contribution of tax and non tax revenue***

14. INVESTASI JANGKA PANJANG / *14. LONG-TERM INVESTMENTS*

Rincian investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

The details of long-term investments are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Penyertaan Saham :			*Investment in Shares:*
PT Peninsula Bali Resort	28.500	28.500	*PT Peninsula Bali Resort*
PT Sinergi Colomadu	8.600	8.600	*PT Sinergi Colomadu*
PT Jasamarga Bali Tol	7.454	7.454	*PT Jasamarga Bali Tol*
PT Purantara Mitra Angkasa Dua	5.253	5.253	*PT Purantara Mitra Angkasa Dua*
PT Garuda Adhimatra Indonesia	4.500	4.500	*PT Garuda Adhimatra Indonesia*
PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara	2.285	2.285	*PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara*
PT Manajemen CBT Nusantara	500	500	*PT Manajemen CBT Nusantara*
	57.092	**57.092**	
Perubahan nilai wajar investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain	25.572	20.530	*Changes in the fair value of equity investments measured at fair value through other comprehensive*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.785)	(2.785)	*Allowances for impairment loss*
Jumlah	**79.879**	**74.837**	***Total***

14. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Peninsula Bali Resort ("PNBR")

ITDC mempunyai penyertaan pada saham PNBR yang telah disetujui oleh pemegang saham melalui surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. S-417/MBU/2003 tanggal 10 September 2003 tentang Perjanjian Kerjasama antara ITDC dengan PT Penta Adi Samudera. Pada tahun 2011, PT Peninsula Indonesia Resort mengalami perubahan susunan pemegang saham akibat peningkatan modal dasar sesuai akta Notaris Fifi Wangsadiputra, S.H., No. 15 tanggal 11 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PNBR dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-24130.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011. Hotel telah beroperasi pada tahun 2011. ITDC memiliki kepemilikan saham di PNBR sebesar 16,76%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Doli Siregar & Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 17 Maret 2026 dan 26 Februari 2025.

Nilai wajar investasi saham di PNBR pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp50.170 dan Rp41.344.

PT Garuda Adhimatra Indonesia ("GAIN")

ITDC mempunyai penyertaan saham pada GAIN dalam rangka pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana ("GWK") telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui Surat Menteri Keuangan No. S-649/MK.016/1996 tanggal 26 November 1996 tentang Persetujuan Penyertaan dan Pemberian Pinjaman ITDC kepada PT Garuda Adhimarta Indonesia dan Perjanjian antara PT Nyoman Nuarta Enterprise dan ITDC tanggal 29 November 2004 tentang penyertaan saham ITDC pada PT Garuda Adhimarta Indonesia.

ITDC memiliki kepemilikan saham di GAIN sebesar 9,71%.

Nilai wajar investasi saham di GAIN pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp27.977 dan Rp25.016.

PT Sinergi Colomadu

PT Sinergi Colomadu adalah badan usaha hasil kerjasama antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk dan TWC. Badan usaha ini bergerak dalam bidang jasa komersial area. TWC memiliki kepemilikan saham pada PT Sinergi Colomadu dengan persentase sebesar 0,79%.

14. LONG-TERM INVESTMENTS (continued)

PT Peninsula Bali Resort ("PNBR")

ITDC has an investment in share of PNBR that was approved by the shareholders through the letter of the Ministry of State Owned Enterprises No. S-417/MBU/2003 dated September 10, 2003 regarding the Cooperation Agreement between the ITDC and PT Penta Adi Samudera. In 2011, PT Peninsula Indonesia Resort changed its shareholders' structure due to the increase of authorized capital based on notarial deed of Fifi Wangsadiputra, S.H., No. 15 dated January 11, 2011 on PNBR Meeting Decision Statement and has been approved by the minister of Law and Human Right No. AHU-24130.AH.01.02 Year 2011 dated May 12, 2011. The Hotel has been operating since 2011. ITDC has total investment in PNBR of 16.76% ownership.

As of December 31, 2025 and 2024, the investment's fair values are based on valuations performed by KJPP Doli Siregar & Partners, an independent appraiser registered with OJK, in their reports dated March 17, 2026 and February 26, 2025, respectively.

The fair value of investment in PNBR as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp50,170 and Rp41,344, respectively.

PT Garuda Adhimatra Indonesia ("GAIN")

ITDC has an investment in share of GAIN for the construction of Garuda Wisnu Kencana ("GWK") statue that has been approved by the shareholders through Letter of the Minister of Finance No. S-649/MK.016/1996 dated November 26, 1996 regarding Approval of Participation and Lending of ITDC to PT Garuda Adhimarta Indoneisa and an agreement between PT Nyoman Nuarta Enterprise and ITDC dated November 29, 2004 related to the ITDC Investment in shares of PT Garuda Adhimarta Indonesia.

ITDC has total investment in GAIN of 9.71% ownership.

The fair value of investment in GAIN as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp27,977 and Rp25,016, respectively.

PT Sinergi Colomadu

PT Sinergi Colomadu is a joint venture company between PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk and TWC. This business entity is engaged in commercial area services. TWC owns shares in PT Sinergi Colomadu with a percentage of 0.79%.

14. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Sinergi Colomadu (lanjutan)

Nilai wajar investasi saham di PT Sinergi Colomadu pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp236 dan Rp632.

PT Purantara Mitra Angkasa Dua ("PMAD")

Kepemilikan AP Indonesia (dahulu AP II) di PMAD sebesar 0,11% merupakan kompensasi sewa tanah selama periode 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan sesuai dengan perjanjian sewa tanah tanggal 1 Mei 2000 yang kemudian di addendum melalui surat perjanjian tambahan (addendum) I tanggal 15 April 2002.

Nilai wajar investasi saham di PMAD pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp179 dan Rp5.253.

PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara ("PPSU")

Investasi saham pada PPSU ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai surat No. S/114/M K.013/1991 tanggal 24 Januari 1991. Investasi saham HIN pada PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU) dengan kepemilikan sebesar 8,26%, berdasarkan Akta No. 23 tanggal 24 November 2008 Notaris Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H., PPSU sudah tidak menjalankan kegiatan operasinya.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai permanen akibat tidak beroperasinya PPSU.

PT Manajemen CBT Nusantara ("MCN")

HIN mencatat investasi saham pada MCN ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sesuai surat No.SR-796/MRU/11/2018 tanggal 30 November 2018. Investasi saham pada MCN dengan kepemilikan sebesar 8,33% dengan penyetoran saham yaitu sebesar Rp402.

INU mempunyai penyertaan saham pada MCN sesuai dengan Akta Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., No. 34 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas MCN dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005057.AH.01.01 Tahun 2019. MCN telah beroperasi pada bulan Maret 2019.

14. LONG-TERM INVESTMENTS (continued)

PT Sinergi Colomadu (continued)

The fair value of investment in PT Sinergi Colomadu as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp236 and Rp632, respectively.

PT Purantara Mitra Angkasa Dua ("PMAD")

AP Indonesia (formerly AP II)'s ownership in PMAD amounting to 0.11% represents a land lease compensation for 11 (eleven) years and 3 (three) months in accordance with the land lease agreement dated May 1, 2000 which has been amended by letter of additional agreement (addendum) I dated April 15, 2002.

The fair value of investment in PMAD as of December 31, 2025 and 2024 is Rp179 and Rp5,253, respectively.

PT Pembangunan Pariwisata Sulawesi Utara ("PPSU")

This share investment in PPSU has received approval from the Minister of Finance in accordance with letter No. S/114/M K.013/1991 dated January 24, 1991. Investment in shares HIN in PT Pembangunan Wisata North Sulawesi (PPSU) with ownership of 8.26%, based on Deed No. 23 dated November 24, 2008 Notary Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H, PPSU is no longer operating.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that may arise from permanent impairment due to PPSU not operating.

PT Manajemen CBT Nusantara ("MCN")

HIN recorded this investment in shares in MCN has received approval from the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia in accordance with letter No. SR-796/MRU/11/2018 dated November 30, 2018. Investment in shares in MCN with ownership of 8.33% with a share deposit of Rp402.

INU has an investment in share of PT Manajemen CBT Nusantara based on Notarial Deed of Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., No. 34 dated December 31, 2018 on the Establishment of Limited Liability Company of MCN and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU- 0005057.AH.01.01 Year 2019. MCN has been operating since March 2019.

14. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Jasamarga Bali Tol ("JBT")

ITDC mempunyai penyertaan saham pada JBT sesuai dengan Akta Notaris Paulina S. Endah Putri, S.H., nomor 02 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas JBT dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-57740.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 serta Akta Notaris Paulina S. Endah Putri, S.H., No. 01 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Perjanjian Usaha Patungan.

ITDC memiliki kepemilikan investasi di JBT sebesar 0,79%.

Nilai wajar investasi saham di JBT pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp970 dan Rp2.592.

14. LONG-TERM INVESTMENTS (continued)

PT Jasamarga Bali Tol ("JBT")

ITDC has an investment in share of JBT accordance with the Notarial Deed of Paulina S. Endah Putri, S.H., number 02 dated August 22, 2011, regarding the establishment of the Limited Liability Company JBT. This has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-57740.AH.01.01 of 2011 dated November 25, 2011, as well as the Notarial Deed of Paulina S. Endah Putri, S.H., No. 01 dated August 22, 2011, concerning the Joint Venture Agreement.

ITDC has total investment in JBT of 0.79% ownership.

The balance of investment in JBT as of December 31, 2025 and 2024 is Rp970 and Rp2,592, respectively.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE

The details of investment in associates and joint venture are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Entitas asosiasi	5.922.765	264.720	*Associates*
Ventura bersama	478.459	312.106	*Joint Ventures*
Subjumlah	**6.401.224**	**576.826**	***Subtotal***
Uang muka penyertaan saham	13.000	-	*Advances in shares of stocks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(184.076)	-	*Allowance for impairment loss*
Jumlah	**6.230.148**	**576.826**	***Total***

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

Berikut adalah rincian mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura:

The details of investment in associates and joint venture movements are as follows:

31 Desember/*December 31,* 2025

	Persentase Kepemilikan/ *Percentage*	Biaya perolehan/ *Acquisiton cost*	Nilai tercatat awal tahun/ *Carrying value at beginning of the year*	Penambahan investasi periode berjalan/ *Additional*	Penerimaan dividen periode berjalan/ *Dividen investment for the period*	Bagian laba (rugi)/ *Share of profit (loss) received for the year*	Bagian penghasilan komprehensif lain *Share of other comprehensive income*	Selisih Transaksi Kombinasi Bisnis *Entitas* Sepengendali/ *Difference in the Value of Business Combination Under Common Control*	Nilai tercatat akhir periode/ *Carrying value at end of the period*	
Metode Ekuitas										***Equity Method***
Entitas Asosiasi										***Associates***
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.	68,40%	-	-	5.664.912	-	-	-	-	5.664.912	*PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.*
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda)	19,51%	385.000	193.929	-	-	(22.853)	-	-	171.076	*PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda)*
PT Railink	40,00%	335.760	64.216	-	-	17.322	(2)	-	81.536	*PT Railink*
PT Jasamarga Bali Tol	6,31%	59.635	6.575	-	-	(1.272)	(62)	-	5.241	*PT Jasamarga Bali Tol*
PT Wijaya Karya Realty	22,57%	1.755.999	-	-	-	-	-	-	-	*PT Wijaya Karya Realty*
PT Sariarthamas Hotel Internasional	50,00%	63.810	-	-	-	-	-	-	-	*PT Sariarthamas Hotel International*
PT Sarinah Dufry Indonesia	40,00%	12.000	-	-	-	-	-	-	-	*PT Sarinah Dufry Indonesia*
Ventura Bersama										***Joint Venture***
PT Bandara International Batam	56,09%	296.524	312.106	148.920	(13.778)	26.393	-	-	473.641	*PT Bandara International Batam*
KSO Nindya Karya - IASP	40,00%	4.060	-	4.060	-	758	-	-	4.818	*KSO Nindya Karya - IASP*
Subjumlah		**2.912.788**	**576.826**	**5.817.892**	**(13.778)**	**20.348**	**(64)**	**-**	**6.401.224**	***Subtotal***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		**-**	**-**	**(171.076)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(171.076)**	***Allowance for impairment loss***
Neto		**2.908.728**	**576.826**	**5.646.816**	**(13.778)**	**20.348**	**(64)**	**-**	**6.230.148**	***Net***

31 Desember/*December 31,* 2024

	Persentase Kepemilikan/ *Percentage*	Biaya perolehan/ *Acquisiton cost*	Nilai tercatat awal tahun/ *Carrying value at beginning of the year*	Penambahan investasi periode berjalan/ *Additional*	Penerimaan dividen periode berjalan/ *Dividen investment for the period*	Bagian laba (rugi)/ *Share of profit (loss) received for the year*	Bagian penghasilan komprehensif lain *Share of other comprehensive income*	Selisih Transaksi Kombinasi Bisnis *Entitas* Sepengendali/ *Difference in the Value of Business Combination Under Common Control*	Nilai tercatat akhir periode/ *Carrying value at end of the period*	
Metode Ekuitas										***Equity Method***
Entitas Asosiasi										***Associates***
PT Wijaya Karya Realty	22,57%	1.755.999	1.236.134	(1.248.335)	-	(12.201)	-	-	-	*PT Wijaya Karya Realty*
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda)	19,51%	385.000	248.177	(4.434)	-	(30.000)	-	-	193.929	*PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda)*
PT Railink	40,00%	335.760	54.979	-	-	6.702	-	-	64.216	*PT Railink*
PT Sariarthamas Hotel Internasional	50,00%	63.810	26.967	(26.967)	-	(10.096)	-	-		*PT Sariarthamas Hotel International*
PT Jasamarga Bali Tol	6,31%	59.635	6.588	(2.005)	-	(4.700)	-	-	6.575	*PT Jasamarga Bali Tol*
PT Sarinah Dufry Indonesia	40,00%	12.000	3.097	(3.097)	-	(7.361)	-	-	-	*PT Sarinah Dufry Indonesia*
Ventura Bersama										***Joint Venture***
PT Bandara International Batam	51,00%	296.524	292.776	20.073	-	17.000	-	-	312.106	*PT Bandara International Batam*
Subjumlah		**2.908.728**	**1.868.718**	**(1.264.765)**	**-**	**(16.254)**	**-**	**-**	**576.826**	***Subtotal***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		**-**	**(26.157)**	**26.157**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***Impairment loss***
Neto		**2.908.728**	**1.842.561**	**(1.238.608)**	**-**	**(16.254)**	**-**	**-**	**576.826**	***Net***

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi dan ventura bersama di atas adalah sebagai berikut:

Summary of financial information of associates and joint venture above are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2025			
	Jumlah Aset/ *Total Assets*	**Jumlah Liabilitas/ *Total Liabilities***	**Laba (Rugi) Neto/*Net Profit (Loss)***	
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.	13.803.001	11.572.702	539.347	*PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.*
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda)	2.748.059	1.985.362	(117.134)	*PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda)*
PT Jasamarga Bali Tol	1.890.367	1.773.040	(20.158)	*PT Jasamarga Bali Tol*
PT Bandara Internasional Batam	976.702	129.345	47.055	*PT Bandara Internasional Batam*
PT Railink	536.547	280.001	43.305	*PT Railink*
KSO Nindya Karya - IASP	22.935	21.039	1.896	*KSO Nindya Karya - IASP*
Jumlah	**19.977.611**	**15.761.489**	**494.311**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Jumlah Aset/ *Total Assets*	**Jumlah Liabilitas/ *Total Liabilities***	**Laba (Rugi) Neto/*Net Profit (Loss)***	
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda)	2.804.769	1.983.698	(437.391)	*PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda)*
PT Jasamarga Bali Tol	1.893.224	1.75.743	(637)	*PT Jasamarga Bali Tol*
PT Bandara Internasional Batam	797.075	185.102	37.654	*PT Bandara Internasional Batam*
PT Railink	434.921	224.106	22.579	*PT Railink*
PT Sarinah Dufry Indonesia	24.990	20.775	(9.000)	*PT Sarinah Dufry Indonesia*
Jumlah	**5.954.979**	**2.489.425**	**(386.795)**	***Total***

PT Wijaya Karya Realty ("WIKA-R")

Investasi saham pada WIKA-R berdasarkan Akta Notaris No.189 tanggal 30 September 2021 dari Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHUAH.01.03-0460507 tanggal 13 Oktober 2021, sehubungan dengan penyerahan inbreng saham PT Hotel Indonesia Properti. HIN berhak menerima dari WIKA-R hak atas kepemilikan sebanyak 16.566.614.132 lembar saham, dengan harga perolehan sebesar Rp1.755.999, sehingga persentase kepemilikan saham HIN menjadi 22,57%.

Pada tanggal 19 Desember 2024, kepemilikan saham HIN di WIKA-R telah ditukar dengan kepemilikan 50,99% saham di HIPRO sehingga HIN tidak memiliki lagi kepemilikan saham di WIKA-R.

PT Wijaya Karya Realty ("WIKA-R")

Investment in shares in WIKA-R based on Notarial Deed No.189 dated September 30, 2021 of Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has been approved and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Indonesia by Decree No.AHUAH.01.03-0460507 dated October 13, 2021, in connection with the transfer of shares in PT Hotel Indonesia Properti. HIN is entitled to receive from WIKA-R the ownership rights of 16,566,614,132 shares, with acquisition cost of Rp1,755,999, so that the percentage of HIN share ownership becomes 22.57%.

On December 19, 2024, HIN's ownership of shares in WIKA-R has been converted with a 50.99% ownership of shares in HIPRO, therefore HIN no longer has any ownership of shares in WIKA-R.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) ("BIJB")

BIJB merupakan perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengusahaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat, serta membangun dan mengembangkan Kertajati *Aerocity*.

Pada tanggal 22 Januari 2018, AP Indonesia (dahulu AP II), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan BIJB menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Jawa Barat, di mana para pihak sepakat menunjuk AP Indonesia (dahulu AP II) sebagai operator untuk melaksanakan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. S-668/MBU/09/2019 tanggal 30 September 2019, telah disetujui untuk melakukan pembelian saham BIJB oleh AP Indonesia (dahulu AP II) sejumlah 625.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp625.000 yang dilakukan secara bertahap selama tiga tahun, yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021. AP Indonesia (dahulu AP II) dan para pemegang saham telah menyepakati perubahan jangka waktu penyertaan saham BIJB menjadi tujuh tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, sesuai dengan addendum perubahan Perjanjian Para Pemegang Saham terkait kepemilikan saham di BIJB tanggal 22 Oktober 2021 dan perubahan Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat tanggal 22 Oktober 2021.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BIJB yang telah diaktakan dengan akta notaris Surjadi Jasin, S.H., No. 23 pada tanggal 26 September 2019, AP Indonesia (dahulu AP II) memiliki penyertaan saham di BIJB sebesar Rp100.000 atau 6,01% kepemilikan. AP Indonesia (dahulu AP II) telah melakukan pembayaran kepemilikan saham tersebut secara bertahap yaitu sebesar Rp32.000 pada tanggal 7 Oktober 2019 dan Rp68.000 pada tanggal 23 Oktober 2019.

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) ("BIJB")

BIJB is a company tasked with operating the West Java International Airport, as well as building and developing Kertajati Aerocity.

On January 22, 2018, AP Indonesia (formerly AP II), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) and BIJB signed a Cooperation Agreement on Airport Service Provision at West Java International Airport, whereby the parties agreed to appoint AP Indonesia (formerly AP II) as operator to carry out the service airport, including the operation and maintenance of West Java International Airport in Kertajati Sub-district.

Based on Decision Letter from Ministry of BUMN No. S-668/MBU/09/2019 dated September 30, 2019, it was approved to purchase share in BIJB a total of 625,000 shares with a value of Rp625,000 which will be done in stages over three years in 2019, 2020 and 2021. AP Indonesia (formerly AP II) and the stakeholders have agreed on a change in the period of participation of BIJB shares to seven years, from 2019 to 2025, in accordance with the addendum of changes to the Shareholders' Agreement related to share ownership in BIJB dated October 22, 2021 and the change of Share Subscription Agreement dated October 22, 2021.

Based on Circular Shareholders' Decision of BIJB which has been notarized by notarial deed of Surjadi Jasin, S.H., No. 23 dated September 26, 2019, AP Indonesia (formerly AP II) owned investment in shares in BIJB amounted to Rp100,000 or 6.01% ownership. AP Indonesia (formerly AP II) has made payments on the investments in stages of Rp32,000 on October 7, 2019 and Rp68,000 on October 23, 2019.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) ("BIJB") (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin, S.H No. 27 Tanggal 29 September 2021, Pemegang Saham menyetujui pengeluaran/penempatan saham sebesar 99.968 lembar yang masing-masing bernilai Rp1 juta (nilai penuh) dengan jumlah Rp99.968 yang seluruhnya diambil oleh Pemprov Jabar sehingga persentase kepemilikan saham AP Indonesia (dahulu AP II) terdilusi menjadi 14,62%.

Berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin, S.H No. 10 Tanggal 29 Desember 2021, Pemegang Saham menyetujui pengeluaran/penempatan saham sebesar 50.000 lembar yang masing-masing bernilai Rp1 juta (nilai penuh) dengan jumlah Rp50.000 yang seluruhnya diambil oleh AP Indonesia (dahulu AP II) sehingga persentase kepemilikan saham AP Indonesia (dahulu AP II) menjadi 16,76%.

Berdasarkan Akta Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn No. 30 Tanggal 27 Desember 2023, Pemegang Saham menyetujui pengeluaran/penempatan saham AP Indonesia (dahulu AP II) sebesar 50.000 lembar yang masing-masing bernilai Rp1 juta (nilai penuh) dengan jumlah Rp50.000 yang seluruhnya diambil oleh AP Indonesia (dahulu AP II) sehingga persentase kepemilikan saham AP Indonesia (dahulu AP II) menjadi 18,79%.

AP Indonesia (dahulu AP II) dan para pemegang saham telah menyepakati perubahan jangka waktu penyertaan saham BIJB menjadi tujuh tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2026, sesuai dengan addendum kedua perubahan Perjanjian Para Pemegang Saham terkait kepemilikan saham di BIJB tanggal 29 Februari 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BIJB yang telah diaktakan dengan akta notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn No. 43 pada tanggal 30 September 2024, AP Indonesia (dahulu AP II) menambah penyertaan saham di BIJB sebesar Rp31.000 sehingga meningkatkan persentase kepemilikan menjadi 19,51%. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas penambahan kepemilikan saham tersebut pada tanggal 13 Februari 2024.

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) ("BIJB") (continued)

Based on Notarial Deed of Surjadi Jasin, S.H, No. 27 dated September 29, 2021, the Shareholders approved the issuance or placement of 99,968 shares with a par value of Rp1 million (full amount) with total value of Rp99,968, which all were acquired by Pemprov Jabar and made AP Indonesia (formerly AP II)'s percentage of ownership decreased into 14.62%.

Based on Notarial Deed of Surjadi Jasin, S.H, No. 10 dated December 29, 2021, the Shareholders approved the issuance or placement of 50,000 shares with a par value of Rp1 million (full amount) with total value of Rp50,000, which all were acquired by AP Indonesia (formerly AP II) and made AP Indonesia (formerly AP II)'s percentage of ownership into 16.76%.

Based on Notarial Deed of Yanti Yulianti, S.H, M.Kn No. 30 dated December 27, 2023, the Shareholders approved the issuance or placement of 50,000 shares with a par value of Rp1 million (full amount) with total value of Rp50,000, which all were acquired by AP Indonesia (formerly AP II) and made AP Indonesia (formerly AP II)'s percentage of ownership into 18.79%.

AP Indonesia (formerly AP II) and the shareholders have agreed to change the term of the BIJB shareholding to seven years, from 2019 to 2026, in accordance with the second addendum to the Shareholders Agreement regarding the share ownership in BIJB, dated February 29, 2024.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders of BIJB which has been notarized by notarial deed of Yanti Yulianti, S.H., M.Kn No. 43 dated September 30, 2024, AP Indonesia (formerly AP II) made additional investment of Rp31,000 which increased their percentage ownership to 19.51%. The Company has fully paid the additional investment on February 13, 2024.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) ("BIJB") (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyetoran Modal Ketujuh AP Indonesia pada BIJB nomor BAC.DU.1198/KU.04/2025 tanggal 18 Maret 2025, Para Pihak sepakat untuk mengatur kontribusi modal ketujuh AP Indonesia kepada BIJB sebesar Rp13.000 untuk pemenuhan kebutuhan aspek Safety, Security, Service and Compliance (3S+1C) dan kewajiban pembayaran konsesi dan/atau pendapatan negara bukan pajak ("PNBP") atas jasa kebandarudaraan. AP Indonesia telah melakukan pembayaran sebesar Rp13.000 tersebut pada tanggal 27 Maret 2025.

Per 31 Desember 2025, setoran modal tersebut masih dicatat sebagai uang muka penyertaan saham karena belum terdapat akta perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

AP Indonesia mencatat investasi saham pada BIJB menggunakan metode ekuitas karena pengaruh signifikan di *investee* sesuai PSAK 228 paragraf 6 dan 16.

PT Railink ("Railink")

Railink merupakan Perusahaan patungan antara AP Indonesia dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") yang bertugas untuk mengelola kegiatan usaha kereta api bandara. Railink dibentuk berdasarkan Perjanjian Usaha Kerjasama antara AP Indonesia dengan tanggal 14 Agustus 2006.

Berdasarkan akta perubahan anggaran dasar Railink yang dibuat oleh Notaris Yulkhaizar Panuh, S.H., No. 13 tanggal 15 Agustus 2008, nilai penyertaan AP Indonesia di Railink adalah sebesar Rp40.000 atau 40%.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. S-447/MBU/2013 tanggal 5 Juli 2013, telah disetujui untuk melakukan penambahan setoran modal AP Indonesia kepada Railink sebesar Rp59.600 sehingga jumlah setoran modal AP Indonesia menjadi Rp99.600 dengan persentase kepemilikan tetap.

Pada tahun 2016, AP Indonesia melakukan penambahan setoran modal kepada Railink sebesar Rp124.800 sehingga jumlah setoran modal AP Indonesia di Railink menjadi Rp224.400 dengan persentase kepemilikan tetap.

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) ("BIJB") (continued)

Based on the Minutes of Agreement for the AP Indonesia's Seventh Capital Contribution to BIJB No. BAC.DU.1198/KU.04/2025 dated 18 March 2025, the Parties agreed to allocate AP Indonesia's seventh capital contribution to BIJB amounting to Rp13,000 for the fulfillment of Safety, Security, Service and Compliance (3S+1C) requirements, as well as for the payment of concession fees and/or non-tax state revenue ("PNBP") related to airport services. AP Indonesia made the payment of Rp13,000 on March 27, 2025.

As of 31 December 2025, the capital contribution was still recorded as an advance for investment in shares, as no notarial deed for the increase in issued and paid-up capital had yet been executed.

AP Indonesia recorded its investments in shares in BIJB using the equity method due to significant influence over investee in accordance with PSAK 228, paragraphs 6 and 16.

PT Railink ("Railink")

Railink is a joint venture between AP Indonesia and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") to conduct the business activities of the airport train. Railink was formed based on Business Cooperation Agreement between AP Indonesia and KAI dated August 14, 2006.

Based on the deed of establishment of No. 13 dated August 15, 2008 prepared by Notary Yulkhaizar Panuh, S.H., the investment in shares of AP Indonesia in Railink amounted to Rp40,000 or 40%.

Based on Decision Letter from Ministry of BUMN No. S-447/MBU/2013 dated July 5, 2013, it was approved to make additional contribution to the capital of AP Indonesia (formerly AP II) to Railink amounting to Rp59,600 hence total amount of AP Indonesia's paid in capital became Rp99,600 with the same percentage of ownership.

In 2016, AP Indonesia paid additional capital contribution to Railink amounting to Rp124,800 where AP Indonesia's capital contribution in Railink became Rp224,400 with the same percentage of ownership.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Railink ("Railink") (lanjutan)

Pada tahun 2019, AP Indonesia melakukan penambahan setoran modal kepada Railink sebesar Rp91.600 yang terdiri dari konversi pinjaman pemegang saham sebesar Rp51.800 dan tunai sebesar Rp39.800 sehingga jumlah setoran modal AP Indonesia di Railink menjadi Rp316.000 dengan persentase kepemilikan tetap.

Berdasarkan Akta Notaris Hadijah S.H Nomor 14 tanggal 12 Mei 2020, Pemegang Saham menyetujui penambahan modal dasar PT Railink yang semula sebesar Rp790.000 yang terbagi atas 790.000 lembar saham menjadi Rp839.400 yang terbagi dalam 839.400 lembar saham dan menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih disimpan sebesar 29.640 lembar yang masing-masing bernilai Rp1 dengan jumlah Rp29.640 yang seluruhnya diambil oleh KAI sehingga persentase kepemilikan saham AP Indonesia terdilusi menjadi 38,55%.

Berdasarkan Akta Notaris Ariani L. Rachim, S.H. No. 06 Tanggal 19 April 2021, Pemegang Saham menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih disimpan sebesar 19.760 lembar yang masing-masing bernilai Rp1 dengan jumlah Rp19.760 yang seluruhnya diambil oleh AP Indonesia sehingga persentase kepemilikan saham AP Indonesia menjadi 40%.

Berdasarkan Akta Notaris Ariani L. Rachim, S.H. No. 05 Tanggal 27 Januari 2023 yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0017880 tanggal 31 Januari 2023, Pemegang Saham menyetujui perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor dengan penerbitan saham baru sebanyak 40.000 lembar saham yang masih-masing bernilai Rp1, berdasarkan jumlah nilai atas dana pinjaman KAI sebesar Rp24.000 dan dana talangan dan injeksi kas dari AP Indonesia sebesar Rp16.000 yang telah disetorkan oleh AP Indonesia dalam dua tahap pada tanggal 30 Maret 2022 dan 4 Agustus 2022 masing-masing sebesar Rp8.429 dan Rp7.571.

AP Indonesia mencatat investasi saham pada Railink menggunakan metode ekuitas karena pengaruh signifikan di investee sesuai PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Railink ("Railink") (continued)

In 2019, AP Indonesia made additional capital contribution to Railink amounting to Rp91,600 which consist of conversion of shareholder loan of Rp51,800 and cash of Rp39,800 where AP Indonesia's capital contribution in Railink became Rp316,000 with the same percentage of ownership.

Based on Notarial Deed of Hadijah SH No. 14, dated May 12, 2020, the Shareholders approved the addition of PT Railink's authorized capital from Rp790,000 which was consist of 790,000 shares to become Rp839,400 consist of 839,400 shares and approved the issuance or placement of unauthorized shares of 29,640 shares with a par value of Rp1 with total value of Rp29,640, which all were acquired by KAI and made AP Indonesia's percentage of ownership decreased into 38.55%.

Based on Notarial Deed of Ariani L. Rachim, S.H. No. 06, dated April 19, 2021, the Shareholders approved the issuance or placement of unauthorized shares of 19,760 shares with a par value of Rp1 with total value of Rp19,760, which all were acquired by AP Indonesia and made AP Indonesia's percentage of ownership into 40%.

Based on Notarial Deed No. 05 of Ariani L. Rachim, S.H. dated January 27, 2023 which was legalized by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01. .03-0017880 dated January 31, 2023, the Shareholders approved the amendment to increase the issued/paid-up capital with the issuance of 40,000 new shares with a value of Rp1 each, based on the total value of KAI's loan fund of Rp24,000 and AP Indonesia's cash injection of Rp16,000 which has been deposited by AP Indonesia in two phases on March 30, 2022 and August 4, 2022 amounting to Rp8,429 and Rp7,571, respectively.

AP Indonesia recorded its investments in shares in Railink using the equity method due to significant influence over investee in accordance with PSAK 228: Investment in Associates and Joint Ventures.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Sariarthamas Hotel International ("SHI")

Sarinah menguasai saham pada SHI sebesar 50% atau 3.750 lembar saham dengan nilai nominal AS$1.000 (nilai penuh) per lembar saham. Penyertaan tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Tanah merupakan bagian dari setoran modal inbreng Sarinah pada SHI yang luasnya 2.280 m^2 yang berlokasi di Jalan H. Agus Salim Jakarta. Tanah setoran modal inbreng tersebut tertuang dalam beberapa perjanjian diantara pemegang saham Sarinah termasuk namun tidak terbatas dalam *Basic Agreement* tanggal 30 September 1970. Terkait dengan hal tersebut, Sarinah juga telah mengkonfirmasi kewajibannya kepada SHI yang dituangkan dalam *Memorandum Agreement* tanggal 8 Maret 1983 diantara pemegang saham Sarinah.

Pada tanggal 23 Desember 2024, Sarinah telah menyelesaikan proses penjualan investasi pada SHI melalui akta no. 71 tanggal 23 Desember 2024 oleh Notaris Diharini S.H., M.Kn., dan telah memperoleh hasil penjualan investasi tersebut sebesar Rp705.000 yang diterima pada tanggal yang sama.

Sehubungan dengan penjualan tersebut, Sarinah telah mengakui keuntungan pada laba rugi tahun 2024 sebesar Rp683.000.

PT Jasamarga Bali Tol ("JBT")

JBT bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa.

Investasi dalam saham pada JBT merupakan konsorsium investasi pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa di daerah Bali oleh beberapa perusahaan BUMN.

AP Indonesia (dahulu AP I) memiliki 59.635 saham atau sebesar Rp59.635 dan tambahan modal disetor lainnya sebesar Rp14.908 dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 8%.

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Sariarthamas Hotel International ("SHI")

Sarinah owns 50% shares in SHI or 3,750 shares with a par value of US$1,000 (full amount) per share. Therefore, The investment is recorded using the equity method.

Land which is part of the Sarinah's inbreng capital injection to SHI with an area of 2,280 sqm located at Jalan H. Agus Salim Jakarta. The land for paid-in capital inbreng is contained in several agreements between Sarinah shareholders including but not limited to the Basic Agreement dated September 30, 1970. In this regard, Sarinah has also confirmed its obligations to SHI as stated in the Memorandum Agreement dated March 8, 1983 among Sarinah's shareholders.

On December 23, 2024, Sarinah has completed the process of selling its investment in SHI through deed no. 71 dated December 23, 2024 by Notary Diharini S.H., M.Kn., and has obtained the proceeds from the sale of the investment amounting to Rp705,000 which was received on the same date.

In relation to the sale, Sarinah has recognized a gain in the 2024 statement of profit or loss amounting to Rp683,000.

PT Jasamarga Bali Tol ("JBT")

JBT is engaged in the operation of Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa toll road.

The investment in shares in JBT is an investment consortium for the construction of the Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa toll road in the Bali area by several state-owned companies.

AP Indonesia (formerly AP I) has 59,635 shares or Rp59,635 and additional paid-in capital amounting to Rp14,908 with share ownership of 8%.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Jasamarga Bali Tol ("JBT") (lanjutan)

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H. Notaris di Jakarta. Dalam anggaran dasar, AP Indonesia (dahulu AP I) setuju untuk meningkatkan modal disetor dari Rp745.434 menjadi Rp1.440.434. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H Notaris di Jakarta, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melakukan tambahan modal disetor sebesar Rp200.000, sehingga membuat persentase kepemilikan AP Indonesia (dahulu AP I) di JBT terdilusi dari 8% menjadi 6,31%.

AP Indonesia (dahulu AP I) mencatat investasi saham pada JBT menggunakan metode ekuitas karena pengaruh signifikan di *investee* sesuai PSAK 228.

PT Sarinah Dufry Indonesia ("SDI")

SDI didirikan sesuai dengan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn No. 234 tanggal 29 Juni 2022 dan telah disetujui oleh Kemenkumham Nomor AHU-0126328.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 4 Juli 2022. SDI merupakan hasil *joint venture* antara PT Sarinah, Dufry International AG dan Groupo Industrial Omega S.A. DE C.V.

Sarinah menempatkan investasi sebagai penyertaan pada SDI Indonesia dengan kepemilikan saham 40% atau 12.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1 per lembar saham. Penyertaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

PT Bandara Internasional Batam ("BIB")

BIB didirikan untuk mengelola kegiatan aktivitas bisnis seperti pengembangan, operasi, dan pengelolaan kegiatan bandara yang didalamnya termasuk layanan pesawat dan penumpang, kegiatan atau bisnis dan kegiatan layanan terkait atau bisnis untuk mendukung kegiatan layanan operasi pesawat di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam.

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Jasamarga Bali Tol ("JBT") (continued)

Based on the Deed of Meeting Resolutions Number 46 dated October 22, 2020 made in the presence of Leolin Jayayanti, S.H. Notary in Jakarta. In its articles of association, AP Indonesia (formerly AP I) agreed to increase the authorized capital from Rp745,434 to Rp1,440,434. Based on the Deed of Meeting Resolutions Number 24 dated November 12, 2020 made in the presence of Leolin Jayayanti, S.H. Notary in Jakarta, PT Jasa Marga (Persero), Tbk. and PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. made additional paid-in capital of Rp200,000, which made the percentage of AP Indonesia (formerly AP I)'s ownership in JBT diluted from 8% to 6.31%.

AP Indonesia (formerly AP I) recorded its investments in shares in JBT using the equity method due to significant influence over investee in accordance with PSAK 228.

PT Sarinah Dufry Indonesia ("SDI")

SDI was established in accordance with the Deed of Notary Humberg Lie, S.H., S.E, M.Kn No. 234 dated June 29, 2022 and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-0126328.AH.01.11. Year 2022 dated July 4, 2022. SDI is a joint venture between PT Sarinah, Dufry International AG and Groupo Industrial Omega S.A. DE C.V.

Sarinah places the investment as an investment in SDI Indonesia with 40% share ownership or 12,000 shares with a par value of Rp1. The investment is recorded using the equity method.

PT Bandara Internasional Batam ("BIB")

BIB was established to manage business activities such as the development, operating and managing airport activities including aircraft and passenger service, activities or businesses and related service activities or businesses to support aircraft operation service activities at Hang Nadim International Airport, Batam.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Bandara Internasional Batam ("BIB") (lanjutan)

Investasi di BIB merupakan penyertaan saham pada Perusahaan ventura bersama yang dibentuk oleh konsorsium AP Indonesia (dahulu AP1), Incheon International Airport Corporation, PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. ("Konsorsium AP1-IIAC-WIKA") dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim. AP Indonesia memiliki 296.523.690 lembar saham atau sebesar Rp296.523.690.000 (nilai penuh) dengan jumlah kepemilikan sebesar 51%.

Berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BIB yang telah diaktakan dengan akta notaris Stefani Agustina, S.H., M.Kn. No. 26 tanggal 25 Juni 2025 di Batam. Dalam anggaran dasar, AP Indonesia setuju untuk meningkatkan modal disetor sebesar Rp 149.920 sehingga persentase kepemilikan saham AP Indonesia menjadi 56,09%.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham BIB No. KEP.DU.396/RT.01/2025 tanggal 30 September 2025, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya, dimana AP Indonesia selaku pemegang 56,09% saham memperoleh dividen sebesar Rp13.778. Keputusan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi BIB untuk melakukan proses konfirmasi rekening dan realisasi pembayaran dividen kepada masing-masing pemegang saham.

AP Indonesia mencatat investasi saham pada BIB menggunakan metode ekuitas karena pengaruh signifikan atas *investee* sesuai PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. ("GMF")

GMF merupakan perusahaan *Maintenance, Repair and Operations* (MRO) pesawat yang didirikan pada tahun 2002 dan berlokasi di Hangar 4 Bandara Soekarno Hatta. GMF menyediakan layanan perawatan, perbaikan, dan overhaul pesawat beserta komponennya, perdagangan suku cadang dan peralatan aviasi, aktivitas pendukung kebandarudaraan, serta jasa konsultansi teknis.

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Bandara Internasional Batam ("BIB") (continued)

Investment in BIB is an investment in shares in a joint venture Company by a consortium of AP Indonesia (formerly AP1), Incheon International Airport Corporation, PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. ("AP1-IIAC-WIKA Consortium") in a Cooperation Project between Government with Business Entities (KPBU) Hang Nadim Airport. AP Indonesia has 296,523,690 shares or Rp296,523,690,000 (full amount) and with ownership of 51%.

Based on the Circular Resolution of the Shareholders of BIB, as notarized by Notarial Deed of Stefani Agustina, S.H., M.Kn., No. 26 dated 25 June 2025 in Batam, the Company agreed to increase its paid-up capital by Rp149,920, resulting in the Company's share ownership increasing to 56.09%.

Based on the Circular Resolution in Lieu of the General Meeting of Shareholders of BIB No. KEP.DU.396/RT.01/2025 dated September 30, 2025, the shareholders approved the distribution of dividends to all shareholders in proportion to their respective ownership, whereby AP Indonesia, as the holder of 56.09% of the shares, is entitled to receive a dividend amounting to Rp13,778. This resolution also served as the basis for BIB to carry out the bank account confirmation process and the subsequent realization of dividend payments to each shareholder.

AP Indonesia recorded its investments in shares in BIB using the equity method due to significant influence over investee in accordance with PSAK 228: Investment in Associates and Joint Venture

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia ("GMF")

GMF is an aircraft Maintenance, Repair and Operations (MRO) company established in 2002 and located at Hangar 4 of Soekarno Hatta Airport. GMF provides aircraft and component maintenance, repair, and overhaul services, trading of aviation parts and equipment, airport support activities, and technical consultancy services.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. ("GMF") (lanjutan)

Pada tanggal 17 September 2025, AP Indonesia dan GMF menyepakati Perjanjian Pendahuluan Rencana Transaksi Nomor PJJ.DU.138/HK.08/2025 dan GMF/PERJ./DT-3171/2025, yang kemudian terakhir diubah pada tanggal 10 Desember 2025 dengan Adendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pendahuluan Rencana Transaksi Nomor PJJ.DU.0183/HK.04/2025 dan GMF/PERJ./AMAND-I/DT-3171/2025/25.

AP Indonesia dan GMF menyepakati bahwa rencana inbreng akan dilakukan melalui penyertaan nontunai berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama AP Indonesia di atas Hak Penglolaan (HPL) atas nama AP Indonesia dengan luas ± 972.123 M2 dan nilai sebesar Rp5.664.912. Nilai tersebut mengacu pada hasil valuasi atas HGB di atas HPL milik AP Indonesia yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Ruky, Safrudin & Rekan.

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), GMF sepakat untuk menerbitkan sebanyak banyaknya 124.269.948.745 lembar saham baru Seri B kepada para pemegang saham GMF dalam rangka PMHMETD. Harga pelaksanaan PMHMETD yang ditetapkan oleh GMF adalah sebesar Rp69 (nilai penuh) untuk setiap saham baru Seri B.

Pada tanggal 3 Desember 2025, AP Indonesia dan Garuda menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Nomor IG/PERJ/IV/DZ-4156/2025 dan PJJ.DU.173/HK.08/2025, yang kemudian terakhir diubah pada tanggal 10 Desember 2025 dengan Adendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham GMF, dimana GMF kan menerbitkan sebanyak-banyaknya 90.050.687.400 saham baru Seri B sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan HMETD.

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia ("GMF") (continued)

On 17 September 2025, AP Indonesia and GMF entered into the Preliminary Transaction Plan Agreement No. PJJ.DU.138/HK.08/2025 and GMF/PERJ./DT-3171/2025, which was subsequently amended and restated on 10 December 2025 through the Addendum and Restatement of the Preliminary Transaction Plan Agreement No. PJJ.DU.0183/HK.04/2025 and GMF/PERJ./AMAND-I/DT-3171/2025/25.

AP Indonesia and GMF agreed that the planned inbreng would be executed through a non-cash contribution in the form of a Building Use Rights (HGB) registered under AP Indonesia, situated on Land Management Right (HPL), also registered under AP Indonesia, with an area of approximately 972,123 m² and a value of Rp5,664,912. This value is based on valuaion of the HGB over AP Indonesia's HPL as assessed by the Public Appraisal Firm ("KJPP") Ruky, Safrudin & Partners.

In connection with the planned Capital Increase with Pre emptive Rights ("PMHMETD"), GMF agreed to issue up to 124,269,948,745 new Series B shares to the shareholders of GMF under the PMHMETD. The exercise price determined by GMF for the PMHMETD is Rp69 (full amount) for each new Series B share.

On 3 December 2025, AP Indonesia and Garuda entered into the Rights Issue Transfer Agreement No. IG/PERJ/IV/DZ-4156/2025 and PJJ.DU.173/HK.08/2025, which was subsequently amended and restated on 10 December 2025 through the Addendum and Restatement of the Rights Issue Transfer Agreement ("HMETD").

The Parties agreed to undertake a capital increase with Pre-emptive Rights (HMETD) through a Limited Public Offering to the shareholders of GMF, whereby GMF will issue up to 90,050,687,400 new Series B shares in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 45 of 2024 on Capital Increases of Public Companies with Pre-emptive Rights.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. ("GMF") (lanjutan)

Berdasarkan ketentuan tersebut, Garuda berhak atas 82.100.173.900 HMETD, di mana 1 HMETD memberikan hak untuk membeli 1 lembar saham baru Seri B GMF, yang selanjutnya dialihkan kepada AP Indonesia. Harga pelaksanaan HMETD ditetapkan sebesar Rp69 (nilai penuh) untuk setiap saham baru Seri B.

Pada tanggal 5 Desember 2025, AP Indonesia dan GMF menandatangani Perjanjian Penyertaan Modal Bersyarat Nomor PJJ.DU.178/HK.08/2025 dan GMF/PERJ./DT-3214/2025, yang kemudian terakhir diubah pada tanggal 10 Desember 2025 dengan Adendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penyertaan Modal Bersyarat Nomor PJJ.DU.0184/HK.04/2025 dan GMF/PERJ./AMAND-I/DT-3214/2025/2025.

Dalam kesepakatan tersebut, AP Indonesia berkomitmen untuk memenuhi sejumlah hal, termasuk menandatangani dokumen kesepakatan antara AP Indonesia dan Garuda. Sehubungan dengan masuknya AP Indonesia sebagai pemegang saham GMF melalui mekanisme PMHMETD yang menyebabkan terdilusinya kepemilikan saham Garuda di GMF, para pihak menyepakati bahwa Garuda akan tetap mengendalikan dan mengkonsolidasikan GMF ke dalam laporan keuangan Garuda setelah pelaksanaan PMHMETD. AP Indonesia juga menyepakati bahwa AP Indonesia tidak akan mengendalikan maupun mengkonsolidasikan GMF ke dalam laporan keuangan AP Indonesia setelah pelaksanaan PMHMETD.

Pada tanggal 29 Desember 2025, AP Indonesia dan GMF menandatangani Akta Pengikatan Pemasukan ke Dalam Perusahaan No. 146, yang dibuat di hadapan Asep Heryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Melalui akta tersebut, AP Indonesia melakukan penyetoran modal ke dalam GMF dalam bentuk non-tunai berupa tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama AP Indonesia seluas 972.123 m². Nilai aset tersebut didasarkan pada hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian No. 00392/2.0095-01/PI/0046/1/XII/2025/2025 tanggal 8 Desember 2025.

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia ("GMF") (continued)

Based on these provisions, Garuda is entitled to 82,100,173,900 HMETD, with each right granting the entitlement to purchase one new Series B share of GMF, which will subsequently be transferred to AP Indonesia. The exercise price for the HMETD is set at Rp69 (full amount) per new Series B share.

On 5 December 2025, AP Indonesia and GMF entered into the Conditional Capital Injection Agreement No. PJJ.DU.178/HK.08/2025 and GMF/PERJ./DT-3214/2025, which was subsequently amended and restated on 10 December 2026 through the Addendum and Restatement of the Conditional Capital Injection Agreement No. PJJ.DU.0184/HK.04/2025 and GMF/PERJ./AMAND-I/DT-3214/2025/2025.

Under this agreement, AP Indonesia committed to several obligations, including signing certain agreement documents with Garuda. In connection with AP Indonesia's entry as a shareholder of GMF through the PMHMETD mechanism, which results in the dilution of Garuda's ownership in GMF, the parties agreed that Garuda will continue to control and consolidate GMF into Garuda's financial statements following the completion of the PMHMETD. AP Indonesia also agreed that it will not control nor consolidate GMF into its financial statements after the completion of the PMHMETD.

On 29 December 2025, AP Indonesia and GMF executed the Deed of Capital Contribution Agreement No. 146, drawn before Asep Heryanto, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency. Through this deed, AP Indonesia made a non-cash capital contribution to GMF in the form of land under a Right-to-Build Title (HGB) registered under AP Indonesia, with a total area of 972,123 m². The value of the asset was determined based on the appraisal conducted by the Public Appraisal Firm Ruky, Safrudin & Rekan, as set out in Valuation Report No. 00392/2.0095-01/PI/0046/1/XII/2025/2025 dated December 8, 2025.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. ("GMF") (lanjutan)

AP Indonesia memiliki 82.100.173.900 lembar saham seri B dengan nilai sebesar Rp5.664.912.000.000 (nilai penuh) dengan jumlah kepemilikan sebesar 68,40%. AP Indonesia mencatat investasi saham pada GMF menggunakan metode ekuitas karena pengaruh signifikan di investee sesuai PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

KSO NINDYA - IASP

Pada tanggal 5 Agustus 2025, IASP bekerja sama dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk membentuk KSO dengan nama KSO NINDYA - IASP untuk pekerjaan Pengoptimalisasian Fasilitas Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan nomor kontrak 005/KSO-IGNIA/VIII/2025. Persentase kepemilikan IASP pada KSO ini yaitu 40%. Setoran dana talangan yang diberikan oleh IASP kepada KSO ini yakni sebesar Rp4.060. Setoran dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

15. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia ("GMF") (continued)

AP Indonesia holds 82,100,173,900 Series B shares with a total value of Rp5,664,912,000,000 (full amount), representing an ownership interest of 68.40%. AP Indonesia recognizes its investment in GMF using the equity method, as AP Indonesia has significant influence over the investee in accordance with PSAK 228: Investments in Associates and Joint Ventures.

KSO NINDYA - IASP

On August 5, 2025, IASP collaborated with PT Nindya Karya (Persero) to establish a Joint Venture (KSO) with the name of KSO NINDYA - IASP for the project Optimization of Facilities at I Gusti Ngurah Rai International Airport, with contract number 005/KSO-IGNIA/VIII/2025. IASP's ownership percentage in this Joint Venture is 40%. The funding contributed by IASP to this Joint Venture amounted Rp4,060. The contribution is recorded using the equity method.

16. PROPERTI INVESTASI

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

16. INVESTMENT PROPERTIES

The details of investment properties are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/ *Year ended December 31, 2025*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	949.880	-	-	24.407	974.287	*Land*
Bangunan lapangan	984.968	259.235	-	16.177	1.260.380	*Field buildings*
Jumlah	**1.934.848**	**259.235**	**-**	**40.584**	**2.234.667**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan lapangan	(154.439)	(28.988)	-	-	(183.427)	*Field buildings*
Penurunan nilai						***Impairment loss***
Bangunan lapangan	(24.158)	-	-	-	(24.158)	*Field buildings*
Nilai buku neto	**1.756.251**				**2.027.082**	***Net book value***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/ *Year ended December 31, 2024*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	796.316	825	(3.712)	156.451	949.880	*Land*
Bangunan lapangan	1.067.108	129.360		(211.500)	984.968	*Field buildings*
Jumlah	**1.863.424**	**130.185**	**(3.712)**	**(55.049)**	**1.934.848**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan lapangan	(122.801)	(39.780)	-	8.142	(154.439)	*Field buildings*
Penurunan nilai						***Impairment loss***
Bangunan lapangan	(23.007)	(1.151)	-	-	(24.158)	*Field buildings*
Nilai buku neto	**1.717.616**				**1.756.251**	***Net book value***

16. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Nilai wajar properti investasi Grup ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), manajemen berkeyakinan bahwa NJOP telah mendekati nilai wajarnya.

Penghasilan sewa Grup dari properti investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp608.861 dan Rp554.634.

Properti investasi Grup terutama terdiri dari:

- Tanah dan gedung di Jl. Majapahit No. 8, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jl. MH. Thamrin dan aset tanah di Braga yang terletak di Jalan Braga No. 10, Bandung yang dimiliki oleh Sarinah. Pada tahun 2022, Sarinah melakukan reklasifikasi atas bangunan yang sebelumnya tercatat pada aset tetap bangunan dan aset dalam penyelesaian sebesar Rp144.538 (Catatan 17). Sarinah juga melakukan reklasifikasi atas tanah yang sebelumnya tercatat dalam aset tetap tanah sebesar Rp63.810 (Catatan 17). Tanah milik Sarinah dijadikan sebagai jaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- Tanah yang akan dikembangkan untuk kawasan wisata di sekitar Candi Ijo, Candi Sewu dan Candi Ratu Boko yang dimiliki oleh TWC.

- Tanah, gedung, dan fasilitas penunjang, merupakan bentuk kerjasama yang disepakati dalam rangka mengembangkan Eks. Unit Hotel Indonesia dan Unit Inna Wisata dengan Kerjasama Bangun Guna Serah (BOT) untuk masa 30 tahun dan dengan Hak Opsi Perpanjangan selama 20 tahun yang dimiliki oleh HIN.

- Hak Pengelolaan Lahan (“HPL”) Tanah Kawasan Pariwisata Mandalika (“KPML”) merupakan properti investasi ITDC yang terletak di Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2008, ITDC mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah berupa seluruh saham PT Pengembangan Pariwisata Lombok (PPL) yang underlying-nya berupa lahan seluas 1.175 ha yang terletak di Kawasan Pariwisata Kuta, Lombok Tengah.

16. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

The Group’s fair value of investment properties is determined based on the Selling Value of Tax Object (NJOP), management believes that the NJOP is close to its fair value.

Group’s rental income from investment properties for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp608,861 and Rp554,634 respectively.

The Group's investment properties mainly consist of:

- *Land and building on Majapahit Street No. 8, South Petojo Village, Gambir District, Central Jakarta, MH. Thamrin Street and land assets in Braga which is located at Braga Street No. 10, Bandung which is owned by Sarinah. In 2022, Sarinah reclassified buildings which were previously recorded as building fixed assets and construction in progress of Rp144,538 (Note 17). Sarinah also reclassified the land which was previously recorded in land fixed assets amounting to Rp63,810 (Note 17). Land owned by Sarinah was used as collateral to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*

- *The land which will be developed for tourist areas around Ijo Temple, Sewu Temple and Ratu Boko Temple which are owned by TWC.*

- *The land, buildings, and supporting facilities constitute the agreed forms of cooperation for the development of the former Hotel Indonesia Unit and the Inna Wisata Unit through a Build–Operate–Transfer (BOT) scheme for a period of 30 years, with an Extension Option Right of 20 years held by HIN.*

- *Hak Pengelolaan Lahan ("HPL") of KPML land is an investment property of ITDC located in Mandalika Lombok Tourism Area ("KPML"). Based on Government Regulation No. 50 of 2008, ITDC obtained State Equity Participation (PMN) from the government in the form of all shares of PT Pengembangan Pariwisata Lombok (PPL) underlying its land area of 1,175 ha located in Kuta Tourism Area, Central Lombok.*

16. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Properti investasi Grup terutama terdiri dari (lanjutan):

- ITDC telah mengalihkan status kepemilikan tanah eks PT Pengembangan Pariwisata Lombok yang semula dalam status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Pengembangan Pariwisata Lombok menjadi HPL atas nama ITDC. Pengalihan ini berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 22/HPL/BPN RI/2009 tanggal 31 Agustus 2009, No. 23/HPL/BPN RI/2009 tanggal 31 Agustus 2009 dan SK lainnya tentang pemberian Hak Pengelolaan atas nama ITDC atas Tanah yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Tanah ex-PPD yang berada di Jalan Kramat Raya No. 21 DKI Jakarta seluas 16.101 m^2 dan di Jalan Batas II, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan seluas 14.303 m^2 yang dimiliki AP Indonesia dengan jumlah tercatat sebesar Rp56.088 dan jumlah sebesar Rp55 yang merupakan biaya sertifikasi atas tanah ex-PPD yang berada di Jalan Kramat Raya No.21 DKI Jakarta seluas 16.101 m^2 dan di Jalan Batas II, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan seluas 14.303 m^2. Per tanggal laporan keuangan ini, tanah belum dapat dikembangkan dikarenakan belum adanya izin dari Pemerintah Daerah setempat.

- Tanah yang dimiliki AP Indonesia yang berada di Desa Saentis, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seluas 40.000 m^2 dengan jumlah tercatat Rp19. Tanah dan bangunan yang merupakan tanah, bangunan dan ruang yang dimanfaatkan oleh pihak lain untuk ruang tunggu di bandara, pergudangan, hotel dan perkantoran di kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan Kualanamu sejumlah Rp30.549.

- Properti investasi yang dimiliki AP Indonesia terutama merupakan *private jet* hangar yang berada di Denpasar, tanah di Rawasari Jakarta, gudang kargo di Surabaya, dan lainnya.

- Bangunan Gedung Hanggar Maintenance Repair Overhaul (MRO) C yang berlokasi di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali yang dimiliki oleh IASP.

- Gudang Kargo Bali Logistik Park yang berlokasi di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali yang dimiliki oleh IAS.

16. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

The Group's investment properties mainly consist of (continued):

- *ITDC transferred the status of the land previously owned by PT Pengembangan Pariwisata Lombok which was originally under the status of land right (HGB) on behalf of PT Pengembangan Pariwisata Lombok into HPL on behalf of ITDC. This transfer is based on Decree of National Land Agency No. 22 /HPL/BPN RI/2009 dated August 31, 2009, No. 23/HPL/BPN RI/2009 dated August 31, 2009 and other decrees regarding the granting of Hak Pengelolaan on behalf of ITDC to Land located in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province.*

- *Ex-PPD land located in Kramat Raya Street No. 21 DKI Jakarta totaling 16,101 sqm and in Batas II Street, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan totaling 14,303 sqm with owned by AP Indonesia total amount of Rp56,088 and land certificate expense totaling Rp55 relating to ex-PPD land in Kramat Raya Street No.21 DKI Jakarta totaling 16,101 sqm and in Batas II Street, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan totaling 14,303 sqm. As of this reporting date, this land has not been developed since no permission has been obtained from Local Government.*

- *Land owned by AP Indonesia located at Saentis Village, Sub-District Percut Sei Tuan, District Deli Serdang with an area of 40,000 sqm with carrying amount of Rp19. Land and buildings which consist of land, building and space utilized by other parties for airport lounge, warehouse, hotel and office around Soekarno-Hatta and Kualanamu Airports area amounting Rp30,549.*

- *Investment properties owned by AP Indonesia mostly are private jet hangar in Denpasar, Land in Rawasari Jakarta, a cargo warehouse in Surabaya, and others.*

- *Maintenance Repair Overhaul (MRO) Hangar C Building located at I Gusti Ngurah Rai Airport, Bali owned by IASP.*

- *Bali Logistik Park Cargo Warehouse located in I Gusti Ngurah Rai Airport Bai, owned by IAS.*

17. ASET TETAP / *17. FIXED ASSETS*

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: / *The details of fixed assets are as follows:*

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/
*Year ended December 31, 2025***

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan						***Acquisition cost***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Tanah	13.804.898	-	-	8.456	13.813.354	*Land*
Bangunan lapangan	30.919.692	-	(14.252)	1.833.056	32.738.496	*Field buildings*
Bangunan prasarana	294.272	16.136	(21.778)	108.909	397.539	*Infrastructure*
Bangunan gedung	29.331.679	126.024	(20.419)	4.548.819	33.986.103	*Buildings*
Kendaraan bermotor	3.004.955	76.116	(2.506)	16.305	3.094.870	*Vehicles*
Mesin dan peralatan	11.025.654	264.510	(8.081)	1.447.467	12.729.550	*Machinery and equipment*
Perabotan dan perlengkapan	8.590.899	132.349	(17.575)	(177.654)	8.528.019	*Furnitures and tools*
Instalasi dan jaringan	10.524.718	37.093	(253)	1.257.252	11.818.810	*Installation and network*
Overlay	-	-	-	-	-	*Overlay*
Landskap dan taman	39.847	-	-	90	39.937	*Landscape and garden*
Aset dalam penyelesaian	7.478.752	4.392.056	(50.312)	(9.141.989)	2.678.507	*Assets under construction*
Jumlah	**115.015.366**	**5.044.284**	**(135.176)**	**(99.289)**	**119.825.185**	***Total***
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai						***Accumulated depreciation and impairment***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan lapangan	(9.815.165)	(963.255)	(4)	957	(10.777.467)	*Field buildings*
Bangunan prasarana	(40.935)	(12.708)	21.657	(36.922)	(68.908)	*Infrastructure*
Bangunan gedung	(6.545.736)	(847.531)	5.589	11.494	(7.376.184)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(2.398.691)	(119.012)	2.185	1.772	(2.513.746)	*Vehicles*
Mesin dan peralatan	(7.567.481)	(665.476)	2.465	(523)	(8.231.015)	*Machinery and equipment*
Perabotan dan perlengkapan	(3.382.500)	(391.043)	14.327	43.705	(3.715.511)	*Furnitures and tools*
Instalasi dan jaringan	(5.937.826)	(788.158)	-	(2.537)	(6.728.521)	*Installation and network*
Overlay	-	-	-	-	-	*Overlay*
Landskap dan taman	(17.933)	(1.950)	-	-	(19.883)	*Landscape and garden*
Jumlah	**(35.706.267)**	**(3.789.133)**	**46.219**	**17.946**	**(39.431.235)**	***Total***
Cadangan penurunan nilai	(255.464)	(139.174)		-	(394.638)	*Allowance for impairment*
Nilai buku neto	**79.053.635**				**79.999.312**	***Net book value***

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/
*Year ended December 31, 2024***

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan						***Acquisition cost***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Tanah	13.724.409	80.077	-	412	13.804.898	*Land*
Bangunan lapangan	28.770.946	18.768	(384)	2.130.362	30.919.692	*Field buildings*
Bangunan prasarana	-	134.370	-	159.902	294.272	*Infrastructure*
Bangunan gedung	26.481.621	101.278	(20.951)	2.769.731	29.331.679	*Buildings*
Kendaraan bermotor	3.007.237	8.644	(10.913)	-	3.004.955	*Vehicles*
Mesin dan peralatan	10.670.545	97.301	(63.012)	320.898	11.025.654	*Machinery and equipment*
Perabotan dan perlengkapan	8.025.948	108.536	(61.087)	517.502	8.590.899	*Furnitures and tools*
Instalasi dan jaringan	10.024.677	21.954	(195)	478.281	10.524.718	*Installation and network*
Overlay	1.745.810	-	-	(1.745.810)	-	*Overlay*
Landskap dan taman	39.753	94	-	-	39.847	*Landscape and garden*
Aset dalam penyelesaian	7.555.559	4.384.162	(7.119)	(4.453.850)	7.478.752	*Assets under construction*
Jumlah	**110.046.505**	**4.955.184**	**(163.661)**	**177.428**	**115.015.366**	***Total***
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai						***Accumulated depreciation and impairment***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan lapangan	(7.104.099)	(1.842.875)	67	(868.258)	(9.815.165)	*Field buildings*
Bangunan prasarana	-	(23.530)	-	(17.405)	(40.935)	*Infrastructure*
Bangunan gedung	(5.743.617)	(837.282)	16.033	19.129	(6.545.736)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(2.298.479)	(119.862)	11.243	8.408	(2.398.691)	*Vehicles*
Mesin dan peralatan	(6.621.242)	(999.155)	52.916	-	(7.567.481)	*Machinery and equipment*
Perabotan dan perlengkapan	(3.318.535)	(93.991)	30.026	-	(3.382.500)	*Furnitures and tools*
Instalasi dan jaringan	(5.916.359)	(22.088)	130	491	(5.937.826)	*Installation and network*
Overlay	(861.217)	-	-	861.217	-	*Overlay*
Landskap dan taman	(15.756)	(5.927)	-	3.750	(17.933)	*Landscape and garden*
Jumlah	**(31.879.301)**	**(3.944.710)**	**110.415**	**7.332**	**(35.706.267)**	***Total***
Cadangan penurunan nilai	(162.280)	(90.926)	4.061	(6.319)	(255.464)	*Allowance for impairment*
Nilai buku neto	**78.004.524**				**79.053.635**	***Net book value***

17. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek yang masih belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

17. FIXED ASSETS (continued)

Assets under construction represents projects that have not been completed at the date of the consolidated statements of financial position with the details as follows:

31 Desember 2025/*December 31,* 2025

	Perkiraan % Penyelesaian/ *Estimated % of Completion*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Tahun Perkiraan Penyelesaian/ *Estimated Years of Completion*	
Tanah	98,02%	156.437	2026-2028	*Land*
Bangunan lapangan	57,08%	413.860	2026-2028	*Field buildings*
Bangunan gedung	79,70%	1.980.537	2026-2028	*Buildings*
Mesin dan peralatan	67,48%	8.875	2026-2028	*Machinery and equipment*
Instalasi dan jaringan	45,52%	77.302	2026-2028	*Installation and network*
Lain-lain	72,32%	41.457	2026-2028	*Others*
Jumlah		**2.678.468**		***Total***

31 Desember 2024/*December 31,* 2024

	Perkiraan % Penyelesaian/ *Estimated % of Completion*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Tahun Perkiraan Penyelesaian/ *Estimated Years of Completion*	
Tanah	95,04%	17.210	2025-2027	*Land*
Bangunan lapangan	84,01%	2.844.029	2025-2027	*Field buildings*
Bangunan gedung	76,11%	4.069.559	2025-2027	*Buildings*
Mesin dan peralatan	50,04%	388.685	2025-2027	*Machinery and equipment*
Instalasi dan jaringan	25,12%	97.932	2025-2027	*Installation and network*
Lain-lain	59,65%	61.337	2025-2027	*Others*
Jumlah		**7.478.752**		***Total***

Beberapa aset tetap milik APS1 berupa tanah, gedung, peralatan dan kendaraan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (Catatan 27).

Certain fixed assets owned by APS1 such as land, buildings, equipments and vehicles are used as collateral for loans obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. and PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (Note 27).

Terdapat aset tetap TWC yang dijaminkan untuk utang bank (Catatan 27) berupa tanah dan bangunan The Manohara Hotel Yogyakarta.

There are fixed assets of TWC that are pledged as collateral for bank loans (Note 27) in the form of land and buildings of The Manohara Hotel Yogyakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 aset tetap diasuransikan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp52.573.120 dan Rp72.739.638. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

On December 31, 2025 and 2024, fixed assets were insured with the insured value amounting to Rp52,573,120 and Rp72,739,638, respectively. Management believes that the insured amount is adequate to cover possible losses from such risk.

Cadangan penurunan nilai terdiri dari penurunan nilai terutama terdiri atas:

- Aset tetap yang tidak ditemukan, tidak dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain.
- Aset tetap dari PMN yang telah divaluasi ulang oleh KJPP Joko Suratno berdasarkan laporannya tertanggal 18 Maret 2024 dengan penurunan nilai sebesar Rp20.185 dari nilai PMN.
- Aset dalam penyelesaian berupa kajian perencanaan, yang belum terealisasikan.

Allowance for impairment loss mainly represents reduction in cost value of:

- *Fixed assets that are not found, not exploited and controlled by other parties.*
- *Fixed assets from PMN that have been revalued by KJPP Joko Suratno based on its report dated March 18, 2024 with impairment loss of Rp20,185 from the PMN amount.*
- *Assets under construction in the form of planning studies that have not been realized.*

17. ASET TETAP (lanjutan) / *17. FIXED ASSETS (continued)*

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment as of December 31, 2025 and 2024 is adequate.

Berdasarkan surat korespondensi Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada BPI Danantara tanggal 25 November 2025, Menteri Pertahanan RI menyampaikan permohonan izin penggunaan lahan di bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar milik AP Indonesia yang akan digunakan untuk kepentingan pertahanan negara.

Based on the correspondence from the Minister of Defense of the Republic of Indonesia to BPI Danantara dated November 25, 2025, the Minister of Defense conveyed a request for authorization to use AP Indonesia's land located at Sultan Hasanuddin International Airport, Makassar, which will be utilized for national defense purposes.

Pada tanggal tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif.

As of December 31, 2025 and 2024, there are no fixed assets classified as terminated from active use.

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA / *18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES*

a. Aset hak-guna / *a. Right-of-use assets*

Di bawah ini adalah jumlah tercatat aset hak-guna yang diakui dan pergerakannya selama periode tersebut:

Set out below are the carrying amounts of right-of-use assets recognized and the movements during the period:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/ *Year ended December 31,* 2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Modifikasi/ *Modification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan						***Cost***
Tanah	884.926	496.117	(3.005)	(254.406)	1.123.632	*Land*
Bangunan	367.022	143.301	2.075	-	512.398	*Buildings*
Kendaraan	53.389	47.967	(48.313)	-	53.043	*Vehicles*
Instalasi dan jaringan	25.812	-	-	-	25.812	*Instalation and network*
Peralatan	100.243	163.631	(53.629)	-	210.245	*Tools*
Jumlah biaya perolehan	**1.431.392**	**851.016**	**(102.872)**	**(254.406)**	**1.925.130**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Tanah	(190.090)	(51.041)	3.128	28.281	(209.722)	*Land*
Bangunan	(149.446)	(102.340)	18.340	-	(233.446)	*Buildings*
Kendaraan	(23.080)	(32.140)	12.307	-	(42.913)	*Vehicles*
Instalasi dan jaringan	(16.461)			-	(16.461)	*Instalation and network*
Peralatan	(68.749)	(64.038)	49.162	-	(83.625)	*Tools*
Jumlah akumulasi amortisasi	**(447.826)**	**(249.559)**	**82.937**	**28.281**	**(586.167)**	***Total accumulated amortization***
Nilai buku neto	**983.566**				**1.338.963**	***Net book value***

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)*

a. Aset hak-guna (lanjutan) / *Right-of-use assets (continued)*

Di bawah ini adalah jumlah tercatat aset hak-guna yang diakui dan pergerakannya selama periode tersebut: (lanjutan)

Set out below are the carrying amounts of right-of-use assets recognized and the movements during the period: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/ *Year ended December 31, 2024*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Modifikasi/ *Modification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Cost***
Tanah	845.874	83.113	(44.061)	-	884.926	*Land*
Bangunan	267.481	139.606	(40.065)	-	367.022	*Buildings*
Kendaraan	49.646	44.402	(40.659)	-	53.389	*Vehicles*
Instalasi dan jaringan	-	27.120	(1.308)	-	25.812	*Instalation and network*
Peralatan	43.455	56.788	-	-	100.243	*Tools*
Jumlah biaya perolehan	**1.206.456**	**351.029**	**(126.093)**	**-**	**1.431.392**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Tanah	(176.040)	(61.169)	47.119	-	(190.090)	*Land*
Bangunan	(85.585)	(104.507)	40.646	-	(149.446)	*Buildings*
Kendaraan	(24.712)	(25.255)	26.887	-	(23.080)	*Vehicles*
Instalasi dan jaringan	-	(17.501)	1.040	-	(16.461)	*Instalation and network*
Peralatan	(26.633)	(42.116)	-	-	(68.749)	*Tools*
Jumlah akumulasi amortisasi	**(312.970)**	**(250.548)**	**115.692**	**-**	**(447.826)**	***Total accumulated amortization***
Nilai buku neto	**893.486**				**983.566**	***Net book value***

b. Liabilitas sewa / *Lease liabilities*

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as follow:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Liabilitas sewa			*Lease liabilities*
Saldo awal	958.123	996.785	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	851.016	169.587	*Addition during the year*
Pengurangan selama tahun berjalan	(19.935)	(14.514)	*Deductions during the year*
Modifikasi kontrak	(226.125)	-	*Contract modifications*
Pembayaran	(438.092)	(413.637)	*Payments*
Reklasifikasi	-	139.783	*Reclassification*
Pertambahan bunga	105.146	80.119	*Accretion of interest*
Jumlah	**1.230.133**	**958.123**	***Total***

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Liabilitas sewa			*Lease liabilities*
Bagian jangka pendek	166.773	141.165	*Current portion*
Bagian jangka panjang	1.063.360	816.958	*Non-current portion*
Jumlah	**1.230.133**	**958.123**	***Total***

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas sewa (lanjutan) / *b. Lease liabilities (continued)*

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 43)	105.146	80.119	*Interest on lease liabilities (Note 43)*
Beban penyusutan aset hak-guna	249.559	250.548	*Depreciation of right-of-use assets*
Jumlah	**354.705**	**330.667**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Amount recognized in statement of cash flow is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Jumlah kas keluar untuk:			*Total cash outflow for:*
Pembayaran	438.092	380.457	*Payment*

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan dan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options and reassesses this conclusion when there is a significant event or significant change in circumstances within the Group's control.

19. ASET TAKBERWUJUD / *19. INTANGIBLE ASSETS*

Mutasi aset takberwujud adalah sebagai berikut:

The mutation of intangible assets as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Cost***
Hak cipta	43	-	-	-	43	*Copyright*
Perangkat lunak dan lisensi	592.514	5.323	-	34.100	631.937	*Software and license*
Aset dalam penyelesaian	9.488	1.764	-	(4.628)	6.624	*Assets under construction*
Jumlah biaya perolehan	**602.045**	**7.087**	**-**	**29.472**	**638.604**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Perangkat lunak dan lisensi	**(472.411)**	**(35.155)**	**-**	**2.850**	**(504.716)**	*Software and license*
Cadangan penurunan nilai	(9.682)	-	3.809	-	(5.873)	*Allowance for impairment loss*
Nilai buku neto	**119.952**				**128.015**	***Net book value***

19. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Mutasi aset takberwujud adalah sebagai berikut: (lanjutan)

19. INTANGIBLE ASSETS (continued)

The mutation of intangible assets as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Cost***
Hak cipta	52.503	-	(6.255)	(46.205)	43	*Copyright*
Perangkat lunak dan lisensi	500.971	48.343	(2.993)	46.193	592.514	*Software and license*
Aset dalam penyelesaian	7.846	2.242	(600)	-	9.488	*Assets under construction*
Jumlah biaya perolehan	**561.320**	**50.585**	**(9.848)**	**(12)**	**602.045**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Hak cipta	(27.651)	-	6.083	21.568	-	*Copyright*
Perangkat lunak dan lisensi	(395.944)	(57.655)	2.756	(21.568)	(472.411)	*Software and license*
Jumlah akumulasi amortisasi	**(423.595)**	**(57.655)**	**8.839**	**-**	**(472.411)**	***Total accumulated amortization***
Cadangan penurunan nilai	(8.564)	(1.118)	-	-	(9.682)	*Allowance for impairment loss*
Nilai buku neto	**129.161**				**119.952**	***Net book value***

Hak cipta terutama merupakan hak cipta dari invensi materi promosi Prambanan Jazz Festival (PJF) dan hak cipta film “Ibu”.

Copyrights mainly consist of invention copyrights for Prambanan Jazz Festival (PJF) promotional materials and copyrights for the film "Ibu".

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment as of December 31, 2025 and 2024 is adequate.

20. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN

Aset tidak lancar lain-lain terutama terdiri dari uang jaminan atas sewa ruangan dan jaminan utilitas dan uang muka jangka panjang kepada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg) atas dana talangan pesangon kepada eks karyawan Yayasan Harapan Kita (YHK) yang telah dibayarkan oleh TWC dan aset Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang merupakan alat bantu navigasi yang belum diserahkan AP Indonesia kepada LPPNPI.

20. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Other non-current assets primarily consist of guarantee deposits from rent and utilities, long-term advances to the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia (Kemensetneg) for severance payment bridging funds to former employees of Yayasan Harapan Kita (YHK), which have been disbursed by TWC and Indonesian Air Navigation Service Provider Corporation's (LPPNPI) property assets, which are navigation aids that have not yet been transferred by AP Indonesia to LPPNPI.

21. UTANG USAHA / *21. ACCOUNT PAYABLES*

Utang usaha terdiri dari: / *Account payables consists of:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Nindya Karya (Persero)	201.459	32.134	*PT Nindya Karya (Persero)*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	37.701	92.254	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
KSO PT Inacon Luhur Pertiwi JV PT Ciriajasa E.C – PT Bina Karya (Persero)	32.262	-	*KSO PT Inacon Luhur Pertiwi JV PT Ciriajasa E.C - PT Bina Karya (Persero)*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) - PT Bunga Raya Lestari	22.952	-	*KSO PT Wijaya Karya (Persero) - PT Bunga Raya Lestari*
PT BNI Sekuritas	10.801	10.801	*PT BNI Sekuritas*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.683	11.756	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.625	252	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Mandiri Sekuritas	2.903	-	*PT Mandiri Sekuritas*
KSO PT Hutama Karya (Persero) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	143.274	*KSO PT Hutama Karya (Persero) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
Kementerian Sekretariat Negara RI	-	19.493	*Kementerian Sekretariat Negara RI*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	12.498	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
Lain-lain (di bawah Rp5 miliar)	56.808	24.917	*Others (below Rp5 billion)*
Subjumlah	380.194	347.379	*Subtotal*
Pihak ketiga	1.008.307	1.033.284	*Third parties*
Jumlah	**1.388.501**	**1.380.663**	***Total***

Jumlah utang usaha kepada pihak berelasi merepresentasikan 0,59% dan 0,51% dari jumlah liabilitas Grup masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Total account payables due to related parties represent 0.59% and 0.51% of total liabilities of the Group as of December 31, 2025 and 2024 respectively.

22. UTANG LAIN-LAIN / *22. OTHER PAYABLES*

Utang lain-lain terdiri dari: / *Other payables consists of:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Perolehan aset tetap	1.468.550	1.577.334	*Acquisition of fixed assets*
Jaminan pelanggan	228.784	264.447	*Customer guarantee*
Titipan pembayaran	164.132	172.238	*Payment deposit*
Jaminan pelaksanaan	131.081	186.945	*Deposit guarantee*
Titipan lainnya	34.577	2.430	*Other deposits*
Titipan *collection fee*	18.871	18.834	*Deposit for collection fee*
Titipan BMKG	15.114	14.580	*Deposit for BMKG*
Titipan koperasi	14.248	12.000	*Deposit for koperasi*
Retribusi parkir	4.991	3.647	*Parking retribution*
Utang iuran	2.627	21.808	*Contribution*
Utang SKBDN (Catatan 5)	-	385.215	*SKBDN debt (Note 5)*
Utang SCF	-	2.934	*SCF Payable*
Lain-lain	99.384	145.314	*Others*
Jumlah	**2.182.359**	**2.807.726**	***Total***

22. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Perolehan aset tetap merupakan utang kepada kontraktor sehubungan proyek-proyek aset tetap Grup yang dibangun oleh kontraktor (Catatan 17).

Titipan pembayaran terutama merupakan selisih lebih/kelebihan penerimaan sejumlah uang/kas dari *customer* atau entitas lain yang belum dapat diidentifikasi penggunaannya.

Jaminan pelanggan merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pelanggan sehubungan dengan sewa ruangan, tanah, listrik, air dan telepon di awal perjanjian dan simpanan jaminan dari para distributor untuk memasarkan barang retail yang menjadi objek cukai dan komoditi beras di Indonesia.

Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang diberikan oleh kontraktor sehubungan dengan proyek-proyek seperti uang jaminan atas pelaksanaan *beauty contest* proyek pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok dan proyek pengembangan Lot di wilayah operasional Nusa Dua, termasuk *refundable* deposit ITDC dalam kasus dengan PT Jaya Makmur Bersama.

Titipan lainnya terdiri dari titipan titipan THT dan DPLK, titipan listrik, titipan ZIS (zakat, infaq, sodaqoh), dan titipan dari pengelola merupakan utang kepada pihak ketiga atas kerja sama pengelolaan *lounge* dan jasa terkait kargo.

22. OTHER PAYABLES (continued)

Acquisition of fixed assets represents payable to the contractors in relation with the Group's fixed asset projects which are constructed by the contractors (Note 17).

Payment deposit mainly represents the excess or surplus of cash received from customers or other entities whose usage has not yet been identified.

Customer deposit represent cash deposit given by customer that consists of deposits for space rental, land rental, electrical, water, and telephone at the beginning of the contract and savings guarantee from distributors to market retail goods subject to taxation and rice commodities in Indonesia.

Deposit guarantee represents guarantee from contractors engaged in the Company's projects such as Deposit guarantee represents deposit for beauty contest process for Tourism Area of Mandalika Lombok and Lot development project in Nusa Dua operational area, includes refundable deposit of the ITDC in case with PT Jaya Makmur Bersama.

Other deposits consist of DJU deposit, THT and DPLK deposit, electrical deposit, ZIS deposit (zakat, infaq, sodaqoh) and management deposits represent payables from third parties for cooperation of lounge management and cargo related services.

23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA JANGKA PENDEK

Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek terdiri dari:

23. SHORT-TERM BANK AND OTHER INSTITUTION LOANS

Short-term bank and other institution loans consist of:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	33.946	38.947	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	20.000	54.500	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	20.000	20.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	79.600	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
Jumlah	**73.946**	**193.047**	***Total***

23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA JANGKA PENDEK (lanjutan)

23. SHORT-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTION LOANS (continued)

IAS

Pada tanggal 31 Desember 2025, rincian utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek IAS adalah sebagai berikut:

IAS

As of December 31, 2025, details of short-term bank and other financial institution loans of IAS are as follows:

Entitas/ Entity	Kreditor/ *Creditors*	Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date*	Jumlah Maksimum Fasilitas/ *Maximum Facility Amount* (Rp)	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	Jaminan/ *Collateral*	Saldo Pinjaman/ *Outstanding Loan* 31 Des/ *Dec 31* 2025	Saldo Pinjaman/ *Outstanding Loan* 31 Des/ *Dec 31* 2024
IASP (dh APP1)	PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk.	19 Agustus 2024/ *August 19, 2024*	100.000	19 Agustus 2025/ *August 19, 2025*	8,65% - 8,75% (2024 & 2025)	Piutang proyek IASP / *IASP's Project receivable*	-	79.600
APS1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	11 Desember 2024/ *December 11, 2024* Diperpanjang/*Extended* 9 Desember 2025/ *December 9, 2025*	55.000	10 Desember 2026/ December 10, 2026	8,50% (2024 & 2025)	Piutang usaha senilai Rp50.000/ *Trade receivable amounting to Rp50.000*	33.946	38.946
APS1	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	30 Juni 2024/ *June 30, 2024* Diperpanjang tanggal/ *Extended on* 19 Desember 2025/ *December 19, 2025*	20.000	18 Juni 2026/ *June 18,2026*	9,50% (2025) & 10% (2024)	Piutang usaha senilai Rp50.000/ *Trade receivable amounting to Rp50.000*	20.000	20.000
IAS	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	2 Februari 2024 dan 4 Maret 2024/ *February 2, 2024 and March 4, 2024*	120.000	1 Februari 2025 dan 3 Maret 2025/ *February 1, 2025 and March 3, 2025*	3,00% - 3,25% (2024 & 2025)	Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted Time Deposits*	-	34.500
Jumlah							**53.946**	**173.046**

Tujuan dari pinjaman-pinjaman di atas adalah untuk modal kerja entitas anak terkait.

The purpose of the above loans is for working capitals of related subsidiaries.

APS1 juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:
- *Current Ratio* (CR) minimal 1 kali
- *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 2,5 kali
- *Debt Service Coverage* (DSCR) minimal 1 kali

APS1 is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:
- *Current Ratio (CR) minimum 1 time*
- *Debt to Equity Ratio (DER) maximum 2.5 time*
- *Debt Service Coverage (DSCR) minimum 1 time*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, semua fasilitas pinjaman bank jangka pendek yang diperoleh oleh APS1 sebagaimana tertera diatas adalah tanpa jaminan.

As of December 31, 2025 and 2024, all short-term bank loan credit facilities obtained by APS1 as listed above are unsecured.

APS1 telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka pendeknya.

APS1 has complied with all covenant stated in all of its short-term bank loan agreements.

23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA JANGKA PENDEK (lanjutan)

Sarinah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Sarinah mendapatkan kredit modal kerja dari Mandiri dan perjanjian kredit telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. KP.CRO/041/PK-KMK/2010 adendum XVI tanggal 27 Oktober 2025.

Fasilitas yang diperoleh Sarinah antara lain:
- Plafond pinjaman sebesar Rp20.000.
- Jangka waktu 1 tahun (28 Oktober 2025 - 27 Oktober 2026).
- Tingkat suku bunga 7,75%.

Fasilitas ini dijamin dengan sebidang Tanah SHGB No.1.170 m2 terletak di Jl. Jend. Basuki Rahmat Nomor 2A Malang, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dan piutang usaha dan persediaan barang dagang masing-masing senilai Rp15.000 yang diikat secara fidusia.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Sarinah memiliki kewajiban untuk mempertahankan:
- Menjaga rasio keuangan, yaitu current ratio minimal 110%.
- Debt to Equity Ratio tidak melebihi 230%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp20.000.

23. SHORT-TERM BANK AND FINANCIAL INSTITUTION LOANS (continued)

Sarinah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Sarinah obtained a working capital loan from Mandiri and the credit agreement has been amended several times with the latest amendment based on a letter from Bank Mandiri No. KP.CRO/041/PK-KMK/2010 addendum XVI 5dated October 27, 2025.

The facilities obtained by Sarinah among others:
- *Loan plafond of Rp20,000.*
- *1 year period (October 28, 2025 – October 27, 2026).*
- *Interest rate 7.75%.*

This facility is secured by plot of Land SHGB No.1.170 sqm Located on Jl. Gen. Basuki Rahmat Number 2A Malang, Kiduldalem Village, Klojen District, Malang City, East Java and accounts receivable and inventories each amounted Rp15,000 which secured by fiduciary transfer of ownership.

In connection with the credit agreement, Sarinah has an obligation to maintain:

- *Maintain financial ratios, which is current ratio at least 110%.*
- *Debt to Equity Ratio does not exceed 230%.*

As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding balance of this facility amounting to Rp20,000, respectively.

24. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari akrual untuk biaya-biaya sebagai berikut:

24. ACCRUED EXPENSES

This account consists of accruals for the following expenses:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Umum dan pemeliharaan	2.605.526	1.680.796	*General and maintenance*
Beban konsesi kepada DJPU	572.140	837.557	*Concession fee to DJPU*
Biaya pegawai	425.212	364.894	*Employees expense*
Konsultan	291.592	159.626	*Consultant*
Bunga	106.976	144.916	*Interest*
Utilitas	105.096	10.448	*Utilities*
Sewa	104.095	156.992	*Rental*
Operasional *groundhandling*	99.731	98.310	*Groundhandling operational*
Persediaan	47.354	182.019	*Inventory*
Event		100.484	*Event*
Lain-lain	191.452	75.497	*Others*
Jumlah	**4.549.174**	**3.811.539**	***Total***

24. BEBAN AKRUAL (lanjutan) / *24. ACCRUED EXPENSES (continued)*

Beban akrual umum dan pemeliharaan terutama merupakan akrual untuk pemeliharaan, kebersihan, keamanan, perbaikan dan perawatan aset tetap, telekomunikasi, kesehatan dan *collection fee* Grup.

Accrued expenses related to general and maintenance represent accruals for maintenance, cleaning, security, repairs and maintenance of fixed assets, telecommunications, health and collection fees of the Group.

Akrual beban konsesi kepada DJPU merupakan kewajiban yang timbul sehubungan dengan konsesi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) kepada AP Indonesia untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan (Catatan 47).

Concession to DJPU represents obligations arising from concessions granted by the Directorate General of Civil Aviation (DJPU) to AP Indonesia for the provision of airport services activities (Notes 47).

Beban *event* merupakan kewajiban yang timbul terutama sehubungan dengan penyelenggaraan seperti World Superbike (“WSBK”) oleh ITDC.

Accrued expenses related to events mainly represent expenses for such as the World Superbike ("WSBK") by ITDC.

Beban akrual biaya pegawai mencakup beban manfaat pegawai diantaranya beban THR, beban cuti, beban kelebihan jam kerja, beban uang makan harian yang akan dibayarkan Grup kepada pegawai.

Accrued expenses related to employee expenses consist of employee benefits expenses including THR expenses, leave expenses, overtime expenses, daily meal allowances which will be paid by the Group to employees.

25. LIABILITAS KONTRAK / *25. CONTRACT LIABILITIES*

Liabilitas kontrak terdiri dari: / *Contract liabilities consist of:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Penjualan lahan	314.053	-	*Land sales*
Sewa ruang	211.575	200.059	*Space rental*
Sewa tanah	122.789	244.194	*Land rental*
Perdagangan	54.430	82.171	*Trading*
Tiket	53.332	12.112	*Tickets*
Sewa jaringan	37.567	45.132	*Network rental*
Hotel dan convention	23.957	23.366	*Hotel and convention*
Pemasangan reklame	14.556	25.889	*Advertising installation*
Konsesi dan *airport pass*	2.141	9.520	*Concession and airport pass*
Lain-lain	44.426	13.729	*Others*
Jumlah	**878.826**	**656.172**	***Total***

Liabilitas kontrak terutama terdiri dari penerimaan uang dari pelanggan sehubungan dengan penjualan lahan, sewa tanah, sewa ruang, tempat reklame dan lainnya, namun jasa tersebut belum diberikan ke pelanggan.

Contract liabilities mostly consist of cash received from customers in related to land sales, land rental income, space rental, billboards and others, while services have not been delivered to the customers.

26. LIABILITAS TUNJANGAN HARI TUA DAN DANA PENSIUN / *26. RETIREMENT AND PENSION FUND LIABILITIES*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini terutama merupakan kewajiban pembayaran premi asuransi dan iuran dana pensiun.

As of December 31, 2025 and 2024 this account mainly represents payable of insurance premium and pension fund contribution.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS

Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang terdiri dari:

Long-term bank and other financial institution loans consist of:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Perusahaan			***The Company***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			*Related party*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	861.017	972.033	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*
Subjumlah	**861.017**	**972.033**	***Subtotal***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	7.167.130	7.893.447	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	6.180.756	6.584.176	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	3.955.949	4.342.728	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	2.837.394	3.012.677	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	1.944.660	2.065.925	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk.*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (”Indonesia Eximbank”)	1.180.364	1.508.526	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (”Indonesia Eximbank”)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	978.578	1.264.242	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Indonesia Infrastructure Finance	454.693	628.768	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
Lain-lain	3.490	2.515	*Others*
Subjumlah	**24.703.014**	**27.303.004**	***Subtotal***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	2.867.365	3.408.276	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk.*
PT Bank Central Asia Tbk.	2.642.483	2.755.665	*PT Bank Central Asia Tbk.*
PT Bank DKI	1.702.468	1.791.436	*PT Bank DKI*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	1.196.859	1.248.122	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk.*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	957.487	998.498	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	462.299	482.567	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.*
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	478.744	499.249	*PT Bank Pembangunan Daerah Papua*
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	444.520	249.449	*PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	95.749	99.850	*PT Bank Pembangunan Daerah Bali*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	455.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Subjumlah	**10.847.974**	**11.988.112**	***Subtotal***
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			*Related party*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	77.272	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
Subjumlah	**-**	**77.272**	***Subtotal***
Pihak ketiga			*Third party*
Asian Infrastructure Investment Bank	1.318.993	2.025.900	*Asian Infrastructure Investment Bank*
Jumlah	**37.730.998**	**42.366.321**	***Total***

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang terdiri dari: (lanjutan)

Long-term bank and other financial institution loans consist of: (continued)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Dikurangi biaya pinjaman yang belum di amortisasi	(228.909)	(284.308)	*Less unamortized cost of loans*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(4.747.011)	(4.491.948)	*Less current portion*
Porsi jangka panjang	**32.755.078**	**37.590.065**	***Long-term portion***

Perusahaan

The Company

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN")

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 169 tanggal 29 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank BTN dalam rangka mendukung pelaksanaan pembentukan *Holding* BUMN Pariwisata dengan Plafond setinggi-tingginya sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan *grace period* selama 3 (tiga) tahun, serta tingkat bunga LPS + 4,50% eq 8,00% per tahun.

Based on the Credit Agreement No. 169 dated December 29, 2021, the Company obtained a credit facility from Bank BTN in order to support the implementation of the establishment of a Tourism SOEs Holding with a maximum ceiling of Rp500,000 with a term of 5 (five) years and a grace period of 3 (three) years, with interest LPS + 4.50% eq 8.00% per annum.

Pada tanggal 29 Desember 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan BTN di mana BTN berperan sebagai kreditur dan fasilitas kredit yang diberikan bersifat *Non-Revolving* atau suatu pinjaman yang tidak berulang dan hanya dicairkan satu kali pada maksimum fasilitas kredit yang diberikan.

On December 29, 2021, the Company signed a Loan Agreement with BTN, where BTN acts as the creditor, and the credit facility provided is a Non-Revolving, meaning it is a one-time, non-recurring loan drawn at the maximum credit facility granted.

Jangka waktu perjanjian kredit adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan masa *grace period* selama 3 tahun dan masa penarikan kredit selama 2 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit.

The loan agreement has a term of 5 years from December 29, 2021, until December 31, 2026, with a grace period of 3 years and a credit drawdown period of 2 years from the signing of the loan agreement.

Bank Tabungan Negara mengenakan biaya fasilitas pinjaman sebesar 0,25% dari jumlah fasilitas kredit atau sebesar Rp1.250 yang dapat dibayarkan secara bertahap maksimum 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit atau maksimal pada 31 Desember 2022. Fasilitas pinjaman pokok akan dibayar dalam sistem angsuran sejak tanggal berakhirnya *grace period*, yaitu 31 Desember 2024 dan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 25 triwulanan.

Bank Tabungan Negara imposes a loan facility fee of 0.25% of the credit facility amount or Rp1,250, which can be paid gradually over a maximum period of 12 (twelve) months from the date of signing the loan agreement, or by December 31, 2022. The principal repayment will be made in installments starting from the end of the Grace Period, i.e., December 31, 2024, and interest payments are due every 25th of each quarter.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN") (lanjutan)

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan bisnis berdasarkan rencana bisnis Perusahaan yang ada dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar LPS + 4,5%, ekuivalen 8,00% per tahun.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) di atas 100% setelah masa pemberian *waiver* sampai dengan tahun 2024 berakhir.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 300%.

Debitur kedua, yaitu AP Indonesia juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) di atas 100% setelah masa pemberian *waiver* sampai dengan tahun 2024 berakhir.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 200%.

Pada tanggal 30 Desember 2021, 6 Desember 2022, 17 April 2023, dan 2 Agustus 2023, Perusahaan telah melakukan penarikan atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp270.115, Rp90.000, Rp50.000, dan Rp89.885.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp450.000 dan Rp500.000.

Pada tanggal 22 Desember 2023, Perusahaan menandatangani akta perjanjian kredit No. 61 dengan Bank BTN berupa pemberian fasilitas kredit bersifat *Non-Revolving* dan terdiri dari dua *tranche,* yaitu *tranche* A sebesar maksimum Rp350.000 dan *tranche* B sebesar maksimum Rp150.000.

Kedua *tranche* fasilitas kredit memiliki tujuan penggunaan yang berbeda di mana *tranche* A ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kepada anggota *holding* Perusahaan, yaitu PT Sarinah dan *tranche* B ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *operational expenditure* Perusahaan di luar pembayaran kewajiban bunga dan pokok hutang Bank serta proyek Kawasan Ekonomi (KEK) Khusus Sanur.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN") (continued)

The loan is intended for financing business activities based on the Company's business plan and carries an annual interest rate of LPS + 4.5%, equivalent to 8.00% per year.

Company is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) above 100% after the waiver period until the end of 2024.*
- *Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 300%.*

The second borrower, namely AP Indonesia, is also required to maintain specific financial ratios during the loan agreement period:
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) above 100% after the waiver period until the end of 2024.*
- *Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 200%.*

As of December 30, 2021, December 6, 2022, April 17, 2023, and August 2, 2023, the Company has drawn amounts of Rp270,115, Rp90,000, Rp50,000, and Rp89,885 from this facility, respectively.

As of December 31, 2025 and 2024 the outstanding balance of this facility amounting to Rp450,000 and Rp500,000.

On December 22, 2023, the Company entered into deed of loan agreement No. 61 with Bank BTN, providing a Non-Revolving credit facility consisting of two tranches, namely tranche A with maximum amount of Rp350,000 and tranche B, with a maximum amount of Rp150,000.

The two tranches have different usage purposes, where tranche A is intended to meet the funding needs of the holding company members, PT Sarinah, and tranche B is intended to cover the Company's operational expenditure outside of Bank debt principal and interest payments and the Special Economic Zone (SEZ) Sanur project.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN") (lanjutan)

Untuk fasilitas kredit *tranche* A, jangka waktu perjanjian kredit adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028 dengan masa *grace period* selama 3 tahun dan masa penarikan kredit selama 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 , saldo pinjaman pada fasilitas ini sebesar Rp350.000 dan Rp350.000.

Sedangkan untuk fasilitas kredit *tranche* B, jangka waktu perjanjian kredit adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan masa *grace period* selama 1 tahun dan masa penarikan kredit selama 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman pada fasilitas ini sebesar Rp61.017 dan Rp122.033.

Bank BTN mengenakan *upfront fee*, biaya yang dibayarkan atas persetujuan fasilitas kredit dengan besaran 0,25% dari jumlah fasilitas kredit atau sebesar Rp1.250.

Perusahaan melakukan pembayaran kembali pokok fasilitas kredit setiap triwulannya di tahun keempat dan kelima untuk *tranche* A serta di tahun kedua dan ketiga untuk *tranche* B dengan besaran sebesar 12,5%.

Fasilitas kredit tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar LPS + margin 4,5% yang dibayarkan setiap tanggal 25 Desember, 25 Maret, 25 Juni, dan 25 September setiap tahunnya.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) di atas 100% setelah masa pemberian *waiver* sampai dengan tahun 2024 berakhir.
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 300%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp411.017 dan Rp472.033.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN") (continued)

For tranche A credit facility, the loan agreement term is 5 years from December 22, 2023, until December 31, 2028 with a grace period of 3 years and a credit drawdown period of 1 year from the signing of the loan agreement. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding balance of this facility amounting to Rp350,000 and Rp350,000.

As for tranche B credit facility, the loan agreement term is 3 years from December 22, 2023, until December 31, 2026, with a grace period of 1 year and a credit drawdown period of 1 year from the signing of the loan agreement. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding balance of this facility amounting to Rp61,017 and Rp122,033.

Bank BTN charges an upfront fee, a fee paid upon approval of credit facility, amounting to 0.25% of the credit facility amount or Rp1,250.

The Company makes quarterly principal repayments on the credit facilities in the fourth and fifth years for tranche A, and in the second and third years for tranche B, at a rate of 12.5%.

The credit facility incurs an annual interest rate of LPS + a margin of 4.5%, payable on December 25, March 25, June 25, and September 25 each year.

Company is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) above 100% after the waiver period until the end of 2024.*
- *Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 300%.*

As of December 31, 2025 and 2024 the outstanding balance of this facility amounting to Rp411,017 and Rp472,033.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

AP Indonesia

Restrukturisasi Pinjaman

Sehubungan dengan kondisi operasi dan keuangan AP Indonesia (dahulu AP I), pada tanggal 30 Juni 2022, AP Indonesia (dahulu AP I) telah menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Induk dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank BNI"), PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("Bank BSI"), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN"), Bank Jatim, Bank DKI, Bank Papua, Bank DIY, Bank Bali, PT Bank Danamon, Tbk. ("Bank Danamon"), untuk seluruh saldo pinjaman yang masih terutang. Pada tanggal 15 Juli 2022, PT Bank Central Asia ("BCA"), PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF"), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank BRI"), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") telah menandatangani dokumen aksesi yang menyatakan penundukan diri terhadap perjanjian restrukturisasi pinjaman tersebut di atas.

Perjanjian restrukturisasi pinjaman ini mengubah beberapa ketentuan-ketentuan dari perjanjian pinjaman sebelumnya dari masing masing kreditur yaitu perubahan jangka waktu pinjaman, suku bunga dan jadwal pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Dalam perjanjian ini, Bank Mandiri bertindak sebagai agen fasilitas, agen jaminan dan agen penampungan.

Berdasarkan perjanjian restrukturisasi pinjaman ini, seluruh pinjaman dikenakan suku bunga dan indikasi bagi hasil sebesar 5% untuk tahun 2022 - 2023, LPS + margin 2% untuk tahun 2024 - 2028, dan LPS + margin 2,5% untuk tahun 2029 - 2031. Tingkat suku bunga yang dibayarkan selama tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 2%, dimana sisanya akan ditangguhkan dan dibayarkan pada tahun 2025-2026 (Catatan 19 dan 26).

Selain itu, apabila selama tahun 2022 dan 2023 terdapat kenaikan tingkat suku bunga LPS dari yang berlaku pada 1 Juni 2022, maka AP Indonesia akan membayarkan selisih tingkat suku bunga tersebut setelah seluruh bunga yang tertunggak telah dilunasi atau paling lambat pada 2027 dan 2028.

Pada tanggal 7 Agustus 2024 dan 31 Desember 2024, AP Indonesia melakukan pembayaran dipercepat atas bunga ditangguhkan masing-masing sebesar Rp13.152 dan Rp826.057.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

AP Indonesia

Loan Restructuring

In connection with AP Indonesia (formerly AP I)'s operational and financial condition, on June 30, 2022, AP Indonesia (formerly AP I) signed an Agreement for Restructuring with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank BNI"), PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("Bank BSI"), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN"), Bank Jatim, Bank DKI, Bank Papua, Bank DIY, Bank Bali, PT Bank Danamon Tbk. ("Bank Danamon"), for all its existing outstanding loans. In July 15, 2022, BCA, PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF"), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank BRI"), and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") have signed accession document which acts as a proof of submission to the above loan restructuring agreement.

This loan restructuring agreement has changed several terms from previous loan agreements with its creditors such as changes in maturity date of loans, interest rates and payment schedules of loan principal and interests. Under this agreement, Bank Mandiri acts as a facility agent, guarantee agent and collecting agent.

Based on this loan restructuring agreement, all loans bear interest at 5% for 2022 - 2023, LPS + 2% margin for 2024 - 2028, and LPS + 2.5% margin for 2029 - 2031. Interest rate paid during 2022 and 2023 is 2%, of which the remaining will be deferred and paid in 2025-2026 (Notes 19 and 26).

In addition, if during 2022 and 2023 there is an increase in interest rate from the LPS interest rate applicable on June 1, 2022, AP Indonesia will pay the difference in interest rates after all outstanding interest has been paid or in 2027 and 2028 at the latest.

On August 7, 2024 and December 31, 2024, AP Indonesia made accelerated payments on the deferred interest amounting to Rp13,152 and Rp826,057, respectively.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

AP Indonesia (lanjutan)

AP Indonesia (continued)

Restrukturisasi Pinjaman (lanjutan)

Loan Restructuring (continued)

Pada tanggal 19 Maret 2025 dan 28 Mei 2025, AP Indonesia melakukan pembayaran dipercepat atas bunga ditangguhkan masing-masing sebesar Rp130.541 dan Rp391.622.

On March 19, 2025 and May 28, 2025, AP Indonesia made accelerated payments on the deferred interest which are amounting to Rp130,541 and Rp391,622, respectively.

Pada tanggal 28 Mei 2025, AP Indonesia melakukan pembayaran dipercepat atas selisih tingkat suku bunga LPS sebesar Rp178.421.

On May 28, 2025, AP Indonesia made an accelerated payment for the LPS interest rate differential amounting to Rp178,421.

Setelah tanggal efektif, AP Indonesia wajib untuk membayar angsuran pokok pinjaman secara triwulanan dengan tanggal jatuh tempo terakhir adalah pada tanggal 23 Desember 2031.

After the effective date, AP Indonesia is required to pay the principal installments on a quarterly basis with the latest due date on December 23, 2031.

Terkait dengan perjanjian di atas, AP Indonesia juga telah menandatangani perjanjian gadai rekening dan pengelolaan rekening dengan Bank Mandiri. Rekening ini digunakan untuk pembayaran pinjaman dan dikelola penuh oleh Bank Mandiri.

Related to the above agreement, AP Indonesia has also signed an account pawn agreement and account management with Bank Mandiri. These accounts will be used to pay the loans and are fully managed by Bank Mandiri.

Pinjaman ini dijamin dengan setiap rekening pembayaran utang, rekening cadangan pembayaran utang dan rekening penerimaan program *deleveraging* kepada para pemberi fasilitas. Khusus sehubungan dengan gadai atas rekening penerimaan program *deleveraging*, jaminan gadai tersebut akan dilepaskan setelah nasabah telah menggunakan dana hasil program *deleveraging* tersebut sampai dengan jumlah kumulatif sebesar Rp10.500.000 untuk pelunasan dipercepat dan belanja modal sesuai ketentuan perjanjian.

This loan is guaranteed by each debt payment account, debt payment reserve account and deleveraging program receipt account to the facility providers. Particularly in relation to the pawning of deleveraging program receipt account, the collateral will be released after the customer has used the deleveraging program proceeds up to a cumulative amount of Rp10,500,000 for early repayment and capital expenditures in accordance with the provisions of the agreement.

Utang bank jangka panjang yang direkstrukturisasi terdiri dari:

Restructured long-term bank loans consist of:

	Jumlah Utang/ direstrukturisasi ***Amount of Loan/ Restructured***	**Saldo Pinjaman/ December 31, 2025** ***Balance as of/ December 31, 2025***	
Sindikasi 2019 - BCA Mandiri	4.000.000	3.829.949	*Syndicated 2019 - BCA Mandiri*
Sindikasi Mandiri, BRI, BCA, SMI, IIF	3.799.054	3.637.545	*Syndicated Mandiri, BRI, BCA, SMI, IIF*
Bilateral 2019 - Mandiri	3.000.000	2.872.461	*Bilateral 2019 - Mandiri*
Sindikasi 2019 - BPD	2.500.000	2.393.718	*Syndication 2019 - BPD*
Bilateral 2018 - SMI	2.000.000	1.914.974	*Bilateral 2019 - SMI*
Bilateral 2018 - BTN	2.000.000	1.914.974	*Bilateral 2018 - BTN*
Bilateral 2020 - Danamon	1.250.000	1.196.859	*Bilateral 2020 - Danamon*
Bilateral 2020 - DKI (KMK)	1.000.000	957.487	*Bilateral 2020 - DKI (KMK)*
Bilateral 2019 - BTN	1.000.000	957.487	*Bilateral 2019 - BTN*
Bilateral 2019 - BSI	1.000.000	957.487	*Bilateral 2019 - BSI*
Bilateral 2018 - BSI	1.000.000	957.487	*Bilateral 2018 - BSI*
Bilateral 2021 - BNI	886.585	848.894	*Bilateral 2021 - BNI*
Jumlah	**23.435.639**	**22.439.322**	***Total***

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

Restrukturisasi Pinjaman (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, AP Indonesia membayar pinjaman pokok utang bank jangka panjang masing-masing sebesar Rp961.113 (termasuk pembayaran dipercepat Rp23.688 pada tanggal 5 Agustus 2025) dan Rp12.901.

AP Indonesia diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 1 kali sejak tahun 2023;
- Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) maksimum sebesar 5 kali untuk tahun 2022-2024 dan maksimum sebesar 3 kali sejak tahun 2025;
- Rasio Lancar minimal sebesar 1 kali berlaku sejak tahun 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025, AP Indonesia tidak memenuhi persyaratan rasio lancar minimal sebesar 1 kali. Pada tanggal 31 Desember 2025, AP Indonesia telah menerima surat persetujuan pengesampingan atas persyaratan rasio lancar minimal sebesar 1 kali tersebut hingga tanggal laporan keuangan berikutnya yaitu 31 Desember 2026 dari Mandiri selaku agen fasilitas.

Pada tanggal 31 Desember 2024, AP Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

AP Indonesia (continued)

Loan Restructuring (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, AP Indonesia made repayments of long-term bank loan principal amounting to Rp961,113 (including an accelerated payment of Rp23,688 on August 5, 2025) and Rp12,901, respectively.

AP Indonesia is required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum of 1 time since 2023;*
- *Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 5 times for the year 2022-2024 and maximum of 3 times since 2025;*
- *Current Ratio minimum of 1 time since 2024.*

As of December 31, 2025 and 2024, AP Indonesia breached the covenant of current ratio minimum of 1 time.On December 31, 2025, AP Indonesia has obtained waiver letter on the covenant of current ratio minimum of 1 time until the next financial statement period on December 31, 2026 from Mandiri as the facility agent.

As of December 31, 2024, AP Indonesia has complied with all of the covenants of the above-mentioned as stipulated in the respective loan agreements.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

AP Indonesia (dahulu AP II)

AP Indonesia (formerly AP II)

Dibawah ini ringkasan dari utang bank jangka panjang yang dimiliki oleh AP Indonesia (dahulu AP II):

Below is a summary of the long-term bank debts held by AP Indonesia (formerly AP II):

Kreditur/ *Creditor*	**Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date***	**Jumlah Maksimum Fasilitas/ *Maximum Facility Amount* (Rp)**	**Saldo Terutang 31 Desember 2025/ *Outstanding December 31, 2025* (Rp)**	**Jatuh Tempo/ *Maturity Date***	**Pembayaran Periode Berjalan/ *Payment During This Period* (Rp)**	**Suku Bunga/ *Interest Rate***	**Jaminan/ *Collateral***
Maybank	12 Oktober/ *October 12,* 2018	3.000.000	1.750.000	12 Oktober/ *October 12*, 2028	500.000 (2024: 375.000)	6,40% - 5,65% (2025) 6,40% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
	3 Juni/ *June 3*, 2020	500.000	500.000	29 Desember/ *December 29*, 2026	-	9,24% - 7,64% (2025) 9,24% - 9,51% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
	22 Desember/ *December 22*, 2023	694.750	571.432	15 Desember/ *December 15*, 2028	86.844 (2024: 36.474)	9,13% - 7,53% (2025) 9,13% - 9,40% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
Bank Jateng	22 Oktober/ *October 22,* 2021	700.000	-	22 Oktober/ *October 22*, 2025	455.000 (2024: 140.000)	10,00% - 8,75% (2025) 10,00% - 10,25% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
Muamalat	29 Agustus/ *August 29*, 2022	500.000	462.300	29 Agustus/ *August 29*, 2029	20.268 (2024: 4.051)	7,00% - 7,75% (2025) 7,75% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
SMI	20 Maret/ *March 20*, 2015	500.000	-	20 March/ *March 20*, 2025	50.925 (2024: 266.000)	6,25% (2025 & 2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
	21 November/ *November 21*, 2018	1.500.000	1.026.000	21 November/ *November 21*, 2028	250.000 (2024: 140.000)	5,65% - 6,40% (2025) 6,40% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
	19 Desember/ *December 19*, 2022	2.000.000	1.948.000	19 Desember/ *December 19*, 2030	32.000 (2024: 20.000)	7,54% - 9,13% (2025) 9,13% - 9,40% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

AP Indonesia (dahulu AP II) (lanjutan)

AP Indonesia (formerly AP II) (continued)

Dibawah ini ringkasan dari utang bank jangka panjang yang dimiliki oleh AP Indonesia (dahulu AP II) (lanjutan):

Below is a summary of the long-term bank debts held by AP Indonesia (formerly AP II) (continued):

Kreditur/ *Creditor*	**Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date***	**Jumlah Maksimum Fasilitas/ *Maximum Facility Amount* (Rp)**	**Saldo Terutang 31 Desember 2025/ *Outstanding December 31, 2025* (Rp)**	**Jatuh Tempo/ *Maturity Date***	**Pembayaran Periode Berjalan/ *Payment During This Period* (Rp)**	**Suku Bunga/ *Interest Rate***	**Jaminan/ *Collateral***
Bank Mandiri	1 April/ *April 1*, 2016	700.000	150.465	31 Maret/ *March 31*, 2026	250.775 (2024: 125.020)	5,50% - 6,25% (2025) 6,25% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
	29 November/ *November 29*, 2021	400.000	382.313	28 Maret/ *March 28*, 2031	13.170 (2024: -)	8,46% - 9,92% (2025) 9,92% - 10,18% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
	20 Maret/ *March 20*, 2023	725.000	566.770	19 Maret/ *March 19, 2028*	108.300 (2024: 36.100)	7,78% - 9,13% (2025) 9,13% - 9,40% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
PT Bank Syariah Nasional ("BSN") *)	12 September/ *September 12*, 2018	1.000.000	662.950	12 September/ *September 12*, 2028	166.250 (2024:100.000)	5,65-6,40% (2025) 6,40% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
	24 Maret/ *March 24*, 2023	481.000	377.585	24 Maret/ *March 24*, 2028	72.150 (2024: 24.050)	7,79% - 9,13% (2025) 9,13% - 9,40% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*

*) Efektif per tanggal 22 Desember 2025, Unit Syariah BTN telah resmi melakukan *spin-off* menjadi entitas baru dengan nama PT Bank Syariah Nasional, sehingga seluruh hak dan kewajiban Bank BTN beralih sepenuhnya dari Bank BTN ke BSN tanpa ada perubahan pada syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya/*Effective December 22, 2025, Bank BTN's Sharia Unit officially completed its spin-off into a new entity named PT Bank Syariah Nasional. Accordingly, all rights and obligations of Bank BTN have been fully transferred from Bank BTN to BSN, with no changes to the terms and conditions previously agreed upon*

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

AP Indonesia (dahulu AP II) (lanjutan)

AP Indonesia (formerly AP II) (continued)

Dibawah ini ringkasan dari utang bank jangka panjang yang dimiliki oleh AP Indonesia (dahulu AP II) (lanjutan):

Below is a summary of the long-term bank debts held by AP Indonesia (formerly AP II) (continued):

Kreditur/ ***Creditor***	**Tanggal Perjanjian/** ***Agreement Date***	**Jumlah Maksimum Fasilitas/** ***Maximum Facility Amount*** **(Rp)**	**Saldo Terutang 31 Desember 2025/** ***Outstanding December 31, 2025*** **(Rp)**	**Jatuh Tempo/** ***Maturity Date***	**Pembayaran Periode Berjalan/** ***Payment During This Period*** **(Rp)**	**Suku Bunga/** ***Interest Rate***	**Jaminan/** ***Collateral***
Bank BNI	1 April/ *April 1*, 2016	700.000	150.465	31 Maret/ *March 31*, 2026	250.775 (2024: 125.020)	5,50% - 6,25% (2025) 6,25% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
	15 Mei/ *May 15*, 2023	722.000	593.845	14 Mei/ *May 14*, 2028	90.250 (2024: 30.685)	7,78% - 9,13% (2025) 9,13% - 9,40% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
Bank BRI	1 April/ *April 1*, 2016	700.000	87.465	1 April/ *April 1*, 2026	145.810 (2024: 116.690)	5,50% - 6,25% (2025) 6,25% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
	27 Maret/ *March 27*, 2023	675.000	529.875	27 Maret/ *March 27*, 2028	101.250 (2024: 33.750)	7,78% - 9,13% (2025) 9,13% - 9,40% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("EXIM")	1 April/ *April 1,* 2015	1.500.000	-	1 April/ *April 1,* 2025	328.162 (2024: 669.450)	6,25% (2025 & 2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*
IIF	15 Juli/ *July 15*, 2015	400.000	-	15 Juli/ *July 15*, 2025	154.600 (2024: 120.000)	6,00% - 6,25% (2025) 6,25% (2024)	Tidak ada jaminan khusus/ *No special collateral*

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

AP Indonesia (dahulu AP II) (lanjutan)

AP Indonesia (formerly AP II) (continued)

Berikut adalah persyaratan rasio keuangan yang berlaku untuk perjanjian pinjaman jangka panjang dan status pemenuhanya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following is the applicable financial ratio requirements for long-term loan agreements and their compliance status as of December 31, 2025 and 2024:

Kreditur/ *Lenders*	**Persyaratan Rasio Keuangan/ *Financial Ratio Covenant***
Maybank, Muamalat, SMI, Bank Mandiri, BSN, Bank BNI, EXIM, IIF	- *Debt Service Coverage ratio* minimum 1 kali/ *Debt Service Coverage ratio at minimum 1* - *Debt to Equity ratio* maksimum 2 kali/ *Debt to Equity ratio maximum 2 times*
Bank BRI	- *Debt Service Coverage ratio* minimum 1 kali/ *Debt Service Coverage ratio at minimum 1* - *Debt to Equity ratio* maksimum 2 kali/ *Debt to Equity ratio maximum 2 times* - Ekuitas positif/*positive equity*
Bank Jateng	- *Debt to Equity ratio* maksimum 2,2 kali/ *Debt to Equity ratio maximum 2.2 times* - Ekuitas positif/*positive equity*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, AP Indonesia telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

As of December 31, 2025 and 2024, AP Indonesia has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.

Seluruh utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang AP Indonesia telah dilunasi melalui program Injourney Group Financial Solution ("IGFS") (Catatan 51).

All of the AP Indonesia's long-term bank loans and other financial institution borrowings have been fully settled through the Injourney Group Financial Solution ("IGFS") program (Note 51).

IAS

IAS

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")

APS1 memperoleh fasilitas pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dari Bank BSI pada tanggal untuk 17 Mei 2019 dengan ringkasan fasilitas pinjaman sebagai berikut:

APS1 obtained Musyarakah Mutanaqishah financing facilites from Bank BSI on for May 17, 2019 with credit facility as summarized below

Kreditur/*Creditor*	**Tanggal Penarikan/ *Drawdown Date***	**Jumlah Maksimum Fasilitas/ *Maximum Facility Amount (Rp)***	**Jatuh Tempo/ *Maturity Date***	**Pembayaran Periode Berjalan/ *Payment During This Period (Rp)***	**Jumlah 31 Desember/ *Amount December 31***	
					2025	**2024**
BSI I	28 Oktober 2015/ *October 28, 2015*	3.650	November 2025/ *November 2025*	543	-	543
BSI I	22 Agustus 2016/ *August 22, 2016*	1.800	Agustus 2026/ *August 2026*	266	193	459
BSI III	31 Mei 2019/ *May 31, 2019*	112.512	Desember 2026/ *December 2026*	17.680	23.572	41.252
BSI IV	31 Mei 2019/ *May 31, 2019*	15.949	Desember 2026/ *December 2026*	2.401	-	2.401
BSI V	28 Juni 2019/ *June 28, 2019*	7.762	Desember 2026/ *December 2026*	64	-	64
BSI VI	31 Juli 2019/ *July 31, 2019*	2.109	Desember 2026/ *December 2026*	173	230	403
BSI VII	31 Juli 2019/ *July 31, 2019*	3.708	Desember 2026/ *December 2026*	572	-	572

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

IAS (lanjutan)

IAS (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI") (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI") (continued)

APS1 memperoleh fasilitas pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dari Bank BSI pada tanggal untuk 17 Mei 2019 dengan ringkasan fasilitas pinjaman sebagai berikut: (lanjutan)

APS1 obtained Musyarakah Mutanaqishah financing facilites from Bank BSI on for May 17, 2019 with credit facility as summarized below (continued)

Kreditur/ *Creditor*	Tanggal Penarikan/ *Drawdown Date*	Jumlah Maksimum Fasilitas/ *Maximum Facility Amount (Rp)*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Pembayaran Periode Berjalan/ *Payment During This Period (Rp)*	Jumlah 31 Desember/ Amount December 31	
					2025	2024
BSI VIII	19 September 2019/ *September 19, 2019*	27.807	Desember 2026/ *December 2026*	4.333	-	4.333
BSI IX	31 Oktober 2019/ *October 31, 2019*	23.551	Desember 2026/ *December 2026*	3.686	-	3.686
BSI X	31 Oktober 2019/ *October 31, 2019*	5.283	Desember 2026/ *December 2026*	648	-	648
BSI XI	27 Januari 2020/ *January 27, 2020*	2.775	Desember 2026/ *December 2026*	560	749	1.309
BSI XII	24 Januari 2020/ *January 24, 2020*	1.115	Desember 2026/ *December 2026*	9	-	9
BSI XIII	28 Januari 2020/ *January 28, 2020*	19.267	Desember 2026/ *December 2026*	2.635	-	2.635
BSI XIV	28 Januari 2020/ *January 28, 2020*	14.602	Desember 2026/ *December 2026*	3.193	4.258	7.451
BSI XV	25 Agustus 2020/ *August 25, 2020*	9.775	Desember 2026/ *December 2026*	1.433	-	1.433
BSI XVI	25 Agustus 2020/ *August 25, 2020*	1.358	Desember 2026/ *December 2026*	209	-	209
BSI XVII	25 Agustus 2020/ *August 25, 2020*	2.152	Desember 2026/ *December 2026*	327	-	327
BSI XVIII	29 September 2020/ *September 29, 2020*	2.361	Desember 2026/ *December 2026*	512	683	1.195
Jumlah				**39.244**	**29.685**	**68.929**

Pinjaman bank jangka panjang dari BSI memiliki marjin berkisar dari 10%-13% per tahun.

The long-term bank loan from BSI bears fixed rates margin is in a range of 10%-13% per annum.

APS1 juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:
- *Current Ratio* (CR) minimal 1 kali
- *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 3 kali
- *Debt Service Coverage* (DSCR) minimal 1 kali

APS1 is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:
- *Current Ratio (CR) minimum 1 time*
- *Debt to Equity Ratio (DER) maximum 3 time*
- *Debt Service Coverage (DSCR) minimum 1 time*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, semua fasilitas pinjaman bank jangka panjang yang diperoleh oleh APS1 sebagaimana tertera diatas adalah tanpa jaminan.

As of December 31, 2025 and 2024, all long-term bank loan credit facilities obtained by APS1 as listed above are unsecured.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, APS1 telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

As of December 31, 2025 and 2024, APS1 has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

IAS (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri")

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 30 Desember 2024, IASS memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri untuk kebutuhan capital expenditure IASS tahun 2024 dan 2025 dengan plafond sebesar Rp80.000. Pinjaman ini dikenakan upfront fee sebesar 0,1% dari nilai plafond pinjaman dan pinjaman juga dikenakan bunga pinjaman sebesar JIBOR1M + 1,25% per tahun yang dibayarkan tiap bulan selama masa pinjaman dengan ketentuan jumlah bunga yang dibayarkan minimal sebesar 7,25% dan maksmimal sebesar 7,50%.

Fasilitas pinjaman ini hanya bisa digunakan untuk membiayai 80% dari nilai aset yang diperoleh

Perjanjian ini bersifat *Commited* dan *Non Revolving* dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan masa penarikan serta masa tenggang maksimal 1 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

IASS juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:
- *Current Ratio (CR) minimal 1 kali*
- *Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 3 kali*
- *Debt Service Coverage (DSCR) minimal 1 kali*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp79.213 dan nihil.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2025, IASS memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri untuk kebutuhan *capital expenditure* IASS tahun 2025 dan 2026 dengan limit fasilitas kredit sebesar Rp250.000. Pinjaman ini dikenakan upfront fee sebesar 0,5% dari niliai *plafond* pinjaman dan pinjaman ini juga dikenakan bunga pinjaman sebesar INDONIA3M + 2,783% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini hanya bisa digunakan untuk membiayai 75% dari nilai aset yang diperoleh

Perjanjian ini bersifat *Commited* dan *Non Revolving* dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan masa penarikan serta masa tenggang maksimal 1 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

IAS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri")

Based on the Credit Agreement dated December 30, 2024, IASS obtained an investment credit facility from Bank Mandiri to finance IASS capital expenditure for the years 2024 and 2025, with a ceiling of Rp80,000. This loan is charged with upfront fee amounting 0.1% of the loan ceiling and bears interest at JIBOR 1M + 1.25% per annum, payable monthly throughout the loan period, with the provision that the total interest rate payable at minimum 7.25% and maximum at 7.50%.

This credit facility can only be used to finance 80% of the total assets acquired.

This Agreement is committed and non-revolving, with a tenure of five (5) years, and provides for a maximum withdrawal period and grace period of up to one year from the date of signing of the Credit Agreement.

IASS is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:
- *Current Ratio (CR) minimum 1 time*
- *Debt to Equity Ratio (DER) maximum 3 time*
- *Debt Service Coverage (DSCR) minimum 1 time*

As of December 31, 2025 and 2024 the outstanding balance of this facility amounting to Rp79,213 and nil.

Based on the Credit Agreement dated December 17, 2025, IASS obtained an investment credit facility from Bank Mandiri to finance IASS capital expenditure for the years 2024 and 2025, with a ceiling of Rp250,000. This loan is charged with an upfront fee amounting 0.5% of the loan ceiling and bears interest at INDONIA3M + 2.783% per annum.

This credit facility can only be used to finance 75% of the total assets acquired.

This Agreement is committed and non-revolving, with a tenure of 7 (seven) years, and provides for a maximum withdrawal period and grace period of up to one year from the date of signing of the Credit Agreement.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

IAS (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri") (lanjutan)

IASS juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pinjaman sebagai berikut:
- *Current Ratio (CR) minimal 1 kali*
- *Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 3 kali*
- *Debt Service Coverage (DSCR) minimal 1 kali*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo pinjaman atas fasilitas kredit ini adalah nihil karena belum ada penggunaan fasilitas kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, semua fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri yang diperoleh IASS sebagaimana tertera diatas dijaminkan dengan:
- Aset yang diperoleh menggunakan fasilitas pinjaman sebesar nilai perolehan aset tersebut dan sudah diasuransikan secara penuh.
- Piutang usaha IASS sebesar Rp150.000

- Rekening penerimaan IASS
- Rekening DSA yang digunakan untuk membayar kewajiban kepada Bank Mandiri dengan penyetoran dana paling lambat lima hari kerja sebelum jatuh tempo
- Rekening DSRA digunakan sebagai cadangan atas Rekening DSA untuk menampung dana yang setara dengan satu kali pembayaran pokok dan satu kali pembayaran bunga atas saldo pinjaman yang tersisa.
- Rekening Excess Cash yang digunakan sebagai rekening penampung dana sisa budget operasional

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, IASS telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam seluruh perjanjian utang bank jangka panjangnya.

Sarinah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi II No. WCO.KP/592/KI/2021 pada tanggal 8 Desember 2021, Sarinah mendapatkan kredit investasi dari Mandiri.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

IAS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri") (continued)

IASS is also required to maintain certain financial ratios during the period of loan agreement as follows:
- *Current Ratio (CR) minimum 1 time*
- *Debt to Equity Ratio (DER) maximum 3 time*
- *Debt Service Coverage (DSCR) minimum 1 time*

As of December 31, 2025 and 2024 the outstanding balance of this credit facility is nil as the credit facility have not been used.

As of December 31, 2025 and 2024, all credit facilities obtained by IASS as listed above are secured with:

- *Assets that was acquired using loan facilities in an amount equal to its acquisition cost and has been fully insured.*
- *Trade receivables of IASS amounting to Rp150,000*
- *Collection account of IASS*
- *DSA account that is used to settle obligations to Bank Mandiri, with funds required to be deposited no later than five business days before the due date.*
- *DSRA account that serves as a reserve for the DSA Account, maintaining funds equivalent to one principal payment and one interest payment on the remaining loan balance.*

- *The Excess Cash Account is used as a reserve account for remaining operational budget funds*

As of December 31, 2025 and 2024, IASS has complied with all covenant stated in all of its long-term bank loan agreements.

Sarinah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Based on the Deed of Investment Credit Agreement II No. WCO.KP/592/KI/2021 on December 8, 2021, Sarinah received an investment credit from Mandiri.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

Sarinah (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

Fasilitas yang diperoleh Sarinah antara lain:
- Fasilitas kredit investasi 1 sebesar Rp98.800.
- Fasilitas kredit investasi 2 sebesar Rp3.000.
- Jangka waktu 5 tahun (31 Desember 2021 - 31 Desember 2026).
- Tingkat suku bunga 7,75%.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut:
- Gedung parkir yang dibiayai dari fasilitas KI-1 akan diikat fidusia.
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 163/Margasari seluas 1.750 m^2 yang terletak di Jl. Jend Basuki Rachmat No 2a Malang, Kel kiduldalem, Kec klojen Kota Malang Jawa Timur.
- Sebidang tanah sertifikat Hak Guna bangunan No. 112 seluas 4.135 m^2 yang terletak di Jl. Jend Basuki Rachmat No.2A Malang.
- Inventaris/peralatan/perlengkapan *trading house* yang dibiayai dari fasilitas KI-2 diikat fidusia.
- Piutang usaha dan persediaan barang dagangan masing masing, senilai Rp15.000 yang diikat secara fidusia.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Sarinah memiliki kewajiban untuk mempertahankan *financial covenant* yaitu:
- Rasio Lancar minimum 110% selama masa konstruksi mulai dihitung sejak terbitnya Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2023.
- *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak melebihi 230%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Sarinah tidak dapat memenuhi persyaratan rasio lancar minimum 100%. Sarinah menerima surat persetujuan *waiver letter* dari Bank Mandiri pada tanggal 28 Februari 2025. Sehingga saldo pinjaman jangka panjang Bank Mandiri disajikan pada liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Sarinah telah memenuhi semua kovenan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp45.933 dan Rp77.272.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

Sarinah (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

Facilities obtained by Sarinah include:
- *Investment credit facility 1 amounting to Rp98,800.*
- *Investment credit facility 2 amounting to Rp3,000.*
- *5 years period (December 31, 2021 - December 31, 2026).*
- *Interest rate 7.75%.*

This facility is secured by the following collaterals:
- *The parking building which financed by KI-1 facility secured by fiduciary.*
- *A plot of land with Building Use Rights Certificate Number 163/Margasari covering an area of 1,750 m^2 located at Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 2a Malang, Kel kiduldalem, Kec Klojen Malang City, East Java.*
- *A plot of land with a Right of Use certificate for building No. 112 covering an area of 4,135 m^2 located on Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 2A Malang.*
- *Trading House's equipments which financed by KI-2 facility secured by fiduciary.*
- *Each of accounts receivable and inventories, amounted to Rp15,000 secured by fiduciary.*

In connection with the credit agreement, Sarinah has an obligation to maintain financial covenants namely:
- *A minimum Current Ratio of 110% during the construction period starting from the publication of the Financial Statements for the position of December 31, 2023.*
- *Debt to Equity Ratio does not exceed 230%.*

As of December 31, 2024, Sarinah was unable to meet the minimum liquidity ratio requirement of 110%. On February 28, 2025, Sarinah received a waiver letter of approval from Bank Mandiri. Therefore, long-term bank loan from Bank Mandiri is classified as short-term liabilties as of December 31, 2024.

As of December 31, 2025, Sarinah has complied with all covenants stated in the loan agreement above.

The loan balance as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp45,933 and Rp77,272, respectively.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

Sarinah (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Berdasarkan Akta Kredit Investasi No 1 tanggal 2 November 2021 dibuat dihadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., dan Surat Persetujuan Kredit No. BIN/3.2/112/R tanggal 19 Maret 2021 Bank setuju memberikan fasilitas kredit investasi kepada Sarinah, dengan addendum Surat Bank BNI Nomor KPS 3/3.1/190/R tanggal 4 Agustus 2022 serta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Investasi No. (3) 05 tanggal 8 Agustus 2022.

Fasilitas yang diperoleh Sarinah antara lain:
- Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp65.000.
- Jangka waktu 8 tahun (2 November 2021 - 2 November 2029).
- Tingkat suku bunga 9,5%.

Fasilitas ini dijamin dengan (Catatan 17), sebidang tanah dan bangunan ruko diatasnya yang terletak di Jl. Ir H Juanda Raya No. 27 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Sarinah memiliki kewajiban untuk mempertahankan menjaga rasio keuangan yaitu:
- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 3 (tiga) kali berlaku sejak tahun 2025.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100% berlaku sejak tahun 2025.
- *Debt Service Coverage* minimal 100%, dapat dibawah 100% selama kas positif dan memenuhi ketersediaan dana untuk pembayaran kewajiban per triwulan.

Pada tanggal 2 Januari 2025, Sarinah telah melakukan pelunasan dipercepat atas seluruh utang pinjaman kredit modal kerja yang diperoleh dari Bank BNI, yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2029.

Per 31 Desember 2025 dan 2024 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar RpNihil dan Rp57.567.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

Sarinah (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Based on the Investment Credit Deed No. 1 dated November 2, 2021, it was drawn up before Fessy Farizqoh Alwi, S.H., and the Credit Approval Letter No. BIN/3.2/112/R dated March 19, 2021, the Bank agreed to provide an investment credit facility to Sarinah, with addendum to Bank BNI Letter No. KPS 3/3.1/190/R dated August 4, 2022 and Approval of Amendment to Investment Credit Agreement No. (3) 05 dated August 8, 2022.

Facilities obtained by Sarinah include:
- *Investment Credit Facility amounting to Rp65,000.*
- *8 years period (November 2, 2021 - November 2, 2029).*
- *9.5% interest rate.*

This facility is secured by (Note 17), a plot of land and a shophouse building on it which is located on Jl. Ir H Juanda Raya No. 27 Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta.

In connection with the credit agreement, Sarinah has an obligation to maintain:

- *Debt Equity Ratio (DER) maximum 3 (three) times applicable since 2025.*
- *Debt Service Coverage Ratio of at least 100% applies since 2025.*
- *Debt Service Coverage of at least 100%, can be below 100% as long as cash is positive and meets the availability of funds for quarterly payment of obligations.*

On January 2, 2025, Sarinah accelerated the repayment of the working capital loan facility to BNI which matured in 2029.

As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding balance of this facility amounting to RpNil and Rp57,567, respectively.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

Sarinah (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 5 tertanggal 26 April 2021 dibuat di hadapan Sri Budi Lestariningsih, S.H., BRI setuju memberikan fasilitas kredit transaksi khusus kepada Sarinah, sebagai berikut:
- Plafond pinjaman sebesar Rp50.000.
- Jangka waktu 5 tahun (26 April 2021 - 26 April 2026).
- Tingkat suku bunga 9,25%

Fasilitas ini dijamin (Catatan 18), sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1725 Petojo Selatan, seluas 1.159 m^2 yang terletak di provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, kecamatan Gambir, kelurahan petojo Selatan.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Sarinah memiliki kewajiban untuk mempertahankan rasio keuangan yaitu:
- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 300%.
- *Current ratio* minimal 100%
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 1 (satu) kali.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Sarinah telah melakukan pelunasan dipercepat atas seluruh utang pinjaman kredit modal kerja yang diperoleh dari Bank BRI, yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada saldo terutang dari fasilitas kredit ini.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank")

Sarinah mendapatkan fasilitas kredit berupa kredit modal kerja ekspor yang dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja ekspor ke supplier dan pembelian tagihan atas dasar L/C atau non L/C untuk mempercepat pembayaran dari *buyer* di luar negeri.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

Sarinah (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Based on the Deed of Credit Agreement No. 5 dated April 26, 2021, made in presence of Sri Budi Lestariningsih, S.H., BRI agreed to provide a special transaction credit facility to Sarinah, as follows:
- *Loan plafonds of Rp50,000.*
- *5 years period (April 26, 2021 – April 26, 2026).*
- *Interest rate 9.25%*

This facility is secured by (Note 18), a plot of land with Building Use Rights Certificate Number 1725 Petojo Selatan, covering an area of 1,159 sqm which is located in the province of the Special Capital Region of Jakarta, Central Jakarta Administrative City, Gambir sub-district, Petojo Selatan sub-district.

In connection with the credit agreement, Sarinah has an obligation to maintain financial ratio:
- *Debt Equity Ratio (DER) of a maximum of 300%.*
- *Current ratio at least 100%.*
- *Debt Service Coverage Ratio at least 1 (one) time.*

On December 31, 2024, the Sarinah accelerated the repayment of the working capital loan facility to BRI which matured in 2026.

As of December 31, 2025 and 2024, there were no outstanding balances under this credit facility.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank")

Sarinah obtained a credit facility in the form of export working capital credit which is used to finance export working capital to suppliers and purchase bills on an L/C or non L/C basis to accelerate payments from overseas buyers.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

Sarinah (lanjutan)

Sarinah (continued)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank") (lanjutan)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank") (continued)

Fasilitas yang diperoleh Sarinah antara lain:
- Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp20.000.
- Jangka waktu 1 tahun (22 September 2023 - 22 September 2025).

Facilities obtained by Sarinah include:
- *Investment Credit Facility amounting to Rp20,000.*
- *1 year period (September 22, 2023 - September 22, 2025).*

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut:
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2024/Margasari seluas 1.900 m^2 yang terletak di JI. Pluto utara no.1 Kel. Margasari, Kec. Buah batu kota Bandung, Jawa Barat.

This facility is secured by the following collaterals:
- *A plot of land with Building Rights Title Certificate No. 2024/Margasari covering an area of 1,900 m^2 located at JI. Pluto Utara no.1 Kel. Margasari, Kec. Buah batu Bandung city, West Java.*

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, PT Sarinah memiliki kewajiban untuk mempertahankan *financial covenant* yaitu:
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 1,10 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,50 kali.

In connection with the credit agreement, PT Sarinah has an obligation to maintain financial covenants namely:
- *Debt Service Coverage Ratio minimum 1.10 times.*
- *Debt to Equity Ratio of maximum 2.50 times.*

Pada tahun 2025, fasilitas pinjaman ini tidak diperpanjang.

In 2025, this loan facility was not extended.

TWC

TWC

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Fasilitas Kredit Investasi

Investment Credit Facility

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 2 tanggal 3 November 2021 yang dibuat di hadapan Anita Kurniawati S.H. M.Kn., Notaris di Sleman, TWC memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai maksimum sebesar Rp57.000 dengan jangka waktu selama 36 bulan.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 2 dated November 3, 2021, made in presence of Anita Kurniawati S.H. M.Kn., Notary in Sleman, TWC obtained an investment credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta with a maximum value of Rp57,000 with a period of 36 months.

Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk *refinancing* Hotel The Manohara. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 9% per tahun (*floating*).

The purpose of this facility is for refinancing The Manohara Hotel. This facility bears interest at 9% per annum (floating).

Pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 1.835 m^2 dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 9.529 m^2 (Catatan 17).

This loan is secured by land with an area of 1,835 sqm and a building that stands on it with an area of 9,529 m^2 (Note 17).

Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 1 November 2024

This loan facility has been settled on November 1, 2024

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

TWC (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 59 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Anita Kurniawati S.H. M.Kn., Notaris di Sleman, TWC memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai maksimum sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu selama 24 bulan. Akta perjanjian kredit tersebut telah dua kali diadendum, terakhir pada tanggal 25 Agustus 2025 dalam rangka perpanjangan jangka waktu hingga tanggal 25 Agustus 2027.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 1.835 m^2 dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 9.529 m^2 (Catatan 17).

TWC harus memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berikut ini selama fasilitas masih berjalan:
- Rasio utang terhadap modal paling tinggi sebesar 200%.
- Rasio likuiditas paling rendah sebesar 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, TWC tidak dapat memenuhi persyaratan rasio likuiditas paling rendah sebesar 100%, namun pada tanggal 31 Desember 2025, TWC telah menerima *waiver letter* dari PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga menegaskan bahwa kewajiban untuk melunasi pembayaran adalah pada tanggal 25 Agustus 2027 sesuai dengan perjanjian kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2024, TWC tidak dapat memenuhi persyaratan rasio likuiditas paling rendah sebesar 100%, namun pada tanggal 31 Desember 2024, TWC telah menerima *waiver letter* dari PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selama kredit belum lunas, TWC tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Melakukan penjualan aset, kecuali dilakukan dalam rangka menjalankan operasional TWC dan/atau sekuritas aset sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan penggabungan atau akuisisi, kecuali dilakukan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

TWC (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Working Capital Credit Facility

Based on the Deed of Credit Agreement No. 59 dated August 25, 2023, made in presence of Anita Kurniawati S.H. M.Kn., Notary in Sleman, TWC obtained an investment credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta with a maximum amount of Rp50,000 with a period of 24 months. The deed of credit agreement has been amended two times, the latest is on August 25, 2025 in relation to extending the period until August 25, 2027.

This loan is secured by land with an area of 1,835 sqm and a building that stands on it with an area of 9,529 m^2 (Note 17).

TWC must meet the following financial ratios covenant during the facility period:

- *Debt to equity ratio (DER) maximum of 200%.*
- *Liquidity ratio minimum of 100%.*

As of December 31, 2025, TWC did not meet the minimum liquidity ratio of 100%, however on December 31, 2025, TWC has obtained waiver letter from PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta which also emphasized that the obligation to settled the repayment of loan is on August 25, 2027 in accordance with the credit agreement.

As of December 31, 2024, TWC did not meet the minimum liquidity ratio of 100%, however on December 31, 2024, TWC has obtained waiver letter from PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

As long as the credit has not been paid off, TWC is not allowed to do the following:
- *Selling assets, except for carrying out TWC's operations and/or asset securities in accordance with the articles of association and the provisions of the applicable laws and regulations.*
- *Perform mergers or acquisitions, unless carried out in the context of implementing the applicable laws and regulations.*
-

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

TWC (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (lanjutan)

Fasilitas Kredit Modal Kerja (lanjutan)

Selama kredit belum lunas, TWC tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- Melakukan perubahan bidang usaha, kecuali dilakukan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan pihak Bank.
- Mengubah periode pelaporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp49.794, dan Rp49.794.

Fasilitas Kredit Investasi *Joint Borrower* dari PT Bank DKI

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Ashoyaratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, TWC memperoleh fasilitas kredit investasi *Joint Borrower* dengan BHIVA dari PT Bank DKI dengan nilai maksimum sebesar Rp130.000, terdiri dari:

1. Kredit Investasi I sebesar Rp15.000, yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan investasi rutin sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran TWC (RKAP). Berlaku selama maksimal 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2027.
2. Kredit Investasi II sebesar Rp115.000, yang digunakan untuk pembiayaan atas aset yang dibangun pada Kawasan Taman Mini Indonesia Indah di bawah pengelolaan PT Bhumi Visatanda Indonesia, berlaku selama maksimal 63 (enam puluh tiga) bulan sejak 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2029.

Fasilitas kredit tersebut dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan seluruh tagihan dan/ atau pendapatan Taman Mini Indonesia Indah milik BHIVA yang ditampung dalam *collection account/ escrow account* atas nama BHIVA dengan minimal sebesar 125% dari plafond kredit yang diberikan atau minimal sebesar Rp162.500 dan escrow account atas nama BHIVA di PT Bank DKI.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

TWC (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (continued)

Working Capital Credit Facility (continued)

As long as the credit has not been paid off, TWC is not allowed to do the following: (continued)

- *Make changes to the business field, unless it is carried out in the context of implementing the applicable laws and regulations.*
- *Conduct transactions that cause conflicts of interest with the interests of the Bank.*
- *Change the financial reporting period.*

As of December 31, 2025 and 2024 the outstanding balance of this facility amounting to Rp49,794 and Rp49,794, respectively.

Joint Borrower Investment Credit Facility from PT Bank DKI

Based on the Deed of Credit Agreement No. 55 dated December 21, 2023 made before Ashoyaratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, TWC obtained a Joint Borrower investment credit facility with BHIVA from PT Bank DKI with a maximum amount of Rp130,000, consisting of:

1. *Investment Credit I of Rp15,000, to finance routine investment activities in accordance with the TWC Budget Work Plan (RKAP). Valid for a maximum of 39 (thirty-nine) months from December 21, 2023 to March 21, 2027.*
2. *Investment Credit II of Rp115,000, to finance assets built in Taman Mini Indonesia Indah Area under the management of PT Bhumi Visatanda Indonesia, valid for a maximum of 63 (sixty-three) months from December 21, 2023 to March 21, 2029.*

The credit facilities charged with interest at the rate of 9% per annum.

This loan is guaranteed by all bills and/or income of Taman Mini Indonesia Indah owned by BHIVA which is accommodated in a collection account/ escrow account on behalf of BHIVA with a minimum of 125% of the credit plafond provided or a minimum of Rp162,500 and an escrow account on behalf of BHIVA at PT Bank DKI.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

TWC (lanjutan)

Fasilitas Kredit Investasi *Joint Borrower* dari PT Bank DKI (lanjutan)

Selama periode perjanjian, TWC harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penempatan dana TWC di Bank DKI dengan minimal penempatan dana dalam bentuk giro sebesar Rp5.000.
2. Menjaga *financial covenant* TWC Konsolidasi sebagai berikut:
   a) *Current Ratio* TWC minimal sebesar 1 kali.
   b) *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 3 kali.
   c) *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.
3. Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan penggunaannya.
4. Menjaga kepemilikan saham TWC tetap sebagai pemegang saham pengendali BHIVA.

Pada tanggal 31 Desember 2025, TWC dan entitas anak tidak dapat memenuhi persyaratan *current ratio* minimal sebesar 1 kali, namun TWC dan entitas anak telah mendapatkan surat pernyataan dari PT Bank DKI pada tanggal 31 Desember 2025 yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak membuat PT Bank DKI memberlakukan event of default kepada TWC dan BHIVA dan seluruh kewajiban pembayaran akan tetap berjalan sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi No.55.

Pada tanggal 31 Desember 2024, TWC tidak dapat memenuhi persyaratan *current ratio* minimal sebesar 1 kali namun TWC telah mendapatkan surat pernyataan dari PT Bank DKI pada tanggal 31 Desember 2025 yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak membuat PT Bank DKI memberlakukan event of default kepada TWC dan BHIVA dan tidak akan meminta TWC dan BHIVA untuk melakukan pelunasan dipercepat hingga tanggal 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar Rp74.740, dan Rp93.990.

Fasilitas Kredit Pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan No. 41 tanggal 8 November 2023 yang dibuat di hadapan Ir. Edwin Rusdi S.H. M.Kn., Notaris di Bantul, TWC memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai maksimal sebesar Rp90.000 dengan tanggal jatuh tempo fasilitas pembiayaan pada 23 September 2028.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

TWC (continued)

Joint Borrower Investment Credit Facility from PT Bank DKI (continued)

During the agreement period, TWC must meet the following requirements, among others:

1. *Placement of funds of TWC in Bank DKI with a minimum placement of funds in the form of current accounts of Rp5,000.*
2. *Maintain Consolidated TWC financial covenant as follows:*
   a) Current Ratio at least 1 time.
   b) Debt to Equity Ratio maximum of 3 times.
   c) Debt Service Coverage Ratio at least 100%
3. *Use credit facilities according to their intended use.*
4. *Maintain share ownership of TWC remain as controlling shareholders of BHIVA.*

As of December 31, 2025, TWC and its subsdiary did not meet the minimum current ratio requirement of 1 time, however TWC and its subsdiary has obtained statement letter from PT Bank DKI on December 31, 2025 which stated that the condition is not considered as event of default by PT Bank DKI to TWC and BHIVA and all repayment obligation will still in accordance with the Deed of Investment Credit Facility No.55.

As of December 31, 2024, TWC and its subsdiary did not meet the minimum current ratio requirement of 1 time, however TWC and its subsdiary has obtained statement letter from PT Bank DKI on December 31, 2024 which stated that the condition is not considered as event of default by PT Bank DKI to TWC and BHIVA and will note request accelerated repayment until December 31, 2025..

As of December 31, 2025 and 2024 the outstanding balance of this facility amounting to Rp74,740 and Rp93,990, respectively.

Financing Facilities from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Based on the Deed of Financing Agreement No. 41 dated November 8, 2023, made in presence of Ir. Edwin Rusdi, S.H. M.Kn., Notary in Bantul, TWC obtained financing credit facility from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) with a maximum Amount of Rp90,000.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

TWC (lanjutan)

Fasilitas Kredit Pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (lanjutan)

Akta Perjanjian Pembiayaan No. 41 tersebut di atas telah beberapa kali dilakukan adendum, terakhir melalui Salinan Akta Adendum Ketiga Perjanjian Pembiayan No. 7 tanggal 12 Juni 2025. Berdasarkan adendum tersebut, fasilitas pembiayaan berubah menjadi maksimal sebesar Rp81.000 dengan jangka waktu penarikan fasilitas pembiayaan dimulai sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 22 Juni 2025. Pembiayaan dikenakan bunga per tahun sebesar Indonia + 1,31449%.

TWC diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan termasuk pemenuhan rasio keuangan sebagai berikut:
1) DSCR to EBITDA > 1,25x.
2) Current Ratio >1x.
3) Debt to Equity < 3x
4) Debt to EBITDA < 4,5x; 3,5x di 2024 dan seterusnya

Pada tanggal 31 Desember 2024, TWC belum melakukan pencairan atas fasilitas pembiayaan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025 saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar Rp64.110.

Pada tanggal 31 Desember 2025, TWC tidak dapat memenuhi persyaratan *current ratio* minimal sebesar 1 kali. TWC menerima *waiver letter* dari SMI pada tanggal 28 Januari 2026. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman sebesar Rp64.110 disajikan sebagai liabilitas lancar pada laporan keuangan konsolidasian TWC dan Grup

HIN dan Entitas Anak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

HISI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka senior BNI melalui Akta No 21 tanggal 27 September 2023, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta. Nilai yang disetujui adalah sebesar Rp1.253.785. Jumlah fasilitas pinjaman tersebut terdiri dari:
- Fasilitas Tranche A1: sejumlah sampai dengan maksimum Rp1.243.230; dan
- Fasilitas Tranche A2: sejumlah sampai dengan maksimum Rp10.555

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

TWC (continued)

Financing Facilities from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (continued)

The Deed of Financing Agreement No.41 above has been amended several times, the latest through Third Addendum of Deed of Financing Agreement No.7 dated June 12, 2025. Based on the addendum, the financing faciity changed into maximum amount of Rp81,000 with availability period to withdrawn the facility start from the signing date of the agreeement until June 22, 2025. The facilty charged with interest at the rate of Indonia + 1.31449% per annum.

TWC must meet several covenant requirements including the following financial ratios:

1) DSCR to EBITDA > 1.25x.
2) Current Ratio >1x.
3) Debt to Equity < 3x
4) Debt to EBITDA < 4.5x; 3.5x in 2024 onwards

A of December 31, 2024, TWC has not drawdown the financing facility yet.

As of December 31, 2025, the outstanding balance of this facility amounting to Rp64,110.

As of December 31, 2025, TWC did not meet the minimum current ratio requirement of 1 time. TWC has obtained waiver letter from SMI on January 28, 2026. Therefore, as of December 31, 2025, the outstanding balance amounted to Rp64,110 presented as current liabilities on the TWC's and Group's consolidated financial statements.

HIN and Subsidiaries

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

HISI obtained a senior term loan facility from BNI through Deed No. 21 dated September 27, 2023, made in the presence of Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn, Notary in Jakarta. The approved amount is Rp1,253,785. The total loan facility consists of:

- *Tranche A1 Facility: up to a maximum of Rp1,243,230; and*
- *Tranche A2 Facility: up to a maximum of Rp10,555*

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

HIN dan Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (lanjutan)

Sehubungan dengan fasilitas tersebut, HISI dikenai suku bunga sebesar agregat dari marjin dan suku bunga acuan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 3 (tiga) bulan dan bunga dihitung secara harian. Jangka waktu pinjaman untuk fasilitas Tranche A1 dan Tranche A2 adalah terhitung masing-masing 12 dan 5 tahun sejak tanggal perjanjian.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, HISI memiliki kewajiban untuk mempertahankan:
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) (dihitung dengan dasar LTM) tidak kurang dari 100% sejak periode 31 Desember 2026 sampai dengan akhir tanggal jatuh tempo final.
- *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak melebihi sebesar 2,50 sejak periode 31 Desember 2024
- *Current Ratio* tidak kurang dari 1 sejak 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, HISI telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025, HISI telah menerima surat nomor SSF/5/1/4142 tanggal 19 Desember 2025 dari BNI yang menyetujui permohonan waiver rasio lancar HISI.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Sesuai dengan surat Bank Mandiri nomor: CBD.CB1.SPPK.038/2022 tertanggal 19 Mei 2022, perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Novasi a.n. HIN Kepada HIPRO, Bank Mandiri menyetujui permohonan Novasi Fasilitas Kredit Investasi HIN kepada HIPRO.

Jumlah yang dinovasi fasilitas kredit Investasi Hotel Inna Muara Padang, pokok fasiltas KI: Rp61.625, Fasilitas KI Hotel Grand Inna Kuta Bali, pokok fasilitas KI: Rp59.925, dan pokok fasilitas KI Hotel Inaya Putri Bali adalah: Rp331.770. Seluruh tunggakan bunga yang dijadwalkan dan bunga yang ditangguhkan juga dilakukan novasi.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

HIN and Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (continued)

In relation to the facility, HISI bears interest at the aggregate of the margin and the 3 (three) month Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) and interest is calculated on a daily basis. The loan terms for Tranche A1 and Tranche A2 facilities are 12 and 5 years respectively from the date of agreement.

In connection with the credit agreement, HISI has an obligation to maintain:
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (calculated on LTM basis) not less than 100% since the period December 31, 2026 until the end of the final maturity date.*
- *Debt to Equity Ratio (DER) not exceeding 2.50 since December 31, 2024.*
- *Current Ratio not less than 1 since December 31, 2025.*

As of 31 December 2024, HISI has fulfilled all of these requirements.

As of December 31, 2025, HISI received letter No. SSF/5/1/4142 dated December 19, 2025 from BNI, confirming the approval of HISI's request for waiver of current ratio requirement.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

In accordance with Bank Mandiri letter number: CBD.CB1.SPPK.038/2022 dated 19 May 2022, regarding Novation Approval Letter a.n. HIN to HIPRO, Bank Mandiri approved the Novation of HIN's Investment Credit Facility to HIPRO.

Amount renovated Investment credit facility Hotel Inna Muara Padang, principal amount: Rp61,625, Grand Inna Kuta Bali Hotel KI facility, principal of KI facility: Rp59,925, and principal of KI facility of Hotel Inaya Putri Bali is: IDR331,770. All arrears of scheduled interest and deferred interest were also novated.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

HIN dan Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

Fasilitas Kredit Investasi Hotel Grand Inna Muara Padang dengan Limit Kredit: Rp61.625, sifat kredit: aflopend - non revolving, jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2027, dengan tingkat bunga efektif antara 6% - 8% per annum (p.a). Pembayaran bunga sejak 23 Maret 2022 sampai dengan 22 Maret 2023 sebesar 2% dan sisanya akan ditangguhkan, kemudian pembayaran atas bunga yang ditangguhkan tersebut, termasuk bunga yang ditangguhkan periode 23 April 2020 sampai dengan 22 Maret 2022, akan dibayarkan setiap bulan, mulai April 2023 sampai dengan Desember 2027.

Fasilitas Kredit Investasi Hotel Grand Inna Kuta Bali dengan Limit Kredit: Rp59.925, sifat kredit: aflopend - non revolving, jangka waktu sampai 31 Desember 2027, dengan tingkat bunga efektif antara 6% - 8% per annum (p.a).

Pembayaran bunga sejak 23 Maret 2022 sampai dengan 22 Maret 2023 sebesar 2% dan sisanya akan ditangguhkan, kemudian pembayaran atas bunga yang ditangguhkan tersebut, termasuk bunga yang ditangguhkan periode 23 April 2020 sampai dengan 22 Maret 2022, akan dibayarkan setiap bulan, mulai April 2023 sampai dengan Desember 2027.

Fasilitas Kredit Investasi Inaya Putri Bali (Hotel Inaya) dengan Limit Kredit: Rp331.770, sifat kredit: aflopend-non revolving, jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2029, dengan tingkat bunga efektif antara 6% - 8% per annum (p.a). Pembayaran bunga sejak 23 Maret 2022 sampai dengan 22 Maret 2023 sebesar 2% dan sisanya akan ditangguhkan, kemudian pembayaran atas bunga yang ditangguhkan tersebut, termasuk bunga yang ditangguhkan periode 23 April 2020 sampai dengan 22 Maret 2022, akan dibayarkan setiap bulan, mulai April 2023 sampai dengan Desember 2029.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

HIN and Subsidiaries (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

Grand Inna Muara Padang Hotel Investment Credit Facility with Credit Limit: Rp61,625, nature of credit: aflopend - non revolving, term up to 31 December 2027, with effective interest rate between 6% - 8% per annum (p.a). The interest payment from 23 March 2022 to 22 March 2023 is 2% and the rest will be deferred, then the payment of the deferred interest, including the deferred interest for the period 23 April 2020 to 22 March 2022, will be paid monthly, starting from April 2023 to December 2027.

Hotel Grand Inna Kuta Bali Investment Credit Facility with Credit Limit: Rp59,925, nature of credit: aflopend - non revolving, tenor until 31 December 2027, with effective interest rate between 6% - 8% per annum (p.a).

The interest payment from 23 March 2022 to 22 March 2023 is 2% and the rest will be deferred, then the payment of the deferred interest, including the deferred interest for the period 23 April 2020 to 22 March 2022, will be paid monthly, starting from April 2023 to December 2027.

Inaya Putri Bali Investment Credit Facility (Hotel Inaya) with Credit Limit: Rp331,770, nature of credit: aflopend-non revolving, tenor up to 31 December 2029, with effective interest rate between 6% - 8% per annum (p.a). Payment of interest from 23 March 2022 to 22 March 2023 is 2% and the remainder will be deferred, then payment of the deferred interest, including deferred interest for the period 23 April 2020 to 22 March 2022, will be paid monthly, starting April 2023 to December 2029.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

HIN dan Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

Agunan berupa aset tetap berupa tanah dan bangunan proyek Inna Muara Padang (SHGB No. 191/Belakang Tangsi) yang diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai pengikat sebesar Rp70.700, aset tetap berupa tanah dan bangunan Hotel Inna Kuta Beach (SHGB No. 361/Kuta) yang diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I dan II dengan nilai pengikatan sebesar Rp134.100. Aset tetap berupa tanah dan bangunan proyek Grand Inna Putri Bali (SHGB No. 6668/Kel. Benoa) yang akan diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai pengikatan sebesar Rp367.520. Agunan tersebut terkait dan diikat secara cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit atas nama HIP di Bank Mandiri.

ITDC dan Entitas Anak

Asian Infrastructure Investment Bank

Pada tanggal 31 Desember 2018, ITDC menandatangani perjanjian pinjaman dengan Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB") dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar AS$248.400.000 (nilai penuh) yang digunakan untuk membangun infrastruktur utama untuk pengembangan wisata baru di Mandalika, Lombok.

Jangka waktu pinjaman selama 35 tahun dengan *grace period* pokok 10 tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah fasilitas yang dicairkan adalah sebesar AS$125.349.585 (nilai penuh) atau setara dengan Rp2.025.900. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar SOFR ditambah *adjustment spread* ditambah *variable spread* sebesar 1,83%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada ITDC sebesar 7,15 - 7,28%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah fasilitas yang belum dicairkan adalah sebesar AS$125.780.480,15 (nilai penuh) atau setara Rp2.032.864. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, tingkat bunga terkait *commitment fee* untuk pinjaman yang belum dicairkan sebesar 0,25% per tahun.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

HIN and Subsidiaries (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

Collateral in the form of fixed assets in the form of land and building of Inna Muara Padang project (SHGB No. 191/Belakang Tangsi) which is bound by Hak Tanggungan rank I with a binding value of Rp70,700, fixed assets in the form of land and building of Inna Kuta Beach Hotel (SHGB No. 361/Kuta) which is bound by Hak Tanggungan rank I and II with a binding value of Rp134,100. Fixed assets in the form of land and building of Grand Inna Putri Bali project (SHGB No. 6668/Kel. Benoa) which will be bound by Hak Tanggungan with a binding value of Rp367,520. The collateral is related and bound by cross collateral and cross default with all credit facilities on behalf of HIP at Bank Mandiri.

ITDC and Subsidiaries

Asian Infrastructure Investment Bank

As of December 31, 2018, ITDC signed a loan agreement with Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB") with total loan facility amounting to US$248,400,000 (full amount) to provide sustainable core infrastructure for the development of a new tourism destination in Mandalika, Lombok.

The loan period is for 35 years with a principal grace period of 10 years from the date of the loan agreement.

As of December 31, 2024, the total disbursed facilities amounted to US$125,349,585 (full amount) or equivalent to Rp2,025,900. This loan bears an interest rate of SOFR plus adjustment spread plus variable spread of 1.83%. For the years ended December 31, 2024, the loan interest rates charged to the ITDC is 7.15 - 7.28%.

As of December 31, 2024, the total facilities that had not been disbursed amounted to US$125,780,480.15 (full amount) or equivalent to Rp2,032,864. For the year ended December 31, 2024, the interest rate related to commitment fee for undisbursed loans is 0.25% per annum.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

ITDC dan Entitas Anak (lanjutan)

Asian Infrastructure Investment Bank (lanjutan)

Pada tanggal 10 Oktober 2025, ITDC melakukan pembayaran sebagian pokok sebesar AS$54.000.000 (nilai penuh) atau setara Rp896.130 dan *break cost* sebesar AS$430.555 (nilai penuh) atau setara Rp7.145.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo fasilitas pinjaman yang masih terutang adalah sebesar AS$78.595.731 (nilai penuh) atau setara dengan Rp1.318.993. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar SOFR ditambah adjustment spread ditambah variable spread sebesar 1,83%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada ITDC sebesar 6,15 - 6,26%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah fasilitas yang belum dicairkan adalah sebesar AS$115.804.268,61 (nilai penuh) atau setara Rp1.943.427. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, tingkat bunga terkait commitment fee untuk pinjaman yang belum dicairkan sebesar 0,25% per tahun.

Pinjaman ini dijamin oleh Negara Republik Indonesia (Kementerian Keuangan dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)). Atas jaminan Pemerintah tersebut, ITDC membayarkan biaya jasa jaminan sesuai dengan perjanjian penjaminan pinjaman dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 , biaya penjaminan yang dikeluarkan oleh ITDC kepada PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) masing-masing sebesar Rp1.392 dan Rp1.323 yang dicatat sebagai beban umum dan administrasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pembatasan penting dalam pinjaman ini berdasarkan perjanjian kredit awal adalah *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1,1x.

Berdasarkan amandemen perjanjian kredit tanggal 20 September 2024, AIIB menghapus kovenan DSCR dan diganti dengan kewajiban ITDC untuk melaporkan rasio keuangan kepada Bank, secara triwulanan.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

ITDC and Subsidiaries (continued)

Asian Infrastructure Investment Bank (continued)

As of October 10, 2025, ITDC has been paid partial prepaymen of principal amounted to US$54,000,000 (full amount) or equivalent to Rp896,130 and break cost amounted to US$430,555 (full amount) or equivalent to Rp7,145.

As of December 31, 2025, the outstanding loan facilities amounted to US$78,595,731 (full amount) or equivalent to Rp1,318,993. This loan bears an interest rate of SOFR plus adjustment spread plus variable spread of 1.83%. For the year ended December 31, 2025, the loan interest rates charged to ITDC is 6.15 - 6.26%.

As of December 31, 2025, the total facilities that had not been disbursed amounted to US$115,804,268.61 (full amount) or equivalent to Rp1,943,427. For the year ended December 31, 2025, the interest rate related to commitment fee for undisbursed loans is 0.25% per annum.

This loan is guaranteed by the Republic of Indonesia (Ministry of Finance and PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)). For this Government guarantee, ITDC pays the guarantee service fee in accordance with the loan guarantee agreement with PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero). For the years ended December 31, 2025 and 2024, the guarantee costs incurred by ITDC to PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) amounted to Rp1,392 and Rp1,323, respectively, and recorded as part of general and administrative expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

An important covenant in this loan based on the initial credit agreement is a minimum Debt Service Coverage Ratio ("DSCR") of 1.1x.

Based on amendment of the credit agreement dated September 20, 2024, AIIB removed the DSCR covenant requirement and being replaced with ITDC's obligation to report the financial ratios to the Bank, on a quarterly basis.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

ITDC dan Entitas Anak (lanjutan)

Asian Infrastructure Investment Bank (lanjutan)

Pada tahun 2025, ITDC mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan rasio keuangan kepada bank untuk periode Q1 dan Q2. Laporan Q3 telah disampaikan sesuai jadwal. Berdasarkan konfirmasi melalui email dari AIIB pada 27 Oktober 2025, keterlambatan tersebut tidak akan dianggap sebagai material default berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, ITDC telah memenuhi semua kovenan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.318.993 dan Rp2.025.900.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank")

Pada tanggal 17 Februari 2020, ITDC menandatangani perjanjian pinjaman dengan Eximbank dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.188.000 yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Jangka waktu pinjaman selama 35 tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman.

Pembatasan penting dalam pinjaman ini adalah *DSCR* minimum 1,1x dan *Debt Equity Ratio* maksimum 7x.

Pada tanggal 31 Desember 2024, ITDC telah memenuhi semua kovenan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Pada tanggal 31 Desember 2025, ITDC tidak dapat memenuhi persyaratan DSCR minimum 1,1x. Pada tanggal 29 Desember 2025, ITDC telah menerima surat persetujuan waiver letter dari Indonesia Eximbank atas tidak terpenuhinya DSCR 1,1x pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah fasilitas yang dicairkan sebesar Rp1.180.364. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada ITDC sebesar 5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman pada fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.180.364 dan Rp1.508.526.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

ITDC and Subsidiaries (continued)

Asian Infrastructure Investment Bank (continued)

In 2025, the ITDC experienced delays in submitting financial ratio reports to the bank for Q1 and Q2. The Q3 report was submitted on schedule. based on the confirmation from AIIB on October 27, 2025, such delays will not be considered as a material default under the loan agreement.

As of December 31, 2025 and 2024, ITDC has complied with all covenants stated in the loan agreement above.

As of December 31, 2025 and 2024 the outstanding balance of this facility amounting to Rp1,318,993 and Rp2,025,900, respectively.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank")

On February 17, 2020, ITDC entered loan agreement with Eximbank with total loan amounting to Rp1,188,000 for support the management and development of the Mandalika Special Economic Zone. The loan period is for 35 years from the date of the loan agreement.

An important limitation in this loan is a minimum DSCR of 1.1x. and Debt Equity Ratio maximum of 7x.

As of December 31, 2024, ITDC has complied with all covenants stated in the loan agreement above.

As of December 31, 2025, ITDC did not meet the DSCR requirement minimum of 1.1x. On December 29, 2025, ITDC has received waiver approval letter from Indonesia Eximbank for not fulfilling the DSCR of minimum 1.1x as of December 31, 2025.

As of December 31, 2025 and 2024, the total disbursed facilities amounted to Rp1,180,364. For the year period ended December 31, 2024, this loan bears an interest rate of 5% per annum, respectively.

As of December 31, 2025 and 2024 the outstanding balance of this facility amounting to Rp Rp1,180,364 and Rp1,508.526, respectively.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

ITDC dan Entitas Anak (lanjutan)

Sindikasi HIMBARA

Pada tanggal 3 September 2021, ITDC menandatangani perjanjian fasilitas kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan nilai pinjaman Kredit Investasi sebesar Rp400.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun sejak tanggal penandatanganan fasilitas kredit atau 30 September 2026 (“Kredit Investasi”).

Pembatasan penting dalam pinjaman ini adalah DSCR minimum 1,1x dan debt equity ratio maksimum 4x.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada ITDC sebesar 11,92%-12,18%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp271.698. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 5%. Jumlah pembayaran pokok dari fasilitas pada tahun 2024 sejumlah Rp95.894.

Pada tanggal 31 Desember 2024, ITDC telah memenuhi semua kovenan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada ITDC sebesar 10,59 - 11,93%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp171.809. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 5%. Jumlah pembayaran pokok dari fasilitas pada tahun 2025 adalah sejumlah Rp99.889.

Pada tanggal 31 Desember 2025, ITDC tidak dapat memenuhi persyaratan DSCR minimum 1,1x. Pada tanggal 31 Desember 2025, ITDC telah menerima surat waiver dari agen sindikasi atas tidak terpenuhinya rasio keuangan tertentu pada tanggal 31 Desember 2025.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

ITDC and Subsidiaries (continued)

HIMBARA Syndicate

On September 3, 2021, ITDC entered a syndicated loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with the loan value of Investment Credit of Rp400,000 with a loan term of 5 years from the date of signing the credit facility or September 30, 2026 (“Investment Credit”).

An important limitation in this loan is a minimum DSCR of 1.1x and debt equity ratio maximum of 4x.

For the years ended December 31, 2024, the loan interest rates charged to ITDC is 11.92%-12.18%.

As of December 31, 2024, the outstanding loan facility amounted to Rp271,698. This loan bears an interest rate of 3 months JIBOR + 5%. Total principal repayments for this loan facility in 2024 amounted to Rp95,894.

As of December 31, 2024, ITDC has complied with all covenants stated in the loan agreement above.

For the year ended December 31, 2025, the loan interest rates charged to the ITDC is 10,59 - 11.93%.

As of December 31, 2025, the outstanding loan facility amounted to Rp171,809,236,356. This loan bears an interest rate of 3 months JIBOR + 5%. Total principal repayments for this loan facility in 2025 amounted to Rp99,889,090,900.

As of December 31, 2025, ITDC did not meet the DCSR requirement minimum of 1.1x. On December 31, 2025, ITDC has received a waiver letter from syndicate agent for incompliance of certain financial ratios as of December 31, 2025.

27. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - JANGKA PANJANG (lanjutan)

ITDC dan Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank NTB Syariah

Pada tanggal 12 Januari 2022, PT ITDC Nusantara Utilitas ("INU"), anak ITDC, memperoleh fasilitas pembiayaan dengan PT Bank NTB Syariah (NTB Syariah) dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp5.000 dengan jangka waktu pinjaman 120 bulan dengan nisbah bagi hasil 44,19% ke NTB Syariah.

Pada tanggal 29 Agustus 2024, INU melakukan pengalihan atas seluruh fasilitas pinjaman NTB Syariah kepada Mandiri, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, INU telah melakukan pembayaran atas bagi hasil sejumlah Rp428.

Pada tanggal 29 Agustus 2024, INU melakukan pengalihan atas seluruh fasilitas pinjaman NTB Syariah kepada Mandiri.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Berdasarkan surat no. BOC.DPS/2315/KSB/2024 tanggal 29 Agustus 2024, INU mendapatkan fasilitas kredit agunan surat berharga dari Mandiri, dengan pagu fasilitas pinjaman sejumlah Rp4.500, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut, dan dikenakan suku bunga sebesar 0,50% per tahun diatas tingkat suku bunga deposito Rupiah yang berlaku di Mandiri. Tujuan dari fasilitas pinjaman ini adalah sebagai kredit modal kerja.

Fasilitas ini dijaminkan dengan deposito sejumlah Rp4.500 yang dicatat sebagai dana yang dibatasi penggunaannya pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak terdapat kovenan sehubungan dengan fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp3.300. Jumlah pembayaran pokok dari fasilitas pada tahun 2025 adalah sejumlah Rp900.

27. LONG-TERM BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS (continued)

ITDC and Subsidiaries (continued)

PT Bank NTB Syariah

As of January 12, 2022, PT ITDC Nusantara Utilitas ("INU"), a subsidiary, obtained facility financing from PT Bank NTB Syariah (NTB Syariah) with total loan facility amounting to Rp5,000 with a loan term of 120 months with interest sharing of 44.19% to NTB Syariah.

On August 29, 2024 INU transferred all of credit facility from PT Bank NTB Syariah to Mandiri, and for the year ended December 31, 2024, INU has paid the profit sharing on the loan amounting to Rp428.

On August 29, 2024 INU transferred all of credit facility from PT Bank NTB Syariah to Mandiri.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Based on letter no. BOC.DPS/2315/KSB/2024 dated August 29, 2024, INU obtained securities-backed credit from Mandiri, with credit limit amounting to Rp4,500,, with credit term of 60 (sixty) month from the signing date of the credit agreement, and bearing interest rate at 0.50% per annum above Rupiah time deposit interest rate at Mandiri. The purpose of this loan facility is as a working capital loan.

This credit facilities are secured by time deposit amounted to Rp4,500, which is recorded as part of restricted funds in the consolidated statements of financial position of the Group.

There are no covenants in relation with this loan facility.

As of December 31, 2025, the outstanding loan facility amounted to Rp3,300. Total principal repayments for this loan facility in 2025 amounted to Rp900.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK / *28. BONDS PAYABLE AND SUKUK*

Utang obligasi dan sukuk terdiri dari: / *Bonds payable and sukuk consist of:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Utang obligasi	5.082.160	5.363.400	*Bonds payable*
Utang sukuk	3.928.640	3.714.760	*Sukuk payable*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(9.914)	(14.073)	*Unamortized cost of loans*
Jumlah	**9.000.886**	**9.064.087**	***Total***
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**(2.302.000)**	**(159.000)**	***Current maturities of long-term liabilities***
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**6.698.886**	**8.905.087**	***Long term liabilities - net of current maturities***

Perusahaan / ***Perusahaan***

a. Sukuk Wakalah / ***a. Sukuk Wakalah***

Pada tanggal 30 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantau Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Jangka Panjang yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) tahun 2024 dengan jumlah Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah sebesar Rp2.000.000 (berjangka waktu 9 tahun 9 bulan sejak tanggal penerbitan).

On December 30, 2024, the Company has signed a Long-Term Wakalah Bi Al-Istitsmar Sukuk Issuance and Monitoring Agent Agreement, carried out without going through the Public Offering of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Tahun 2024, with an Investment Capital Sukuk Wakalah amounting to Rp2,000,000 (with a maturity period of 9 years and 10 months from the issuance date).

Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah dan Imbal Hasil Wakalah Terakhir akan dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah akan dibayarkan setiap tahunnya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

The repayment of the Investment Capital of the Sukuk Wakalah and the final Wakalah Profit Share will be made on the date of the Investment Capital repayment of the Sukuk Wakalah, while the Wakalah Profit Share will be paid annually until the maturity date.

Pemegang Sukuk Wakalah memberikan kuasa dan menunjuk Perusahaan sebagai kuasa dari Pemegang Sukuk Wakalah untuk mengelola dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Sukuk Wakalah dengan melakukan kegiatan investasi yang akan dilakukan dengan akad Ijarah, yaitu investasi terkait pengalihan hak manfaat (sewa) atas pelayanan jasa yang diberikan oleh AP Indonesia berupa Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara ("PJP2U") untuk penumpang pesawat udara dalam negeri di Bandar Udara Juanda – Surabaya.

The Sukuk Wakalah holders, represented by the Monitoring Agent, authorize and appoint the Company as the agent of the Wakalah Sukuk holders to manage the funds obtained from the issuance of the Wakalah Sukuk through engaging in investment activities conducted under the Ijarah contract, which related to transfer of right to reward on service provided by AP Indonesia in the form of Passenger Service Charge ("PJP2U") for passenger of domestic aircraft in Juanda Airport – Surabaya.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a. Sukuk Wakalah (lanjutan)

Setelah Perusahaan sebagai Penerbit (wakil) yang mewakili Pemegang Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar menjadi pemilik manfaat atas Obyek Sukuk Ijarah pelayanan jasa (al-khadamat) yang disewa dari AP Indonesia, selanjutnya Perusahaan melangsungkan dan menandatangani akad ijarah dengan AP Indonesia sebagai penyewa (musta'jir) atas manfaat pelayanan jasa (al-khadamat) yang yang disewa dari AP Indonesia untuk jangka waktu paling lama 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan dengan imbalan ijarah.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian sebagai berikut:

a) Rasio Debt to Equity tidak melebihi 5:1.
b) Rasio DSCR tidak kurang dari 1:1 yang berlaku mulai tahun 2025..

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian.

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II)

b. Obligasi dan Sukuk Ijarah 2016

Pada tanggal 10 November 2016, AP Indonesia (dahulu AP I) telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

Perusahaan (continued)

a. Sukuk Wakalah (continued)

After the Company, as the Issuer (representative) representing the Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar Holders, becomes the beneficial owner of the Sukuk Ijarah object of service (al-khadamat) leased from AP Indonesia, the Company shall then conduct and sign the ijarah contract with AP Indonesia as the lessee (musta'jir) for the benefit of the service (al-khadamat) leased from API for a maximum period of 9 (nine) years and 9 (nine) months with ijarah compensation.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the agreement period as follows:

a) Debt to Equity ratio not more than 5:1.
b) DSCR ratio of not less than 1:1 starting from 2025.

As of December 31, 2025, the Company has complied with all of the covenants of the above-mentioned as stipulated in the agreement.

AP Indonesia (formerly AP I and AP II)

b. Bonds Payable and Sukuk Ijarah 2016

On November 10, 2016, AP Indonesia (formerly AP I) has obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Bonds I Angkasa Pura I Year 2016 with detail as follows:

	Obligasi/*Bonds*			
	Nominal/ *Amount*	**Bunga per Tahun/ *Interest per Annum***	**Jangka Waktu / *Periods***	
Seri A	622.000	8.10 %	5 tahun/*years*	*Seri A*
Seri B	389.000	8,40 %	7 tahun/*years*	*Seri B*
Seri C	1.489.000	8,55 %	10 tahun/*years*	*Seri C*
Jumlah	**2.500.000**			***Total***

	Sukuk Ijarah/*Sukuk ijarah*			
	Nominal/ *Amount*	**Imbalan per Tahun/ *Benefit per Annum***	**Jangka Waktu/ *Periods***	
Seri A	268.000	21.708	5 tahun/*years*	*Seri A*
Seri B	55.000	4.620	7 tahun/*years*	*Seri B*
Seri C	177.000	15.133	10 tahun/*years*	*Seri C*
Jumlah	**500.000**	**41.461**		***Total***

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

b. Obligasi dan Sukuk Ijarah 2016 (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat utang obligasi dan utang sukuk ijarah, 75% dana yang diperoleh akan digunakan untuk pengembangan 5 (lima) bandara yaitu bandara baru Yogyakarta, Ahmad Yani - Semarang, Syamsudin Noor - Banjarmasin, Juanda - Surabaya dan Sultan Hasanuddin - Makassar.

Obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi baik langsung maupun tidak langsung dijamin dengan seluruh harta kekayaan AP Indonesia (dahulu AP I), baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

AP Indonesia (dahulu AP I) juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

a) Perbandingan aset lancar terhadap kewajiban lancar tidak kurang dari 1 kali.
b) Perbandingan jumlah pinjaman terhadap jumlah ekuitas tidak lebih dari 3 kali.
c) Perbandingan penghasilan sebelum beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2025, AP Indonesia tidak dapat memenuhi kovenan terkait current ratio. Namun, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah pada tanggal 18 November 2025, seluruh pemegang obligasi dan sukuk ijarah menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, AP Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

b. Bonds Payable and Sukuk Ijarah 2016 (continued)

Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk. as Trustee for bonds payable and sukuk ijarah, 75% of fund received will be used for the development of 5 (five) new airports in Yogyakarta, Ahmad Yani - Semarang, Syamsudin Noor - Banjarmasin, Juanda - Surabaya and Sultan Hasanuddin - Makassar.

Bonds and sukuk ijarah are not secured by specific collateral, but either directly or indirectly secured by all assets of AP Indonesia (formerly AP I) wealth, goods moveable or immovable, either existing or that will exist in the future.

AP Indonesia (formerly AP I) is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable ratio as follows:

a) Ratio of current assets to current liabilities not less than 1 time.
b) Ratio of total debt to total equity not more than 3 times.
c) Ratio of earnings before income tax, depreciation and amortization to interest expenses not less than 1 time.

As of December 31, 2025, AP Indonesia breached the covenant related to the current ratio. However, based on the Bondholders' General Meeting and the Sukuk Ijarah Holders' General Meeting held on November 18, 2025, all bondholders and sukuk ijarah holders approved the waiver of the financial covenant requirement

As of December 31, 2024, AP Indonesia has complied with all of the covenants of the above-mentioned as stipulated in the respective loan agreements.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

b. Obligasi dan Sukuk Ijarah 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 18 November 2021, AP Indonesia (dahulu AP I) melakukan pembayaran obligasi dan sukuk seri A, masing-masing sebesar Rp622.000 dan Rp268.000.

Pada tanggal 20 November 2023, AP Indonesia (dahulu AP I) melakukan pembayaran obligasi dan sukuk seri B, masing-masing sebesar Rp389.000 dan Rp55.000.

Pada tanggal 12 - 21 Juni 2024, AP Indonesia (dahulu AP I) melakukan penawaran pembelian kembali kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah Seri C tahun 2016. Nilai obligasi dan sukuk yang dibeli masing-masing sebesar Rp464.000 atau setara dengan 31,16% dari keseluruhan nilai pokok obligasi seri C dan Rp81.000 atau setara dengan 45,75% dari keseluruhan nilai pokok sukuk ijarah seri C.

Pada tanggal 27 Juni 2024 dan 2 Juli 2024, AP Indonesia (dahulu AP I) melakukan pembayaran atas pembelian kembali Obligasi dan Sukuk Ijarah Seri C tersebut sebesar Rp488.847 dan Rp85.434. Atas pembelian tersebut, AP Indonesia (dahulu AP I) membayar nilai insentif sebesar 4,5% atau senilai Rp24.525 dan membayar bunga akrual sebesar Rp4.776.

Pada tanggal 14 Maret 2024, peringkat obligasi AP Indonesia (dahulu AP I) yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk periode 13 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah idAAA untuk Obligasi dan idAAA(sy) untuk Sukuk.

Pada tanggal 20 Maret 2023, peringkat obligasi AP Indonesia (dahulu AP I) yang diberikan oleh Pefindo adalah idAA+ untuk Obligasi dan idAA+(sy) untuk Sukuk.

Pada tanggal 10 September 2025, peringkat AP Indonesia yang diberikan oleh Pefindo untuk periode 10 September 2025 sampai dengan 1 September 2026 adalah idAAA untuk Obligasi dan idAAA (sy) untuk Sukuk.

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

b. Bonds Payable and Sukuk Ijarah 2016 (continued)

On November 18, 2021, AP Indonesia (formerly AP I) has paid the bonds and sukuk series A of Rp622,000 and Rp268,000, respectively.

On November 20, 2023, AP Indonesia (formerly AP I) has paid the bonds and sukuk series B of Rp389,000 and Rp55,000, respectively.

From June 12 to June 21, 2024, AP Indonesia (formerly AP I) made a repurchase offer to the holders of the Series C 2016 Bonds and Sukuk Ijarah. The value of the bonds and sukuk repurchased amounted to Rp464,000, or equivalent to 31.16% of the total principal value of the Series C bonds, and Rp81,000, or equivalent to 45.75% of the total principal value of the Series C Sukuk Ijarah.

On June 27, 2024, and July 2, 2024, AP Indonesia (formerly AP I) made payments for the repurchase of the Series C Bonds and Sukuk Ijarah amounting to Rp488,847 and Rp85,434, respectively. For this repurchase, AP Indonesia (formerly AP1) paid an incentive of 4.5%, or equivalent to Rp24,525, and paid accrued interest amounting to Rp4,776.

On March 14, 2024, AP Indonesia (formerly AP I)'s bond rating given by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) for the period from March 13, 2024, to March 1, 2025, was idAAA for the Bonds and idAAA(sy) for the Sukuk.

On March 20, 2023, AP Indonesia (formerly AP I)'s bond rating given by Pefindo is idAA+ for Bond Payable and idAA+(sy) for Sukuk.

On September 10, 2025, AP Indonesia's rating given by Pefindo for the period from September 10, 2025 to September 1, 2026, was idAAA for the Bonds and idAAA(sy) for the Sukuk.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

c. Obligasi 2016

Pada tanggal 23 Juni 2016, AP Indonesia (dahulu AP II) telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I Angkasa Pura II tahun 2016 dengan 3 (tiga) seri yaitu:

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

c. Bonds 2016

On June 23, 2016, AP Indonesia (formerly AP II) has obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Bonds I Angkasa Pura II Year 2016 with 3 (three) series as follows:

	Obligasi/*Bonds*			
	Nominal/ *Amount*	**Bunga per Tahun/ *Interest per Annum***	**Jangka Waktu/ *Periods***	
Seri A	1.000.000	8,60 %	5 tahun/*years*	*Seri A*
Seri B	100.000	8,80 %	7 tahun/*years*	*Seri B*
Seri C	900.000	9,00 %	10 tahun/*years*	*Seri C*
Jumlah	**2.000.000**			***Total***

Jumlah dana yang diterima AP Indonesia (dahulu AP II) pada tanggal 30 Juni 2016 dari hasil penerbitan perdana Obligasi I Angkasa Pura II tahun 2016 adalah sebesar Rp2.000.000. Sesuai dengan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi AP Indonesia (dahulu AP II), 92% dari dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bandara Soekarno-Hatta dan 8% akan digunakan untuk pengembangan bandara lainnya.

Total fund received by AP Indonesia (formerly AP II) on June 30, 2016 from the first issuance of Obligasi I Angkasa Pura II Year 2016 was Rp2,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and AP Indonesia (formerly AP II) prospectus for bonds payable, 92% of the funds will be used for the development of Soekarno-Hatta airport and 8% will be used for the development of other airports.

AP Indonesia (dahulu AP II) juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

AP Indonesia (formerly AP II) is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

a) Perbandingan Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar tidak kurang dari 1 kali.
b) Perbandingan Jumlah Pinjaman terhadap Jumlah Ekuitas tidak lebih dari 2 kali.
c) Perbandingan *Profit* Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

a) Ratio of Current Assets to Current Liabilities not less than 1 time.
b) Ratio of Total Debt to Total Equity not more than 2 times.
c) Ratio of Earnings Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses not less than 1 time.

AP Indonesia (dahulu AP II) juga akan dianggap wanprestasi terhadap kewajibannya apabila terdapat utang jangka panjang lainnya dengan jumlah lebih dari 25% dari ekuitas AP Indonesia, yang tidak memenuhi persyaratan.

AP Indonesia (formerly AP II) will also be declared incompliant with its covenant if there is any other long-term loan totaling more than 25% of AP Indonesia's equity that is not in compliance with their covenant.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

c. Obligasi 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 14 Juni, 2021, AP Indonesia (dahulu AP II) melakukan pembayaran obligasi sebesar Rp1.000.000 atas Obligasi I Angkasa Pura II tahun 2016 Seri A. Pada tanggal 27 Juni 2023, AP Indonesia (dahulu AP II) melakukan pembayaran obligasi sebesar Rp100.000 atas Obligasi I Angkasa Pura II tahun 2016 seri B.

Pada tanggal 19 November 2020 dan 16 Desember 2020, Pemegang Obligasi I Angkasa Pura II 2016 setuju untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

- Penghapusan Perbandingan Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar tidak kurang dari 1 kali.
- Pengesampingan Perbandingan *Profit* Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali untuk periode laporan keuangan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

Pada tanggal 28 Juni 2023, AP Indonesia (dahulu AP II) melakukan pembayaran obligasi sebesar Rp100.000 atas Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri B.

Pada tanggal 10 September 2024, peringkat obligasi AP Indonesia (dahulu AP II) yang diberikan oleh Pefindo untuk periode 10 September 2024 sampai dengan 1 September 2025 adalah idAAA.

Pada tanggal 10 September 2025, peringkat AP Indonesia yang diberikan oleh Pefindo untuk periode 10 September 2025 sampai dengan 1 September 2026 adalah idAAA untuk Obligasi dan idAAA (sy) untuk Sukuk.

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

c. Bonds 2016 (continued)

On June 14, 2021, AP Indonesia (formerly AP II) has paid the Bonds I Angkasa Pura II Year 2016 Seri A of Rp1,000,000. On June 27, 2023, AP Indonesia (formerly AP II) has paid the bonds of Obligasi I Angkasa Pura II Year 2016 Seri B of Rp100,000.

On November 19, 2020 and December 16, 2020, holders of Bonds I Angkasa Pura II Year 2016 agreed to make financial covenant adjustments as follows:

- *Invalidation of Ratio of Current Assets to Current Liabilities not less than 1 time.*
- *Waive Ratio of Earnings Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses not less than 1 time for financial reporting period of December 31, 2020 and December 31, 2021.*

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied with all of the covenants of the above-mentioned as stipulated in the respective loan agreements.

On June 28, 2023, AP Indonesia (formerly AP II) has paid the bonds of Rp100,000 for Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri B.

On September 10, 2024, AP Indonesia's (formerly AP II) bond rating given by Pefindo for the period from September 10, 2024 to September 1, 2025, was idAAA.

On September 10, 2025, AP Indonesia's rating given by Pefindo for the period from September 10, 2025 to September 1, 2026, was idAAA for the Bonds and idAAA(sy) for the Sukuk.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

d. Obligasi 2020

Pada tanggal 13 Agustus 2020, AP Indonesia (dahulu AP II) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 dengan 4 (empat) seri yaitu:

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

d. Bonds 2020

On August 13, 2020, AP Indonesia (formerly AP II) issued Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Phase II Year 2020 with 4 (four) series as follows:

Obligasi/*Bonds*

	Nominal/ *Amount*	**Bunga per Tahun/ *Interest per Annum***	**Jangka Waktu/ *Periods***	
Seri A	32.000	7,80 %	3 tahun/*years*	*Seri A*
Seri B	159.000	8,50 %	5 tahun/*years*	*Seri B*
Seri C	1.602.000	9,10 %	7 tahun/*years*	*Seri C*
Seri D	457.000	9,25 %	10 tahun/years	*Seri D*
Jumlah	**2.250.000**			***Total***

Jumlah dana yang diterima AP Indonesia (dahulu AP II) pada tanggal 13 Desember 2020 dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.250.000. Sesuai dengan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi AP Indonesia (dahulu AP II), seluruh dari dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan sisi udara dan sisi darat di Bandara Soekarno Hatta dan bandara lainnya yang dikelola oleh AP Indonesia (dahulu AP II).

Total funds received by AP Indonesia (formerly AP II) on December 13, 2020 from the issuance of Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Phase II Year 2020 is Rp2,250,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee AP Indonesia (formerly AP II) bonds payable prospectus, all funds will be used for the development of airside and landside of Soekarno-Hatta Airport and other airports managed by AP Indonesia (formerly AP II).

AP Indonesia (dahulu AP II) juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

a) Perbandingan Jumlah Pinjaman terhadap Jumlah Ekuitas tidak lebih dari 2 kali.
b) Perbandingan Profit Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

AP Indonesia (formerly AP II) is also obligated to maintain certain financial ratios along the bonds payable period as follows:

a) Ratio of Total Debt to Total Equity not less than 2 times.
b) The comparison of Profit Before Income Tax and Depreciation and Amortisation to Debt Interest Expense not less than 1 time.

AP Indonesia (dahulu AP II) juga akan dianggap wanprestasi terhadap kewajibannya apabila terdapat utang jangka panjang lainnya dengan jumlah lebih dari 30% dari ekuitas AP Indonesia (dahulu AP II), yang tidak memenuhi persyaratan.

AP Indonesia (formerly AP II) will also be declared incompliance with its covenant if there is any other long-term loan totaling more than 30% of AP Indonesia (formerly AP II) equity that is not in compliance with their covenant.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

d. Obligasi 2020 (lanjutan)

Pada tanggal 4 November 2020, Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 setuju untuk melakukan penyesuaian *financial covenant* sebagai berikut:

- Pengesampingan Perbandingan *Profit* Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 kali untuk periode laporan keuangan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 , AP Indonesia (dahulu AP II) telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

Pada tanggal 11 Agustus 2023, AP Indonesia (dahulu AP II) melakukan pembayaran obligasi sebesar Rp32.000 atas Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 Seri A.

Pada tanggal 12 Agustus 2025, AP Indonesia melakukan pembayaran obligasi sebesar Rp159.000 atas Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 Seri B.

Pada tanggal 10 September 2024, peringkat obligasi AP Indonesia (dahulu AP II) yang diberikan oleh Pefindo untuk periode 10 September 2024 sampai dengan 1 September 2025 adalah idAAA.

Pada tanggal 10 September 2025, peringkat AP Indonesia yang diberikan oleh Pefindo untuk periode 10 September 2025 sampai dengan 1 September 2026 adalah idAAA untuk Obligasi dan idAAA (sy) untuk Sukuk.

Pada tanggal 8 September 2021, AP Indonesia (dahulu AP I) telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

d. Bonds 2020 (continued)

On November 4, 2020, holders of Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Phase II Year 2020 agreed to to make financial covenant adjustments as follows:

- *Waive Ratio of Earnings Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses not less than 1 time for financial reporting period of December 31, 2020 and December 31, 2021.*

As of December 31, 2025 and 2024, AP Indonesia (formerly AP II) has complied with all of the covenants of the above-mentioned as stipulated in the respective loan agreements.

On August 11, 2023, AP Indonesia (formerly AP II) has paid the bonds of Rp32,000 for Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 Seri A.

On August 12, 2025, AP Indonesia has paid the bonds of Rp159,000 for Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 Seri B.

On September 10, 2024, AP Indonesia's (formerly AP II) bond rating given by Pefindo for the period from September 10, 2024 to September 1, 2025, was idAAA.

On September 10, 2025, AP Indonesia's rating given by Pefindo for the period from September 10, 2025 to September 1, 2026, was idAAA for the Bonds and idAAA(sy) for the Sukuk.

On September 8, 2021, AP Indonesia (formerly AP I) has obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Bonds I Angkasa Pura I Year 2021 with detail as follows:

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

e. Obligasi dan Sukuk Ijarah 2021

e. Bonds Payable and Sukuk Ijarah 2021

Obligasi/*Bonds*

	Nominal/ *Amount*	**Bunga per Tahun/ *Interest per Annum***	**Jangka Waktu/ *Periods***	
Seri A	272.500	6,70 %	3 tahun/*years*	*Seri A*
Seri B	66.000	7,10 %	5 tahun/*years*	*Seri B*
Seri C	280.400	8,00 %	7 tahun/*years*	*Seri C*
Seri D	497.000	8,60 %	10 tahun/years	*Seri D*
Jumlah	**1.115.900**			***Total***

Sukuk Ijarah/*Sukuk ijarah*

	Nominal/ *Amount*	**Imbalan per Tahun/ *Benefit per Annum***	**Jangka Waktu/ *Periods***	
Seri A	215.000	14.405	3 tahun/years	*Seri A*
Seri B	215.000	15.265	5 tahun/*years*	*Seri B*
Seri C	52.000	4.160	7 tahun/*years*	*Seri C*
Seri D	14.000	1.204	10 tahun/years	*Seri D*
Jumlah	**496.000**	**35.034**		***Total***

Berdasarkan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat utang obligasi dan sukuk ijarah, bahwa dana sebesar Rp622.000 dan Rp199.900 akan digunakan untuk melunasi surat utang Obligasi Seri A 2016, dana sisa hasil penawaran umum obligasi sebanyak 73% akan digunakan untuk investasi antara lain *overlay* landasan pacu, penggantian peralatan, renovasi terminal beserta fasilitas penunjang, dan lain-lain. Sedangkan sebanyak 27% digunakan untuk modal kerja.

Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk. as Trustee for bonds payable and sukuk ijarah, Rp622,000 and Rp199,900 of funds will be used to pay off the 2016 Series A Bonds, the remaining 73% proceeds from the public offering of bonds will be used for investments including runway overlay, equipment replacement, terminal renovation and supporting facilities, and others. Meanwhile, 27% is used for working capital.

Berdasarkan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat utang obligasi dana sebesar Rp199.950 akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok utang Pinjaman Kredit Sindikasi 2016.

Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk. as Trustee for bonds payable, Rp199,950 of funds will be used to pay off part of the principal debt of the 2016 Syndicated Credit Loans.

Obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi baik langsung maupun tidak langsung dijamin dengan seluruh harta kekayaan AP Indonesia (dahulu AP1), baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Bonds and sukuk ijarah are not secured by specific collateral, but either directly or indirectly secured by all assets of AP Indonesia (formerly AP I) wealth, goods moveable or immovable, either existing or that will exist in the future.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

e. Obligasi dan Sukuk Ijarah 2021 (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I) juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

a) Perbandingan jumlah pinjaman terhadap jumlah ekuitas tidak lebih dari 5 kali.
b) Perbandingan penghasilan sebelum beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1 kali yang dimulai pada tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, AP Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

Pada tanggal 5 September 2024, AP Indonesia (dahulu AP I) melakukan pembayaran obligasi dan sukuk seri A, masing-masing sebesar Rp272.500 dan Rp215.000.

Pada tanggal 14 Maret 2024, peringkat obligasi AP Indonesia (dahulu AP I) yang diberikan oleh Pefindo untuk periode 13 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah idAAA untuk Obligasi dan idAAA(sy) untuk Sukuk.

Pada tanggal 10 September 2025, peringkat AP Indonesia yang diberikan oleh Pefindo untuk periode 10 September 2025 sampai dengan 1 September 2026 adalah idAAA untuk Obligasi dan idAAA (sy) untuk Sukuk.

f. Sukuk Wakalah 2023

Pada tanggal 27 Desember 2023, AP Indonesia (dahulu AP1) telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantau Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Jangka Panjang yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum Angkasa Pura I Tahun 2023 dengan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah sebesar Rp1.460.000 (berjangka waktu 9 tahun 10 bulan sejak tanggal penerbitan).

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

e. Bonds Payable and Sukuk Ijarah 2021 (continued)

AP Indonesia (formerly AP I) is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable ratio as follows:

a) Ratio of total debt to total equity not more than 5 times.
b) Ratio of earnings before income tax, depreciation and amortization to interest expenses not less than 1 time starting from 2022.

As of December 31, 2025 and 2024, AP Indonesia has complied with all of the covenants of the above-mentioned as stipulated in the respective loan agreements.

On September 5, 2024, AP Indonesia (formerly AP I) has paid the bonds and sukuk series A of Rp272,500 and Rp215,000, respectively.

On March 14, 2024, AP Indonesia (formerly AP I)'s bond rating given by Pefindo for the period from March 13, 2024, to March 1, 2025, was idAAA for the Bonds and idAAA(sy) for the Sukuk.

On September 10, 2025, AP Indonesia's rating given by Pefindo for the period from September 10, 2025 to September 1, 2026, was idAAA for the Bonds and idAAA(sy) for the Sukuk.

f. Sukuk Wakalah 2023

On December 27, 2023, AP Indonesia (formerly AP I) has signed a Long-Term Wakalah Bi Al-Istitsmar Sukuk Issuance and Monitoring Agent Agreement, carried out without going through the Public Offering of Angkasa Pura I in 2023, with an Investment Capital Sukuk Wakalah amounting to Rp1,460,000 (with a maturity period of 9 years and 10 months from the issuance date).

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

f. Sukuk Wakalah 2023 (lanjutan)

Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah dan Imbal Hasil Wakalah Terakhir akan dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah akan dibayarkan setiap tahunnya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pemegang Sukuk Wakalah yang diwakili oleh Agen Pemantau memberikan kuasa dan menunjuk AP Indonesia (dahulu AP I) sebagai kuasa dari Pemegang Sukuk Wakalah untuk mengelola dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Sukuk Wakalah dengan melakukan kegiatan investasi yang akan dilakukan dengan akad Ijarah.

AP Indonesia (dahulu AP I) juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

a) Perbandingan jumlah pinjaman terhadap jumlah ekuitas tidak lebih dari 5 kali.
b) Perbandingan penghasilan sebelum beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1 kali yang dimulai pada tahun 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, AP Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

Pada tanggal 14 Maret 2024, peringkat Sukuk Wakalah AP Indonesia (dahulu AP I) yang diberikan oleh Pefindo untuk periode 13 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 adalah idAAA untuk Obligasi dan idAAA(sy) untuk Sukuk.

Pada tanggal 10 September 2025, peringkat AP Indonesia yang diberikan oleh Pefindo untuk periode 10 September 2025 sampai dengan 1 September 2026 adalah idAAA (sy) untuk Sukuk.

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

f. Sukuk Wakalah 2023 (continued)

The repayment of the Investment Capital of the Sukuk Wakalah and the final Wakalah Profit Share will be made on the date of the Investment Capital repayment of the Sukuk Wakalah, while the Wakalah Profit Share will be paid annually until the maturity date.

The Sukuk Wakalah holders, represented by the Monitoring Agent, authorize and appoint AP Indonesia (formerly AP I) as the agent of the Wakalah Sukuk holders to manage the funds obtained from the issuance of the Wakalah Sukuk through engaging in investment activities conducted under the Ijarah contract.

AP Indonesia (formerly AP I) is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable ratio as follows:

a) Ratio of total debt to total equity not more than 5 times.
b) Ratio of earnings before income tax, depreciation and amortization to interest expenses not less than 1 time starting from 2023.

As of December 31, 2025 and 2024, AP Indonesia has complied with all of the covenants of the above-mentioned as stipulated in the respective loan agreements.

On March 14, 2024, AP Indonesia (formerly AP I)'s Wakalah Sukuk rating given by Pefindo for the period from March 13, 2024, to March 1, 2025, was idAAA for the Bonds and idAAA(sy) for the Sukuk.

On September 10, 2025, AP Indonesia's rating given by Pefindo for the period from September 10, 2025 to September 1, 2026, was idAAA(sy) for the Sukuk.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

g. Obligasi 2024

Pada tanggal 5 Juli 2024, AP Indonesia (dahulu AP I) telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Angkasa Pura I Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

g. Bonds 2024

On July 5, 2024, AP Indonesia (formerly AP I) has obtained an effective statement from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the issuance of Bonds II Angkasa Pura I Year 2024 with detail as follows:

	Obligasi/*Bonds*			
	Nominal/ *Amount*	**Bunga per Tahun/ *Interest per Annum***	**Jangka Waktu/ *Periods***	
Seri A	8.005.000	6,95 %	3 tahun/*years*	*Seri A*
Seri B	50.005.000	7,30 %	5 tahun/*years*	*Seri B*
Seri C	196.750.000	7,40 %	10 tahun/*years*	*Seri C*
Jumlah	**254.760.000**			***Total***

Berdasarkan perjanjian dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. selaku Wali Amanat utang obligasi, 100% dana akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri A.

Based on the agreement with PT Bank KB Bukopin Tbk. as the Trustee for the bond debt, 100% of the funds will be used for the refinancing of the Sustainable Bonds and Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Stage I Year 2021 Series A.

Obligasi dan sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi baik langsung maupun tidak langsung dijamin dengan seluruh harta kekayaan AP Indonesia (dahulu AP I), baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Bonds and sukuk ijarah are not secured by specific collateral, but either directly or indirectly secured by all assets of AP Indonesia (formerly AP I) wealth, goods moveable or immovable, either existing or that will exist in the future.

AP Indonesia (dahulu AP I) juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

a) Perbandingan jumlah pinjaman terhadap jumlah ekuitas tidak lebih dari 5 kali.
b) Perbandingan penghasilan sebelum beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1 kali.

AP Indonesia (formerly AP I) is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable ratio as follows:

a) Ratio of total debt to total equity not more than 5 times.
b) Ratio of earnings before income tax, depreciation and amortization to interest expenses not less than 1 time.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

g. Obligasi 2024 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, AP Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

Pada tanggal 10 September 2025, peringkat obligasi AP Indonesia yang diberikan oleh Pefindo untuk periode 10 September 2025 sampai dengan 1 September 2026 adalah idAAA.

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

g. Bonds 2024 (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, AP Indonesia has complied with all of the covenants of the above-mentioned as stipulated in the respective loan agreements.

On September 10, 2025, AP Indonesia's bonds rating given by Pefindo for the period from September 10, 2025 to September 1, 2026, was idAAA.

29. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

Rincian liabilitas jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

29. OTHER NON-CURRENT LIABILITIES

The details of other non-current liabilities are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Utang jaminan pelanggan	234.224	307.508	*Customer guarantee debt*
Kewajiban imbal hasil sukuk	48.997	58.461	*Sukuk yield obligation*
Utang tantiem jangka panjang	16.208	-	*Long-term tantiem payables*
Utang jaminan vendor	4.702	17.456	*Vendor guarantee debt*
Utang bunga ditangguhkan	-	522.212	*Deferred interest payable*
Lain-lain	14.200	65.627	*Others*
Jumlah	**318.331**	**971.264**	***Total***

Utang bunga ditangguhkan merupakan selisih lebih akrual beban bunga berdasarkan bunga yang dikenakan dengan bunga yang dibayar atas pinjaman utang bank dan lembaga keuangan lainnya - jangka panjang (Catatan 27).

Deferred interest payable represents the excess of accrued interest expense based on interest charged and interest paid on loans from banks and other financial institutions - long term (Note 27).

Utang jaminan pelanggan terutama merupakan jaminan yang diterima Grup dari para penyewa (tenant) atas sewa ruangan, tanah dan instalasi listrik, air dan telepon di awal perjanjian. Utang jaminan tersebut akan dibayar kembali kepada penyewa apabila hubungan sewa menyewa dan pemakaian fasilitas berakhir.

Customer guarantee debt mainly represent guarantees received by the Group from tenants for space, land and electricity, water and telephone installations at the beginning of the agreement. The security debt will be repaid to the lessee when the rental relationship and use of the facility ends.

30. LIABILITAS KONTRAK JANGKA PANJANG

30. LONG-TERM CONTRACT LIABILITIES

Rincian liabilitas kontrak jangka panjang adalah sebagai berikut:

The details of long-term contract liabilities are as follow:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Sewa dibayar di muka	1.273.758	1.160.570	*Unearned rental revenue*
Kompensasi perpanjangan	1.667	3.666	*Extend compensation*
Pendapatan diterima di muka lainnya	3.489	9.420	*Other unearned revenue*
Jumlah	**1.278.914**	**1.173.656**	***Total***

Kompensasi perpanjangan merupakan pendapatan yang diperoleh oleh HIN dari kerjasama operasi dengan PT Grand Indonesia. Kompensasi sebesar Rp400.000 merupakan pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan atas Perjanjian Pembangunan, Pemilikan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Gedung dan Fasilitas Penunjang berdasarkan Akta No.195 Notaris Lim Robbyson Halim,S.H.,M.H., notaris pengganti di Jakarta. Kompensasi sebesar Rp12.000, Rp13.000, dan Rp13.000 merupakan kompensasi perjanjian BOT Akta Notaris Nomor 141 tanggal 13 Mei 2014, Pasal 11.1.1 nilai kompensasi untuk tahun 2022, 2023 dan 2024.

Extend compensation for extension represents revenue earned from HIN by the joint operation with PT Grand Indonesia. Compensation amounting to Rp400,000 represents the exercise of Option Right of Extension on the Agreement of Development, Ownership, Management and Submission of Land, Building and Supporting Facilities based on Deed No.195 Notary Lim Robbyson Halim, S.H., M.H., substitute notary in Jakarta. Compensation amounting to Rp12,000, Rp13,000, and Rp13,000 represents compensation for the following BOT agreement Notarial Deed No. 141 dated May 13, 2014, Article 11.1.1 compensation value for the years 2022, 2023 and 2024.

Sewa dibayar di muka merupakan pendapatan yang diterima di muka AP I dari PT Duta Paramindo Sejahtera ("DPS") atas penyerahan Penggunaan tanah dengan hak pengelolaan seluas 129.216 m² milik AP I yang terletak di Jalan Pramukasari, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih - Jakarta Pusat. Tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) berdasarkan perjanjian antara AP I dan DPS tanggal 21 Oktober 2009 dengan jangka waktu perjanjian 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 20 tahun. Atas penyerahan Penggunaan tanah dengan hak pengelolaan tersebut, AP I menerima uang penggantian dari DPS sebesar Rp173.408 (termasuk PPN).

Unearned rental revenue represents unearned revenue of AP I from PT Duta Paramindo Sejahtera ("DPS") due to handover of land with use management rights of 129,216 m² owned by AP I located on Jalan Pramukasari, Rawasari Village, Cempak Putih District - Central Jakarta. The land will be used for the construction of simple flats belonging (rusunami) based on the agreement between AP I and DPS on October 21, 2009 with term of the agreement being 30 years and can be extended for an additional period of 20 years. For the handover of land with use management rights, AP I received compensation from DPS amounting to Rp173,408 (including VAT).

Pendapatan lain diterima di muka diantaranya merupakan sewa lahan oleh HIN yang berada di Lot H1 dan H2 Kawasan Ekonomi Khusus Sanur antara HIN dan PT Pertamina Bina Medika IHC ("IHC") yang periode sewa lahan selama 30 (tiga puluh) tahun, sesuai dengan perjanjian antara HIN dan IHC tanggal 10 Desember 2021.

Other income received in advance represents land lease by HIN located in Lot H1 and H2 of Sanur Special Economic Zone between HIN and PT Pertamina Bina Medika IHC ("IHC") for a period of 30 (thirty) years, in accordance with the agreement between HIN and IHC dated December 10, 2021.

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek / *a. Short-term employee benefit liabilities*

Rincian liabilitas imbalan kerja jangka pendek terdiri dari:

The detail of short-term employee benefit liabilities consist of:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Perusahaan			***The Company***
Tantiem dan jasa produksi	175.360	246.688	*Tantiem and production services*
Entitas anak			***Subsidiaries***
Tantiem dan jasa produksi	1.106.321	599.492	*Tantiem and production services*
Liabilitas imbalan kerja Jangka pendek (PP35/2021)	88.509	59.518	*Short-term employee benefits liability (PP35/2021)*
Jumlah	**1.370.190**	**905.698**	***Total***

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang / *b. Long-term employee benefit liabilities*

Perusahaan dan masing-masing entitas anak menunjuk aktuaris independen, untuk melakukan penilaian dari taksiran liabilitas untuk program imbalan pasca kerja, program pensiun manfaat pasti, program imbalan kesehatan pasca kerja dan program imbalan jangka panjang lainnya.

The Company and each of subsidiaries appointed an independent actuary, to conduct a valuation of the expected obligation for post-employment benefit program, defined benefit pension plan, post-employment health benefit program and other long-term benefit program.

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* oleh aktuaris independen masing-masing entitas adalah sebagai berikut:

The employee benefits liabilities as of December 31, 2025 and 2024 were calculated using the projected unit credit method by the independent actuarists of each entities as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Perusahaan dan entitas anak lainnya			*The Company and other subsidiaries*
Program imbalan pasca kerja	322.989	295.448	*Post-employment benefit program*
Program pensiun manfaat pasti	15.654	14.946	*Defined benefit pension program*
Program imbalan kesehatan pasca kerja	94.434	110.263	*Post-employment health benefit program*
Program imbalan jangka panjang lainnya	56.052	40.225	*Other long-term benefit program*
Subjumlah	**489.129**	**460.882**	***Subtotal***

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / *b. Long-term employee benefit liabilities (continued)*

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* oleh aktuaris independen masing-masing entitas adalah sebagai berikut (lanjutan):

The employee benefits liabilities as of December 31, 2025 and 2024 were calculated using the projected unit credit method by the independent actuarists of each entities as follows (continued):

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II)			*AP Indonesia (formerly AP I dan AP II)*
Program imbalan pasca kerja	1.096.054	509.179	*Post-employment benefit program*
Program pensiun manfaat pasti	981.494	1.329.139	*Defined benefit pension program*
Program imbalan kesehatan pasca kerja	135.206	87.905	*Post employement health benefit program*
Program imbalan jangka panjang lainnya	155.366	234.354	*Other long-term benefit program*
Subjumlah	**2.368.120**	**2.160.577**	***Subtotal***
Jumlah	**2.857.249**	**2.621.459**	***Total***

Beban yang diakui dalam laba rugi imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Expense recorded as profit or loss of post-employment benefit are as follow:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Perusahaan dan entitas anak lainnya	60.359	67.713	*The Company and other subsidiaries*
AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II)	644.247	421.963	*AP Indonesia (formerly AP I and AP II)*
Jumlah	**704.606**	**489.676**	***Total***

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / *b. Long-term employee benefit liabilities (continued)*

Kerugian (keuntungan) aktuaria terkait liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The actuarial loss (gain) of post-employment benefit are as follow:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Perusahaan dan entitas anak anak lainnya	33.734	4.670	*The Company and other subsidiaries*
AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II)	(29.986)	73.156	*AP Indonesia (formerly AP I and AP II)*
Jumlah	**3.748**	**77.826**	***Total***

b.1. Program imbalan pasca kerja / *b.1. Post-employment benefit program*

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) membukukan liabilitas imbalan pasca kerja yang terdiri dari manfaat untuk pengunduran diri secara sukarela, manfaat meninggal dunia, manfaat cacat, manfaat pensiun, bantuan kepemilikan rumah, dan penghargaan pengabdian emas.

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) recorded liabilities for post-employment benefit program which comprises of benefits for voluntary resignation, benefit for death, benefit for disability, pension benefits, housing assistance, and long-service award benefits.

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used to determine post-employment benefit expenses and liabilities are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Tingkat diskonto per tahun	5,58%	7,10%	*Discount rate per year*
Estimasi kenaikan gaji per tahun	3,00%-6,00% per tahun/*year*		*Salary increment per year*
Tingkat mortalita	TMI 2019		*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari TMI/from TMI		*Resignation rate*
Umur pensiun	56 tahun/years		*Retirement age*
Tingkat mengundurkan diri	0,5%-5% pada usia 20-25 tahun, menurun secara linear sampai dengan 0% pada usia pensiun normal/*0.5%-5% for employees with ages 20-25 years old, decreasing linearly to 0% at age of normal pension*		*Resignation rate*

Ringkasan dari nilai kini liabilitas dan jumlah aset programnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah:

The summary of the present value of liabilities and its asset program as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Nilai kini liabilitas	1.829.812	1.229.162	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	(733.758)	(719.983)	*Fair value of plan assets*
Jumlah	**1.096.054**	**509.179**	***Total***

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / ***b. Long-term employee benefit liabilities (continued)***

b.1. Program imbalan pasca kerja (lanjutan) / ***b.1. Post-employment benefit program (continued)***

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Saldo awal	1.229.162	1.297.867	*Beginning balance*
Reklasifkasi	94.978	-	*Reclasification*
Biaya jasa kini	127.422	98.244	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	317.110	40.253	*Past service cost*
Biaya bunga	91.846	85.680	*Interest cost*
Kurtailmen	(9.478)	-	*Curtailment*
Pembayaran imbalan	(110.055)	(103.898)	*Benefits paid*
Iuran peserta	-	6.618	*Contribution of participants*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	88.827	(195.602)	*Actual (gain)/loss*
Jumlah	**1.829.812**	**1.229.162**	***Total***

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of fair value of plan asset program is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Saldo awal	719.983	713.670	*Beginning balance*
Imbalan hasil aset program	50.523	47.599	*Return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	47.788	52.760	*Contribution of employer*
Iuran peserta program	6.478	6.618	*Contribution of participants*
Pembayaran imbalan	(71.065)	(64.745)	*Benefits paid*
Kerugian aktuarial	(19.949)	(35.919)	*Actual loss*
Jumlah	**733.758**	**719.983**	***Total***

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Biaya jasa kini	127.422	98.244	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	317.110	40.253	*Past service cost*
Biaya bunga	91.846	85.680	*Interest cost*
Imbalan hasil aset program	(50.523)	(47.599)	*Return on plan assets*
Iuran peserta program	(6.478)	-	*Contribution of participants*
Kurtailmen	(9.478)	-	*Curtailment*
Keuntungan aktuarial	28.475	-	*Actuarial Gain*
Jumlah	**498.374**	**176.578**	***Total***

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / ***b. Long-term employee benefit liabilities (continued)***

b.1. Program imbalan pasca kerja (lanjutan) / ***b.1. Post-employment benefit program (continued)***

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of re-measurement in the consolidated statements of financial position are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	(253.829)	(94.146)	*Re-measurement amount beginning of year*
Reklasifikasi	13.698	-	*Reclassification*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(80.301)	(159.683)	*Actual (gain)/loss*
Jumlah	**(320.432)**	**(253.829)**	***Total***

Mutasi liabilitas neto yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2025/ ***December 31, 2025***	**31 Desember 2024/** ***December 31, 2024***	
Saldo awal	509.179	584.197	*Net liabilities - beginning of year*
Koreksi saldo awal	94.978	-	*Adjustment to beginning balance*
Beban yang diakui dalam laba rugi	498.374	176.578	*Expense recognized in profit or loss*
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	80.301	(159.683)	*Expense (income) recognized in the other comprehensive income*
Iuran pemberi kerja	(47.788)	(52.760)	*Contribution of employer*
Pembayaran imbalan	(38.990)	(39.153)	*Benefits paid*
Jumlah	**1.096.054**	**509.179**	***Total***

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek Analisa sensitivitas adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis are as follows:

	31 Desember 2025/ ***December 31, 2025***	**31 Desember 2024/** ***December 31, 2024***	
Asumsi tingkat diskonto			*Discount rate assumptions*
Jika tingkat + 1%	579.925	594.810	*If Rate +1%*
Jika tingkat - 1%	911.969	845.222	*If Rate -1%*
Asumsi tingkat kenaikan gaji			*Salary increment assumptions*
Jika tingkat + 1%	915.106	834.514	*If Rate +1%*
Jika tingkat - 1%	574.926	605.155	*If Rate -1%*

Komposisi pengelolaan dana atas aset ditempatkan adalah pada deposito berjangka, piutang pinjaman, reksadana dan obligasi.

The composition of management of planned asset are on time deposits, loan receivable, mutual funds and bonds.

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / *b. Long-term employee benefit liabilities (continued)*

b.2. Program pensiun manfaat pasti / *b.2. Defined benefit pension program*

Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Angkasa Pura I dan Dana Pensiun Angkasa Pura II.

The retirement program is managed by Dana Pensiun Angkasa Pura I and Dana Pensiun Angkasa Pura II

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used to determine post-employment benefit expenses and liabilities are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Tingkat diskonto per tahun	6,90%-7,00%	6,60%-7,10%	*Discount rate per year*
Tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Tunjangan Hari Tua (PhDTHT)	3,00%-5,00% per tahun/*year*		*Basic Income Retirement Allowance (PhDTHT) increase*
Tingkat mortalita	TMI 2019		*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari TMI		*Resignation rate*
Umur pensiun	56 tahun/years		*Retirement age*
Tingkat mengundurkan diri	0,5%-5% pada usia 20-25 tahun, menurun secara linear sampai dengan 0% pada usia pensiun normal/*0.5%-5% for employees with ages 20-25 years old, decreasing linearly to 0% at age of normal pension*		*Resignation rate*

Ringkasan dari nilai kini liabilitas dan jumlah aset programnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah:

The summary of the present value of liabilities and its asset program as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Nilai kini liabilitas	3.707.196	3.778.062	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	(2.725.702)	(2.448.923)	*Fair value of plan assets*
Jumlah	**981.494**	**1.329.139**	***Total***

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Saldo awal	3.778.062	3.616.340	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	18.077	20.451	*Current service cost*
Biaya bunga	259.372	251.542	*Interest cost*
Pembayaran imbalan	(249.882)	(244.255)	*Benefits paid*
Iuran peserta	-	2.910	*Contribution of participants*
Kerugian aktuarial	(98.433)	131.074	*Actual loss*
Jumlah	**3.707.196**	**3.778.062**	***Total***

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / *b. Long-term employee benefit liabilities (continued)*

b.2. Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / *b.2. Defined benefit pension program (continued)*

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of fair value of plan asset program is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Saldo awal	2.448.923	2.293.902	*Beginning balance*
Imbalan hasil aset program	176.152	188.763	*Return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	311.366	315.094	*Contribution of employer*
Iuran peserta program	2.731	2.910	*Contribution of participants*
Pembayaran imbalan	(249.882)	(244.255)	*Benefits paid*
Kerugian aktuarial	36.412	(107.491)	*Actual loss*
Jumlah	**2.725.702**	**2.448.923**	***Total***

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Biaya jasa kini	18.077	20.451	*Current service cost*
Biaya bunga	259.372	251.542	*Interest cost*
Imbalan hasil aset program	(176.152)	(188.763)	*Return on plan assets*
Iuran peserta program	(2.731)	-	*Contribution of participants*
Jumlah	**98.566**	**83.230**	***Total***

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of re-measurement in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	2.041.226	1.802.661	*Re-measurement amount beginning of year*
Kerugian aktuarial	134.845	238.565	*Actual loss*
Jumlah	**2.176.071**	**2.041.226**	***Total***

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

b. Long-term employee benefit liabilities (continued)

b.2. Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

b.2. Defined benefit pension program (continued)

Mutasi liabilitas neto yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Saldo awal	1.329.139	1.322.438	*Net liabilities - beginning of year*
Beban yang diakui dalam laba rugi	98.566	83.230	*Expense recognized in profit or loss*
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(134.845)	238.565	*Expense (income) recognized in the other comprehensive income*
Iuran pemberi kerja	(311.366)	(315.094)	*Contribution of participants*
Jumlah	**981.494**	**1.329.139**	***Total***

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek Analisa sensitivitas adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Asumsi tingkat diskonto			*Discount rate assumptions*
Jika tingkat + 1%	2.381.587	2.102.572	*If Rate +1%*
Jika tingkat - 1%	3.134.910	2.861.984	*If Rate -1%*
Asumsi tingkat kenaikan gaji			*Salary increment assumptions*
Jika tingkat + 1%	2.751.786	2.480.826	*If Rate +1%*
Jika tingkat - 1%	2.701.728	2.420.254	*If Rate -1%*

Komposisi pengelolaan dana atas aset ditempatkan adalah instrumen pada pasar uang, instrumen saham, instrumen obligasi, instrumen surat berharga negara, properti dan lainnya.

The composition of management of planned asset are on stock market instrument, shares instruments, bond instruments, government bonds instruments, properties, and others.

b.3. Program imbalan kesehatan pasca kerja

b.3. Post-employment health benefit program

Kesehatan pensiun diberikan kepada pegawai pada masa pensiun meliputi pegawai yang bersangkutan bersama istri/suami dan anak yang sah yang tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun. Manfaat yang diterima peserta berupa premi BPJS dan bantuan penggantian rawat inap dalam jumlah tertentu. Program kesehatan pensiun ini dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I).

Pension health is given to employees in retirement including the employee concerned with his/her wife/husband and legitimate children listed in the Pension Decree. The benefits received by participants were in the form of BPJS premiums and assistance in hospitalization reimbursement at certain amount. This pension health program is managed by the Angkasa Pura I Employee Welfare Foundation (YAKKAP I).

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / *b. Long-term employee benefit liabilities (continued)*

b.3. Program imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan) / *b.3. Post-employment health benefit program (continued)*

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used to determine post-employment benefit expenses and liabilities are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Tingkat diskonto per tahun	6,86%-7,02%	7,10%	*Discount rate per year*
Tingkat kenaikan Premi BPJS	7% per tahun/*year*		*BPJS premun escalation rate*
Tingkat mortalita	TMI 2019		*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari TMI		*Resignation rate*
Umur pensiun	56 tahun/years		*Retirement age*
Tingkat mengundurkan diri	1% pada usia 20-25 tahun, menurun secara linear sampai dengan 0% pada usia pensiun normal/*1% for employees with ages 20-25 years old, decreasing linearly to 0% at age of normal pension*		*Resignation rate*

Ringkasan dari nilai kini liabilitas dan jumlah aset programnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah:

The summary of the present value of liabilities and its asset program as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Nilai kini liabilitas	478.170	446.337	*Present value of liabilities*
Nilai Wajar Aset Program	(413.371)	(416.971)	*Fair value of plan assets*
Dampak pembatasan asset	70.407	58.539	*Impact of assets ceiling*
Jumlah	**135.206**	**87.905**	***Total***

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Saldo awal	446.337	374.967	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	20.160	13.822	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	89.050	*Past service cost*
Biaya bunga	31.690	27.011	*Interest cost*
Pembayaran imbalan	(8.269)	(8.833)	*Benefits paid*
Iuran peserta	-	3.574	*Contributions of partcipants*
Keuntungan aktuarial	(11.748)	(53.254)	*Actual gain*
Jumlah	**478.170**	**446.337**	**Total**

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / *b. Long-term employee benefit liabilities (continued)*

b.3. Program imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan) / *b.3. Post-employment health benefit program (continued)*

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of fair value of plan asset program is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Saldo awal	416.971	412.011	*Beginning balance*
Imbalan hasil aset program	29.448	27.913	*Return on plan assets*
Iuran peserta program	3.459	3.574	*Contribution of participants*
Pembayaran imbalan	(7.913)	(8.121)	*Benefits paid*
Kerugian aktuarial	(28.594)	(18.406)	*Actual loss*
Jumlah	**413.371**	**416.971**	***Total***

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari dampak pebatasan aset adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of impact of assets ceiling is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Saldo awal	58.539	37.044	*Beginning balance*
Biaya dampak batas aset	11.868	6.072	*Cost of impact of assets ceiling*
Perubahan dampak batas batas aset	-	15.423	*Changes in the impact of assets ceiling*
Jumlah	**70.407**	**58.539**	***Total***

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Biaya jasa kini	20.160	13.822	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	89.050	*Past service cost*
Biaya bunga	31.690	27.011	*Interest cost*
Imbalan hasil aset program	(29.448)	(27.913)	*Return on plan assets*
Biaya dampak batas aset	4.156	6.072	*Cost of impact of assets celing*
Iuran peserta	(3.459)	-	*Contributions of partcipants*
Jumlah	**23.099**	**108.042**	***Total***

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / *b. Long-term employee benefit liabilities (continued)*

b.3. Program imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan) / *b.3. Post-employment health benefit program (continued)*

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of re-measurement in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	(101.845)	(82.420)	*Re-measurement amount beginning of year*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(24.557)	(19.425)	*Actual loss/(gain)*
Jumlah	**(184.265)**	**(101.845)**	***Total***

Mutasi liabilitas neto yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Saldo awal	87.905	-	*Net liabilities – beginning of year*
Beban yang diakui dalam laba rugi	23.099	108.042	*Expense recognized in profit or loss*
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	24.558	(19.425)	*Expense (income recognized in the other comprehensive income*
Pembayaran imbalan	(356)	(712)	*Benefits paid*
Jumlah	**135.206**	**87.905**	***Total***

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek Analisa sensitivitas adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Asumsi tingkat diskonto			*Discount rate assumptions*
Jika tingkat + 1%	269.275	293.809	*If Rate +1%*
Jika tingkat - 1%	438.746	442.677	*If Rate -1%*
Asumsi tingkat kenaikan gaji			*Salary increment assumptions*
Jika tingkat + 1%	431.898	384.792	*If Rate +1%*
Jika tingkat - 1%	273.709	336.085	*If Rate -1%*

Komposisi pengelolaan dana atas aset ditempatkan adalah pada obligasi, deposito, properti dan lainnya.

The composition of management of planned asset are on bond instrument, deposits, mutual funds, properties, and others.

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / *b. Long-term employee benefit liabilities (continued)*

b.4. Program imbalan jangka panjang lainnya / *b.4. Other long-term benefit program*

Program imbalan jangka panjang AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) lainnya terdiri antara lain dari manfaat tanda penghargaan, cuti jangka panjang dan masa persiapan pensiun.

Other long-term benefits program of AP Indonesia (formerly AP I and AP II) consists of, among others, benefits from a long service reward, long service leave, and retirement preparation period.

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used to determine post-employment benefit expenses and liabilities are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Tingkat diskonto per tahun	5,36%-6,55%	6,90%-7,10%	*Discount rate per year*
Estimasi kenaikan gaji per tahun	6% per tahun/*year*		*Salary increment per year*
Tingkat mortalita	TMI 2019		*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari TMI/*from TMI*		*Resignation rate*
Umur pensiun	56 tahun/years		*Retirement age*
Tingkat mengundurkan diri	1% pada usia 20-25 tahun, menurun secara linear sampai dengan 0% pada usia pensiun normal/*1% for employees with ages 20-25 years old, decreasing linearly to 0% at age of normal pension*		*Resignation rate*

Ringkasan dari nilai kini liabilitas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah:

The summary of the present value of liabilities as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Nilai kini liabilitas	155.366	234.354	*Present value of liabilities*
Jumlah	**155.366**	**234.354**	***Total***

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Saldo awal	234.354	180.186	*Beginning balance*
Reklasifikasi	(94.978)	-	*Reclassification*
Biaya jasa kini	18.510	25.176	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	30.034	40.588	*Past service cost*
Biaya bunga	9.994	15.001	*Interest cost*
Pembayaran imbalan	(8.218)	(13.644)	*Benefits paid*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(34.330)	(12.953)	*Actual loss/(gain)*
Jumlah	**155.366**	**234.354**	***Total***

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

b.4. Program imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Long-term employee benefit liabilities (continued)

b.4. Other long-term benefit program (continued)

The details of expenses recognized in the consolidated statements of profit or loss are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Biaya jasa kini	18.510	25.176	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	30.034	40.588	*Past service cost*
Biaya bunga	9.994	15.001	*Interest cost*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(34.330)	(12.953)	*Actual loss/(gain)*
Jumlah	**24.208**	**67.812**	***Total***

Mutasi liabilitas neto yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Saldo awal	234.354	180.186	*Net liabilities - beginning of year*
Reklasifikasi	(94.978)	-	*Reclassification*
Beban yang diakui dalam laba rugi	24.208	67.812	*Expense recognized in profit or loss*
Pembayaran imbalan	(8.218)	(13.644)	*Actual loss/(gain)*
Jumlah	**155.366**	**234.354**	***Total***

Nilai kini liabilitas akhir setelah efek Analisa sensitivitas adalah sebagai berikut:

The present values of liabilities after the effect of sensitivity analysis are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Asumsi tingkat diskonto			*Discount rate assumptions*
Jika tingkat + 1%	(10.450)	(10.037)	*If Rate +1%*
Jika tingkat - 1%	11.869	11.552	*If Rate -1%*
Asumsi tingkat kenaikan gaji			*Salary increment assumptions*
Jika tingkat + 1%	11.798	9.205	*If Rate +1%*
Jika tingkat - 1%	(10.577)	(8.936)	*If Rate -1%*

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan dan semua asumsi lain akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumption for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis have been determined based on reasonably possible change of the respective assumption occure at the end of the reporting period, while holding all other assumption constant.

31. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Risiko Tingkat Bunga
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada obligasi pemerintah jangka Panjang. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu

Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu

Program *Golden Shakehand* di APS

Pada tanggal 11 November 2024, APS, selaku entitas anak dari IAS melalui Keputusan Direksi, mengadakan program Golden Shakehand yang ditujukan kepada Karyawan Tetap Project dengan tujuan memberikan hak kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja lebih awal, dengan rincian kompensasi sebagai berikut

- 1 kali ketentuan uang pesangon, 1 kali ketentuan uang penghargaan masa kerja, Uang Penggantian Hak (Sisa cuti tahunan yang belum digunakan)
- Uang tali asih sebesar 0,25 dari jumlah ke-3 variabel diatas.

Jangka waktu atas program *Golden Shakehand* dimulai dari tanggal 11 November 2024 dan berakhir di tanggal 20 Desember 2024, dengan jumlah keikutsertaan sebanyak 3.988 karyawan tetap proyek dengan nilai biaya yang direalisasi sebesar Rp71.745.906.128 (angka penuh) yang dicatat sebagai beban pada laporan keuangan 31 Desember 2024.

31. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Long-term employee benefit liabilities (continued)

Interest Rate Risk
The present value of the defined benefit pension obligation is calculated using a discount rate determined by reference to Long-term government bonds. A reduction in the bond interest rate will increase the program liability.

Salaries Risk
The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will enhance the program's liabilities.

Salaries Risk
The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will enhance the program's liabilities.

Golden Shakehand Program in APS

On November 11, 2024, APS, as subsidiary of IAS through a Board of Directors Decree implement a Golden Shakehand Program for permanent project employees, with the aim of providing compensation rights for early termination of employment, with details of the compensation as follows:

- *1 time severance pay provisions, 1 time length of service award provisions, Replacement Money for Rights (Remaining annual leave that has not been used)*
- *Compensation money of 0.25 of the total of the 3 variables above.*

The period of the Golden Shakehand program starts from November 11, 2024 and ends on December 20, 2024 with participation reaching 3,988 permanent project employees with a realized cost value of Rp71,745,906,128 (full amount) recorded as expense in the financial report on December 31, 2024.

32. MODAL SAHAM / *32. SHARE CAPITAL*

Susunan pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The details of the Company's shareholder and its share ownership as of December 31, 2025 is as follows:

Pemegang saham/*Shareholders*	Jenis saham/ *Type of shares*	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of share issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/*Total*
Negara Republik Indonesia/ *Republic of Indonesia*	Seri A Dwiwarna	1	0,000001%	1
PT Danantara Asset Management	Seri B	78.656.757	99,999999%	78.656.757
		78.656.758	**100%**	**78.656.758**

Susunan pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The details of the Company's shareholder and its share ownership as of December 31, 2024 is as follows:

Pemegang saham/ *Shareholder*	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Total*
Negara Republik Indonesia/ *Republic of Indonesia*	78.656.758	100%	78.656.758
	78.656.758	**100%**	**78.656.758**

Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir tahun adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the number of outstanding shares at the beginning and the end of the year is as follows:

31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Saldo awal	78.656.758	76.843.739	*Beginning balance*
Penambahan	-	1.813.019	*Addition*
Saldo akhir	**78.656.758**	**78.656.758**	***Ending balance***

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 15 Desember 2021 oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta telah diputuskan:

a) Menyetujui Peningkatan Modal *Dasar* Perusahaan menjadi sejumlah Rp260.000.000 yang terbagi atas 260.000.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000;
b) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp65.164.367 oleh Negara Republik Indonesia.

Based on Deed No. 65 dated December 15, 2021 by Notary Desman, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta has been decided:

a) Approved the increase in the Company's Authorized Capital to Rp260,000,000 which is divided into 260,000.000 shares with a nominal value of Rp1,000;
b) The issued and fully paid-up capital of Rp65,164,367 by the Republic of Indonesia.

32. MODAL SAHAM (lanjutan)

Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0076120.AH.01.02. TAHUN 2021.

Berdasarkan PP No 3 tahun 2023 tanggal 18 Januari 2023, Perusahaan menerima penambahan penyertaan modal negara sebanyak 2.147.659 saham Seri B yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara pada ITDC.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/KMK.06/2023 Tentang Penempatan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia ditetapkan bahwa nilai penambahan penyertaan modal adalah sebesar Rp11.679.372 yang merupakan perhitungan nilai wajar saham per tanggal 30 Juni 2022 yang berasal dari 2.147.659 lembar pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada ITDC.

Berkaitan dengan peralihan saham seri B tersebut, maka dibuatlah Akta No. 85 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, di mana Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0083469 TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023.

Berdasarkan akta No. 10 tanggal 5 Februari 2024 oleh Desman S.H., M.Hum., M.M notaris di Jakarta, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal saham sebesar Rp1.813.019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Rp798.819 yang berasal dari pengalihan Bandara Kertajati Jawa Barat sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 57 Tahun 2023 (Catatan 34).
b. Rp1.014.200 secara tunai sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 65 Tahun 2023 (Catatan 34).
c. Rp451.000 (nilai penuh) yang berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan.

32. SHARE CAPITAL (continued)

The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0076120.AH.01.02. TAHUN 2021.

Based on Government Regulation No. 3 of 2023 dated January 18, 2023, the Company received additional state capital participation of 2,147,659 Series B shares originating from the transfer of all State-owned Series B shares in ITDC.

Through the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 53/KMK.06/2023 concerning the Placement of the Value of the Increase of the Republic of Indonesia's Capital Participation in the Share Capital of the State-Owned Company (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, it was determined that the value of the additional capital participation is Rp11,679,372, calculated based on the fair value of shares as of June 30, 2022, originating from the transfer of 2,147,659 series B shares owned by the Republic of Indonesia of ITDC.

Regarding the transfer of the series B shares, Deed No. 85 was executed on May 31, 2023, before Desman, S.H., M.Hum., a Notary in Jakarta, and the deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-AH.01.03-0083469 YEAR 2023 dated June 26, 2023.

Based on deed No. 10 dated February 5, 2024 by Desman S.H., M.HUm., M.M, a notary in Jakarta, the Republic of Indonesia increase its issued and paid up share capital of Rp1,813,019 with detail as follow:

a. Rp798,819 from transfer of Kertajati West Java Airports as determined in PP No.57 Tahun 2023 (Note 34).

b. Rp1,014,200 in cash as determined in PP No. 65 Tahun 2023 (Note 34).

c. Rp451,000 (full amount) from the Company's reserve.

32. MODAL SAHAM (lanjutan)

Peningkatan modal saham tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0037438 tertanggal 13 Februari 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No. RISPAT.002/RUPS/INJOURNEY/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, pemegang saham Perusahaan setuju untuk membagikan dividen sebesar Rp101.000. Pada tanggal 18 Juli 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut.

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. S-143/MBU/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Desman S.H., M.Hum., M.M No. 42 tanggal 20 Maret 2025, anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0086305 pada tanggal 20 Maret 2025. Perubahan ini telah diterbitkan dalam Berita Negara No.30 tambahan Berita Negara RI No.10024 tanggal 15 April 2025.

Saham Perusahaan terbagi menjadi Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B. Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp260.000.000 terbagi menjadi sebagai berikut:

a. 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh).
b. 259.999.999 saham Seri B masing-masing dengan nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp259.999.999.

Jumlah modal ditempatkan dan disetor yang diambil penuh oleh Negara Republik Indonesia adalah sebesar Rp78.656.758, dan terbagi atas:

a. 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.
b. 78.656.757 saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1 atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp78.656.757.

32. SHARE CAPITAL (continued)

The increase in share capital has been received and recorded by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its letter No. AHU-AH.01.03-0037438 dated February 13, 2024.

Based on General Meeting of Shareholders ("RUPS") No. RISPAT.002/RUPS/INJOURNEY/06/2024 dated Juni 19, 2024, the Company's shareholder agree to distribute dividend of Rp101,000. On July 18, 2024, the Company has paid the dividend.

Based on Letter of State-Owned Enterprise Ministry as Shareholder's General Meeting No. S-143/MBU/03/2025 dated March 18, 2025 which has been notarized by Desman S.H., M.HUm., M.M, in the notarial deed No. 42 dated March 20, 2025, the Articles of Association of the Company has been amended. This amendment has been notified and received by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia through Notification Receipt Letter No. AHU-AH.01.03-0086305 on March 20, 2025. This change has been published in State Gazette No.30 Supplement to the State Gazette of Republic Indonesia No.10024 dated April 15, 2025.

The Company's shares are divided into Series A Dwiwarna and Series B. The Company's authorized capital of Rp260,000,000 divided into:

a. 1 share Series A Dwiwarna with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.
b. 259,999,999 shares Series B with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share or total nominal value of shares amounting to Rp259,999,999.

Total issued and paid-up capital that is held by Republic of Indonesia amounting to Rp78,656,758, are divided into:

a. 1 share Seri A Dwiwarna with par value of Rp1 per share.
b. 78,656,757 shares Seri B with par value of Rp1 per share or total nominal value of shares amounting to Rp78,656,757.

32. MODAL SAHAM (lanjutan)

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025 dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.S-175/MBU/03/2025 tanggal 22 Maret 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian *Holding* Operasional, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Desman S.H., M.Hum., M.M No. 35 tanggal 21 April 2025, dimana seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebanyak 78.656.757 saham dialihkan ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0113051 dan No. AHU-AH.01.09.0207346 pada tanggal 25 April 2025. Perubahan ini telah diterbitkan dalam Berita Negara No.37 tambahan Berita Negara RI No.12019 tanggal 9 Mei 2025.

Berdasarkan RUPS No. RISPAT.002/RUPS/INJOURNEY/06/2025 tanggal 20 Juni 2025, pemegang saham Perusahaan setuju untuk membagikan dividen sebesar Rp650.512. Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut pada tanggal 18 Juli 2025 dan 3 Desember 2025.

Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 70 tanggal 18 Juli 2025 oleh Desman S.H., M.Hum., M.M, pemegang saham menyetujui perubahan nama Pemegang Saham yang sebelumnya PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menjadi PT Danantara Asset Mangement (Persero). Perubahan tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0206906 tanggal 5 Agustus 2025.

32. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Government Regulation (PP) No. 21 Year 2025 dated March 21, 2025 and Letter of State-Owned Enterprise Ministry as Shareholder's General Meeting No. S-175/MBU/03/2025 dated March 22, 2025, regarding Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia to Perusahaan Perseroan (Persero)) PT Biro Klasifikasi Indonesia for the Establishment of an Operational Holding, which has been notarized by Desman S.H., M.HUm., M.M, in the notarial deed No. 35 dated April 21, 2025, where all B series shares of the Company owned by the State Republic of Indonesia of 78,656,757 shares were transferred to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). This amendment has been notified and received by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia through Notification Receipt Letter No. AHU-AH.01.03-0113051 and No. AHU-AH.01.09.0207346 on April 25, 2025. This change has been published in State Gazette No.37 Supplement to the State Gazette of Republic Indonesia No.12019 dated May 9, 2025.

Based on RUPS No. RISPAT.002/RUPS/INJOURNEY/06/2025 dated Juni 20, 2025, the Company's shareholder agree to distribute dividend of Rp650,512. The Company has paid the dividend on July 18, 2025 and December 3, 2025, respectively.

Based on the Deed of Inclusion of the General Meeting No. 70 dated July 18, 2025 of Desman S.H., M.Hum., M.M, the Company's shareholders approved, among others, the amendment of the shareholder's name of the Company from PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to PT Danantara Asset Mangement (Persero). The amendment has been notified and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.03-0206906 dated August 5, 2025.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

33. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

The details of additional paid in capital as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
PT Angkasa Pura Indonesia (dahulu PT Angkasa Pura I)	6.877.358	6.877.358	*PT Angkasa Pura Indonesia (formerly PT Angkasa Pura I)*
PT Angkasa Pura Indonesia (dahulu PT Angkasa Pura II)	18.968.822	18.968.822	*PT Angkasa Pura Indonesia (formerly PT Angkasa Pura II)*
PT Hotel Indonesia Natour	7.555.466	7.555.466	*PT Hotel Indonesia Natour*
PT Sarinah	372.412	372.412	*PT Sarinah*
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	2.467.080	2.467.080	*PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko*
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	9.664.335	9.664.335	*PT Pengembangan Pariwisata Indonesia*
PT Integrasi Aviasi Solusi	67.536	40.907	
JUMLAH	**45.973.009**	**45.946.380**	***TOTAL***

Tambahan modal disetor terutama merupakan selisih antara imbalan yang dialihkan dengan aset neto yang dialihkan sehubungan kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 1b).

The additional paid-in capital primarily represents the difference between the transferred consideration and the net assets transferred in connection with the business combination of entities under common control (Note 1b).

34. MODAL DISETOR LAINNYA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (“PP”) Nomor 57 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia (‘‘Injourney’’) untuk selanjutnya diteruskan seluruhnya menjadi penambahan penyertaan modal Perusahaan ke dalam modal saham AP II, Presiden Republik Indonesia menetapkan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke Perusahaan sebesar Rp798.819 yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Kertajati Jawa Barat dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2017.

Pada tanggal 29 Desember 2023, telah dilakukan serah terima pengalihan Barang Milik Negara dari Perusahaan kepada AP II yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Aset nomor BA.1899 Tahun 2023, BAC.INJ.06.05/23/12/2023/A.0581, dan BAC.INJ.06.02.02/00/12/2023/7443.

34. OTHER PAID-IN CAPITAL

Based on Government Regulation (“PP”) Number 57 of 2023 dated December 27, 2023, concerning the Increase of the Republic of Indonesia's State Capital Participation in the Share Capital of the State-Owned Company (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia (''Injourney''), which is then entirely continued as an increase in the Company's capital participation in AP II's share capital, the President of the Republic of Indonesia stipulates the increase in the Republic of Indonesia's State Capital Participation in the Company by Rp798,819 originating from the transfer of State Assets at the Ministry of Transportation at Kertajati Airport, West Java, and sourced from the State Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Years 2014, 2015, and 2017.

On December 29, 2023, the handover of the transfer of State Property from the Company to AP II took place, as documented in the Handover of Asset Minutes numbered BA.1899 Year 2023, BAC.INJ.06.05/23/12/2023/A.0581, and BAC.INJ.06.02.02/00/12/2023/7443.

34. MODAL DISETOR LAINNYA (lanjutan)

Seluruh penambahan penyertaan modal negara di tahun 2023 telah disetujui melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor S-46/MBU/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan kepada Anak Perusahaan yang telah disetujui melalui RUPS penambahan penyertaan modal Perusahaan kepada AP II sebesar Rp798.819 yang bersumber dari Penambahan Penyertaan Modal Saham Perusahaan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2023.

Penambahan penyertaan modal lainnya tertulis pada Peraturan Pemerintah ("PP") Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia di mana Presiden Republik Indonesia menetapkan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.014.200.

Penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.014.200. akan diteruskan seluruhnya oleh Perusahaan ke dalam modal saham ITDC sebesar Rp872.090 dan HIN sebesar Rp142.110 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Seluruh penambahan penyertaan modal negara di tahun 2023 telah disetujui melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. S-45/MBU/01/2024 dan S-46/MBU/01/2024 tanggal 25 Januari 2024.

34. OTHER PAID-IN CAPITAL (continued)

The entire increase in state capital participation in 2023 has been approved through the Minister of SOE Decree Number S-46/MBU/01/2024 dated January 25, 2024, regarding the Approval of the Increase in Company's Capital Participation to its Subsidiaries, which has been approved through the RUPS for the increase in the Company's capital participation in AP II by Rp798,819, originating from the Increase in Capital Participation in the Company's Shares for the Fiscal Year 2023 based on Government Regulation Number 57 of 2023.

Additional state capital participation is documented in Government Regulation ("PP") Number 65 of 2023 concerning the Increase of the Republic of Indonesia State Capital Participation in the Equity of the State-Owned Company (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, where the President of the Republic of Indonesia has decreed an additional state capital participation of Rp1,014,200.

The entire increase in state capital participation of Rp1,014,200 will be entirely forwarded by the Company into the share capital of ITDC amounting to Rp872,090 and HIN amounting to Rp142,110 sourced from the State Revenue and Expenditure Budget of the fiscal year 2023.

All increases in state capital participation in the year 2023 have been approved through the Minister of State-Owned Enterprises Decree No. S-45/MBU/01/2024 and S-46/MBU/01/2024 dated January 25, 2024.

35. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan non-pengendali atas ekuitas dan bagian atas hasil bersih entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

35. NON-CONTROLLING INTEREST

Details of non-controlling interests in the equity and net results of consolidated subsidiaries are as follows:

Kepemilikan non pengendali Pada Entitas	Nilai Tercatat/*Carrying Amounts* 2025	2024	*Non-controlling interest from entity*
PT Angkasa Pura Indonesia	52.018	50.094	*PT Angkasa Pura Indonesia*
PT Hotel Indonesia Natour	1.022.748	984.586	*PT Hotel Indonesia Nataour*
PT Sarinah	4	4	*PT Sarinah*
PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan, dan Ratu Boko	49	56	*PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan, dan Ratu Boko*
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	(3.378)	(3.033)	*PT Pengembangan Pariwisata Indonesia*
PT Integrasi Aviasi Solusi	284.073	210.977	*PT Integrasi Aviasi Solusi*
Jumlah	**1.355.514**	**1.242.684**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mempunyai 6 (enam) entitas anak yang dikonsolidasi. Entitas anak AP Indonesia, IAS, HIN, dan Sarinah berkantor pusat di Jakarta. Entitas anak TWC dan ITDC masing-masing berkantor pusat di Yogyakarta dan Bali.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has 6 (six) consolidated subsidiaries. The subsidiaries AP Indonesia, IAS, HIN, and Sarinah are headquartered in Jakarta. Subsidiaries TWC and ITDC are headquartered in Yogyakarta and Bali, respectively.

36. PENDAPATAN USAHA / *36. OPERATING REVENUES*

a. Berdasarkan Jenis / *a. By Type*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Kebandarudaraan dan Pusat Pariwisata			***Aviation and Tourism Centers***
Aeronautika	13.305.942	13.044.430	*Aeronautical*
Non aeronautika	6.950.225	6.126.529	*Non aeronautical*
Jasa operator bandara	22.235	28.796	*Airport operator services*
Subjumlah	20.278.402	19.199.755	*Subtotal*
Layanan Penerbangan dan Kargo			***Flight and Cargo Services***
Kargo dan logistik	1.734.550	1.712.565	*Cargo and logistic*
Aircraft handling	1.368.117	1.307.074	*Aircraft handling*
Operation support	1.044.121	1.413.432	*Operation support*
Hospitality	720.472	744.881	*Hospitality*
Learning center	8.379	9.146	*Learning center*
Subjumlah	4.875.639	5.187.098	*Subtotal*
Operator Atraksi			***Attraction operators***
Tiket	411.018	414.582	*Ticket*
Event organizer	204.189	120.332	*Event organizer*
Fasilitas	67.946	43.915	*Facility*
Parkir	27.567	16.855	*Parking*
Subjumlah	710.720	595.684	*Subtotal*
Orkestrator Pariwisata	**-**	76.306	***Tourism Orchestration***
Pengembang Kawasan Wisata			***Tourism Area Developers***
Operational property	404.660	429.708	*Operational property*
Bahan bakar	78.767	70.625	*Fuel*
Utility charge	28.851	25.030	*Utility charge*
Optimalisasi lahan	26.575	2.608.793	*Land optimalization*
Sewa	18.688	35.931	*Rent*
Pendapatan *management fee*	1.920	8.677	*Management fee*
Lainnya	25.088	188.267	*Others*
Subjumlah	584.549	3.367.031	*Subtotal*
Perhotelan dan Manajemen Perjalanan			***Hospitality and Travel Management***
Kamar	960.713	807.394	*Room*
Makanan & minuman	463.317	405.438	*Food & beverages*
Pendapatan non-kamar fasilitas hotel lainnya	52.195	26.046	*Non-room revenue from other hotel facilities*
Pendapatan non-kamar			*Non-room revenue*
Jasa operator hotel	42.693	54.561	*Hotel operator services*
Manajemen perjalanan	7.339	12.809	*Travel management*
Subjumlah	1.526.257	1.306.248	*Subtotal*
Manajemen Retail			***Retail Management***
Retail	472.730	716.554	*Retail*
Sewa	101.040	63.263	*Rent*
Advertising	26.198	23.624	*Advertising*
Makanan & minuman	4.081	3.783	*Food & beverages*
Subjumlah	604.049	807.224	*Subtotal*
Jumlah	**28.579.616**	**30.539.346**	***Total***

36. PENDAPATAN USAHA (lanjutan) / *36. OPERATING REVENUES (continued)*

b. Berdasarkan Pelanggan / *b. By Customers*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga	**22.620.283**	**24.682.335**	***Third parties***
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	2.587.120	2.435.285	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Citilink Indonesia	1.224.531	1.664.429	*PT Citilink Indonesia*
PT Pelita Air Service	478.339	75.713	*PT Pelita Air Service*
PT Pertamina Patra Niaga	338.645	315.259	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	151.358	130.754	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Aerofood Indonesia	143.774	135.003	*PT Aerofood Indonesia*
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk.	139.451	148.743	*PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk.*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	121.688	105.524	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	112.746	84.317	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Pertamina (Persero)	55.935	107.428	*PT Pertamina (Persero)*
PT Transportasi Jakarta	52.319	24.739	*PT Transportasi Jakarta*
PT Kereta Cepat Indonesia China	49.494	43.151	*PT Kereta Cepat Indonesia China*
PT Purantara Mitra Angkasa Dua	45.870	21.414	*PT Purantara Mitra Angkasa Dua*
PT Kereta Commuter Indonesia	41.448	13.834	*PT Kereta Commuter Indonesia*
PT Telekomunikasi Seluler	37.109	45.425	*PT Telekomunikasi Seluler*
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	36.234	30.777	*Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan*
Perum LPPNPI	34.623	36.040	*Perum LPPNPI*
PT Pertamina Bina Medika IHC	26.388	15.788	*PT Pertamina Bina Medika IHC*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	14.812	46	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.*
Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	5.623	15.984	*Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	450	57.155	*Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10 miliar)	261.376	350.203	*Others (each below Rp10 billion)*
Subjumlah	**5.959.333**	**5.857.011**	***Subtotal***
Jumlah	**28.579.616**	**30.539.346**	***Total***

Tidak terdapat pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

There are no customers which represent more than 10% of the total revenues.

Jumlah pendapatan dari pihak berelasi merepresentasikan 20,85% dan 19,18% dari jumlah pendapatan Grup masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The total revenue from related parties represent 20,85% and 19.18% of total revenue of the Group as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

37. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *37. COST OF REVENUES*

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

The details of cost of revenues are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Kebandarudaraan dan Pusat Pariwisata			***Aviation and Tourism Center***
Aeronautika & Non-aeronautika	10.995.937	10.878.506	*Aeronautical & Non-aeronautical*
Subjumlah	10.995.937	10.878.506	*Subtotal*
Layangan Penerbangan dan Kargo			***Flight and Cargo Services***
Operation support	2.512.755	2.719.553	*Operation support*
Aircraft handling	1.100.422	1.006.995	*Aircraft handling*
Kargo dan logistik	939.582	412.795	*Cargo and logistic*
Hospitality	134.924	207.406	*Hospitality*
Management fee	6.412	11.654	*Management fee*
Learning center	1.556	1.699	*Learning center*
Subjumlah	4.695.651	4.360.102	*Subtotal*
Operator Atraksi			***Attraction operators***
Event organizer	513.049	562.192	*Event organizer*
Tiket	217.620	190.072	*Ticket*
Fasilitas	46.406	29.498	*Facility*
Management fee	-	7.512	*Management fee*
Subjumlah	777.075	789.274	*Subtotal*
Orkestrator Pariwisata			***Tourism Orchestration***
Orkestrator pariwisata	-	72.747	*Tourism orchestration*
Subjumlah	-	72.747	*Subtotal*
Pengembang Kawasan Wisata			***Tourism Area Developer***
Sewa	312.835	332.672	*Rent*
Bahan bakar	76.650	76.419	*Fuel*
Revenue sharing	12.846	4	*Revenue sharing*
Utility charge	9.625	4.873	*Utility charge*
Optimalisasi lahan	5.628	41.536	*Land optimalization*
Beban pokok pendapatan	65	77	*Cost of revenue*
Subjumlah	417.649	455.581	*Subtotal*

37. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan) / *37. COST OF REVENUES (continued)*

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *The details of cost of revenues are as follows: (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Perhotelan dan Manajemen Perjalanan			***Hospitality and Travel Management***
Kamar	312.862	238.480	*Room*
Pendapatan non-kamar *food & beverages*	292.895	215.293	*Non-room revenue - food & beverages*
Manajemen perjalanan	48.575	37.171	*Learning center*
Jasa operator hotel	44.365	47.219	*Hotel operator service*
Pendapatan non-kamar fasilitas hotel lainnya	33.646	44.554	*Non-room revenue - other hotel facilities*
Management fee	7.583	36.860	*Management Fee*
Subjumlah	739.926	619.577	*Subtotal*
Manajemen Retail			***Retail Management***
Retail	373.951	601.606	*Retail*
Sewa	1.950	1.347	*Rent*
Subjumlah	375.901	602.953	*Subtotal*
Jumlah	**18.002.139**	**17.778.740**	***Total***

38. BEBAN PEGAWAI / *38. EMPLOYEE EXPENSES*

Rincian beban pegawai adalah sebagai berikut: / *The details of employee expenses are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Gaji dan upah	441.994	396.883	*Salaries and wages*
Tunjangan	402.873	404.338	*Allowance*
Pengobatan	231.962	136.202	*Medical*
Bonus	135.167	186.021	*Bonus*
Seragam karyawan	6.153	4.985	*Employee uniforms*
Lembur	4.209	3.291	*Overtime*
Lainnya	1.165	811	*Others*
Jumlah	**1.223.523**	**1.132.531**	***Total***

39. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *39. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The details of general and administrative are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Imbalan pasca kerja, iuran dana pensiun dan iuran THT	739.113	649.861	*Employee benefits, pension contributions and THT*
Gaji komisaris dan direksi	624.701	679.170	*Salaries and allowances*
Konsultan	428.748	433.348	*Consultant*
Penyusutan dan amortisasi	269.348	419.599	*Depreciation and amortization*
Penurunan nilai investasi entitas asosiasi	184.076	-	*Impairment of investment in associates*
Pengembangan sumber daya manusia	172.500	154.120	*Human resources development*
Beban pajak lainnya	160.348	91.742	*Other tax expenses*
Logistik dan jasa lainnya	149.749	136.971	*Logistics and other services*
Penurunan nilai aset tetap	139.174	80.004	*Impairment of fixed assets*
Perjalanan dinas	132.135	50.179	*Business Travel*
Persediaan dan utilitas kantor	104.558	182.369	*Office Supplies and utilities*
Pemeliharaan	78.557	121.524	*Maintenance*
Penyusutan aset hak guna	52.070	86.198	*Depreciation of right-of-use assets*
Keamanan	51.784	65.766	*Security*
Asuransi	49.057	101.712	*Insurance*
Beban sewa	44.654	48.729	*Rental*
Aset dibiayakan	25.970	15.556	*Low value assets*
Beban makanan dan minuman	24.217	28.452	*Food and beverages*
Pajak bumi dan bangunan	13.959	38.405	*Land and building taxes*
Pemulihan nilai piutang, neto	(78.937)	(18.810)	*Recovery of receivables, net*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	296.681	192.176	*Others (each below Rp5 billion)*
Jumlah	**3.662.462**	**3.557.071**	***Total***

40. PENDAPATAN LAIN-LAIN / *40. OTHER INCOME*

Rincian pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31*		
	2025	**2024**	
Laba atas akuisisi GMF	5.664.810	-	*Gain on GMF acquisition*
Pembalikan provisi liabilitas imbalan kerja jangka pendek	89.368	-	*Reversal on provision of short-term employee benefits*
Laba kurs	37.254	-	*Gain on foreign exchange*
Keuntungan atas modifikasi sewa	29.435	-	*Gain on lease contract modification*
Pembalikan provisi litigasi	22.650	-	*Reversal on provision for litigation*
Kompensasi pengelolaan rekening	13.777	-	*Account management fee*
Denda	11.090	3.466	*Penalties*
Laba pelepasan aset tetap dan properti investasi	2.240	2.271	*Gain on sales of fixed assets and property investment*
Laba pelepasan saham investasi saham entitas asosiasi (Catatan 15)	-	683.654	*Gain on sales of investment in associates (Note 15)*
Pembalikan beban akrual	-	26.647	*Reversal of accrued expense*
Hibah dan *sponsorship*	-	1.673	*Donation and sponsorship*
Pengembalian pajak	-	559	*Tax refund*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	153.529	132.309	*Others (each below Rp5 billion)*
Jumlah	**6.024.153**	**850.579**	***Total***

41. BEBAN LAIN-LAIN / *41. OTHER EXPENSES*

Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut: / *The details of other expenses are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban TJSL	79.685	62.308	*TJSL expense*
Perhitungan kembali pajak masukan	30.729	122.224	*Recalculation of VAT-in*
Rugi selisih kurs, neto	22.619	56.990	*Loss on foreign exchange, net*
Klaim kontraktor	14.180	95.727	*Contractor claims*
Pembebanan lebih bayar pajak	13.814	11.229	*Tax overpayment expense*
Kerugian penghapusan aset tetap	1.113	19.452	*Loss on disposal of fixed assets*
Iuran imbalan kerja LPPNPI	-	16.851	*LPPNPI employee benefit contributions*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	41.681	123.431	*Others (each below Rp5 billion)*
Jumlah	**203.821**	**508.212**	***Total***

42. PENGHASILAN KEUANGAN / *42. FINANCIAL INCOME*

Rincian penghasilan keuangan adalah sebagai berikut: / *The details of financial income are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Bunga jasa giro	266.088	212.131	*Giro service interest*
Bunga deposito	142.800	207.146	*Time deposit interest*
Bunga obligasi dan reksadana	14.085	5.590	*Bonds and mutual funds interest*
Laba penjualan reksadana	8.955	1.583	*Gain from sales of mutual fund*
Bunga pinjaman	2.734	4.078	*Loan interest*
Pendapatan sukuk	225	-	*Sukuk income*
Pajak final pendapatan keuangan	(5.009)	(7.223)	*Final tax from finance income*
Jumlah	**429.878**	**423.305**	***Total***

43. BEBAN KEUANGAN / *43. FINANCIAL EXPENSE*

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut: / *The details of financial expense are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban bunga pinjaman bank dan obligasi	3.145.784	3.417.838	*Bank loans and bonds interest expense*
Imbal hasil sukuk	282.722	150.937	*Sukuk profit sharing*
Beban bunga sewa (Catatan 18)	105.146	80.119	*Interest on lease liabilities (Note 18)*
Beban administrasi bank	24.523	20.507	*Bank administrative expense*
Beban provisi pinjaman bank dan obligasi	18.632	34.790	*Provision of bank loans and bonds*
Lain-lain	605	4.142	*Others*
Jumlah	**3.577.412**	**3.708.333**	***Total***

44. NILAI WAJAR / *44. FAIR VALUE*

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

The table below illustrates the carrying values and fair values of financial assets and liabilities:

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	9.517.234	9.517.234	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	551.640	551.640	*Restricted cash*
Investasi jangka pendek	131.431	131.431	*Short term investments*
Piutang usaha	2.879.396	2.879.396	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	190.735	190.735	*Other receivables*
Aset kontrak	630.766	630.766	*Contract assets*
Investasi jangka panjang	79.879	79.879	*Long term investments*
Jumlah	**13.981.081**	**13.981.081**	***Total***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Utang usaha	1.388.501	1.388.501	*Trade payables*
Utang lain-lain	2.182.359	2.182.359	*Other payables*
Beban akrual	4.549.174	4.549.174	*Accrued expenses*
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek	73.946	73.946	*Short-term bank and other financial institutions loans*
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	37.502.089	37.502.089	*Long-term bank and other financial institutions loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	9.000.886	9.000.886	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Liabilitas sewa	1.230.133	1.230.133	*Lease liabilities*
LIabilitas jangka panjang lainnya	318.331	318.331	*Other non-current liabilities*
Jumlah	**56.245.419**	**56.245.419**	***Total***

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	12.092.579	12.092.579	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.859.944	2.859.944	*Restricted cash*
Investasi jangka pendek	142.374	142.374	*Short term investments*
Piutang usaha	2.614.627	2.614.627	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	104.626	104.626	*Other receivables*
Aset kontrak	719.210	719.210	*Contract assets*
Investasi jangka panjang	74.837	74.837	*Long term investments*
Jumlah	**18.608.197**	**18.608.197**	***Total***

44. NILAI WAJAR (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

44. FAIR VALUE (continued)

The table below illustrates the carrying values and fair values of financial assets and liabilities (continued):

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Utang usaha	1.380.663	1.380.663	*Trade payables*
Utang lain-lain	2.807.726	2.807.726	*Other payables*
Beban akrual	3.811.539	3.811.539	*Accrued expenses*
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek	193.047	193.047	*Short-term bank and other financial institutions loans*
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	42.082.013	42.082.013	*Long-term bank and other financial institutions loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	9.064.087	9.064.087	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Liabilitas sewa	958.123	958.123	*Lease liabilities*
LIabilitas jangka panjang lainnya	971.264	971.264	*Other non-current liabilities*
Jumlah	**61.268.462**	**61.268.462**	***Total***

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Fair values of the most financial assets and liabilities approximate their carrying values because the effect of discounting is not significant.

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

1) Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
2) Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including:

1) Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.
2) Fair value estimation are not always indicating value that the Group will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.

Tabel berikut menunjukkan hirarki pengukuran nilai wajar berulang dari aset Perusahaan:

The following table provides the recurring fair value measurement hierarchy of the Company's assets:

	Jumlah/*Total*	**Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset yang identik (Level 1)/ *Quoted prices in active markets (Level 1)***	**Input yang dapat diobservasi lain yang sifgnifikan (Level 2)/ *Significant observable inputs (Level 2)***	**Input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan (Level 3)/ *Significant unobservable inputs (Level 3)***	
31 Desember 2025					***December 31, 2025***
Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI	72.089	72.089	-	-	*Financial assets at fair value through OCI*
31 Desember 2024					***December 31, 2024***
Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI	69.506	69.506	-	-	*Financial assets at fair value through OCI*

Tidak ada transfer antara Level 1 dan Level 2, dan masuk atau keluar dari Level 3 selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There were no transfers between Level 1 and Level 2, and into or out from Level 3 during the years ended December 31, 2025 and 2024.

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung dan/atau di bawah kendali pihak yang sama.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group entered into transactions with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect and/or under common control.

The details of nature of relationship and types of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak berelasi/*Related parties*	**Sifat hubungan/*Nature of relationship***	**Transaksi/*Transactions***
Negara Republik Indonesia/ Republic of Indonesia	Pemegang Saham/ Shareholders	Setoran Saham/ *Share Capital*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ *Government Related Entities of Republic Indonesia*	Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ *Banking Services, Account Receivables, Short Term Bank and Other Financial Institution Loans,*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ *Government Related Entities*	Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ *Banking Services, Account Receivables, Short Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ *Government Related Entities*	Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pendapatan/ *Banking Services, Account Receivables, Short Term Bank and Other Financial Institution Loans, Revenues*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Jasa Perbankan, Piutang Usaha, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya / *Banking Services, Account Receivables, Short Term Bank and Other Financial Institution Loans,*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Jasa Perbankan, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ *Banking Services, Short Term Bank and Other Financial Institution Loans*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (”Eximbank”)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya *Short Term Bank and Other Financial Institution Loans*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ *Account Receivables, Account Payables, Revenues*
PT Citilink Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Pendapatan/ *Account Receivables, Revenues*
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Pendapatan/ *Account Receivables, Revenues*
PT Aerofood Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Pendapatan/ *Account Receivables, Revenues*
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Pendapatan/ *Account Receivables, Revenues*
PT Merpati Nusantara Airlines	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha/ *Account Receivables*
PT Railink	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha/ *Account Receivables*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/*Account Receivables, Account Payables, Other Payables, Revenues*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, /*Account Receivables, Account Payables, Other Payables*

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The details of nature of relationship and types of significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pihak berelasi/*Related parties*	**Sifat hubungan/*Nature of relationship***	**Transaksi/*Transactions***
Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura (Kokapura)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/ *Account Payables*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Lain-lain / *Account Receivables*
PT Aero Wisata	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha / *Account Receivables*
PT Telekomunikasi Seluler	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Pendapatan/ *Account Receivables, Revenues*
PP KSO	Kerjasama Operasi/ Joint Operasional	Piutang Usaha/ *Account Receivables*
PT Pertamina (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Pendapatan/*Account Receivables, Revenues*
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain,/ *Account Receivables, Account Payables Other Payables*
PT Merpati Maintenance Facility	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha/ *Account Receivables*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Lain-lain / *Other Payables*
PT Hutama Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ *Account Receivables, Other Payables, Revenues*
PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Lain-lain/ *Other Payables*
PT Barata Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha/ *Account Receivables*
PT Sariarthamas Hotel Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain/ *Account Receivables, Other Receivables*
Perum Percetakan Negara RI (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha / *Account Receivables*
Perum Produksi Film Negara (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Lain-lain/ *Other Receivables*
PT Hotel Indonesia Properti	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain/ *Accounts Receivables*, *Other Receivables*
PT Purantara Mitra Angkasa Dua	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha/*Accounts receivables*
PT Aerofood Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha/*Accounts receivables*
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha/*Accounts receivables*
PT Peninsula Bali Resort	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha/*Accounts receivables*
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Lain-Lain/*Other receivables*
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Lain-Lain/*Other receivables*
Wijaya Karya Pembangunan Gedung	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Lain-Lain/*Other receivables*
PT Mandiri Sekuritas	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/*Accounts payable*
Koperasi Satya Ardia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/*Accounts payable*
KSO PT Wijaya Karya – PT Bunga Raya Lestari	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/*Accounts payable*
KSO PT Wijaya Karya – PT Bunga Raya Lestari	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/*Accounts payable*

45. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

45. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The details of nature of relationship and types of significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat hubungan/*Nature of relationship*	Transaksi/*Transactions*
PT Aerosystem Indonesia	Pemerintah/*Government Related Entities* Entitas yang Berelasi dengan	Utang Usaha/*Accounts payable*
PT PP Urban	Pemerintah/*Government Related Entities* Entitas yang Berelasi dengan	Utang Usaha/*Accounts payable*
PT Garuda Energi Logistik	Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/*Accounts payable*
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/ *Account Payables*
Kementerian Sekretariat Negara RI/ *Ministry of State Secretariat Of the Republic of Indonesia*	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Lain-lain/ *Other Receivables*
PT Pelita Air Service (PAS)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ *Account Receivable, Account Payables*, *Revenue*
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang Usaha, Utang Usaha/ *Account Receivable, Account Payables*
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha, Utang Lain-lain / *Account Payables*, *Other Payables*
PT Garuda Daya Pratama Sejahtera	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/ *Account Payables*
PT Amarta Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Lain-lain / *Revenues*
PT Yodya Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Lain-lain/ *Other Payables*
BPJS Ketenagakerjaan	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/ *Account Payables*
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Pendapatan/ *Revenue*
PT Taspen (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/ *Account Payables*
PT Jasa Raharja (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/ *Account Payables*
PT Berdikari Meubel Nusantara	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/ *Account Payables*
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Lain-lain/ *Other Payables*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/ *Account Payables*
PT Indonesia Ferry Property	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Usaha/ *Account Payables*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Piutang lain-lain, Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ *Other Receivables, Short-Term Bank and Other Financial Institution Loans*
PT Istaka Karya (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Lain-lain/ *Other Payables*
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Lain-lain/ *Other Payables*
PT Kadomas Aviasindo	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Utang Lain-lain/ *Other Payables*
PT Pratama Persada Airbone	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Beban Akrual/ *Accrued Expenses*
PT Inaca	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Beban Akrual/ *Accrued Expenses,*
PT Pos Logistik Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/*Government Related Entities*	Pendapatan/ *Revenues*

Jumlah saldo dan transaksi dengan pihak berelasi dijabarkan dalam catatan masing-masing akun.

The balances and transactions with related parties are disclosed in each respective notes of the accounts.

46. INFORMASI SEGMEN OPERASI / *46. OPERATION SEGMENT OPERATION*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/
Year ended December 31, 2025

	Entitas *Holding/ Holding Entity*	Aviasi/ *Aviation*	Jasa dan Perdagangan Umum/ *Services and Trading*	Pariwisata Lainnya/ *Other Tourism*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
PENDAPATAN	**1.133.228**	**28.755.522**	**1.760.836**	**1.442.088**	**(4.512.058)**	**28.579.616**	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	**-**	**(19.297.995)**	**(901.528)**	**(1.199.840)**	**3.397.224**	**(18.002.139)**	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**1.133.228**	**9.457.527**	**859.308**	**242.248**	**(1.114.834)**	**10.577.477**	***GROSS PROFIT***
Beban pegawai	(152.649)	(728.369)	(200.223)	(143.341)	1.059	(1.223.523)	*Employee expenses*
Beban pemasaran	(21.311)	(53.852)	(38.687)	(34.349)	2.675	(145.524)	*Marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	(375.007)	(2.502.375)	(497.848)	(463.231)	175.999	(3.662.462)	*General and administrative expense*
Pendapatan (beban) lain-lain	(17.552)	5.763.926	18.269	(34.164)	89.853	5.820.332	*Other income (expenses)*
LABA USAHA	**566.709**	**11.936.857**	**140.819**	**(432.837)**	**(845.248)**	**11.366.300**	***OPERATING PROFIT***
Penghasilan keuangan	189.398	379.236	18.783	16.001	(173.540)	429.878	*Finance income*
Beban keuangan	(225.186)	(3.160.767)	(149.504)	(226.145)	184.190	(3.577.412)	*Finance costs*
Bagian rugi entitas asosiasi	-	258.129	-	-	(237.781)	20.348	*Equity loss off associates entities*
Pajak final	-	(567.100)	(12.509)	(58.950)	377	(638.182)	*Final tax*
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**530.921**	**8.846.355**	**(2.411)**	**(701.931)**	**(1.072.002)**	**7.600.932**	***PROFIT (LOSS) BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
(Beban) manfaat pajak penghasilan badan, neto	2.404	(749.345)	74.361	(15.159)	-	(687.739)	*Corporate income tax (expense) benefit, net*
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA	**533.325**	**8.097.010**	**71.950**	**(717.090)**	**(1.072.002)**	**6.913.193**	***PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT***
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	**(521)**	**9.177**	**(699)**	**(4.391)**	**-**	**3.566**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR NET OF TAX***
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**532.804**	**8.106.187**	**71.251**	**(721.481)**	**(1.072.002)**	**6.916.759**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
Aset segmen	37.096.018	96.723.238	6.605.405	9.386.418	(43.171.002)	106.640.077	*Segment assets*
Liabilitas segmen	3.629.997	56.281.112	3.578.592	4.719.247	(3.857.985)	64.350.963	*Segment liabilities*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/
Year ended December 31, 2024

	Entitas *Holding/ Holding Entity*	Aviasi/ *Aviation*	Jasa dan Perdagangan Umum/ *Services and Trading*	Pariwisata Lainnya/ *Other Tourism*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
PENDAPATAN	**1.109.343**	**27.541.216**	**1.788.316**	**4.107.779**	**(4.007.308)**	**30.539.346**	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	**(75.697)**	**(18.292.285)**	**(1.092.436)**	**(1.271.719)**	**2.953.397**	**(17.778.740)**	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**1.033.646**	**9.248.931**	**695.880**	**2.836.060**	**(1.053.911)**	**12.760.606**	***GROSS PROFIT***
Beban pegawai	(115.670)	(702.859)	(167.369)	(146.670)	37	(1.132.531)	*Employee expenses*
Beban pemasaran	(13.977)	(57.586)	(11.745)	(15.589)	186	(98.711	*Marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	(376.279)	(2.054.717)	(442.278)	(724.630)	40.833	(3.557.071)	*General and administrative expense*
Pendapatan (beban) lain-lain	45.847	(230.609)	697.805	319.911	(490.587)	342.367	*Other income (expenses)*
LABA USAHA	**573.567**	**6.203.160**	**772.293**	**2.269.082**	**(1.503.442)**	**8.314.660**	***OPERATING PROFIT***
Penghasilan keuangan	91.027	394.436	4.562	23.301	(90.021)	423.305	*Finance income*
Beban keuangan	(89.482)	(3.366.427)	(188.875)	(164.074)	100.525	(3.708.333)	*Finance costs*
Bagian rugi entitas asosiasi	-	217.038	(8.696)	153.246	(377.842)	(16.254)	*Equity loss off associates entities*
Pajak final	(43)	(312.036)	(10.701)	(107.075)	-	(429.855)	*Final tax*
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**575.069**	**3.136.171**	**568.583**	**2.174.480**	**(1.870.780)**	**4.583.523**	***PROFIT (LOSS) BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
(Beban) manfaat pajak penghasilan badan, neto	(31.740)	(1.942.212)	(138.483)	(27.035)	125.573	(2.013.897)	*Corporate income tax (expense) benefit, net*
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA	**543.329**	**1.193.959**	**430.100**	**2.147.445**	**(1.745.207)**	**2.569.626**	***PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT***
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	**423**	**(56.261)**	**(3.588)**	**19.969**	**(1.957)**	**(41.414)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR NET OF TAX***
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**543.752**	**1.137.698**	**426.512**	**2.167.414**	**(1.747.164)**	**2.528.212**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
Aset segmen	37.076.960	92.442.524	6.666.499	10.566.686	(42.933.719)	103.818.950	*Segment assets*
Liabilitas segmen	3.492.505	59.132.540	4.672.390	5.558.707	(5.113.447)	67.742.695	*Segment liabilities*

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Perusahaan

a. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Sarinah

Pada tanggal 5 April 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman pemegang saham dengan Sarinah dengan nilai pinjaman maksimal sebesar Rp50.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga dan tersedia hingga 5 April 2025. Sarinah juga dikenakan biaya fasilitas sebesar 0,3% dari nilai fasilitas dan memiliki *grace period* hingga 5 April 2024.

Pinjaman pemegang saham tersebut akan digunakan oleh Sarinah untuk keperluan sebagai berikut:

- Keperluan rencana penyertaan modal awal, investasi, dan biaya operasional awal pada Perusahaan Patungan atau *Joint Venture Company* (JVC) Toko Bebas Bea (TBB), yaitu PT Sarinah Dufry Internasional dengan nilai maksimal pinjaman sebesar Rp17.358.
- Keperluan rencana pengeluaran perolehan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tanah di Pancoran dengan nilai maksimal pinjaman sebesar Rp32.642.

Pada tanggal 22 Desember 2022, Perusahaan dan Sarinah sepakat melakukan adendum yang mengubah keperluan pinjaman pemegang saham menjadi hanya dibatasi untuk rencana realisasi Program Transformasi Sumber Daya Manusia dengan nilai pinjaman maksimal Rp36.642.

Pada tanggal 24 Desember 2024, Sarinah telah melakukan pelunasan dipercepat atas pinjaman tersebut.

b. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham yang Dapat Dikonversikan Sarinah

Pada tanggal 27 November 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman pemegang saham yang dapat dikonversikan menjadi modal saham dengan Sarinah dengan nilai fasilitas pinjaman maksimal sebesar Rp740.682 dan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2024. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 11% per tahun.

Pinjaman tersebut digunakan oleh Sarinah untuk pelunasan dan pengakhiran perjanjian bangun guna serah antara Sarinah dengan PT Wijaya Karya Realty (“Wika Realty”).

Pada tanggal 30 Desember 2024, Sarinah telah melakukan pelunasan sebagian pinjaman pokok sebesar Rp211.403 beserta pembayaran bunga sebesar Rp54.019.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company

a. Shareholder Loan Agreement Sarinah

On April 5, 2022, the Company entered into an agreement of shareholder loan with Sarinah with a maximum amount Rp50,000. The loan is charged with interest and available until April 5, 2025. Sarinah also charged with facility fee of 0,3% from the facility amount and has garce period until April 5, 2024.

The shareholder loan will be used by Sarinah for the following purposes:

- *The need for initial capital participation plan, investment, and initial operational costs in the Joint Venture Company (JVC) Duty-Free Store, namely PT Sarinah Dufry Internasional, with a maximum loan amount of Rp17,358.*
- *For the planned expenses related to the acquisition of the Right to Build (SHGB) Certificate for land in Pancoran, with a maximum loan amount of Rp32,642.*

On December 22, 2022, the Company and Sarinah agreed to amend the purpose of the shareholder loan to be focus only for the realization of the Human Resources Transformation Program with maximum loan amount of Rp36,642.

On December 24, 2024, Sarinah has made early settlement of the loan.

b. Convertible Shareholder Loan Agreement Sarinah

On November 27, 2023, the Company entered into convertible shareholder loan into share capital facility agreement with Sarinah, with a maximum loan facility amount of Rp740,682 and due on August 26, 2024. The loan is charged with interest at the rate 11% per annum.

The loan is used by Sarinah for settlement and termination of the build-operate-transfer agreement between Sarinah and PT Wijaya Karya Realty ("Wika Realty").

On December 30, 2024, Sarinah has made partial settlement of the loan amounted to Rp211,403 along with its interest of Rp54,019.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

b. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham yang Dapat Dikonversikan Sarinah (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2024, Sarinah telah melakukan pelunasan sebagian pinjaman pokok sebesar Rp211.403 beserta pembayaran bunga sebesar Rp54.019.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sarinah No. 92 tanggal 31 Desember 2025 dari Notaris Desman, S.H., M.Hum., Perusahaan menyetujui penambahan/peningkatan modal ditempatkan dan disetor Sarinah sebesar Rp529.279 yang bersumber dari konversi pokok saldo pinjaman pemegang saham.

Akta notaris tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0003260.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Januari 2026.

c. Perjanjian Dana Talangan ITDC

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian pemberian dana talangan dengan ITDC dengan nilai maksimum sebesar Rp125.000 dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2023. Dana talangan tersebut dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun. Dana talangan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana operasional dan modal kerja ITDC.

Pada tanggal 28 Desember 2023, Perusahaan dan ITDC setuju melakukan perubahan tanggal jatuh tempo dana talangan tersebut menjadi tanggal 31 Juli 2024.

Pada tanggal 25 Juni 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian pemberian dana talangan dengan ITDC dengan nilai sebesar Rp10.000 dengan tanggal jatuh tempo 31 Juli 2024. Dana talangan tersebut dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun. Dana talangan tersebut digunakan untuk *side event* MotoGP 2024. ITDC telah melunasi dana talangan tersebut pada tanggal 30 Juli 2024.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

b. Convertible Shareholder Loan Agreement Sarinah (continued)

On December 30, 2024, Sarinah has made partial settlement of the loan amounted to Rp211,403 along with its interest of Rp54,019.

Based on Deed of Shareholders Decreee of Sarinah No. 92 dated December 31, 2025 from Notary Desman, S.H., M.Hum., the Company approved the increase in the issued and paid-up capital of Sarinah of Rp529,279, which come from convertion of the principal of shareholder loan.

The notarial deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-0003260.AH.01.02.TAHUN 2026 dated January 23, 2026.

c. Emergency Fund Agreement ITDC

On August 31, 2023, the Company entered into an emergency fund agreement with ITDC with maximum amount of Rp125,000 with due date on December 29, 2023. This emergency fund is charged with interest at the rate 10.5% per annum. The purpose of emergency fund will be used for operational and working capital of ITDC.

On December 28, 2023, the Company and ITDC agreed to amend the due date of the emergency fund to July 31, 2024.

On June 25, 2024, the Company entered into an emergency fund agreement with ITDC amounted to Rp10,000 with due date on July 31, 2024. This emergency fund is charged with interest at the rate 10.5% per annum. The purpose of emergency fund will be used for side event of MotoGP 2024. ITDC has settled the emergency fund on July 30, 2024.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

c. Perjanjian Dana Talangan ITDC (lanjutan)

Pada tanggal 25 Juni 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian pemberian dana talangan dengan ITDC dengan nilai sebesar Rp150.000 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2024. Dana talangan tersebut dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun. Dana talangan tersebut digunakan untuk pemenuhan kewajiban kepada kreditur dan operasional.

Pada tanggal 29 Juli 2024, ITDC telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran dana talangan tersebut hingga 30 Desember 2024 kepada Perusahaan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ITDC No. 91 tanggal 31 Desember 2025 dari Notaris Desman, S.H., M.Hum., Perusahaan menyetujui penambahan/peningkatan modal ditempatkan dan disetor ITDC sebesar Rp275.000 yang bersumber dari konversi pokok saldo pinjaman pemegang saham.

Akta notaris tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0019462 tanggal 23 Januari 2026.

d. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham yang Dapat Dikonversikan HIN

Pada tanggal 24 Oktober 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman pemegang saham yang dapat dikonversikan menjadi modal saham dengan HIN, dengan nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp502.935 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 10,5% per tahun.

Pinjaman tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan proyek revitalisasi Grand Inna Bali Beach Hotel di Kawasan Sanur.

Pada tanggal 30 Desember 2024, Perusahaan dan HIN setuju melakukan perubahan tanggal jatuh tempo pinjaman pemegang saham tersebut menjadi tanggal 30 Juni 2025.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

c. Emergency Fund Agreement ITDC (continued)

On June 25, 2024, the Company entered into an emergency fund agreement with ITDC amounted to Rp150,000 with due date on August 30, 2024. This emergency fund is charged with interest at the rate 10.5% per annum. The purpose of emergency fund will be used for fulfillment of obligations to creditors and operationals.

On July 29, 2024, ITDC has submitted a request for postponement of the due date to December 30, 2024 to the Company.

Based on Deed of Shareholders Decreee of ITDC No. 91 dated December 31, 2025 from Notary Desman, S.H., M.Hum., the Company approved the increase in the issued and paid-up capital of ITDC of Rp275,000, which come from convertion of the principal of shareholder loan.

The notarial deed has been acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.03-0019462 dated January 23, 2026.

d. Convertible Shareholder Loan Agreement HIN

On October 24, 2024, the Company entered into convertible shareholder loan into share capital facility agreement with HIN, with loan facility amount of Rp502,935 and due on December 31, 2024. The loan is charged with interest at the rate 10,5% per annum.

The purpose of the loan is for the revitalitation of Grand Inna Beach Bali Hotel in Sanur Area.

On December 30, 2024, the Company and HIN agreed to amend the maturity date of the shareholder loan to June 30, 2025.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

d. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham yang Dapat Dikonversikan HIN (lanjutan)

Pada tanggal 18 Desember 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman pemegang saham yang dapat dikonversikan menjadi modal saham dengan HIN, dengan nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp84.400 dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2025. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 10,5% per tahun.

Pinjaman tersebut ditujukan untuk memenuhi kewajiban PT Hotel Indonesia Properti ("HIPRO") sebagai prasyarat pendahuluan dalam proses transaksi tahap II holding hotel.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HIN No. 44 tanggal 31 Desember 2025 dari Notaris Dwitya Aziza, S.H., M.Kn, Perusahaan menyetujui penambahan/peningkatan modal ditempatkan dan disetor HIN yang bersumber dari konversi pokok saldo pinjaman pemegang saham sebesar Rp432.858 dan setoran uang dari Perusahaan kepada HIN sebesar Rp153.142, sehingga jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor HIN adalah sebesar Rp586.000.

Akta notaris tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0002865.AH.01.02 TAHUN 2026 tanggal 23 Januari 2026.

Setoran tunai sebesar Rp153.142 telah disetorkan oleh Perusahaan kepada HIN pada tanggal 3 Maret 2026.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

d. Convertible Shareholder Loan Agreement HIN (continued)

On December 18, 2024, the Company entered into convertible shareholder loan into share capital facility agreement with HIN, with loan facility amount of Rp84,400 and due on June 30, 2025. The loan is charged with interest at the rate 10,5% per annum.

The purpose of the loan is to fulfill the obligations of PT Hotel Indonesia Properti ("HIPRO") as a preliminary prerequisite in the phase II transaction of hotel holding process.

Based on Deed of Shareholders Decreee of HIN No. 44 dated December 31, 2025 from Notary Dwitya Aziza, S.H., M.Kn, the Company approved the increase in the issued and paid-up capital of HIN which come from convertion of the principal of shareholder loan of Rp432,858 and cash injection from the Company to HIN of Rp153,142, therefore total of the increased of issued and paid-up capital of HIN amounting to Rp586,000.

The notarial deed has been acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. No. AHU-0002865.AH.01.02 TAHUN 2026 dated January 23, 2026.

The cash injection of Rp153,142 have been deposited by the Company to HIN on March 3, 2026.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

e. Perjanjian Lisensi F1H2O

Pada tanggal 5 Agustus 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan H2O Management Ltd. terkait dengan penyelenggaraan kejuaraan *powerboat* kelas dunia dimana Perusahaan memiliki kewenangan untuk menggunakan lisensi F1H2O selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama.

Besaran tarif lisensi penyelenggaraan event F1H2O setiap tahunnya adalah sebesar EUR 2.300.000 (nilai penuh) untuk tahun 2023 dan 2024, dan setelahnya akan mengalami kenaikan 5% setiap tahunnya.

f. Perjanjian Lisensi *Aquabike*

Pada tanggal 22 Agustus 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian addendum atas kerja sama dengan *Aquabike* Promotion Ltd. terkait dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga air kelas dunia di mana Perusahaan memiliki kewenangan untuk menggunakan lisensi Aquabike selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama.

Besaran tarif lisensi yang perlu dikeluarkan untuk penyelenggaraan event *Aquabike* setiap tahunnya adalah sebesar EUR1.750.000 (nilai penuh) untuk tahun 2023 dan setelahnya akan mengalami kenaikan 5% setiap tahunnya.

g. Perjanjian Layanan Manajemen Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung

Perusahaan dan entitas anaknya menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung dimana Perusahaan menyediakan jasa manajemen tertentu kepada masing-masing entitas anak berdasarkan kapasitasnya sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung dengan kompensasi berdasarkan tarif tertentu dari pendapatan entitas anak.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

e. F1H2O License Agreement

On August 5, 2022, the Company entered into a cooperation agreement with H2O Management Ltd. regarding the organization of the world-class powerboat championship, where the Company has the authority to use the F1H2O license for 5 year from the signing of the cooperation agreement.

The annual license fee for organizing the F1H2O event is EUR 2,300,000 (full amount) for 2023 and 2024, and subsequently will have annual increase of 5%.

f. Aquabike License Agreement

On August 22, 2023, the Company signed a cooperation addendum agreement with Aquabike Promotion Ltd. regarding the organization of the world-class water sports championship, where the Company has the authority to use the Aquabike license for 5 year from the signing of the cooperation agreement.

The annual license fee for organizing the Aquabike event is EUR1,750,000 (full amount) for the year 2023, and subsequently will have annual increase of 5%.

g. Management Services Agreement of State-Owned Entities Holding Tourism and Support

The Company and its subsidiaries signed the Management Services Agreement of State-Owned Entities Holding Tourism and Support where the Company provides certain management services to each subsidiaries based on its capacity as the holding company of State-Owned Entities Tourism and Support with compensation based on certain tariff from the subsidiaries revenues.

Entitas Anak/ ***Subsidiaries***	**Tanggal Perjanjian/** ***Agreement Date***	**Tarif Fee Manajemen/** ***Management Fee Tariff***	**Jangka Waktu/*Time Period***
AP I	29 Desember 2023/ *December 29, 2023*	1,00% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2024/ *12 months since January 1, 2024*

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Perusahaan (lanjutan)

The Company (continued)

g. Perjanjian Layanan Manajemen Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung (lanjutan)

g. Management Services Agreement of State-Owned Entities Holding Tourism and Support (continued)

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date*	Tarif Fee Manajemen/ *Management Fee Tariff*	Jangka Waktu/*Time Period*
AP Indonesia (dahulu AP II)	29 Desember 2023/ *December 29, 2023*	1,00% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2024/ *12 months since January 1, 2024*
	19 Juni 2025/ *June 19, 2025*	1,00% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2025/ *12 months since January 1, 2025*
HIN	29 Desember 2023/ *December 29, 2023*	1,00% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2024/ *12 months since January 1, 2024*
	19 Desember 2025/ *December 19, 2025*	0,25% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2025/ *12 months since January 1, 2025*
Sarinah	29 Desember 2023/ *December 29, 2023*	1,00% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2024/ *12 months since January 1, 2024*
	18 Juni 2025/ *June 18, 2025*	0,25% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2025/ *12 months since January 1, 2025*
TWC	29 Desember 2023/ *December 29, 2023*	1,11% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2024/ *12 months since January 1, 2024*
	18 Juni 2025/ *June 18, 2025*	1,00% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2025/ *12 months since January 1, 2025*
ITDC	29 Desember 2023/ *December 29, 2023*	1,00% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2024/ *12 months since January 1, 2024*
	18 Juni 2025/ *June 18, 2025*	1,00% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2025/ *12 months since January 1, 2025*
IAS	29 Desember 2023/ *December 29, 2023*	1,00% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2024/ *12 months since January 1, 2024*
	18 Desember 2025/ *December 18, 2025*	0,25% dari pendapatan usaha konsolidasian/ *from consolidated operating revenues*	12 bulan sejak 1 Januari 2025/ *12 months since January 1, 2025*

AP Indonesia

AP Indonesia

h. Perjanjian Konsesi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pada tanggal 15 Desember 2015, AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) mengadakan perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) mengenai pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan (“Perjanjian Konsesi”).

h. Concession Agreement - Directorate General of Civil Aviation

On December 15, 2015, AP Indonesia (formerly AP I and AP II) entered into an agreement with the Directorate General of Civil Aviation (DJPU) regarding the concession provided to AP Indonesia (formerly AP I) to conduct airport services (“Concession Agreement”).

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

h. Perjanjian Konsesi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (lanjutan)

DJPU memberikan hak kepada AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan termasuk meliputi pelayanan sehubungan dengan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos. Layanan tersebut mencakup penyediaan dan/atau pengembangan:

- Fasilitas kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
- Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
- Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
- Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang digunakan untuk mendukung transportasi udara.

Ketentuan-ketentuan penting dalam perjanjian konsesi diantaranya sebagai berikut:
- AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) diwajibkan untuk membayar pendapatan konsesi dari pelayanan jasa kebandarudaraan sebesar 2,5% dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan per tahun, yang akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- Perjanjian konsesi berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian, dan diperpanjang selama 30 tahun sesuai kesepakatan DJPU dan AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II), setelah AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.

Perjanjian konsesi tersebut tidak diperpanjang setelah jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir.

Pada tanggal 5 September 2024, AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) menyepakati perjanjian tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara yang diselenggarakan oleh AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II).

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

h. Concession Agreement - Directorate General of Civil Aviation (continued)

DJPU granted the right to AP Indonesia (formerly AP I and AP II) to conduct the airport service activities including aircraft, passenger, freight and postal related services. Such services encompass the provision and/or development of:

- *Facilities for service activities for landing, takeoff, maneuvering, parking and storage of aircraft;*
- *Terminal facilities for passenger transport services, cargo, and mail;*
- *Electronic facilities, electricity, water, and waste disposal installations; and*
- *Areas for the building, grounds, and industry as well as buildings provided to support air transportation.*

Important provisions in the concession agreement among others are as follows:
- *AP Indonesia (formerly AP I and AP II) is required to pay concession revenue of airport service activities amounting to 2.5% of total revenue of airport service activities per year, which will be evaluated every 5 (five) years.*

- *The concession agreement is valid for 2 (two) years, starting from date the concession agreement is signed, and extended for 30 years as agreed by DJPU and AP Indonesia (formerly AP I and AP II), after AP Indonesia (formerly AP I and AP II) received approval from shareholders general meeting.*

The concession agreement was not extended after the end of 2 (two) years period.

On September 5, 2024, AP Indonesia (formerly AP I) entered into an agreement regarding Airport Services at Airports organized by AP Indonesia (formerly AP I and AP II).

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

i. Perjanjian Konsesi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (lanjutan)

Rincian pengenaan besaran biaya konsesi yang disepakati pada perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Terhitung sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan kotor berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 193 tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan.
- Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan berakhirnya masa konsesi ditetapkan sebesar 2,5% per tahun dari Pendapatan Kotor.
- Terhadap besaran biaya konsesi sejak tahun 2021, DJPU akan meminta reviu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") yang kemudian hasilnya akan dijadikan dasar untuk dilakukan adendum perjanjian.

Perjanjian tersebut juga mengatur mengenai periode pembayaran konsesi sebagai berikut:

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

i. Concession Agreement - Directorate General of Civil Aviation (continued)

Details of the imposition of the amount of concession fees as agreed in the agreement are as follows:

- *Starting from December 15, 2017 until June 30, 2021 at 2.5% per year of gross revenue based on the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 193 of 2015 regarding Concessions and Other Forms of Cooperation between The Government and Airport Business Entities for Airport Services.*
- *Starting from July 1, 2021 until the end of the concession period, rate is set at 2.5% per year of gross revenue.*
- *Regarding the amount of concession fees since 2021, DJPU will request a review from Regulatory Monitoring Body of Finance and Construction ("BPKP"), which results will be used as the basis of making amendment to the agreement.*

The agreement also regulates the period of concession payments as follows:

Masa Konsesi/ *Concession Period*	Persyaratan Pembayaran/ *Payment Term*
15 Desember 2017 - 30 Juni 2021/ *Desember 15, 2017 - June 30, 2021*	Dibayarkan paling lambat/*To be paid at the latest* 31 Desember/*December 31*, 2024
1 Juli 2021 - 31 Desember 2023/ *July 1, 2021 - Desember 31, 2023*	Dibayarkan paling lambat/*To be paid at the latest* 30 Desember/*December 30*, 2025
1 Januari 2024 dan sampai berakhirnya jangka waktu konsesi/*January 1, 2024 and until the end of concession period*	Dibayarkan paling lambat 30 April tahun berikutnya/ *To be paid at the latest April 30 in the next year*

Atas kewajiban periode 15 Desember 2017 - 30 Juni 2021, AP Indonesia telah melakukan pembayaran pada tanggal 23 Desember 2024 sebesar Rp710.033.

Atas pembayaran tersebut, AP Indonesia melakukan verifikasi perhitungan biaya konsesi dengan Direktorat jenderal Perhubungan pada tanggal 9 Januari 2025 yang disepakati pada Berita Acara Verifikasi Konsesi No. HK.201/3/5/DRJU.KUM-2024 dan No. 0131 SP.DU.0131/HK.04.01/2024 untuk AP Indonesia (dahulu AP1) dan Berita Acara Verifikasi Konsesi No. HK. 201/3/6/DRJU.KUM-2024 dan No. PJJ.04.04/00/09/2024/0340 untuk AP Indonesia.

For the obligation covering the period from December 15, 2017, to June 30, 2021, AP Indonesia made a payment on December 23, 2024, amounting to Rp710,033.

Regarding the payment, the AP Indonesia carried out a verification of the concession cost calculation with the Directorate General of Transportation on January 9, 2025, which was agreed upon in the Concession Verification Minutes No. HK.201/3/5/DRJU.KUM-2024 an No. 0131 SP.DU.0131/HK.04.01/2024 for the AP Indonesia (formerly AP1), and Concession Verification Minute No.HK.201/3/6/DRJU.KUM-2024 and No. PJJ.04.04/00/09/2024/0340 for AP Indonesia.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

i. Perjanjian Konsesi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (lanjutan)

Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat selisih antara jumlah konsesi yang harus dibayarkan dengan yang telah dibayarkan oleh AP Indonesia sebesar Rp7.139 yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Tagihan PNBP dan AP Indonesia akan melakukan pembayaran.

Terhadap bandar udara yang dilaksanakan melalui skema KSP BMN, Perusahaan akan melakukan permohonan reviu kepada BPKP dan hasil reviu BPKP akan menjadi bahan pertimbangan terhadap pembayaran biaya konsesi jasa kebandarudaraan.

Pada tanggal 7 Februari 2025, AP Indonesia menerima surat dari DJPU terkait Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Reviu atas Perhitungan Jangka Waktu dan Tarif Konsesi Pengusahaan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan AP Indonesia.

DJPU menyampaikan bahwa telah dilakukan reviu oleh BPKP atas perhitungan jangka waktu dan tarif konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan pada AP Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

1. Besaran fee konsesi AP Indonesia (dahulu AP I) dan AP Indonesia (dahulu AP II) masing-masing sebesar 2,19% dan 2,00% dari pendapatan bruto dengan jangka waktu konsesi masing-masing 38 (tiga puluh delapan) tahun dan 39 (tiga puluh sembilan) tahun.
2. Setelah proses penggabungan AP Indonesia, BPKP melakukan *remodeling* perhitungan jangka waktu konsesi untuk AP Indonesia sehingga besaran fee menjadi sebesar 2,00% dari pendapatan bruto dengan jangka waktu konsesi 38 tahun.
3. Terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu perlu mitigasi risiko terhadap perubahan (contohnya perubahan lingkungan dan kondisi perekonomian) selama masa konsesi yang dapat berpengaruh pada rencana bisnis, investasi, dan pola operasi bandar udara.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

i. Concession Agreement - Directorate General of Civil Aviation (continued)

Based on the verification results, there is discrepancy between the amount of the concession that should be paid and what has been paid by AP Indonesia, amounting to Rp7,139. A PNBP Billing Letter will be issued, and the AP Indonesia will proceed with the payment.

For airports operated under the KSP BMN scheme, the Company will submit a review request to BPKP, and the results of the BPKP review will be taken into consideration for the payment of airport service concession fees.

On February 7, 2025, AP Indonesia received a letter from DJPU regarding the Follow-up on the Review Report of the Calculation of the Period and Tariff of the Concession for Airport Service by AP Indonesia.

DJPU stated that the review by BPKP has been conducted on the calculation of the period and tariff of the airport service concession at AP Indonesia (formerly AP I and AP II) with the following details:

1. The concession fee for AP Indonesia (formerly AP I) and AP Indonesia (formerly AP II) is set at 2.19% and 2.00% of gross revenue, respectively, with a concession period of 38 (thirty eight) years and 39 (thirty nine) years, respectively.

2. After the merger of AP Indonesia, BPKP conducted a remodeling of the concession period calculation for AP Indonesia, resulting in a fee of 2.00% of gross revenue with a concession period of 38 years.

3. There are important considerations, namely the need for risk mitigation against changes (such as changes in the environment and economic conditions) during the concession period that may impact the business plan, investments, and airport operational patterns.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

i. Perjanjian Konsesi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (lanjutan)

DJPU menyampaikan bahwa telah dilakukan reviu oleh BPKP atas perhitungan jangka waktu dan tarif konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan pada AP Indonesia dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

4. Hasil reviu yang dimaksud direkomendasikan oleh BPKP agar digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam pemberian konsesi jasa kebandarudaraan.

Pada tanggal 30 April 2025, AP Indonesia menyepakati perubahan atas Perjanjian Konsesi sebagaimana dituangkan dalam Adendum Perjanjian Konsesi tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara yang diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura Indonesia No. HK.201/1/24/DRJU.KUM-2025 dan PJJ.DU.0107/HK.04.2025 tanggal 30 April 2025. Rincian perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Masa konsesi berlaku sejak 15 Desember 2017 hingga 31 Desember 2057.

b) Tarif konsesi ditetapkan sebagai berikut:

- 15 Desember 2017 - 30 Juni 2021: 2,5% dari pendapatan bruto;
- 1 Juli 2021 - 31 Desember 2024: 2% dari pendapatan bruto;
- 1 Januari 2025 hingga berakhirnya masa konsesi: 1,12% per tahun.

c) Pembayaran biaya konsesi untuk periode 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2023 dilakukan oleh AP Indonesia melalui mekanisme *self-assessment*, dimana Perusahaan secara mandiri membuat kode billing pada Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online dan menyetorkan biaya konsesi tersebut ke Kas Negara. Seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan periode tersebut harus diselesaikan paling lambat pada 30 Januari 2026.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

i. Concession Agreement - Directorate General of Civil Aviation (continued)

DJPU stated that the review by BPKP has been conducted on the calculation of the period and tariff of the airport service concession at AP Indonesia with the following details (continued):

4. The results of the review are recommended by BPKP to be used as one of the considerations for decision-making in granting airport service concessions.

On April 30, 2025, AP Indonesia agreed to amend the existing Concession Agreement as set forth in the Addendum to the Concession Agreement for Airport Services at airports operated by PT Angkasa Pura Indonesia No. HK.201/1/24/DRJU.KUM-2025 and PJJ.DU.0107/HK.04.2025 dated April 30, 2025. The key amendments are as follows:

a) The concession period is effective from December 15, 2017, until December 31, 2057.

b) Concession fee rates are determined as follows:

- *December 15, 2017 - June 30, 2021: 2.5% of gross revenue;*
- *July 1, 2021 - December 31, 2024: 2% of gross revenue;*
- *January 1, 2025 until the end of the concession period: 1.12% per year.*

c) The concession fee payment for the period July 1, 2021 to December 31, 2023 is carried out by AP Indonesia under a self-assessment mechanism, whereby AP Indonesia independently generates a billing code through the Online Non-Tax State Revenue (PNBP) Payment System and remits the concession fees to the State Treasury. All payment obligations for this period must be settled no later than January 30, 2026.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

i. Perjanjian Konsesi - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2025, AP Indonesia melakukan pembayaran beban konsesi sebesar Rp256.057. Atas pembayaran tersebut, Perusahaan melakukan verifikasi perhitungan biaya konsesi dengan Direktorat jenderal Perhubungan pada tanggal 8 Mei 2025 yang disepakati pada Berita Acara Verifikasi Konsesi No.BA/03/VER-KONSESI/APINDO/SBU/V/2025, yang menyatakan bahwa AP Indonesia lebih bayar Rp206.

Pada tanggal 26 Januari 2026, AP Indonesia melakukan pembayaran beban konsesi untuk periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp411.929.

Atas pembayaran tersebut, AP Indonesia melakukan verifikasi perhitungan biaya konsesi dengan DJPU pada 6 Februari 2026 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Verifikasi Konsesi No. BA/01/VER-KONSESI/APINDO/DBU/II/2026 dan BA/02/VER-KONSESI/APINDO/DBU/II/2026. Berita Acara tersebut menegaskan bahwa perhitungan dan pembayaran konsesi AP Indonesia telah sesuai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo beban akrual PNBP konsesi masing-masing sebesar Rp553.483 dan Rp775.333 (Catatan 22).

j. Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Bandara Internasional Ahmad Yani

Pada tanggal 17 Juni 2014, AP Indonesia (dahulu AP I) dan TNI AD menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagian tanah Milik TNI AD di Bandara Internasional Ahmad Yani - Semarang dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian kerja sama ini mempunyai maksud dan tujuan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara International Ahmad Yani Semarang untuk penerbangan sipil dan penerbangan militer dengan prinsip-prinsip korporasi.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

i. Concession Agreement - Directorate General of Civil Aviation (continued)

On April 30, 2025, AP Indonesia made a payment for concession expenses amounting to Rp256,057. Following this payment, AP Indonesia conducted a verification of the concession cost calculation with the Directorate General of Transportation on May 8, 2025, as recorded in the Concession Verification Minutes No. BA/03/VER-KONSESI/APINDO/SBU/V/2025, which stated that AP Indonesia had overpaid Rp206.

On January 26, 2026, the Company made a concession expense payment for the period of July 1, 2021 to December 31, 2023, amounting to Rp411,929.

For this payment, AP Indonesia conducted a verification of the concession fee calculation with DJPU on February 6, 2026, as documented in Concession Verification Minutes No. BA/01/VER-KONSESI/APINDO/DBU/II/2026 and BA/02/VER-KONSESI/APINDO/DBU/II/2026. The Minutes confirm that AP Indonesia's concession calculation and payment were accurate and in compliance.

As of December 31, 2025 and 2024, the accrued expense of PNBP concession amounting to Rp553,483 dan Rp775,333, respectively (Note 22).

j. Cooperation agreements regarding utilization of land owned by Indonesian Army (TNI AD) in Ahmad Yani International Airport

On June 17, 2014 AP Indonesia (formerly AP I) and TNI AD signed into cooperation agreement utilization of some of the land owned by TNI AD in Ahmad Yani International Airport - Semarang for period of 30 (thirty) years from the signing of the agreement. This cooperation agreement has the sole purpose to enable the development of facilities and infrastructure of Ahmad Yani International Airport in Semarang for civil aviation and military aviation with the principles of the corporation.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

j. Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Bandara Internasional Ahmad Yani (lanjutan)

Ruang lingkup kerjasama adalah :

a. Pemanfaatan tanah milik TNI AD seluas 885.500 m^2 dimana tanah seluas 676.089 m^2 akan digunakan untuk areal pengembangan bandar udara dan tanah seluas 208.411 m^2 akan digunakan untuk areal resapan pada sisi utara areal pengembangan bandar udara.
b. Pembayaran kontribusi kepada negara oleh AP Indonesia (dahulu AP I) berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan lahan.
c. Aset yang diperoleh dari kerja sama pemanfaatan ini akan diserahkan oleh AP Indonesia (dahulu AP I) kepada TNI AD setelah perjanjian berakhir yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya maupun dibangun oleh AP Indonesia (dahulu AP I) akan diserahkan kepada TNI AD.

AP Indonesia (dahulu AP I) dikenakan kontribusi tetap kepada negara atas pemanfaatan tanah milik TNI AD tersebut yakni sebesar 0,6% dari nilai wajar tanah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan atau sebesar 0,6% x Rp219.471 yakni Rp1.317. Dimana diasumsikan kenaikan nilai tanah yang menjadi objek KSP sebesar 4,14% setiap tahun. Selain itu juga terdapat pembagian keuntungan sebesar 12,29% dari arus kas bersih dari aktivitas operasi dan investasi per tahun.

Sesuai Addendum Atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat c.q. Komando Daerah Militer IV/ Diponegoro dengan PT Angkasa Pura I Nomor: PSM/56/VI/2024 dan No. ADD.DU.012/HK.04/2024/DU-B tanggal 14 Juni 2024 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik TNI AD di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang bahwa terdapat keringanan pembayaran kontribusi tetap dengan faktor penyesuai sebesar 50% dari kewajiban pembayaran kontribusi tetap tahun 2025 dan 2024.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

j. Cooperation agreements regarding utilization of land owned by Indonesian Army (TNI AD) in Ahmad Yani International Airport (continued)

The scope of cooperation are :

a. The utilization of land owned by TNI AD area of 885,500 m^2 where the land of 676,089 m^2 will be used for airport development area and the land of 208,411 m^2 will be used for recharge areas on the north side of the airport development area.
b. Payment of contributions to the country by AP Indonesia (formerly AP I) is in the form of fixed contributions and profit sharing on land use.
c. Assets obtained from this utilization cooperation will be handed over by AP Indonesia (formerly AP I) to TNI AD after the agreement ends which is stated in the minutes of handover.

Facilities and infrastructure that have been previously established or built by AP Indonesia (formerly AP I) will be handed over to TNI AD.

AP Indonesia (formerly AP I) is subject to a fixed contribution for the utilization of the land owned by the TNI AD, which is 0.6% of the fair value of the land which is the object of the joint utilization or 0.6% x Rp219,471, which is equal to Rp1,317. It is assumed that the increase in the value of land which is the object of the KSP is 4.14% every year. In addition, there is also a profit sharing of 12.29% of net cash flow from operating and investing activities per year.

Pursuant to the Addendum to the Cooperation Agreement for the Utilization of Assets between the Indonesian National Army (TNI AD), represented by the Regional Military Command IV/Diponegoro, and PT Angkasa Pura I, No. PSM/56/VI/2024 and Number: ADD.DU.012/HK.04/2024/DU-B dated June 14, 2024, regarding the Cooperation for the Utilization of a Portion of TNI AD Land at Jenderal Ahmad Yani Airport Semarang, a relief on the fixed contribution payment has been granted through an adjustment factor of 50% of the fixed contribution obligation for the years 2025 and 2024.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

j. Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Bandara Internasional Ahmad Yani (lanjutan)

Besaran kontribusi tetap yang dibayarkan untuk masa untuk masa 31 Maret 2025 sampai dengan 30 Maret 2026 senilai Rp1.478 dan 31 Maret 2024 sampai 30 Maret 2025 senilai Rp717. Selain itu juga terdapat pembagian keuntungan sebesar 2,48% dari laba bersih per tahun.

Bandara Ahmad Yani Semarang mencatatkan kerugian masing-masing sebesar Rp153.056 dan Rp155.542 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

k. Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya

Pada tanggal 13 Februari 2014, AP Indonesia (dahulu AP I) dan TNI AL menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah dan fasilitas milik TNI AL di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan pengembangan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya untuk kepentingan penerbangan sipil maupun penerbangan TNI AL.

Objek perjanjian kerjasama ini adalah tanah seluas 3.143.352 m^2 beserta fasilitas di atasnya milik TNI AL yang akan dimanfaatkan oleh AP Indonesia (dahulu AP I).

Sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya maupun dibangun oleh AP Indonesia (dahulu AP I) akan diserahkan kepada TNI AL. AP Indonesia (dahulu AP I) diwajibkan melaksanakan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tanah beserta fasilitasnya dari hasil pembangunan dan pengembangan terminal 2 bandara.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

j. Cooperation agreements regarding utilization of land owned by Indonesian Army (TNI AD) in Ahmad Yani International Airport (continued)

The fixed contribution amounts paid for the period from March 31, 2025 to March 30, 2026 totaled Rp1,478, and for the period from March 31, 2024 to March 30, 2025 totaled Rp717. In addition, a profit-sharing arrangement of 2.48% of annual net income is also applied.

Ahmad Yani Semarang Airport recorded loss of Rp153,056 and Rp155,542 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

k. Cooperation agreements utilization of land owned by Indonesian Navy (TNI AL) Juanda International Airport in Surabaya

On February 13, 2014, AP Indonesia (formerly AP I) and TNI AL signed into cooperation agreement utilization of and facilities owned by TNI AL in International Airport Juanda Surabaya for period of 30 (thirty) years from the signing of the agreement. This cooperation agreement intended to carry out the development of Juanda International Airport for the benefit of civil aviation and aviation of Indonesian Navy.

The object of this cooperation agreement is an area of 3,143,352 m^2 and the facilities on it owned by TNI AL which will be utilized by AP Indonesia (formerly AP I).

Facilities and infrastructure that have been previously established or built by AP Indonesia (formerly AP I) will be handed over to TNI AL. AP Indonesia (formerly AP I) is required to pay fixed contribution and profit sharing from land use and its facilities from the results of the construction and development of airport terminal 2.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

l. Perjanjian jasa kontruksi gedung terminal dan fasilitas penunjang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

Pada tanggal 19 Maret 2019, AP Indonesia (dahulu AP I) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menandatangani perjanjian pengadaan jasa untuk melakukan konstruksi dan pengembangan gedung terminal dan fasilitas penunjangnya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan nilai kontrak sebesar Rp2.666.419 (nilai termasuk PPN). Jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 dan diperpanjang hingga tanggal 24 Oktober 2022. Pada tanggal 30 April 2025, diterbitkan Berita Acara Perubahan Waktu Pekerjaan yang mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi sampai dengan 18 September 2025. Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tersebut telah dikapitalisasi menjadi aset tetap.

m. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (DJPU)

Pada berbagai tanggal, AP Indonesia (dahulu AP I) dan AP Indonesia (dahulu AP II) melakukan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Bandar Udara dengan DJPU.

Ruang lingkup kerjasama meliputi:
- Mengelola dan melakukan optimalisasi penyediaan dan pengembangan bandar udara.
- Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan bandar udara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Penyerahan hasil pengembangan, pembangunan dan penambahan fasilitas bandar udara kepada DJPU.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

l. Construction service agreements of terminal building and supporting facilities at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar

On March 19, 2019, AP Indonesia (formerly AP I) and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. signed service procurement agreement for the construction and development of terminal buildings and supporting facilities at Sultan Hasanuddin Airport in Makassar with a contract value of Rp2,666,419 (including VAT). The contract period commenced on February 27, 2019 and was initially valid until May 11, 2021, and subsequently extended until October 24, 2022. On April 30, 2025, a Minutes of Amendment to the Work Period was issued, revising the work completion period to September 18, 2025. As of December 31, 2025, the asset has been capitalized as fixed assets.

m. Cooperation Agreement of Airport Utilization with Directorate General of Civil Aviation Ministry of Transportation of The Republic of Indonesia (DJPU)

On various dates, AP Indonesia (formerly AP I) and AP Indonesia (formerly AP II) entered into Cooperation Agreement of State Property Utilization of Airport with DJPU.

Scopes of the cooperation covers:
- *Managing and optimizing provision and development of airport.*
- *Providing fixed contribution and profit sharing on the management of airport as Non-Tax State Revenue (PNBP).*
- *Handing over the result of development, construction and addition of airport facilities to DJPU.*

Bandara/ ***Airport***	**Tanggal Perjanjian/** ***Agreement Date***	**Jumlah Kontribusi Tetap/** ***Total Fixed Contribution***	**Pembagian Keuntungan/** ***Profit Sharing***	**Jangka Waktu/*Time Period***
Sentani, Jayapura	13 Oktober 2019/ October 13, 2019	Rp536.026/ *Rp536,026*	7,43% dari pendapatan kotor apabila bandara telah menghasilkan keuntungan/ *7.43% of gross revenues upon profit of airport*	30 Tahun/ *30 Years*
Tjilik Riwut, Palangkaraya	19 Desember 2018/ December 19, 2018	Rp606.065/ *Rp606,065*	3,7% dari pendapatan kotor apabila bandara telah menghasilkan keuntungan/ *3.7% of gross revenues upon profit of airport*	30 Tahun/ *30 Years*

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

m. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (DJPU) (lanjutan)

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

m. Cooperation Agreement of Airport Utilization with Directorate General of Civil Aviation Ministry of Transportation of The Republic of Indonesia (DJPU) (continued)

Bandara/ *Airport*	**Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date***	**Jumlah Kontribusi Tetap/ *Total Fixed Contribution***	**Pembagian Keuntungan/ *Profit Sharing***	**Jangka Waktu/*Time Period***
Radin Inten II, Lampung	12 Oktober 2019/ October 12, 2019	Rp451.855 *Rp451,855*	10,26% dari pendapatan kotor apabila bandara telah menghasilkan keuntungan/ *10.26% of gross revenues upon profit of airport*	30 Tahun/ *30 Years*
H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan	13 Oktober 2019/ October 13, 2019	Rp209.676/ *Rp209,676*	11,05% dari pendapatan kotor apabila bandara telah menghasilkan keuntungan/ *11.05% of gross revenues upon profit of airport*	30 Tahun/ *30 Years*
Fatmawati Soekarno, Bengkulu	13 Oktober 2019/ October 13, 2019	Rp74.598/ *Rp74,598*	3,23% dari pendapatan kotor apabila bandara telah menghasilkan keuntungan/ *3.23% of gross revenues upon profit of airport*	30 Tahun/ *30 Years*
Sentani, Jayapura	27 Maret 2025/ March 27, 2025	Rp536.026/ *Rp536,026*	9,63% dari pendapatan kotor apabila bandara telah menghasilkan keuntungan/ *9.63% of gross revenues upon profit of airport*	30 Tahun/ *30 Years*
Tjilik Riwut, Palangkaraya	27 Maret 2025/ March 27, 2025	Rp606.065/ *Rp606,065*	10% dari pendapatan kotor apabila bandara telah menghasilkan keuntungan/ *10% of gross revenues upon profit of airport*	30 Tahun/ *30 Years*
Radin Inten II, Lampung	10 Februari 2026/ February 10, 2026	Rp109.478/ *Rp109,478*	2,57% dari pendapatan kotor apabila bandara telah menghasilkan keuntungan/ *2.57% of gross revenues upon profit of airport*	30 Tahun/ *30 Years*
H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan	10 Februari 2026/ February 10, 2026	Rp67.748/ *Rp67,748*	3,52% dari pendapatan kotor apabila bandara telah menghasilkan keuntungan/ *3.52% of gross revenues upon profit of airport*	30 Tahun/ *30 Years*
Fatmawati Soekarno, Bengkulu	10 Februari 2026/ February 10, 2026	Rp58.043/ *Rp58,043*	10% dari pendapatan kotor apabila bandara telah menghasilkan keuntungan/ *10% of gross revenues upon profit of airport*	30 Tahun/ *30 Years*

n. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi

Pada tanggal 7 Oktober 2021, AP Indonesia (dahulu AP II) dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tanah untuk Kegiatan Pengusahaan dan/atau Pengembangan Bandar Udara Siborong-Borong. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian

n. Cooperation Agreement of Airport Utilization with District and Provincial Government

On October 7, 2021, AP Indonesia (formerly AP II) and District Government of Tapanuli Utara signed Cooperation Agreement of Land Utilization for the commercial activities and/or development of Siborong-Borong Airport. This agreement is effective for 30 years from signing date of the agreement.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

n. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bandara dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi (lanjutan)

Pada tanggal 26 Februari 2015, AP Indonesia (dahulu AP II) dan Pemerintah Provinsi Jambi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tanah untuk Kegiatan Pengusahaan dan/atau Pengembangan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi. Perjanjian ini berlaku selama 50 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:
- Memanfaatkan tanah dan bangunan dengan situasi dan kondisi yang telah diketahui untuk kegiatan pengusahaan dan/atau pengembangan Bandar Udara.
- Memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pengelolaan Bandar Udara.
- Rencana pemanfaatan tanah dan/atau bangunan adalah khusus untuk kegiatan pengusahaan dan/atau pengembangan Bandar Udara.
- Tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek kerjasama tidak boleh dijaminkan dan/atau dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.

o. Perjanjian Kerjasama Pemberian Dukungan dan Pengelolaan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Kediri

Pada tanggal 26 Oktober 2020, AP Indonesia (dahulu AP I) dan PT Gudang Garam Tbk. ("Gudang Garam") menandatangani Perjanjian Induk tentang Perjanjian Kerjasama Pemberian Dukungan dan Pengelolaan pada Proyek KPBU Bandar Udara Kediri dimana kerjasama akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
- Tahap penetapan badan usaha pemrakarsa dan pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP);
- Tahap pembangunan dan pengelolaan bandar udara Kediri.
- *Upfront Fee/Technical Expertise Fee* atas advis yang diberikan oleh AP Indonesia (dahulu AP I) pada proses pengadaan BUP dan *technical know-how* dalam pembangunan dan pengelolaan di bidang kebandarudaraan;
- *Management fee* atas biaya pengelolaan bandar udara Kediri;
- *Variable Incentives*, yaitu bagi hasil atas pendapatan kegiatan pengelolaan bandar udara Kediri.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

n. Cooperation Agreement of Airport Utilization with District and Provincial Government (continued)

On February 26, 2015, AP Indonesia (formerly AP II) and Provincial Government of Jambi signed Cooperation Agreement of Land Utilization for the commercial activities and/or development of Sultan Thaha Jambi Airport. This agreement is effective for 50 years from signing date of the agreement.

Scopes of the cooperation are as follows:

- *Utilize land and building with known situation and condition for commercial activities and/or development of Airport.*
- *Provide fixed contribution and profit sharing for management of Airport.*
- *Planning for land and building utilization is specific for commercial activities and/or development of Airport.*
- *Land and/or building that become objects of agreement should not be guaranteed and/or burdened with dependent rights of any kind to other parties.*

o. Cooperation Agreement of Support and Operation on Cooperation Project between The Government and Business Entity (KPBU) of Kediri Airport

On October 26, 2020, AP Indonesia (formerly AP I) and PT Gudang Garam Tbk. ("Gudang Garam") signed a Master Agreement regarding the Cooperation Agreement for Providing Support and Operation of Kediri Airport KPBU Project, whereas the cooperation will be carried out in 2 (two) stages:
- *The appointment stage of the initiating business entity and the procurement of the Implementation Business Entity (BUP);*
- *The construction and operation stage of Kediri airport.*
- *Upfront Fee/Technical Expertise Fee for the advice given by AP Indonesia (formerly AP I) on the BUP procurement process and technical know-how in the development and operation of the airport sector;*
- *Management fee for the operation fee of Kediri airport;*
- *Variable Incentives, which is revenue sharing from the operation of Kediri airport.*

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

o. Perjanjian Kerjasama Pemberian Dukungan dan Pengelolaan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Kediri (lanjutan)

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan Perjanjian KPBU Kediri berlaku efektif dan mengikat para pihak.

Pada tanggal 26 Januari 2021, AP Indonesia (dahulu AP I) dan Gudang Garam menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kediri dimana Gudang Garam menyerahkan pengoperasian bandar udara Kediri kepada AP Indonesia (dahulu AP I). Atas kegiatan pengoperasian tersebut, AP Indonesia (dahulu AP I) memperoleh management fee dan variable incentives sebagaimana dijelaskan di atas. Jangka waktu perjanjian ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan perjanjian KPBU antara Gudang Garam dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, yaitu DJPU.

Pada tanggal 11 Februari 2021, AP Indonesia (dahulu AP I) telah menerima 25% pembayaran *Technical Expertise Fee* sebesar Rp22.029.

Sehubungan dengan telah keluarnya Surat Pengumuman Hasil Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Bandar Udara Baru di Kabupaten Kediri tanggal 29 Juli 2022 yang menyatakan bahwa Gudang Garam sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 16 Agustus 2022, AP Indonesia (dahulu AP I) telah menerima sisa 75% pembayaran Technical Expertise Fee sebesar Rp66.086.

Dalam pengoperasian Bandar Udara Kediri, Gudang Garam akan menunjuk entitas anak nya, yaitu PT Surya Dhoho Investama (SDHI) untuk bekerjasama dengan AP Indonesia (dahulu AP I) sehingga dibuat perjanjian Novasi antara Gudang Garam, SDHI, dan AP Indonesia (dahulu AP I) serta Amandemen Perjanjian KSO tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kediri pada tanggal 27 Maret 2023. Jangka waktu perjanjian ini berlaku efektif selama 50 tahun sejak tanggal penandatangan perjanjian atau sampai berakhirnya Perjanjian KPBU Bandar Udara Kediri.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

o. Cooperation Agreement of Support and Operation on Cooperation Project between The Government and Business Entity (KPBU) of Kediri Airport (continued)

This Agreement is valid from the signing of the agreement until the Kediri Airport KPBU Agreement effective and binding on the parties.

On January 26, 2021, AP Indonesia (formerly AP I) and Gudang Garam signed Joint Operation Agreement of Operating Airport Services at Kediri Airport where Gudang Garam handed the operation of Kediri airport over to AP Indonesia (formerly AP I). For the operational activities, AP Indonesia (formerly AP I) will obtain management fee and variable incentives as explained above. The period of the agreement will be determined later based on KPBU agreement between Gudang Garam and the Representation of of the Project Cooperation, which is DJPU.

On February 11, 2021, AP Indonesia (formerly AP I) has received 25% of the Technical Expertise Fee amounted to Rp22,029.

In connection with the issuance of the Letter of Announcement on the Procurement of Business Entities as KPBU Project Implementer for the New Airport in Kediri Regency dated July 29, 2022 stating that Gudang Garam as the winner of the auction, on August 16, 2022, AP Indonesia (formerly AP I) has received the remaining 75% payment of the Technical Expertise Fee of Rp66,086.

In operating the Kediri Airport, Gudang Garam will appoint its subsidiary, namely PT Surya Dhoho Investama (SDHI) to cooperate with AP Indonesia (formerly AP I) so that a Novation agreement was made between Gudang Garam, SDHI, and AP Indonesia (formerly AP I) and Amendment to the KSO Agreement regarding the Provision of Airport Services at Kediri Airport dated March 27, 2023. The term of this agreement is effective for 50 years from the date of signing the agreement or until the end of the Kediri Airport KPBU Agreement.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

o. Perjanjian Kerjasama Pemberian Dukungan dan Pengelolaan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Kediri (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara, AP Indonesia (dahulu AP I), berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO), menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara Kediri tanggal 4 September 2023 selaku kuasa dari SDHI sebagai BUP KPBU Bandar Udara Kediri.

p. Kerjasama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda")

Pada tanggal 3 Juli 2014, AP Indonesia (dahulu AP II) mengadakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah No. PJJ.15.02.01/00/07/2014/119 dengan Garuda, dimana AP Indonesia (dahulu AP II) bertindak sebagai pemberi sewa dan Garuda sebagai penyewa. Beberapa isi perjanjian sebagai berikut:

- Lahan yang dimanfaatkan seluas 164.742 m^2.
- Tujuan pemanfaatan lahan untuk administrasi perkantoran, penunjang kegiatan operasional penerbangan berikut fasilitas penunjangnya.
- Jangka waktu perjanjian adalah 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2016.

Pada tanggal 29 Juli 2020, AP Indonesia dan Garuda telah melakukan perpanjangan perjanjian dengan jangka waktu perjanjian hingga 31 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2021, Garuda tidak lagi memperpanjang sewa lahan.

Atas bangunan di atas lahan tersebut, yang bukan merupakan objek yang harus dikembalikan sesuai perjanjian, AP Indonesia (dahulu AP II) setuju untuk membayar bangunan tersebut sebesar Rp142.500 melalui mekanisme penjumpaan utang atas tagihan yang dimiliki oleh AP Indonesia (dahulu AP II) kepada Garuda. Nilai bangunan tersebut berdasarkan Laporan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan pada tanggal 15 Desember 2021.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

o. Cooperation Agreement of Support and Operation on Cooperation Project between The Government and Business Entity (KPBU) of Kediri Airport (continued)

Based on Law No. 1 of 2009 on Aviation in conjunction with Minister of Transportation Regulation No. PM 81 of 2021 on Airport Business Activities, AP Indonesia (formerly AP I), under the Operational Cooperation Agreement (KSO), signed the Concession Agreement for Airport Services at Kediri Airport, dated September 4, 2023, acting as the representative of SDHI as the BUP KPBU of Kediri Airport.

p. Cooperation with PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda")

On July 3, 2014, AP Indonesia (formerly AP II) entered into Land Use Agreement No. PJJ.15.02.01/00/07/2014/119 with Garuda, where AP Indonesia (formerly AP II) acts as lessor and Garuda as lessee. Some terms of the agreement are as follows:

- *Area utilization of 164,742 m^2.*
- *Land use objectives are for the administrative offices, flight operations, including its supporting facilities.*
- *The agreement is valid from January 1, 2012 until December 31, 2016.*

On July 29, 2020, AP Indonesia and Garuda agreed to extend the agreement with period until December 31, 2021. On December 31, 2021, Garuda did not extend the land utilization.

Regarding the building bulit on the land, which is not an object that must be returned to AP Indonesia (formerly AP II) according to the agreement, AP Indonesia (formerly AP II) agreed to pay the building totalling to Rp142,500 through a set off wih the outstanding receivables of AP Indonesia (formerly AP II) from Garuda. The value of the building is based on the Valuation Report conducted by KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun and Partners on December 15, 2021.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

p. Kerjasama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, AP Indonesia dan Garuda telah melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komesial dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 31 Desember 2026. Dalam perjanjian tersebut AP Indonesia dan Garuda menyepakati perjanjian atas pengurangan luasan lahan yang semula 164.742 m2 menjadi 59.016 m2.

Pada tanggal 13 Oktober 2016, AP Indonesia (dahulu AP II) mengadakan perjanjian dengan Garuda No. PJJ.04.04/00.02/10/2016/0009 dan No. WI/PERJ/DG-3368 tentang pemanfaatan fasilitas komersial, yaitu ruangan di gedung 510, 520 dan 530 berlaku sampai dengan 31 Desember 2018, dimana AP Indonesia (dahulu AP II) bertindak sebagai pemberi sewa dan Garuda sebagai penyewa. Perjanjian ini telah beberapa kali diperpanjang, terakhir sampai dengan 30 Juni 2026

q. Kerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga

Pada tanggal 5 Agustus 2022, AP Indonesia (dahulu AP II) dan PT Pertamina Patra Niaga mengadakan perjanjian untuk melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2027.

Pada tanggal 8 September 2023, AP Indonesia (dahulu AP II) dan Pertamina Patra Niaga mengadakan perjanjian untuk melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandara Udara Banyuwangi, Bandar Udara Tjilik Riwut, Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin, Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bandar Udara Raden Inten II. Perjanjian ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2027.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

p. Cooperation with PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda") (continued)

On December 31, 2021, AP Indonesia and Garuda agreed to extend the cooperation agreement for the Utilization of Commercial Facilities with period up to December 31, 2026. In the Agreement, AP Indonesia and Garuda agreed to reduce the land area from 164.742 m2 to 59.016 m2.

On October 13, 2016, AP Indonesia (formerly AP II) entered into agreement with Garuda No.PJJ.04.04/00.02/10/2016/0009 and No.WI/PERJ/DG-3368 regarding the use of commercial facility, such as building 510, 520 and 530 up to December 31, 2018, where AP Indonesia (formerly AP II) acts as lessor and Garuda as lessee. The agreement has been extended several times, last until June 30, 2026.

q. Cooperation with PT Pertamina Patra Niaga

On August 5, 2022, AP Indonesia (formerly AP II) and PT Pertamina Patra Niaga entered into agreement to carry out aircraft refueling services at Soekarno Hatta International Airport. This agreement is valid for 5 years from April 1, 2022 to March 31, 2027.

On September 8, 2023, AP Indonesia (formerly AP II) and Pertamina Patra Niaga entered into agreement to implement aircraft refueling services at Minangkabau International Airport, Sultan Mahmud Badaruddin II Airport, Banyuwangi Airport, Tjilik Riwut Airport, H.A.S Hanandjoeddin Airport, Fatmawati Soekarno Airport, and Raden Inten II Airport. This agreement is valid for 4 years from April 1, 2023, until March 31, 2027.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

q. Kerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga (lanjutan)

Pada tanggal 18 September 2023, AP Indonesia (dahulu AP II) dan Pertamina Patra Niaga mengadakan perjanjian untuk melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara di Bandar Udara Husein Sastranegara, Supadio, Sultan Iskandar Muda, Raja Haji Fisabilillah, Sultan Thaha, Depati Amir, dan Silangit. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Maret 2027.

r. Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma ("HLP") dengan PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS")

Pada tanggal 31 Agustus 2022, AP Indonesia (dahulu AP II) dan ATS menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian HLP dengan skema pembagian keuntungan dan dengan Jangka waktu perjanjian sampai dengan 30 September 2022, atau hingga ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Administratif.

Selama jangka waktu perjanjian, seluruh pendapatan HLP akan ditampung dalam rekening bersama, dan akan dibagikan kepada para pihak setelah adanya kesepakatan terkait besaran pembagian keuntungan. Seluruh Biaya Operasional HLP di bulan September sebesar Rp8.100 ditanggung oleh para pihak dengan proporsi AP Indonesia (dahulu AP II) dan ATS masing-masing sebesar 50%.

Pada Tanggal 19 Januari 2023, AP Indonesia (dahulu AP II) dan ATS menandatangani perjanjian KSO untuk membentuk KSO HLP dalam rangka pengelolaan dan pengoperasian HLP, meliputi penyelenggaraan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara. Perjanjian ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban AP Indonesia (dahulu AP II) atas keuntungan/kerugian dari KSO sebesar 50% dengan jangka waktu hingga tanggal 17 Mei 2025.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

q. Cooperation with PT Pertamina Patra Niaga (continued)

On September 18, 2023, AP Indonesia (formerly AP II) and Pertamina Patra Niaga entered into Agreement to implement aircraft refueling services at Husein Sastranegara Airport, Supadio, Sultan Iskandar Muda, Raja Haji Fisabilillah, Sultan Thaha, Depati Amir, and Silangit. This agreement is valid for 5 years from October 1, 2023, until March 31, 2027.

r. Management and Operation Cooperation of Halim Perdanakusuma International Airport ("HLP") with PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS")

On August 31, 2022, AP Indonesia (formerly AP II) and ATS signed HLP Management and Operation Cooperation Agreement with a profit-sharing scheme and term of agreement until September 30, 2022, or until the signing of the Administrative Joint Operation Agreement (JO).

During the term of the agreement, all HLP revenues will be collected in a joint account and will be distributed among the parties after agreement is reached related to the profit-sharing. All HLP operational costs in September amounted to Rp8,100 will be borne by both parties with a proportion of 50% for AP Indonesia (formerly AP II) and ATS, respectively.

On January 19, 2023, AP Indonesia (formerly AP II) and ATS signed JO agreement to establish JO of HLP for the purpose of managing and operating HLP, including the provision of airport services and related airport services. This agreement also stipulates AP Indonesia (formerly AP II)'s rights and obligations regarding the profits/losses of the JO amounting to 50% with period until May 17, 2025.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

r. Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma ("HLP") dengan PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS") (lanjutan)

Pada tanggal 17 Mei 2025, Perusahaan dan ATS menandatangani Amandemen Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan dan Pengoperasian Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta melalui Amandemen No. PJJ.DU.0114/HK.04/2025; 006/ADD.PKS/ATS-API/V/2025 tanggal 17 Mei 2025. Amandemen tersebut mengubah ketentuan mengenai jangka waktu Perjanjian, sehingga Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal efektif Perjanjian sampai dengan 9 Februari 2026, atau jangka waktu lain yang dapat timbul akibat pengakhiran Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 (Sebab Pengakhiran Perjanjian).

Pada tanggal 9 Februari 2026, AP Indonesia dan ATS menandatangani Amandemen Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan dan Pengoperasian Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta melalui Amandemen No. PJJ.DU.0006/HK.04/2026; 001/PKS/ATS-API/II/2026 tanggal 9 Februari 2026. Amandemen tersebut mengubah ketentuan mengenai jangka waktu Perjanjian, sehingga Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal efektif Perjanjian sampai dengan 9 Februari 2031, atau jangka waktu lain yang dapat timbul akibat pengakhiran Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 (Sebab Pengakhiran Perjanjian).

Pembagian keuntungan akan dilakukan sebesar proporsi tanggung jawab dan kepentingan para pihak, dengan mempertimbangkan:
- Saldo kas minimal dengan besaran setara 3 bulan rata-rata biaya operasional HLP.
- *Current Ratio* minimum berada di 1,5x.

Pembagian keuntungan akan dilakukan:
- Setiap 1 bulan sekali berdasarkan laporan realisasi RKAP bulanan; dan
- Setiap akhir tahun berdasarkan laporan keuangan tahunan.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

r. Management and Operation Cooperation of Halim Perdanakusuma International Airport ("HLP") with PT Angkasa Transportindo Selaras ("ATS") (continued)

On May 17, 2025, the Company and ATS signed an Amendment to the Operational Cooperation Agreement for the Management and Operation of Halim Perdanakusuma International Airport, under Amendment No. PJJ.DU.0114/HK.04/2025; 006/ADD.PKS/ATS-API/V/2025 dated May 17, 2025. The amendment revised the provision on the term of the Agreement, whereby the Agreement is effective from its effective date until February 9, 2026, or any other period that may arise due to the termination of the Agreement in accordance with Article 20.1 (Grounds for Termination).

On February 9, 2026, the Company and ATS signed an Amendment to the Operational Cooperation Agreement for the Management and Operation of Halim Perdanakusuma International Airport, under Amendment No. PJJ.DU.0006/HK.04/2026; 001/PKS/ATS-API/II/2026 dated February 9, 2026. The amendment revised the provision on the term of the Agreement, whereby the Agreement is effective from its effective date until February 9, 2031, or any other period that may arise due to the termination of the Agreement in accordance with Article 20.1 (Grounds for Termination).

Profit sharing will be carried out in proportion to the responsibilities and interests of the parties, taking into account:
- *Minimum cash balance with an amount equivalent to 3 months of average HLP operating costs.*
- *Minimum Current Ratio is at 1.5x.*

Profit sharing will be carried out:
- *Once every month based on monthly RKAP realization report; and*
- *At the end of each year based on the annual financial report.*

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

s. Perjanjian Kerjasama Strategis Bandara Kualanamu

Pada tanggal 23 Desember 2021, AP Indonesia (dahulu AP II), PT Angkasa Pura Aviasi ("AVI"), dan GMR Airport Netherlands B.V telah menandatangani Shareholders Agreement (SHA) terkait pengelolaan dan pengembangan bandara Kualanamu.

Pada tanggal 3 Juni 2022, AP Indonesia menandatangani perjanjian dengan AVI dimana AP Indonesia memberikan hak tunggal dan eksklusif kepada AVI untuk mengembangkan, mengoperasikan, mengelola, dan memiliki hak guna usaha atas Bandara Kualanamu dan lahan proyek, termasuk hak eksklusif untuk melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu kerjasama. Jangka waktu kerjasama adalah jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal operasi komersial kecuali diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan perjanjian.

Sebagai persyaratan pendahuluan yang harus dipenuhi, AVI wajib, paling lambat saat Tanggal Wajib Operasi Komersial, membayar kepada AP Indonesia sejumlah Rp162.078. AVI telah melakukan pembayaran pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal tersebut juga ditandatangani Berita Acara Serah Terima Operasi antara AP Indonesia dan AVI yang menyatakan bahwa tanggal operasi komersial dan perjanjian kerja sama aset berlaku efektif sejak tanggal berita acara ini ditandatangani.

Pada tahun pertama sampai dengan tahun kedua dari Tanggal Operasi Komersial, AVI wajib membayar kepada AP Indonesia sebesar Rp162.078 sebagai cicilan kedua dan ketiga dari pembayaran sewa di muka. AVI telah melakukan pembayaran cicilan kedua sewa di muka pada tanggal 3 Juli 2023

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

s. Strategic Partnership Agreement Kualanamu Airport

On December 23, 2021, AP Indonesia (formerly AP II), PT Angkasa Pura Aviasi ("AVI"), and GMR Airport Netherlands B.V had signed Shareholders Agreement (SHA) regarding Kualanamu airport's operation and development.

On June 3, 2022, AP Indonesia signed an agreement with AVI where AP Indonesia grants AVI the sole and exclusive rights to develop, operate, manage, and leasehold right to the existing Kualanamu Airport and project land, including the exclusive rights to carry out its obligations for the duration of the co-operation period. the cooperation period shall be a period of 25 years commencing from the commercial operation date unless otherwise extended or terminated in accordance with the agreement.

As a condition precedent, AVI obliged to, no later than the Required Commercial Operation Date, provide payment to AP Indonesia in the amount of Rp162,078. AVI has made the payment on July 7, 2022. On the same date, Minutes of Operation Handover was also signed by AP Indonesia and AVI which stipulates the date of commercial operation and asset cooperation agreement is effective from the date of the minutes was signed.

On the first year until the second year of the Commercial Operation Date, AVI is required to pay to AP Indonesia Rp162,078, which is the second year and third year installment of the advance site rent. AVI has paid the second installment of advance site rent on July 3, 2023.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

s. Perjanjian Kerjasama Strategis Bandara Kualanamu (lanjutan)

Pada tahun ketiga sampai dengan tahun kelima dari Tanggal Operasi Komersial, AVI wajib membayar kepada AP Indonesia sebesar Rp405.195 sebagai cicilan keempat, kelima dan keenam pembayaran sewa di muka.

Pada tahun keenam sampai dengan tahun ketujuh dari Tanggal Operasi Komersial, AVI wajib membayar kepada AP Indonesia sebesar Rp769.871 sebagai cicilan ketujuh dan kedelapan pembayaran sewa di muka.

Disamping itu, AP Indonesia juga akan menerima bagi hasil sejumlah 19% dari pendapatan bruto AVI.

Hingga tanggal 31 Desember 2025, AVI belum melakukan pembayaran cicilan ketiga dan keempat sebesar jumlah Rp567.273. AVI telah mengajukan beberapa permohonan penundaan pembayaran, yang terakhir disetujui oleh AP Indonesia hingga 28 Februari 2026.

AP Indonesia dan GMR dalam proses pembahasan angsuran dan sumber dana untuk ASR tersebut dan akan dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian Induk. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, addendum Perjanjian Induk masih dalam proses.

t. Serah Operasi Bandar Udara Banyuwangi

Pada tanggal 22 Desember 2017, AP Indonesia (dahulu AP II) dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Pemkab Banyuwangi) menandatangani Berita Acara Serah Terima pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemkab Banyuwangi. Tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Pemkab Banyuwangi kepada AP Indonesia (dahulu AP II) masing-masing seluas ±1.318.678 m² dan ±17.910 m².

Pada tanggal 22 Desember 2017, AP Indonesia (dahulu AP II) dan DJPU menandatangani Berita Acara Pengalihan Pengoperasian Bandar Udara Banyuwangi dari DJPU kepada AP Indonesia (dahulu AP II) dimana DJPU menyerahkan pengalihan/pengoperasian Bandar Udara Banyuwangi kepada AP Indonesia (dahulu AP II) berikut fasilitas, peralatan dan sumber daya manusia.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

s. Strategic Partnership Agreement Kualanamu Airport (continued)

On the third year until the fifth year of the Commercial Operation Date, AVI is required to pay AP Indonesia amounting to Rp405,195 as the fourth year, fifth year and sixth year installment of the advance site rent.

On the sixth year until the seventh year of the Commercial Operation Date, AVI is required to pay AP Indonesia in the amount of Rp769,871 as the seventh year and eighth year installment of the advance site rent.

In addition, AP Indonesia will also receive a revenue sharing of 19% of AVI's gross revenue.

As of December 31, 2025, AVI has not made the third and fourth installment payments totaling Rp567,273. AVI has submitted several requests for payment deferral, the most recent of which was approved by AP Indonesia until February 28, 2026.

AP Indonesia and GMR are in the process of discussing the installments and funding sources for the ASR, which will be formalized in the form of an addendum to the Master Agreement. As of the completion date of the consolidated financial statements, the addendum of the Master Agreement is still in process.

t. Transfer Operations of Banyuwangi Airport

On December 22, 2017, AP Indonesia (formerly AP II) and the Government of Banyuwangi Regency (Pemkab Banyuwangi) signed an Official Report on the handover of utilization of land and/ or buildings owned/ controlled by Pemkab Banyuwangi. Land and buildings submitted by Pemkab Banyuwangi to AP Indonesia (formerly AP II) amounting to ±1,318,678 m² and ±17,910 m², respectively.

On December 22, 2017, AP Indonesia (formerly AP II) and DJPU signed the Minutes of Transfer of Banyuwangi Airport Operations from DJPU to AP Indonesia (formerly AP II) where DJPU handed over the transfer/operation of Banyuwangi Airport to AP Indonesia (formerly AP II) including facilities, equipment and human resources.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

t. Serah Operasi Bandar Udara Banyuwangi (lanjutan)

Pada tanggal 22 Desember 2017, AP Indonesia (dahulu AP II) dan DJPU menandatangani Berita Acara Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan Bandar Udara Banyuwangi dari DJPU kepada AP Indonesia (dahulu AP II) dimana DJPU menyerahkan hasil pekerjaan pada Bandar Udara Banyuwangi kepada AP Indonesia (dahulu AP II). Hasil pekerjaan tersebut berupa aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan aset takberwujud yang seluruhnya berjumlah Rp207.706 yang dinilai berdasarkan harga perolehan.

Pada tanggal 5 Januari 2018, AP Indonesia (dahulu AP II) mengeluarkan Keputusan Direksi tentang Task Force Alih Operasi Bandar Udara Banyuwangi yang diperuntukkan untuk mendukung dan memastikan semua kesiapan pengalihan secara menyeluruh operasional Bandar Udara Banyuwangi kepada AP Indonesia (dahulu AP II), baik dari sisi fasilitas, operasi, pelayanan, komersial, sistem dan informasi serta pemenuhan sumber daya manusia berjalan dengan baik dan tepat, dengan pembentukan Coordinator of Safety, Risk, Operation & Quality Control, Coordinator of Airport Service & Commercial Support, Coordinator of Shared Service dan Member.

Pada tanggal 14 Mei 2018, AP Indonesia menerima surat dari DJPU terkait penyampaian koreksi lampiran Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Bandar Udara Banyuwangi yang ditandatangani oleh DJPU dan AP Indonesia dimana nilai yang diserahterimakan kepada AP Indonesia yang sebelumnya sebesar Rp207.706 berubah menjadi sebesar Rp203.680. Aset Bandar Udara Banyuwangi yang dinyatakan dalam BASTO akan dicatat sebagai aset AP Indonesia dan penyertaan modal negara pada saat telah diterbitkan Peraturan Pemerintah.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

t. Transfer Operations of Banyuwangi Airport (continued)

On December 22, 2017, AP Indonesia (formerly AP II) and DJPU signed an Official Report on the Operation Handover of Banyuwangi Airport Work Results from DJPU to AP Indonesia (formerly AP II) where the DJPU submitted the proceeds at Banyuwangi Airport to AP Indonesia (formerly AP II). The proceeds consist of equipment and machinery, buildings, roads and bridges, irrigation, network, other fixed assets and intangible assets with total amounted to Rp207,706 valued at cost.

On January 5, 2018, AP Indonesia (formerly AP II) issued Directors' Decree on Task Force of Operation Transfer Banyuwangi Airport which is intended to support and ensure all readiness of the complete transfer of Banyuwangi Airport operations to AP Indonesia (formerly AP II), in terms of facilities, operations, services, commercial, system and information and the fulfillment of human resources goes well and appropriately, with the establishment of Coordinator of Safety, Risk, Operation & Quality Control, Coordinator of Airport Service & Commercial Support, Coordinator of Shared Service and Member.

On May 14, 2018, AP Indonesia received a letter from DJPU regarding submission of correction of Official Report on the Operation Handover (BASTO) of Banyuwangi Airport Work Results signed by DJPU and AP Indonesia, where the value handed over to AP Indonesia which was previously amounting to Rp207,706 was changed to Rp203,680. Asset of Banyuwangi Airport which stated in the BASTO will be recorded as AP Indonesia asset and government's investment when Government Regulation is issued.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

u. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Jawa Barat

Pada tanggal 22 Januari 2018, AP Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Jawa Barat dimana para pihak sepakat menunjuk AP Indonesia sebagai operator untuk melaksanakan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 17 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis para pihak.

Pada tanggal 4 Mei 2018, AP Indonesia, Pemprov Jabar dan BIJB menandatangani addendum Perjanjian Kerjasama dimana para pihak menyepakati perubahan terkait Tanggal Efektif menjadi tanggal yang menandakan dimulainya operasional Bandara Kertajati oleh AP Indonesia. Dengan demikian, jangka waktu perjanjian diperhitungkan sejak dioperasikannya Bandara Kertajati oleh AP Indonesia yang ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 24 Mei 2018 dan dituangkan dalam suatu berita acara operasional yang ditandatangani para pihak.

Pada tanggal 14 Mei 2018, AP Indonesia menerima Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Hasil Pekerjaan Direktorat Bandar Udara di Bandar Udara Internasional Kertajati Jawa Barat dari DJPU atas fasilitas sisi udara dengan nilai jumlah sebesar Rp831.757. Aset Bandar Udara Kertajati yang dinyatakan dalam BASTO akan dicatat sebagai aset AP Indonesia dan penyertaan modal negara pada saat telah diterbitkan Peraturan Pemerintah.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

u. Cooperation Agreement on Airport Service Provision at West Java International Airport

On January 22, 2018, AP Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) and PT Bandar Udara International Jawa Barat (BIJB) signed a Cooperation Agreement on Airport Service Provision at West Java International Airport where the parties agreed to appoint AP Indonesia as operator to carry out the service airport, including the operation and maintenance of West Java International Airport in Kertajati Sub-district. The term of this agreement is valid for 17 years commencing from the signing of the agreement and may be extended upon the parties' written agreement.

On May 4, 2018, AP Indonesia, Government of West Java Province and BIJB signed an addendum to Cooperation Agreement where the parties agreed to change the Effective Date to be the date that marks the start of Kertajati Airport operations by AP Indonesia. Therefore, the term of the agreement is calculated from the start of operation of Kertajati Airport by AP Indonesia which date is set no later than May 24, 2018 and is set out in an operational minutes signed by the parties.

On May 14, 2018, AP Indonesia received Minutes of Operational Handover (BASTO) of the Work Results of the Airport Directorate at Kertajati International Airport, West Java from DJPU for air side facilities amounted to Rp831,757. Asset of Kertajati Airport which stated in the BASTO will be recorded as AP Indonesia asset and government's investment when Government Regulation is issued.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

u. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Jawa Barat (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 57 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Injourney untuk selanjutnya diteruskan seluruhnya menjadi penambahan penyertaan modal Injourney ke dalam modal saham AP Indonesia, Presiden Republik Indonesia menetapkan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke Injourney sebesar Rp798.819 yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Kertajati Jawa Barat dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2017.

Pada tanggal 29 Desember 2023, telah dilakukan serah terima aset tersebut dari Perusahaan kepada AP Indonesia.

v. Kerjasama dengan PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM")

AP Indonesia mengadakan perjanjian penggunaan tanah di area Bandara Soekarno-Hatta seluas 1.020.000 m^2 dengan SDM sesuai Perjanjian Sewa Tanah tanggal 30 Maret 2000 dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak 1 Mei 2000 sampai dengan 6 Januari 2019. AP Indonesia menyewakan tanah tersebut kepada SDM untuk dikelola sebagai fasilitas usaha yaitu lapangan golf, taman niaga dan pusat pertokoan berikut fasilitas penunjangnya.

AP Indonesia juga memperoleh pendapatan konsesi yang dihitung berdasarkan jumlah pendapatan kotor dengan persentase konsesi. Pada akhir periode perjanjian, SDM wajib mengembalikan tanah tersebut kepada AP Indonesia dan AP Indonesia wajib membayar kepada SDM sebesar nilai pasar yang wajar dari bangunan gedung serta kelengkapannya yang melekat termasuk infrastruktur yang terdapat di pusat pertokoan dan taman niaga tersebut.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

u. Cooperation Agreement on Airport Service Provision at West Java International Airport (continued)

Based on Government Regulation ("PP") No. 57 of 2023 dated December 27, 2023 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Injourney henceforth forwarded in its entirety into additional equity participation of Injourney into AP Indonesia share capital, the President of the Republic of Indonesia stipulated the additional equity participation of the Republic of Indonesia into Injourney amounting to Rp798,819 derived from the transfer of State Property at the Ministry of Transportation at Kertajati Airport, West Java and sourced from the State Budget for Fiscal Years 2014, 2015, and 2017.

On December 29, 2023, the assets were handed over from Company to AP Indonesia.

v. Cooperation with PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM")

AP Indonesia entered into land use agreement at Soekarno-Hatta Airport area covering 1,020,000 m^2 with SDM in accordance with Land Lease Agreement dated March 30, 2000 and valid for 20 (twenty) years from May 1, 2000 untill January 6, 2019. AP Indonesia leased the land to SDM to be used as business facilities such as golf course, park and shopping centre, including its supporting facilities.

AP Indonesia also obtained a concession income calculated based on the amount of gross income with the percentage of concession. At the end of the agreement, SDM is required to return the land to AP Indonesia and AP Indonesia shall pay to SDM for the fair market value of the building as well as the accessories attached including infrastructure located in the shopping centre and commercial parks.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

v. Kerjasama dengan PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2017, AP Indonesia dan SDM menandatangani adendum dengan kesepakatan diantaranya:

1. Seluruh fasilitas usaha yang dibangun SDM, pada akhir masa perjanjian diserahkan dan menjadi milik AP Indonesia (dahulu AP II) tanpa kompensasi dalam bentuk apapun.
2. Mengubah objek perjanjian yang dikenakan kompensasi dan besaran kompensasi penggunaan tanah.
3. Mengubah objek perjanjian yang dikenakan konsesi dan prosentase konsesi.
4. Mengembalikan sebagian tanah seluas ±57.000 m² yang telah disewa SDM kepada AP Indonesia (dahulu AP II) sehingga luas objek perjanjian menjadi 963.000 m².
5. SDM melakukan pembongkaran dan/atau relokasi aset milik SDM yang berlokasi di area lahan seluas ±57.000 m². Bentuk dan cara kompensasi yang akan dibayarkan oleh AP Indonesia (dahulu AP II) kepada SDM antara lain dapat diperhitungkan dari pembebasan kewajiban kompensasi dan/atau pembebasan nilai konsesi.
6. Memperhitungkan jangka waktu perjanjian antara lain:
   - Tanggal 1 Mei 2000 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019.
   - Tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 (masa Perpanjangan I).
   - Masa Perpanjangan akan diperpanjang otomatis sampai dengan 6 Januari 2024 (untuk selanjutnya "Masa Perpanjangan II") apabila AP Indonesia (dahulu AP II) tidak menggunakan objek perjanjian untuk kepentingan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta.

Pada tanggal 22 Februari 2018, AP Indonesia dan SDM menandatangani adendum II Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah dengan kesepakatan diantaranya:

- Rincian aset yang akan direlokasi.
- Jumlah biaya pembongkaran dan/ atau aset yang akan direlokasi.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

v. Cooperation with PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM") (continued)

On May 31, 2017, AP Indonesia and SDM signed an amendment with agreement among others:

1. *All business facilities that were built by SDM, at the end of the agreement shall be returned and become the property of AP Indonesia (formerly AP II) without any compensation.*
2. *Changing the object of the agreement subject to compensation and the amount of land use compensation.*
3. *Changing the object of the agreement subject to concession and its percentages.*
4. *Returning part of the land that has been rented by SDM measuring ±57,000 m² to AP Indonesia (formerly AP II) and changing the object of agreement to 963,000 m².*
5. *SDM dismantling and/or relocating assets owned by SDM located in an area of ±57,000 m². The form and method of compensation that will be paid by AP Indonesia (formerly AP II) to SDM may be calculated from the exemption of compensation and/or exemption of the concession.*
6. *Considering term of agreement among others:*
   - *May 1, 2000 until January 6, 2019.*
   - *January 7, 2019 until January 6, 2021 (Extension Period I).*
   - *The extention periode will be automatically extended until January 6, 2024 (for further as "Extention Period II') if AP Indonesia (formerly AP II) does not use the object of the agreement in preparation for the construction of Terminal 4 of Soekarno-Hatta Airport.*

On February 22, 2018, AP Indonesia and SDM signed amendment II of Land Use Cooperation Agreement with agreement among others:

- *Details of the assets to be relocated.*
- *Total cost of dismantling and/ or assets to be relocated.*

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

v. Kerjasama dengan PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM") (lanjutan)

Pada tanggal 22 Februari 2018, AP Indonesia dan SDM menandatangani adendum II Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah dengan kesepakatan diantaranya: (lanjutan)

- Bentuk dan cara kompensasi yang akan diberikan dan/atau dibayarkan oleh AP Indonesia kepada SDM atas biaya pembongkaran dan/atau aset yang akan direlokasi.

Pada tanggal 7 Januari 2021, AP Indonesia dan SDM menandatangani adendum III Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah dengan kesepakatan diantaranya:

- AP Indonesia dan SDM menyepakati masa perpanjangan selama 3 (tiga) tahun atas objek perjanjian seluas ±643.000 m^2 (lahan golf) dari tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan maksimal tanggal 6 Januari 2024.
- Bahwa AP Indonesia belum melaksanakan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta, sehingga para pihak menyepakati untuk melaksanakan Masa Perpanjangan II sebagaimana disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Penggunaan Tanah.
- AP Indonesia dapat melakukan survei topografi dan soil investigation serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di area Obyek Perjanjian, dan SDM akan memberikan akses dan mengijinkan AP Indonesia untuk melakukan kegiatan tersebut.
- AP Indonesia dapat melakukan survei topografi dan *soil investigation* serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di area Obyek Perjanjian, dan SDM akan memberikan akses dan mengijinkan AP Indonesia untuk melakukan kegiatan tersebut.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

v. Cooperation with PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM") (continued)

On February 22, 2018, AP Indonesia and SDM signed amendment II of Land Use Cooperation Agreement with agreement among others: (continued)

- *The method of compensation to be provided and/or paid by AP Indonesia to human resources for the costs of dismantling and/or assets to be relocated.*

On January 7, 2021, AP Indonesia and SDM signed amendment III of Land Use Cooperation Agreement with agreement among others:

- *AP Indonesia and SDM agree to extend the agreement for 3 (three) years for the object of the agreement of ± 643,000 m^2 (golf land) maximum until January 6, 2024.*
- *AP Indonesia has not performed the construction of Terminal 4 of Soekarno-Hatta Ariport as the parties agree to carried out the Extension Period II as agreed on Minutes of Land Use Agreement.*
- *AP Indonesia may conduct topography and soil investigation surveys and other activities related to the development planning of Terminal 4 of Soekarno-Hatta Airport in the Agreement Object area and SDM provides access and allows AP Indonesia to carry out these activities.*
- *AP Indonesia may conduct topography and soil investigation surveys and other activities related to the development planning of Terminal 4 of Soekarno-Hatta Airport in the Agreement Object area and SDM provides access and allows AP Indonesia to carry out these activities.*

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

v. Kerjasama dengan PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM") (lanjutan)

Pada tanggal 14 Agustus 2023, AP Indonesia dan SDM menandatangani adendum IV Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah dengan kesepakatan diantaranya:

- AP Indonesia dan SDM menyepakati objek perjanjian lahan seluas ±30.124,64 m^2 akan dimanfaatkan sebagai fasilitas umum (akses jalan publik), kedua belah pihak bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, penerangan listrik, dan pajak atas objek tersebut.
- SDM diberikan waktu untuk melakukan pembokaran dan relokasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak berakhirnya perjanjian.
- SDM dihilangkan sebagai salah satu pengelola gudang lini 2 Cargo Village.

Pada tanggal 21 Agustus 2023, AP Indonesia dan SDM menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial dengan jangka waktu sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 6 Januari 2027 (Perpanjangan):

- Objek Perjanjian Tanah/Lahan :
  1. ±80.972m dan ±932.875,36m^2 peruntukan usaha untuk Fasilitas Usaha (Area Golf & Taman Niaga) & Fasilitas Penunjang Lainnya, bentuk kerja sama konsesi usaha;
  2. ±30.124,64 peruntukan Jalan Umum, bentuk kerja sama adalah Bentuk kerja sama lain yang lebih menguntungkan AP Indonesia (dahulu AP II).
- Imbalan konsesi usaha sebesar 17,3% per bulan dengan MoB sebesar Rp18.500 per bulan.
- Untuk objek perjanjian dengan bentuk kerja sama lain yang lebih menguntungkan, SDM memiliki kewajiban meliputi tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan penerangan listrik; dan tanggung jawab atas pajak-pajak yang timbul atas fasilitas komersial dimaksud.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

v. Cooperation with PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM") (continued)

On August 14, 2023, AP Indonesia and SDM signed Amendment IV of Land Use Cooperation Agreement with agreement among others:

- *AP Indonesia and SDM agree that a parcel of land measuring ±30,124.64 m^2 will be utilized for public facilities (public access roads), both parties are responsible for the maintenance, electricity, and taxes for the said property.*
- *SDM is given a period to conduct demolition and relocation no later than 6 months after the termination of the agreement.*
- *SDM is removed as one of the managers of warehouse line 2 of the Cargo Village.*

On August 21, 2023, AP Indonesia and SDM signed Cooperation Agreement on Utilisation of Commercial Facilities with period starting from January 7, 2024 until January 6, 2027 (Extension):

- *Land/Land Agreement Objects:*
  a. ±80,972m^2 and ±932,875.36m^2 of business allotment for Business Facilities (Golf Area & Commercial Park) & Other Supporting Facilities, the form of cooperation is business concession;
  b. ±30,124.64 allotted for of Public Road, the form of cooperation is other forms of cooperation that are more favourable to AP Indonesia (formerly AP II).
- *Business concession fee of 17.3% per month with MoB of Rp18,500 per month.*
- *For the object of the agreement with other forms of cooperation that are more profitable, SDM has obligations including the responsibility to carry out maintenance and electricity lighting; and responsibility for taxes arising from the commercial facilities.*

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

v. Kerjasama dengan PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM") (lanjutan)

Pada tanggal 24 Juli 2025, AP Indonesia dan SDM sepakat mengakhiri kerja sama sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasiltas Komersial PT Angkasa Pura II No. PJJ.04.04/00/08/2023/0324 antara PT Angkasa Pura Indonesia dan PT Sanggraha Daksamitra No. BAC.CGK.GMC.1213/PR.03.01.04/2025 yang berlaku efektif tanggal 1 September 2025. Berdasarkan Berita Acara tersebut, antara lain disepakati hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak dengan iktikad baik berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata akan mengakhiri PKS 0324 terhitung sejak tanggal 1 September 2025
- Terhitung sejak tanggal pengakhiran, seluruh fasilitas usaha yang dibangun, ditempatkan, atau dilekatkan oleh Sanggraha pada Fasilitas Komersial milik AP Indonesia menjadi milik AP Indonesia tanpa kompensasi dalam bentuk apa pun dan wajib diserahkan oleh Sanggraha kepada AP Indonesia pada tanggal pengakhiran.

Sanggraha telah menyerahkan seluruh aset terkait ke AP indonesia sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Fasilitas Usaha dan Fasilitas Komersial Perusahaan tanggal 25 Agustus 2025.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

v. Cooperation with PT Sanggraha Daksa Mitra ("SDM") (continued)

On July 24, 2025, the Company and SDM agreed to terminate the cooperation as stipulated in the Minutes of Agreement on the Termination of the Cooperation Agreement for the Utilization of Commercial Facilities of PT Angkasa Pura II No. PJJ.04.04/00/08/2023/0324 between PT Angkasa Pura Indonesia and PT Sanggraha Daksamitra No. BAC.CGK.GMC.1213/PR.03.01.04/2025, which becomes effective on September 1, 2025. Based on the Minutes of Agreement, which, among other things, the following matters were agreed upon:

- *The Parties, in good faith and pursuant to Article 1338 of the Indonesian Civil Code, agree to terminate Cooperation Agreement No. 0324 effective as of September 1, 2025.*
- *As of the termination date, all business facilities constructed, installed, or attached by Sanggraha to AP Indonesia's Commercial Facilities shall become the property of AP Indonesia without any form of compensation, and Sanggraha is obliged to hand them over to AP Indonesia on the termination date.*

Sanggraha has handed over all related assets to AP Indonesia in accordance with the Minutes of Handover for the Return of Business Facilities and Commercial Facilities of the Company dated August 25, 2025.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

w. Kerjasama Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara

Pada tanggal 7 Juli 2015, AP Indonesia mengadakan perjanjian dengan KAI dan Railink dimana perjanjian ini berlaku sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan berakhirnya masa konsesi. Ruang lingkup kerjasama penyelenggaraan perkeretaapian bandara adalah penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana.

AP Indonesia beserta para pihak sepakat bahwa kerjasama ini menggunakan skema bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai bagi hasil adalah berdasarkan EBITDA dikurangi dengan pembayaran utang;
- Nilai bagi hasil yang ditentukan, mengacu kepada laporan keuangan Railink dan dilakukan berdasarkan proporsi realisasi AP Indonesia (dahulu AP II) dan para pihak;
- Pembayaran bagi hasil mulai dilakukan pada tahun ketiga setelah penyelenggaraan kereta api Bandara Soekarno-Hatta ("Basoetta") beroperasi penuh untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pada tanggal 25 April 2022, para pihak melaksanakan adendum dan pernyataan kembali perjanjian antara KAI, AP Indonesia, Railink dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang menyepakati Railink untuk melakukan novasi, menyerahkan dan mengalihkan kepada KCI seluruh hak, kewajiban dan kepentingan Railink sesuai perjanjian sehubungan dengan adanya pelaksanaan transaksi pengalihan aset kereta api Basoetta.

Pada tanggal 26 Juni 2022, AP Indonesia dan Railink menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan fasilitas komersial di Bandara Soekarno-Hatta untuk periode 2 Januari 2018 hingga 31 Desember 2022. Tarif pemanfaatan adalah sebesar Rp60.000 (nilai penuh) per m^2 per bulan.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

w. Cooperation of Arrangement of Airport Railway

On July 7, 2015, AP Indonesia entered into an agreement with KAI and Railink. This agreement is valid since the signing of the agreement until the end of the concession period. The scope of cooperation arrangement of airport railway is railway infrastructure implementation service including construction, procurement, operation, maintenance and operation of infrastructure.

AP Indonesia and the Parties agreed that this cooperation will use the following profit sharing scheme:

- *The calculation of the profits is based on EBITDA less the payment of the debt;*
- *The profit sharing portions refers to Railink's financial statements and is based on the proportion of the realization of AP Indonesia (formerly AP II) and the parties;*
- *Payment of Profit Sharing begin in the third year after the Soekarno-Hatta Airport ("Basoetta") railway is fully operational for 1 (one) year budget.*

On April 25, 2022, the parties perform the amandment and restatement of the agreement between KAI, AP Indonesia, Railink and PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) that agreed Railink to novate, hand over and transfer all rights, obligations and the interest of Railink to KCI according to the initial agreement due to the implementation of Basoetta railway asset transfer transaction.

On June 26, 2022, AP Indonesia and Railink signed a cooperation agreement for the utilization of commercial facilities of at Soekarno-Hatta Airport for the period from January 2, 2018, to December 31, 2022. The utilization fee is Rp60,000 (full amount) per m^2 per month.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

w. Kerjasama Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara (lanjutan)

Menunjuk keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham (Sirkuler) Railink tentang persetujuan transaksi pengalihan bisnis kereta api bandara Soekarno-Hatta tanggal 26 Desember 2022 dan AP Indonesia tanggal 27 Desember 2022, telah disetujui pengalihan bisnis pengoperasian kereta api Bandar Udara Soekarno-Hatta termasuk pemanfaatan fasilitas penyelenggaraan perkeretaapian di area Airport Railways Station (ARS) dari Railink kepada KCI.

Pada tanggal 5 Desember 2023, AP Indonesia dan KCI mengadakan perjanjian untuk memanfaatkan *Airport Railway Station* dan jalur kereta api Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027.

Pada tanggal 21 September 2023, AVI dan Railink mengadakan perjanjian tentang kerjasama sewa/pemanfaatan dan imbalan konsesi di Bandar Udara Internasional Kualanamu dengan dengan jangka waktu kerjasama tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Perjanjian tersebut telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2026.

x. Kerjasama Pengelolaan Parkir

AP Indonesia memberikan persetujuan kepada mitra untuk mengoperasikan area parkir yang terbatas pada fungsi pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan, pelaporan dan pelayanan sesuai dengan lingkup pekerjaan pengelolaan parkir seperti mobil, motor, bus, inap, langganan dan lost parkir.

Pada tanggal 31 Desember 2021, AP Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Centrepark Citra Corpora untuk mengelola lahan dan fasilitas usaha parkir meliputi:

- Terminal 1, 2, area parkir inap dan bus (non terminal) Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
- Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
- Bandar Udara Internasional Minangkabau

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

w. Cooperation of Arrangement of Airport Railway (continued)

Based on Railink's shareholders decision in lieu of general meeting of shareholder (Circular) regarding approval of transaction for the transfer of Soekarno-Hatta airport train business dated December 26, 2022 and AP Indonesia dated December 27, 2022, the transfer of the railroad Soekarno-Hatta international airport has been approved including utilization of the railroad operation facilities in airport railways station (ARS) from Railink to KCI.

On December 5, 2023, AP Indonesia and KCI entered into agreement to utilize the Airport Railway Station and Soekarno Hatta international airport railway. This agreement is valid for 5 years starting from January 1, 2023 until December 31, 2027.

On September 21, 2023, AVI and Railink established an agreement regarding the collaboration for rent/utilization and concession compensation at Kualanamu International Airport. The period of this collaboration is from July 25, 2022 to December 31, 2023. The agreement has been extended to December 31, 2026.

x. Parking Management Cooperation

AP Indonesia gives approval to partners to operate the parking area which is limited to management, supervision, maintenance, reporting and service functions in accordance with the scope of work of parking management such as cars, motorcycles, buses, overnight, subscriptions and lost parking.

On December 31, 2021, AP Indonesia entered into an agreement with PT Centrepark Citra Corpora to manage the land and business facilities of parking, covering:

- *Terminals 1 and 2, overnight parking area, and bus area (non-terminal) Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta*
- *Sultan Syarif Kasim Airport*
- *Minangkabau International Airport*

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

x. Kerjasama Pengelolaan Parkir (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, AP Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Centrepark Citra Corpora untuk mengelola lahan dan fasilitas usaha parkir meliputi (lanjutan):

- Bandar Udara Raden Inten II
- Bandar Udara Sultan Iskandar Muda
- Bandar Udara Fatmawati Soekarno
- Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah
- Bandar Udara Silangit

Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun. AP Indonesia mendapatkan imbalan konsesi usaha dengan nilai presentase usaha 63%. Pada akhir tahun akan dilakukan rekonsiliasi untuk menentukan Jaminan Minimum Pendapatan *Real*.

Pada tanggal 30 Maret 2022, AP Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Securindo Packatama Indonesia No. untuk mengelola lahan dan fasilitas usaha parkir yang meliputi:

- Terminal 3 dan kargo Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
- Bandar Udara Supadio Pontianak
- Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya
- Bandar Udara Banyuwangi
- Bandar Udara SultanThaha Jambi
- Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin Tanjung Pandan
- Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang

Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun. AP Indonesia mendapatkan imbalan konsesi usaha dengan nilai presentase usaha 63%. Pada akhir tahun akan dilakukan rekonsiliasi untuk menentukan Jaminan Minimum Pendapatan Real.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

x. Parking Management Cooperation (continued)

On December 31, 2021, AP Indonesia entered into an agreement with PT Centrepark Citra Corpora to manage the land and business facilities of parking, covering (continued):

- *Raden Inten II Airport*
- *Sultan Iskandar Muda Airport*
- *Fatmawati Soekarno Airport*
- *Raja Haji Fisabilillah Airport*
- *Silangit Airport*

The duration of this agreement is 5 (five) years. AP Indonesia receives concession fees at a business percentage value of 63%. At the end of the year, a reconciliation will be conducted to determine the Real Minimum Revenue Guarantee.

On March 30, 2022, AP Indonesia entered into an agreement with PT Securindo Packatama Indonesia to manage the land and the business facilities of parking covering:

- *Terminal 3 and Cargo Soekarno-Hatta International Airport*
- *Supadio Pontianak Airport*
- *Tjilik Riwut Palangkaraya Airport*
- *Banyuwangi Airport*
- *SultanThaha Jambi Airport*
- *H.A.S Hanandjoeddin Tanjung Pandan Airport*
- *Depati Amir Pangkal Pinang Airport*

The duration of this agreement is 5 (five) years. AP Indonesia receives concession fees at a business percentage value of 63%. At the end of the year, a reconciliation will be conducted to determine the Real Minimum Revenue Guarantee.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

y. PT Republik Manor Propertindo ("RMP")

AP Indonesia mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial dengan RMP di area Bandara Soekarno-Hatta seluas 1.020.000 m² berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial No. BAC.DC.1210/KU.07/2025 tanggal 15 Agustus 2025.

Perjanjian tersebut berlaku selama 15 (lima belas) tahun, terhitung sejak 1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2040.

Dalam perjanjian ini, AP Indonesia menyewakan bangunan dan lahan serta utilitas komersial untuk pengelolaan fasilitas usaha, fasilitas penunjang, dan jalan umum. AP Indonesia juga memperoleh pendapatan konsesi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pendapatan kotor.

z. Kerjasama Sewa untuk Infrasktruktur Barang Milik Negara ("BMN")

Pada tahun 2025, Perusahaan dan DJPU menyepakati perjanjian sewa untuk Infrastruktur BMN pada 5 Bandara dengan detil berikut :

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

y. PT Republik Manor Propertindo ("RMP")

AP Indonesia entered into a Commercial Facilities Utilization Cooperation Agreement with RMP for an area of 1,020,000 m² at Soekarno-Hatta Airport, pursuant to the Minutes of Agreement on Commercial Facilities Utilization Cooperation No. BAC.DC.1210/KU.07/2025 dated August 15, 2025.

The agreement is valid for 15 (fifteen) years, effective from September 1, 2025 until August 31, 2040.

Under this agreement, AP Indonesia leases buildings, land, and commercial utilities for the operation of business facilities, supporting facilities, and public access roads. AP Indonesia also receives concession revenue calculated based on a specified percentage of gross revenue.

z. Lease Agreement for State-Owned Infrastructure Assets ("BMN")

In 2025, the Company and DJPU agreed to a lease arrangement for BMN Infrastructure at five airports with the following details:

No	Bandara/ *Airport*	Perjanjian/ *Agreement*	Masa Sewa (tahun) / *Rent Period (year)*	Jumlah Nilai/ *Amount Total (Rp)*	Objek Perjanjian/ *Rent Object*
1	Juanda - Surabaya (SUB)	HK.201/2/1/DRJU.KUM-2025 dan/and No. PJJ.DU.0110/HK.04/2025 9 Mei/ *May 9,* 2025	50	1.087.541	Tanah dengan luas 1.321.955 m^2 yang berlokasi di Bandar Udara Juanda – Surabaya
2	Sultan Hasanuddin - Makassar (UPG)		50	584.580	Tanah dengan luas 2.879.371 m^2 yang berlokasi pada Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar
3	Sultan Thaha - Jambi (DJB)	HK.201/1/21/DRJU.KUM-2025 dan/*and* No. PJJ.DU.0106/HK.04/2025 2 Mei/ *May 2*, 2025	50	191.131	Tanah dengan luas 1.393.812m^2 yang berlokasi pada Bandar Udara Sultan Thaha - Jambi
4	Depati Amir-Pangkal Pinang (PGK)		50	234.917	Tanah dengan luas Rp 1.349.000 m^2 pada Bandar Udara Depati Amir – Pangkal Pinang
5	Minangkabau - Padang (PDG)		50	284.814	Tanah dengan luas 2.039.023m^2 pada Bandar Udara Minangkabau - Padang

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

z. Kerjasama Sewa untuk Infrasktruktur Barang Milik Negara ("BMN") (lanjutan)

Pada tanggal 6 Mei 2025, Perusahaan telah melakukan pembayaran 95.351 untuk Sewa BMN kepada DJPU cabang SUB, PGK, dan UPG.

Pada tanggal 30 April 2025, Perusahaan telah melakukan pembayaran 23.797 untuk Sewa BMN kepada DJPU cabang PDG dan DJB.

aa. Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial

Pada tanggal 25 Maret 2024, AP Indonesia (dahulu AP2) mengadakan perjanjian dengan GMF berdasarkan Perjanjian No. PJJ.04.04/00/03/2024/0069 dan GMF/PERJ./DC-3023/2024 untuk pemanfaatan lahan Perusahaan seluas 972.123 m² di Bandara Soekarno-Hatta serta konsesi usaha di 16 bandara yang dikelola AP Indonesia (dahulu AP2) untuk kegiatan *maintenance, repair, and overhaul* (MRO).

Jangka waktu perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026. Atas perjanjian tersebut, AP Indonesia (dahulu AP2) berhak menerima imbalan konsesi usaha sebesar 1,25% per bulan dari omzet serta biaya sewa lahan.

Pada tanggal 8 Desember 2025, Perusahaan melakukan addendum terhadap perjanjian dengan GMF tersebut dengan perubahan dalam *addendum* tersebut meliputi penghapusan klausul sewa lahan sehubungan dengan transaksi inbreng lahan, serta perubahan imbalan konsesi usaha menjadi sebesar 2,85% per bulan dari omzet.

ab. PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. ("JAS")

Pada tanggal 1 November 2022, Perusahaan (dahulu AP1) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembagian Pendapatan dengan JAS, dimana JAS bertindak sebagai *Cargo Terminal Operator* di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Perjanjian ini berlaku dari 1 September 2023 hingga 31 Agustus 2028 untuk jangka waktu lima tahun, sesuai dengan Berita Acara Operasional No. BA.SUB.88/KB.03/2024.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

z. Lease Agreement for State-Owned Infrastructure Assets ("BMN") (continued)

On May 6, 2025, the Company made a payment of 95,351 for the BMN Lease to the DJPU branches in SUB, PGK, and UPG.

On April 30, 2025, the Company made a payment of 23,797 for the BMN Lease to the DJPU branches in PDG and DJB.

aa. Commercial Facilities Utilization Cooperation

On March 25, 2024, the Company (formerly AP2) entered into an agreement with GMF under Agreement No. PJJ.04.04/00/03/2024/0069 and GMF/PERJ./DC-3023/2024 for the utilization of 972,123 m² of the Company's land at Soekarno-Hatta Airport and business concessions at 16 airports operated by the Company for maintenance, repair, and overhaul (MRO) activities.

The agreement period is effective from January 1, 2022 until December 31, 2026. Under this agreement, the Company (formerly AP2) is entitled to receive a business concession fee amounting to 1.25% per month of revenue, as well as land lease charges.

On December 8, 2025, the Company entered into an addendum to the agreement with GMF. The key amendments include the removal of the land lease clause following the land inbreng transaction, and the revision of the business concession fee to 2.85% per month of revenue.

ab. PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. ("JAS")

On November 1, 2022, the Company (formerly AP1) signed a Revenue Sharing Cooperation Agreement with JAS, where JAS acts as the Cargo Terminal Operator at Juanda International Airport, Surabaya. The agreement is valid from September 1, 2023, to August 31, 2028, for a period of five years, as per Operational Minutes No. BA.SUB.88/KB.03/2024.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AP Indonesia (lanjutan)

ab. PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. ("JAS") (lanjutan)

Pada tanggal 1 November 2022, AP Indonesia (dahulu AP1) juga menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembagian Pendapatan dengan JAS, dimana JAS bertindak sebagai *Cargo Terminal Operator* di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar. Perjanjian ini berlaku dari 1 Agustus 2023 hingga 31 Juli 2028 untuk jangka waktu lima tahun, sesuai dengan Berita Acara Operasional No. BA.DPS.CD.63/KB.03/2024.

Pada tanggal 27 Mei 2024, AP Indonesia (dahulu AP2) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial dengan JAS, dimana JAS bertindak sebagai Cargo Terminal Operator di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. Perjanjian ini berlaku dari 1 November 2023 hingga 31 Oktober 2026.

Pada tanggal 25 Februari 2025, AP Indonesia dan JAS menandatangani addendum Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial yang menyepakati perubahan objek perjanjian.

AVI

ac. Perjanjian Konsesi - DJPU

Pada tanggal 7 Juli 2022, AVI dan DJPU telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara Internasional Kualanamu oleh AVI atas Pelayanan Jasa Kebandarudaraan. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa AVI wajib membayar biaya konsesi kepada DJPU sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelayanan jasa kebandarudaraan yang dikumpulkan dan diperoleh AVI berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Periode jangka waktu perjanjian konsesi ini adalah 25 tahun sejak tanggal operasi komersial.

Pada tanggal 3 Oktober 2022, AVI dan DJPU telah menandatangani addendum I perjanjian konsesi yang menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian konsesi, besaran nilai konsesi dan pembayaran konsesi akan dilakukan reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan hasil reviu BPKP sebagaimana dimaksud akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan addendum perjanjian konsesi.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AP Indonesia (continued)

ab. PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. ("JAS") (continued)

On November 1, 2022, AP Indonesia (formerly AP1) also signed another Revenue Sharing Cooperation Agreement with JAS, where JAS acts as the Cargo Terminal Operator at Ngurah Rai International Airport, Denpasar. The agreement is valid from August 1, 2023, to July 31, 2028, for a period of five years, as per Operational Minutes No. BA.DPS.CD.63/KB.03/2024.

On May 27, 2024, AP Indonesia (formerly AP2) signed a Cooperation Agreement on the Utilization of Commercial Facilities with JAS, where JAS acts as the Cargo Terminal Operator at Soekarno-Hatta International Airport, Cengkareng. The agreement is valid from November 1, 2023, to October 31, 2026.

On February 25, 2025, AP Indonesia and JAS signed an addendum to the Cooperation Agreement on the Utilization of Commercial Facilities, agreeing to amend the agreement object.

AVI

ac. Concession Agreement - DJPU

On July 7, 2022, AVI and DJPU signed Concession Agreement regarding The Operation of Kualanamu International Airport by AVI for Airport Services. The agreement stipulates that AVI is obligated to pay concession fees to DJPU amounting to 2.5% of the gross revenue for airport services collected and obtained by AVI in that fiscal year based on the audited financial report audited by a Public Accounting Firm. The period of this concession agreement is 25 years from the date of commercial operation.

On October 3, 2022, AVI and DJPU signed amendment I of concession agreement which stipulates that the concession agreement's duration, value, and payment will be reviewed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and the results of the BPKP review will be used as the basis for amending the concession agreement.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

AVI (lanjutan)

ac. Perjanjian Konsesi - DJPU (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2025 dan 2024, AVI telah melakukan pembayaran sehubungan dengan konsesi kebandarudaraan masing-masing sebesar Rp18.367 dan Rp18.103.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, AVI telah mencatat beban akrual sehubungan dengan konsesi kebandarudaraan ini masing-masing sebesar Rp18.657 dan Rp12.714 (Catatan 23).

Gapura

ad. Perjanjian Ijarah Muntahiyah bit Tamlik ("IMBT") antara Gapura dengan CIMB Niaga

Pada tanggal 9 Agustus 2017, Gapura melakukan kerjasama pembiayaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga") dalam bentuk fasilitas pembiayaan langsung IMBT. Pembiayaan ini ditandatangani dalam rangka penyewaan alat *ground support equipment* (GSE) untuk keperluan operasi Gapura. Nilai kontrak atas pokok sewa adalah sebesar Rp425.803 dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 120 bulan, atau jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2027. Kepemilikan atas GSE tersebut akan berpindah dari bank kepada Gapura seiring dengan berakhirnya kontrak.

Pada 12 April 2021, kedua pihak menandatangani kesepakatan untuk perpanjangan masa *grace period* sehubungan dengan pandemi Covid-19 selama 12 bulan (April 2021 - Maret 2022) dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan hingga 7 Maret 2028.

Pada 31 Mei 2022, kedua pihak menandatangani amandemen keempat yang berisi perubahan skedul pembayaran bulanan pada periode setelah masa *grace period* hingga tanggal jatuh tempo yang diperpanjang hingga Juli 2028.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

AVI (continued)

ac. Concession Agreement - DJPU (continued)

On April 30, 2025 and 2024, AVI made payments related to the airport concession amounting to Rp18,367 and Rp18,103, respectively.

As of December 31, 2025 and 2024, AVI has recorded an accrual expense related to the airport concession amounting to Rp18,657 and Rp12,714 (Note 23), respectively.

Gapura

ad. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik ("IMBT") Agreement between Gapura and CIMB Niaga

On August 9, 2017, Gapura entered into a financing partnership with PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga") in the form of an IMBT direct financing facility. This financing was signed in the context of rental of ground support equipment (GSE) for Gapura's operations. The contract value of the principal lease amounted to Rp425,803 with a maximum financing term of 120 months, or due on August 7, 2027. The ownership of the GSE will be transferred from the bank to Gapura along with the end of the contract.

On April 12, 2021, both parties signed an agreement for the extension of grace period in connection with the Covid-19 pandemic for 12 months (April 2021 - March 2022) and extension of financing period until March 7, 2028.

On May 31, 2022, both parties signed the fourth amendment which contains change of monthly payment schedule after grace period until the due date which has been extended until July 2028.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Gapura (lanjutan)

Gapura (continued)

ad. Perjanjian Ijarah Muntahiyah bit Tamlik ("IMBT") antara Gapura dengan CIMB Niaga (lanjutan)

ad. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik ("IMBT") Agreement between Gapura and CIMB Niaga (continued)

Jumlah komitmen IMBT pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

IMBT's total commitments as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
< 1 tahun	73.603	48.929	*< 1 year*
1-5 tahun	161.285	234.888	*1-5 year*
Jumlah	**234.888**	**283.817**	***Total***

HIN

HIN

ae. Perjanjian konstruksi revitalisasi kawasan Sanur

Pada tanggal 18 Oktober 2021, HIN dan PP menandatangani perjanjian kerjasama Jasa Konstruksi Infrastruktur Dasar Untuk Revitalisasi Kawasan Sanur. Dalam kontrak tersebut, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh PP adalah Fase I: Konsultan *Reverse Engineering*, Konsultan Operator Area, Konsultan *Detail Engineering Design* dan Pekerjaan *Ground Breaking* dan Fase II: Kontraktor Infrastruktur Dasar. Jenis kontraknya adalah kontrak *turn key* dan merupakan gabungan antara *lump sum* dan harga satuan dengan jumlah nilai perjanjian sebesar Rp289.305 dengan jangka waktu 365 hari kalender atau sejak terpenuhinya syarat dimulainya pekerjaan. Pembayaran nilai kontrak secara sekaligus setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) 1 diterima, paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal 17 Oktober 2022.

ae. Construction agreement on the revitalization of Sanur

On October 18, 2021, HIN and PP signed an agreement of cooperation in Basic Infrastructure Construction Services for Revitalization of the Sanur Area. In the contract, the scope of work to be carried out by PP is Phase I: Reverse Engineering Consultant, Area Operator Consultant, Detail Engineering Design Consultant and Ground Breaking Work and Phase II: Basic Infrastructure Contractor. The type of contract is a turn key contract and is a combination of lump sum and unit price with a total agreement value of Rp289,305 with a period of 365 calendar days or from the fulfillment of the requirements for the commencement of work. Payment of the contract value in one lump sum after the Minutes of Handover (BAST) 1 are received, no later than 5 working days after October 17, 2022.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

HIN (lanjutan)

ae. Perjanjian konstruksi revitalisasi kawasan Sanur (lanjutan)

Pada tanggal 8 Juli 2022, HIN dan PP melakukan adendum perjanjian dalam beberapa hal terkait dengan nilai perjanjian seluruhnya menjadi Rp284.028 dengan jangka waktu 397 hari kalender atau sejak terpenuhinya syarat-syarat mulai bekerja. Pembayaran nilai kontrak secara sekaligus setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) 1 diterima, paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal 18 November 2022.

Pada tanggal 10 November 2022, HIN dan PP melakukan adendum perjanjian dalam beberapa hal terkait dengan nilai perjanjian sebesar Rp257.481 dengan jangka waktu 440 hari kalender atau karena syarat untuk memulai pekerjaan telah terpenuhi dan PPN tidak dipungut. Pembayaran nilai kontrak secara sekaligus setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) 1 diterima, selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal 31 Desember 2022.

Pada tanggal 12 Juni 2023, telah terjadi perjanjian novasi antara HIN, PT Bina Karya (Persero) Tbk ("BK") dan PT Hotel Internasional Sanur Indonesia ("HISI") untuk mengatur mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian pekerjaan jasa konsultan manajemen konstruksi pembangunan infrastruktur dasar pengembangan kawasan Sanur.

af. Perjanjian konstruksi revitalisasi Hotel Grand Inna Bali Beach ("GIBB")

Pada tanggal 20 April 2022, HIN dan PT Nindya Karya (Persero) ("NK") menandatangani perjanjian jasa konstruksi Revitalisasi Hotel Grand Inna Bali Beach ("GIBB") di kawasan Sanur. Dalam kontrak tersebut, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh NK adalah rancang bangun antara lain Revitalisasi GIBB dan Inna Bali Beach Garden ("IBBG") serta Pembangunan Bung Karno Convention Center ("BKCC") di kawasan Sanur dan fasilitas penunjangnya.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

HIN (continued)

ae. Construction agreement on the revitalization of Sanur area (continued)

On July 8, 2022, HIN and PP amended the agreement in several respects related to the total agreement value being Rp284,028 with a period of 397 calendar days or since fulfillment conditions for starting work. Payment of the contract value in one lump sum after the Minutes of Handover (BAST) 1 are received, no later than 14 working days after November 18, 2022.

On November 10, 2022, HIN and PP amended the agreement in several matters related to the agreement value of Rp257,481 with a period of 440 calendar days or because of conditions for starting work has been fulfilled and VAT is not collected. Payment of the contract value in one lump sum after the Minutes of Handover (BAST) 1 are received, no later than 14 working days after December 31, 2022.

On June 12, 2023, there was a novation agreement between HIN, PT Bina Karya (Persero) Tbk ("BK") and PT Hotel Internasional Sanur Indonesia ("HISI") to regulate the transfer of all rights and obligations related to the construction management consultant services agreement for basic infrastructure development of Sanur area development.

af. Construction agreement on the revitalization of Grand Inna Bali Beach ("GIBB") Hotel

On April 20, 2022, HIN and PT Nindya Karya (Persero) ("NK") signed an agreement of Grand Inna Bali Beach ("GIBB") Hotel Revitalization construction service agreement in the Sanur area. In the contract, the scope of work to be carried out by NK is design and construction, including the Revitalization of GIBB and Inna Bali Beach Garden ("IBBG") and the Development of the Bung Karno Convention Center ("BKCC") in the Sanur area and its supporting facilities.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

HIN (lanjutan)

af. Perjanjian konstruksi revitalisasi Hotel Grand Inna Bali Beach (“GIBB”) (lanjutan)

Jenis perjanjian adalah kontrak *turn key* dan merupakan kombinasi *lump sum* dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp898.573 dengan jangka waktu 16 bulan dengan pekerjaan dimulai pada tanggal 20 April 2022 dan selesai serta siap beroperasi pada tanggal 20 Agustus 2023. Pembayaran nilai kontrak dilakukan sekaligus setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) 1 diterima, yaitu paling lambat 30 hari setelah penyerahan pembayaran.

Pada tanggal 20 September 2023, telah terjadi perjanjian novasi antara HIN, NK dan HISI untuk mengatur mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian pekerjaan jasa konstruksi revitalisasi Hotel GIBB.

Dalam perjanjian novasi sepakat bahwa HIN dan NK dengan ini memberikan persetujuan atas penunjukan dan pengalihan kepada HISI atas kewajiban pembayaran perjanjian serta perubahannya sesuai dengan nilai yang dibukukan oleh HIN dan telah menjadi nilai valuasi HISI sebesar Rp1.229.967 sehingga pelaksanaan kewajiban pembayaran serta perubahannya yang akan dilaksanakan HISI kepada NK sebesar Rp1.229.967.

Perjanjian novasi ini berlaku efektif sejak tanggal efektif dan akan tetap berlaku hingga pelaksanaan kewajiban sebesar Rp1.229.967 telah diselesaikan oleh HISI dan HISI wajib menyerahkan perjanjian pinjaman antara HISI dan BNI sebagai jaminan pembayaran kepada NK paling lambat tanggal 29 September 2023. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 Juni 2023 dikarenakan belum tercapainya objek pekerjaan sampai dengan siap beroperasi maka HIN menjamin menanggung seluruh penambahan biaya yang terjadi sampai dengan objek pekerjaan siap beroperasi.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

HIN (continued)

af. Construction agreement on the revitalization of Grand Inna Bali Beach ("GIBB") Hotel (continued)

The type of agreement is a turn key contract and is a lump sum combination with a total contract value of Rp898,573 with a period of 16 months with work starting on April 20, 2022 and completed and ready to operate on August 20, 2023. Payment of the contract value is made at once after the News Handover Event (BAST) 1 received, no later than 30 days after submission of payment.

On September 20, 2023, there was a novation agreement between HIN, NK and HISI to regulate the transfer of all rights and obligations related to the GIBB Hotel revitalization construction services work agreement.

In the novation agreement, it is agreed that HIN and NK hereby approve the appointment and transfer to HISI of the payment obligations of the agreement and its changes in accordance with the value recorded by HIN and has become HISI's valuation value of Rp1,229,967 so that the implementation of payment obligations and changes that will be carried out by HISI to NK amounting to Rp1,229,967.

This novation agreement is effective from the effective date and will remain in effect until the implementation of obligations amounting to Rp1,229,967 has been completed by HISI and HISI is required to submit a loan agreement between HISI and BNI as payment guarantee to NK no later than September 29, 2023. In addition, based on the Minutes of Agreement dated June 14, 2023, because the object of work has not been achieved until it is ready to operate, HIN guarantees to bear all additional costs incurred until the object of work is ready to operate.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

HIN (lanjutan)

ag. Perjanjian BOT eks Hotel Indonesia

HIN mengadakan Perjanjian Pembangunan, Pemilikan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Gedung dan Fasilitas Penunjang dengan PT Cipta Karya Bumi Indah dan PT Grand Indonesia pada tanggal 13 Mei 2004. Bentuk kerjasama yang disepakati dalam rangka mengembangkan Eks. Unit Hotel Indonesia dan Unit Inna Wisata dengan pola Build Operate and Transfer (BOT) untuk masa 30 tahun dan dengan Hak Opsi Perpanjangan selama 20 tahun.

Kompensasi yang akan diterima HIN terdiri dari penggantian biaya pindah kantor pusat selama masa konstruksi dan kompensasi tahunan. Besarnya kompensasi tahunan pada 9 tahun pertama sebesar Rp10.000 pertahun dan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga seluruhnya berjumlah Rp355.000.

Pada tanggal 22 Desember 2010, HIN menerima kompensasi sebesar Rp400.000 atas Pelaksanaan Hak Opsi Perpanjangan atas Perjanjian Pembangunan, Pemilikan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Gedung dan Fasilitas Penunjang.

ah. Perjanjian BOT Golf Course dan Club House GIBB

HIN mengadakan Perjanjian Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Tanah dengan cara Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer*/BOT) dengan PT Karya Cipta Balindo ("KCB") pada tanggal 14 Juli 2004. Kesepakatan tersebut untuk merenovasi *Golf Course* dan pembangunan *Club House* di Unit Grand Inna Bali Beach, Bali dengan pola kerjasama Build Operate and Transfer (BOT) untuk jangka waktu 25 tahun. Dengan kesepakatan ini, HIN harus menyerahkan hak penguasaan *Golf Course* dan *Club House* selama masa BOT.

Sebaliknya, HIN akan menerima kompensasi untuk kerugian selama masa konstruksi dan kompensasi tahunan selama masa BOT. Dengan kerja sama ini, HIN akan mendapat kompensasi sebesar Rp42.000 yang terdiri dari kompensasi kerugian selama masa konstruksi sebesar Rp1.500 dan kompensasi selama masa BOT sebesar Rp40.500.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

HIN (continued)

ag. BOT agreement ex Hotel Indonesia

HIN entered into Development, Ownership, Management, and Handover Agreements of Land, Buildings, and Supporting Facilities with PT Cipta Karya Bumi Indah and PT Grand Indonesia on May 13, 2004. The agreed form of cooperation in the context of developing Ex. Hotel Indonesia Units and Inna Wisata Units with a Build Operate and Transfer (BOT) pattern for 30 years and with Optional Extension Rights for 20 years.

The compensation to be received by HIN consists of reimbursement of the cost of moving the head office during the construction period and annual compensation. Annual compensation for the first 9 years is Rp10,000 per year and will continue to increase in the following years so that the total becomes Rp355,000.

On December 22, 2010, HIN received compensation amounting to Rp400,000 for the Exercise of Extension of Option Rights on Development, Ownership, Management, and Handover of Land, Buildings, and Supporting Facilities.

ah. BOT agreement Golf Course and Club House GIBB

HIN entered into a Land Use and/or Utilization Agreement through Build Operate and Transfer (BOT) with PT Karya Cipta Balindo ("KCB") based on Deed No. 6 Notary Betsil Untajana, S.H., Notary in Jakarta on July 14, 2004. The agreement is to renovate the Golf Course and build a Club House at the Grand Inna Bali Beach Unit, Bali with a Build Operate and Transfer (BOT) cooperation pattern for 25 years. With this agreement, HIN must transfer the ownership rights to the Golf Course and Club House during the BOT period.

In return, HIN will receive compensation for losses during the construction period and annual compensation during the BOT period. With this collaboration, HIN will receive compensation of Rp42,000 consisting of compensation for losses during the construction period of Rp1,500 and compensation during the BOT period is Rp40,500.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

HIN (lanjutan)

ah. Perjanjian BOT Golf Course dan Club House GIBB (lanjutan)

Pada tanggal 22 Desember 2021, HIN dan KCB menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Kerja Sama BOT Pengembangan Bali Beach Golf Course ("BA Pengakhiran"). BA Pengakhiran ini didasari atas rencana HIN untuk melakukan Revitalisasi GIBB menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan. Oleh karenanya, pada tanggal 21 Juli 2021, HIN dan KCB menandatangani Komitmen Bersama penunjukan KJPP Pengakhiran Kerja Sama BOT untuk melakukan penilaian dan penghitungan atas sisa investasi yang akan dibayarkan.

Berdasarkan hasil perhitungan KJPP, didapat nilai kompensasi pengakhiran lebih awal kerja sama BOT adalah sebesar Rp24.000.000 terhadap nilai ini dikurangi biaya kompensasi BOT Juli - Desember 2021 sebesar Rp840.000 dan biaya novasi tenant ruko sebesar Rp427.500, sehingga jumlah nilai kompensasi pengakhiran lebih awal kerja sama BOT adalah sebesar Rp22.733.

ai. Perjanjian sewa ruangan Menara BCA

Berdasarkan Perjanjian Sewa Ruangan tanggal 15 Desember 2015 dan adendumnya tanggal 10 Oktober 2016, HIN menyewakan sebuah ruangan di Menara BCA Lantai 39 kepada ITDC, yaitu zona F, G, dan H yang menghadap ke sisi jalan Teluk Betung dengan luas ± 605 m^2 selama 5 tahun. Harga sewa ruangan sebesar Rp556.000 (nilai penuh) per meter persegi per bulan (belum termasuk PPN). Jumlah biaya sewa 605 meter persegi untuk 5 tahun adalah sebesar Rp18.120 belum termasuk biaya lainnya seperti *service charge*, parkir, pemakaian listrik dan telepon yang akan disesuaikan tarif yang berlaku umum untuk sewa di gedung Menara yang ditagih dari PT Grand Indonesia ("GI"). Kontrak berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dimulai sejak tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.

Pada 26 Oktober 2021, HIN dan ITDC telah menandatangani adendum dimana disepakati sewa ruangan di Menara BCA Lantai 39 untuk Zona A, Zona F, Zona G, dan Zona H, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2026.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

HIN (continued)

ah. BOT agreement Golf Course and Club House GIBB (continued)

On December 22, 2021, HIN and KCB signed the Minutes of Termination of the BOT Cooperation for the Development of Bali Beach Golf Course ("Termination of BA"). The termination BA was based on HIN plan to revitalize GIBB into a Special Economic Zone for Health Tourism. Therefore, on July 21, 2021, HIN and KCB signed a Joint Commitment to appoint KJPP for Termination of BOT Cooperation, to evaluate and calculate the remaining investment to be paid.

Based on the results of the KJPP calculation, the compensation value for the early termination of the BOT cooperation is Rp24,000,000 against this value less the cost of compensation for BOT in July - December 2021 of Rp840,000 and the novation fee for shophouse tenants of Rp427,500 so the total value of compensation for early termination of BOT cooperation is Rp22,733.

ai. Space rental agreement of Menara BCA

Based on the Space Rental Agreement dated December 15, 2015, and its Addendum on October 10, 2016, HIN leased a space at Menara BCA 39th Floor to ITDC, namely zones F, G, and H facing the side of Teluk Betung road with an area of ± 605 sqm for 5 years. The room rental price is Rp556,000 (full amount) per square meter per month (excluding VAT). The total rental fee of 605 square meters for 5 years is Rp18,120 not including other costs such as service charges, parking, electricity, and telephone usage which will be adjusted to the generally accepted rate for rent in the Menara building which is billed from PT Grand Indonesia ("GI"). The contract is valid for 5 years starting from the date of signing the contract.

On October 26, 2021, HIN and ITDC signed an amendment where it was agreed to rent spaces in the Tower BCA Floor 39 for Zone A, Zone F, Zone G, and Zone H, for 5 (five) years starting from December 15, 2021, until December 14, 2026.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

HIN (lanjutan)

ai. Perjanjian sewa ruangan Menara BCA (lanjutan)

Jumlah nilai sewa ruangan yang disepakati untuk jangka waktu tersebut adalah sebesar Rp15.725 dan disepakati untuk offset dengan sebagian nilai tunggakan kewajiban HIN berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Restrukturisasi Utang dan Pengalihan Kewajiban antara ITDC, HIN dan HIPRO tanggal 24 September 2021.

aj. Perjanjian sewa lahan dengan PT Pertamina Bina Medika IHC

Berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan antara HIN dengan PT Pertamina Bina Medika IHC tanggal 10 Desember 2021, disepakati sewa lahan di kawasan GIBB seluas ±5 Ha (lima hektar) untuk jangka waktu 30 tahun, dengan nilai sewa per m^2 per tahun sebesar Rp172.000 (nilai penuh) dengan jumlah nilai sewa selama jangka waktu sebesar Rp258.000. HIN dan PT Pertamina Bina Medika IHC sepakat bahwa harga sewa lahan tersebut akan tetap berlaku selama periode sewa lahan dan tidak akan dilakukan kenaikan atas harga sewa lahan dalam kondisi apapun dan sepakat bahwa pembayaran harga sewa lahan akan dibayarkan sekaligus untuk periode sewa dan dilakukan pada tanggal efektif.

Pada tanggal 16 Agustus 2023, telah terjadi perjanjian novasi antara PT Pertamina Bina Medika IHC, HIN dan PT Pertamedika Bali Hospital untuk mengatur mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian sewa lahan.

ak. Perjanjian sewa lahan dengan PT Bluecross Medika Internasional

Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah di KEK Sanur Lot H3A tanggal 1 September 2023, antara HIN dengan PT Bluecross Medika Internasional, telah disepakati sewa lahan pada Lot H3A KEK sanur seluas 5.038m2, untuk jangka waktu 30 tahun, dengan nilai sewa per m^2 per tahun sebesar Rp315.000 (nilai penuh) dengan jumlah nilai sewa selama jangka waktu sebesar Rp47.609 dan *revenue sharing* sebesar 2%/tahun, terhitung sejak tanggal operasi komersial.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

HIN (continued)

ai. Space rental agreement of Menara BCA (continued)

The total agreed rental value for this period is Rp15,725 where it was agreed to offset with a portion of the value of the arrears of HIN's obligations based on the land utilization agreement as stipulated in Article 7 of the Debt Restructuring and Transfer of Liability Agreement between ITDC, HIN and HIPRO, dated September 24, 2021.

aj. Land rental agreement with PT Pertamina Bina Medika IHC

Based on the Land Lease Agreement between HIN and PT Pertamina Bina Medika IHC dated December 10, 2021, it was agreed to lease land in the GIBB area of ±5 Ha (five hectares) for 30 years, with a rental value per sqm per year of Rp172,000 (full amount) with a total rental value of Rp258,000. HIN and PT Pertamina Bina Medika IHC agreed that the land rental price would remain in effect during the land lease period and there would be no increase in the land rental price under any circumstances and agreed that payment of the land rental price would be paid all at once for the rental period and made on the effective date.

On August 16, 2023, there was a novation agreement between PT Pertamina Bina Medika IHC, HIN and PT Pertamedika Bali Hospital to regulate the transfer of all rights and obligations related to the land lease agreement.

ak. Land rental agreement with PT Bluecross Medika Internasional

Based on the Land Lease Agreement at KEK Sanur Lot H3A dated September 1, 2023, between HIN and PT Bluecross Medika Internasional, there has been agrement on lease of land at Lot H3A KEK Sanur covering an area of 5,038m2, for a period of 30 years, with a rental value per sqm per year of Rp315,000 (full amount) with a total rental value during the period of Rp47,609 and revenue sharing of 2%/year, starting from the date of commercial operations.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

HIN (lanjutan)

al. Kesepakatan komersial Lot H3B Project Bali

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Negosiasi Ketentuan Komersial Lot H3B Project Bali (*Term Sheet*) tanggal 8 Desember 2023, antara HIN dengan PT Astana Bangun Sejahtera, adapun pada *Term Sheet* telah disepakati sewa lahan seluas ±9.000m², untuk jangka waktu 30 tahun, dengan nilai sewa per m² per tahun sebesar Rp330.000 (nilai penuh) dengan jumlah nilai sewa selama jangka waktu sebesar Rp89.100 dan *revenue sharing* sebesar 3%/tahun terhitung sejak tanggal operasi komersial, adapun saat ini HIN telah menerima *Booking Fee* sebesar 30% dari nilai sewa.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Negosiasi Ketentuan Komersial Lot H3C Project Bali (*Term Sheet*) tanggal 29 November 2023, antara HIN dengan PT Asoka Bunga Khatulistiwa, adapun pada *Term Sheet* telah disepakati sewa lahan seluas ±5.000m², untuk jangka waktu 30 tahun, dengan nilai sewa per m² per tahun sebesar Rp330.000 (nilai penuh) dengan jumlah nilai sewa selama jangka waktu sebesar Rp49.500 dan *revenue sharing* sebesar 2%/tahun untuk tahun pertama dan kedua terhitung sejak tanggal operasi komersial, 3%/tahun untuk tahun ketiga dan keempat terhitung sejak tanggal operasi komersial, 3,5%/tahun untuk tahun kelima, 5%/tahun untuk tahun keenam hingga tahun ke 30, adapun saat ini HIN telah menerima *Booking Fee* sebesar 10% dari nilai sewa.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Negosiasi Ketentuan Komersial Lot H5B Project Bali (*Term Sheet*) tanggal 22 Desember 2023, antara HIN dengan Alpha IVF, adapun pada *Term Sheet* telah disepakati sewa lahan seluas ±6.000m², untuk jangka waktu 30 tahun, dengan nilai sewa per m2 per tahun sebesar Rp330.000 (nilai penuh) dengan jumlah nilai sewa selama jangka waktu sebesar Rp59.400 dan *revenue sharing* sebesar 1-4%/tahun terhitung sejak tanggal operasi komersial, adapun saat ini HIN telah menerima *Booking Fee* sebesar 20% dari nilai sewa.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

HIN (continued)

al. Commercial agreements Lot H3B Project Bali

Based on the Minutes of Negotiation of Commercial Terms of Lot H3B Project Bali (Term Sheet) dated December 8, 2023, between HIN and PT Astana Bangun Sejahtera, the Term Sheet has agreed to lease ± 9,000sqm of land, for a period of 30 years, with a rental value per sqm per year of Rp330,000 (full amount) with a total rental value during the term of Rp89,100 and revenue sharing of 3% / year starting from the date of commercial operation, while currently HIN has received a Booking Fee of 30% of the rental value.

Based on the Minutes of Negotiation of Commercial Terms of Lot H3C Project Bali (Term Sheet) dated November 29, 2023, between HIN and PT Asoka Bunga Khatulistiwa, the Term Sheet has agreed to lease ± 5,000sqm of land, for a period of 30 years, with a rental value per m2 per year of Rp330,000 (full amount) with a total rental value during the term of Rp49. 500 and revenue sharing of 2%/year for the first and second years from the date of commercial operation, 3%/year for the third and fourth years from the date of commercial operation, 3.5%/year for the fifth year, 5% / year for the sixth year until the 30th year, while currently HIN has received a Booking Fee of 10% of the rental value.

Based on the Minutes of Negotiation of Commercial Terms of Lot H5B Project Bali (Term Sheet) dated December 22, 2023, between HIN and Alpha IVF, the Term Sheet has agreed to lease ± 6,000sqm of land, for a period of 30 years, with a rental value per m2 per year of Rp330,000 (full amount) with a total rental value during the term of Rp59,400 and revenue sharing of 1-4% / year starting from the date of commercial operation, while currently HIN has received a Booking Fee of 20% of the rental value.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Sarinah

am. Kerjasama Operasi Hotel D'Braga

Sarinah melakukan perjanjian Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer*/BOT) dengan PT Wijaya Karya Gedung Tbk tentang Pengembangan Properti di Jalan Braga No. 10 Bandung - Jawa Barat. Pembangunan tersebut tertuang dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 649 seluas 1.763 m^2.

Untuk melakukan kerjasama dengan Sarinah, PT Wijaya Karya Gedung Tbk telah memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham yang tertuang dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Gedung Tbk tertanggal 13 November 2015. Sedangkan Sarinah telah memperoleh persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara seperti tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 25 Januari 2016 tentang Persetujuan Pendayagunaan Aset Milik Sarinah di Jl. Braga No. 10, Bandung Jawa barat.

Sarinah berhak atas pembayaran sewa lahan sebesar 3,33% dari nilai NJOP tanah setiap tahunnya sebagaimana tertera dalam Peraturan Kementerian Keuangan No. 33/ PMK.06/2012 dan berhak mendapatkan ruang komersial seluas 132 m^2 selama masa berlakunya perjanjian kerjasama tanpa dikenakan biaya sewa ruang dan *service charge*. Sedangkan, PT Wijaya Karya Gedung Tbk telah merencanakan jumlah investasi yang akan ditanamkan untuk membangun hotel dan fasilitas penunjang dengan investasi awal sebesar Rp81.192 dengan jangka waktu pengelolaan selama 25 tahun.

Sarinah tidak memiliki kewajiban memberikan ganti rugi kepada PT Wijaya Karya Gedung Tbk sebagai bentuk penyerahan dan atau transfer, yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini. Sedangkan, PT Wijaya Karya Gedung Tbk berkewajiban menyerahkan kembali dan mengalihkan obyek BOT pada tanggal pengalihan bangunan dan penyerahan kembali tanah kepada Sarinah.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Sarinah

am. D'Braga Hotel Operation Cooperation

Sarinah entered into a Build Operate Transfer (BOT) agreement with PT Wijaya Karya Gedung Tbk regarding Property Development at Jalan Braga No. 10 Bandung - West Java. The construction of the building is stated in the Hak Guna certificate No. 649 covering an area of 1,763 sqm.

To cooperate with Sarinah, PT Wijaya Karya Gedung Tbk has obtained the approval of the Shareholders as stated in the Shareholders' Decision outside the PT Wijaya Karya Gedung Tbk Meeting dated November 13, 2015. Meanwhile, Sarinah has obtained approval from the Minister of State-Owned Enterprises as stated in the General Meeting of Shareholders dated January 25, 2016, concerning Approval for the Utilization of Assets Owned by Sarinah on Jl. Braga No. 10, Bandung, West Java.

Sarinah is entitled to a land lease payment of 3.33% of the NJOP value of the land annually as stated in the Ministry of Finance Regulation No. 33/PMK.06/2012 and is entitled to a commercial space of 132 m^2 for the duration of the cooperation agreement without being charged a space rental fee and service charges. Meanwhile, PT Wijaya Karya Gedung Tbk has planned the amount of investment to be invested in building a hotel and supporting facilities with an initial investment of Rp81,192 with a management period of 25 years.

Sarinah has no obligation to provide compensation to PT Wijaya Karya Gedung Tbk as a form of submission and or transfer, which arises in this cooperation agreement. Meanwhile, PT Wijaya Karya Gedung Tbk is obliged to return and transfer the BOT object on the date of the transfer of the building and the handover of the land to Sarinah.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Sarinah (lanjutan)

an. Kuota Impor

Dalam menjalankan usahanya di bidang perdagangan terutama usaha impor, Sarinah telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk impor beras dan keperluan lainnya dengan alokasi kuota tertentu untuk produk-produk tertentu.

TWC

ao. Perjanjian pemanfaatan materi promosi "Prambanan Jazz Festival" (PJF) dengan PT Syakira Ghyna Rajawali Indonesia Communication (Rajawali)

TWC melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan materi promosi PJF dengan Rajawali pada tanggal 26 November 2019.

Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa TWC berhak menggunakan Invensi Materi Promosi PJF selama jangka waktu 8 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian. TWC memiliki hak sebagai *Co-Promoter* PJF untuk turut serta mencari dan mendapatkan sponsor dari pihak lain di luar perjanjian dengan menggunakan Invensi Materi Promosi PJF.

Apabila akan diadakan event PJF, TWC dapat mencari *sponsorship* dengan usaha sendiri dengan kesepakatan nilai minimal sebesar Rp3.000. Atas pemanfaatan materi promosi tersebut, TWC telah melakukan pembayaran sebesar Rp36.549. Pembayaran tersebut merupakan jasa penyelenggaraan PJF ke 5 sekaligus merupakan pembayaran Royalti Invensi Materi Promosi PJF dengan *branding value* sebesar Rp37.000. Atas pembayaran tersebut, TWC mencatat aset selama masa perjanjian.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Sarinah (continued)

an. Import Quotas

In carrying out its business in the trading sector, especially the import business, Sarinah has obtained approval from the Directorate General of Foreign Trade for importing rice and other products with certain quota allocation for certain products.

TWC

ao. Agreement on the utilization of promotional materials "Prambanan Jazz Festival" (PJF) with PT Syakira Ghyna Rajawali Indonesia Communication (Rajawali)

TWC entered into a cooperation agreement for the use of PJF promotional materials with Rajawali on November 26, 2019.

In the agreement, it was agreed that TWC has the right to use PJF's Promotional Material Inventions for a period of 8 years from the date of signing the agreement. TWC has the right as Co-Promoter of PJF to participate in seeking and obtaining sponsorship from other parties outside the agreement by using PJF Promotional Material Inventions.

If a PJF event is to be held, TWC can seek sponsorship with its own effort with an agreement of a minimum value of Rp3,000. For the use of these promotional materials, TWC has made a payment amounting to Rp36,549. The payment is a service for organizing the 5th PJF as well as a royalty payment for the Invention of PJF Promotional Materials with a branding value amounting to Rp37,000. For this payment, TWC record asset during the term of the agreement.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

TWC (lanjutan)

ap. Perjanjian KSP BMN di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2021, diadakan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan TWC tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dimaksudkan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN berupa tanah dan bangunan serta aset lainnya TMII milik Kementerian Sekretariat Negara dengan melakukan pengelolaan sesuai kesepakatan para pihak.

Kerjasama yang disepakati antara lain sebagai berikut:

- Nilai dan objek KSP:
  i. Nilai wajar BMN Objek KSP adalah sebesar Rp12.824.486.
  ii. Objek KSP yaitu tanah, bangunan eksisting fasilitas lainnya sesuai dengan lampiran Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan KSP yang berada dalam Kawasan KSP.
  iii. Dalam hal terdapat perubahan atas Objek KSP, Para Pihak sepakat akan melakukan addendum dan memperhitungkan kembali kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas Objek KSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ruang lingkup pelaksanaan KSP sebagai berikut: penggunaan atau pemanfaatan, pembangunan, renovasi dan pemeliharaan, pengelolaan, laporan tahunan, dan pembayaran kontribusi kepada negara oleh TWC berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan Objek KSP.
- TWC berhak membangun, merenovasi dan memelihara Objek KSP dengan didasarkan pada Program Pengajuan KSP TMII.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

TWC (continued)

ap. KSP BMN agreement in Taman Mini Indonesia Indah (TMII) with Ministry of State Secretariat

Based on Deed No. 1 dated July 1, 2021, conducted Cooperation Agreement between Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia with TWC regarding Cooperation in the Utilization of State-Owned Property in Ministry of the State Secretariat of the Republic of Indonesia in Taman Mini Indonesia Indah. Utilization cooperation (KSP) is intended to optimize the usability of BMN in the form of land and buildings and other assets of TMII belonging to the Ministry of State Secretariat by managing according to the agreement of the parties.

The agreed collaborations include the following:

- *Values and object of KSP:*
  i. The fair value of KSP Object BMN amounting to Rp12,824,486.
  ii. KSP objects are land, existing buildings and other facilities in accordance with the attachment to the Letter of the Minister of Finance concerning the KSP Approval located in the KSP Area.
  iii. In the event that there is a change in the KSP Object, the Parties agree to make an addendum and recalculate the fixed contribution and profit sharing on the KSP Object in accordance with the provisions of the laws and regulations.
- *The scope of the KSP implementation as follows: use or utilization, construction, renovation and maintenance, management, annual reports, and payment of contributions to the state by TWC in the form of fixed contributions and profit sharing on the utilization of KSP Objects.*
- *TWC has the right to build, renovate and maintain KSP Objects based on the TMII KSP Submission Program.*

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

TWC (lanjutan)

ap. Perjanjian KSP BMN di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan Kementerian Sekretariat Negara (lanjutan)

Kerjasama yang disepakati antara lain sebagai berikut (lanjutan):

- Pembayaran Kontribusi Tetap:
  i. Kontribusi tetap dihitung mulai dari awal KSP dan dibayarkan mulai tahun 2021 sebesar Rp1.385, untuk tahun pertama dan untuk tahun berikutnya dihitung dengan kenaikan sebesar 2,91% per tahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnya.
  ii. TWC diberikan keringanan untuk kontribusi tetap 3 tahun pertama sebesar 50%.
  iii. selanjutnya dilakukan setiap tahun paling lambat 30 Juni pada tahun berjalan.
- Pembagian keuntungan KSP dihitung sebesar 40,54% dari Laba Bersih KSP per tahun.
- Jangka waktu pelaksanaan KSP selama 25 tahun terhitung mulai berlaku 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2046 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TWC telah menunjuk entitas anak, PT Bhumi Visatanda Indonesia ("Bhiva"), sebagai *Operating Company* khusus untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan TMII berdasarkan Akta No. 17 tanggal 10 April 2023 tentang Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan TMII.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

TWC (continued)

ap. KSP BMN agreement in Taman Mini Indonesia Indah (TMII) with Ministry of State Secretariat (continued)

The agreed collaborations include the following (continued):

- *Fixed Contribution Payment:*
  i. Fixed contributions are calculated starting from the beginning of the KSP and paid started in 2021 amounting tp Rp1,385, for the first year and for the following year calculated with an increase of 2.91% per year from the previous year's fixed contributions.
  ii. TWC is given discount for the first 3 years fixed contribution of 50%.
  iii. Subsequent fixed contribution payments are made annually no later than June 30 of the current year.
- *KSP profit sharing is calculated at 40.54% of KSP's Net Profit per year.*
- *The KSP implementation period is 25 years starting from July 1, 2021 until June 30, 2046 and can be extended in accordance with the provisions of this Agreement and the prevailing laws and regulations.*

TWC appointed its subsidiary, PT Bhumi Visatanda Indonesia ("Bhiva"), as a special Operating Company to optimize the usability and result of the management of TMII based on Deed No. 17 dated April 10, 2023 regarding of the Operational Cooperation Agreement for the Management of TMII.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

TWC (lanjutan)

ap. Perjanjian KSP BMN di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan Kementerian Sekretariat Negara (lanjutan)

Pada tanggal 30 Oktober 2023, TWC mengirimkan Surat kepada Kementerian Sekretariat Negara perihal Pengajuan Proposal Adendum Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pengajuan yang dilakukan oleh TWC sehubungan dengan revitalisasi Kawasan TMII oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022 dengan nominal investasi kurang lebih sebesar Rp1.100.000 serta telah dilaksanakannya penataan internal di TMII oleh TWC.

aq. Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (KSOP TMII)

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 10 April 2023 tentang Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), TWC menunjuk Bhiva sebagai *Operating Company* khusus untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan TMII. Perjanjian KSOP bertujuan untuk:

1) Mengamankan BMN berupa tanah dan bangunan serta aset lainnya di TMII.
2) Meningkatkan penerimaan pendapatan perusahaan dan negara melalui kontribusi tetap, bagi hasil dan hasil objek KSOP.
3) Menjadikan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa.

Objek KSOP dalam perjanjian ini adalah tanah, bangunan eksisting dan fasilitas lainnya yang berada dalam Kawasan TMII. Selama berlangsungnya KSOP, objek KSOP tetap milik Kementerian Sekertariat Negara Indonesia (Kemensetneg) selaku pengguna barang dan hak pemanfaatan terhadap objek tersebut juga tetap milik TWC selaku mitra KSP yang ditunjuk. Bhiva dilarang mengalihkan atau menjaminkan objek KSOP dengan cara apapun kepada pihak lain termasuk afiliasinya. Bhiva dalam pelaksanaan KSOP dapat membangun dan merenovasi serta memelihara objek KSOP dengan persetujuan terlebih dahulu dari TWC.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

TWC (continued)

ap. KSP BMN agreement in Taman Mini Indonesia Indah (TMII) with Ministry of State Secretariat (continued)

On October 30, 2023, TWC sent Letter to the Ministry of State Secretariat regarding the Submission of a Proposal for the Utilization Cooperation Addendum (KSP) of Taman Mini Indonesia Indah (TMII). The submission made by the TWC in connection with the revitalization of the TMII Area by the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) in 2022 with a nominal investment of approximately amounting to Rp1,100,000 and the implementation of internal arrangements in TMII by TWC.

aq. Operational Cooperation Agreement for Management of Taman Mini Indonesia Indah (KSOP TMII)

Based on Deed No. 17 dated April 10, 2023 regarding of the Operational Cooperation Agreement for the Management of Taman Mini Indonesia Indah (TMII), TWC intends to appoint Bhiva as a special Operating Company to optimize the usability and results of the management of TMII. The KSOP agreement aims to:

1) Secure BMN in the form of land and buildings and other assets at TMII.
2) Increase the company's revenues through fixed contributions, profit sharing and results from KSOP objects.
3) Making TMII an area for the preservation and development of national culture as well as an educational tourism facility with an Indonesian cultural dimension to strengthen the feeling of love for the homeland and foster a sense of national unity and unity.

The KSOP objects in this agreement are land, existing buildings and other facilities located in the TMII area. During the KSOP, the KSOP object remains the property of the Indonesian Ministry of State Secretariat (Kemensetneg) as the user of the goods and the right to use the object also remains the property of TWC as the appointed KSP partner. Bhiva is prohibited from transferring or pledging KSOP objects in any way to other parties, including its affiliates. Bhiva in implementing KSOP can build, renovate and maintain KSOP objects with prior approval from TWC.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

TWC (lanjutan)

aq. Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (KSOP TMII) (lanjutan)

Kerjasama yang disepakati antara lain:
1) Pembayaran kontribusi tetap setiap tahun dari Bhiva kepada TWC sebesar Rp1.467 dengan kenaikan 2,91% setiap tahun dan diberikan keringanan sebesar 50% untuk tahun 2023. Pembayaran kontribusi tetap selambat-lambatnya pada 31 Mei pada tahun berjalan.
2) Pembayaran bagi hasil dari Bhiva kepada TWC sebesar 40,54% dari laba bersih yang wajib dibayarkan setiap tahun. Pembayaran bagi hasil selambat-lambatnya pada 30 Maret tahun berikutnya atau setelah disetujuinya laporan keuangan *audited* berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.
3) KSOP dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan berakhirnya jangka waktu Hak Pemanfaatan TWC berdasarkan Akta KSP.

Penyerahan objek KSOP dari TWC kepada Bhiva dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Juli 2023.

Selama jangka waktu perjanjian, Bhiva dilarang:

1) Mengalihkan hak dan/atau menjaminkan objek KSOP kepada pihak lain;
2) Mengalihkan perjanjian ini kepada siapapun termasuk afiliasinya tanpa ijin atau persetujuan tertulis TWC; dan/atau
3) Melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan TMII.

ar. Perjanjian dengan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya (“MCB”)

Pada tanggal 20 September 2024, terbit Perpres Nomor 101 tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur. Dijelaskan pada pasal 9 Perpes tersebut bahwa tata kelola zona 1 Candi Borobudur akan menjadi kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan Kementerian tersebut akan menugaskan TWC untuk melakukan pemanfaatan zona 1.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

TWC (continued)

aq. Operational Cooperation Agreement for Management of Taman Mini Indonesia Indah (KSOP TMII) (continued)

The agreed collaboration include the following:
1) Annual fixed contribution payments from Bhiva to TWC amounting to Rp1,467 with an increase of 2.91% each year and a 50% relief is provided for 2023. Fixed contribution payments are no later than May 31 of the current year.

2) Profit sharing payments from Bhiva to TWC are 40.54% of net profits which must be paid annually. Payment of profit sharing is no later than March 30 of the following year or after approval of the audited financial report based on the General Meeting of Shareholders.

3) KSOP is implemented starting from the date April 1, 2023 until the end of the term of TWC's Utilization Rights based on the KSP Deed.

The handover of the KSOP object from TWC to Bhiva was carried out through Minutes of Handover dated July 3, 2023.

During the term of the agreement, Bhiva is prohibited from:
1) Transfer rights and/or pledge the object of KSOP to other parties;
2) Transfer this agreement to anyone including its affiliates without TWC's written permission or consent; and/or

3) Conduct other business activities other than business activities related to TMII management.

ar. Agreement with Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya (“MCB”)

On September 20, 2024, Perpres Number 101 2024 concerning the Governance of the Borobudur Temple Complex was issued. Article 9 of the regulation states that the governance of Zone 1 of Borobudur Temple will be under the authority of the Ministry responsible for cultural affairs, and the Ministry will assign TWC to manage the utilization of Zone 1.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

TWC (lanjutan)

ar. Perjanjian dengan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya ("MCB") (lanjutan)

Dampak dari Perpres tersebut, Kementerian Kebudayaan melalui badan dibawahnya yaitu MCB, menandatangani perjanjian Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen pada Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur dengan TWC pada tanggal 26 September 2025. Perjanjian ini efektif berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 1 Juli 2025, dimana TWC diberikan kewenangan untuk:

1. Melakukan kegiatan operasional pemanfaatan Zona 1 Kompleks Candi Borobudur;
2. Menggunakan atau memanfaatkan Zona 1 Kompleks Candi Borobudur sepanjang terkait dengan hal-hal operasional pemanfaatan Zona 1 Kompleks Candi Borobudur;
3. Mendukung pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan terhadap Zona 1 Kompleks Candi Borobudur.

Berdasarkan perjanjian tersebut, TWC diwajibkan untuk memberikan kompensasi berupa:

1. Bagi hasil tiket sebesar 25% dari pendapatan bersih tiket selama tahun 2025.
2. Kompensasi sebesar Rp29.000 untuk tahun 2026 yang terdiri dari:
   a. Bagi Hasil Tiket sebesar 25% dari Pendapatan Bersih Tiket dan
   b. Dana Pelestarian sebesar selisih jumlah kompensasi dikurangi bagi hasil tiket; dengan ketentuan apabila bagi hasil tiket kepada MCB telah mencapai nilai Rp29.000 maka tidak terdapat Dana Pelestarian kepada MCB.
3. Kompensasi paling sedikit sebesar Rp29.000 untuk tahun 2027 dan seterusnya yang terdiri dari:
   a. Bagi hasil tiket sebesar 25% dari pendapatan bersih tiket dan
   b. Dana Pelestarian sebesar selisih jumlah kompensasi dikurangi bagi hasil tiket; dengan ketentuan apabila bagi hasil tiket kepada MCB telah mencapai nilai paling sedikit Rp29.000 maka tidak terdapat Dana Pelestarian kepada MCB.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

TWC (continued)

ar. Agreement with Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya ("MCB") (continued)

As a result of the Perpres, the Ministry of Culture, through its subsidiary body MCB, signed a Cooperation Agreement on Human Resources and/or Management for the Management of the Borobudur Temple Complex with TWC on September 26, 2025. This agreement is effective for five years starting from July 1, 2025, granting TWC the authority to:

1. Conduct operational activities for the utilization of Zone 1 of the Borobudur Temple Complex;
2. Use or utilize Zone 1 of the Borobudur Temple Complex insofar as it relates to the operational activities of Zone 1 utilization;
3. Support the implementation of repairs and maintenance of Zone 1 of the Borobudur Temple Complex.

Based on the agreement, TWC is obligated to provide compensation as follows:

1. Ticket revenue share of 25% of the net ticket revenue for the year 2025.
2. Compensation amounting to Rp29,000 for the year 2026, consisting of:
   a. Ticket revenue share of 25% of the net ticket revenue; and
   b. Preservation fund equal to the difference between the total compensation and the ticket revenue share; provided that if the ticket revenue share to MCB reaches Rp29,000, no Preservation Fund will be allocated to MCB.
3. Compensation of at least Rp29,000 for the year 2027 and onwards, consisting of:
   a. Ticket revenue share of 25% of the net ticket revenue; and
   b. Preservation Fund equal to the difference between the total compensation and the ticket revenue share; provided that if the ticket revenue share to MCB reaches at least Rp29,000 no Preservation Fund will be allocated to MCB.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

ITDC

as. ITDC memiliki LUDA dengan berbagai perusahaan terkait dengan kerjasama utilisasi dan pengembangan lahan di Nusa Dua dan Mandalika. LUDA tersebut berlaku antara 20 - 30 tahun dan memiliki opsi perpanjangan waktu.

at. Pada tanggal 28 Januari 2019, ITDC telah melakukan kerjasama dengan Dorna Sports, S.L untuk penyelenggaraan MotoGP 2021 - 2025. ITDC memiliki kewajiban membayar biaya penyelenggaraan acara untuk tahun 2021 sebesar EUR9.000.000 (nilai penuh). Untuk tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 jumlah tersebut naik dengan indeksasi 5%. Pembayaran penyelenggaraan diangsur setiap tahun. Pembayaran dilakukan 50% enam puluh hari sebelum acara dan 50% pada hari kerja pertama setelah acara.

Pada tanggal April 29, 2020, ITDC dengan Dorna Sports, S.L. telah menyetujui perpanjangan penyelenggaraan FIM World Road Racing World Championship Grand Prix sampai tahun 2030.

au. Pada tanggal 28 Januari 2019, ITDC telah melakukan kerjasama dengan Dorna WSBK Organization SRL untuk penyelenggaraan WSBK. ITDC memiliki kewajiban membayar biaya penyelenggaraan untuk tahun 2021 sampai 2025 masing-masing dalam nilai penuh sebesar EUR3.000.000, EUR3.150.000, EUR3.307.500, EUR3.472.875, dan EUR3.649.518. Biaya penyelenggaraan setiap tahunnya dibayarkan 50% selambat-lambatnya 60 hari sebelum acara dan 50% paling lambat hari kerja pertama setelah acara. ITDC telah menyelenggarakan WSBK sampai dengan tahun 2023. ITDC melakukan pengakhiran event WSBK tahun 2024 melalui perjanjian pengakhiran tanggal 14 Oktober 2023.

av. Selama tahun 2024, ITDC melakukan penjualan lahan kawasan Nusa Dua dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

ITDC

as. ITDC has LUDA with various companies related to cooperation of land utilization and development in Nusa Dua and Mandalika. The LUDA is valid for 20 - 30 years and have options of extention period.

at. On January 28, 2019, ITDC entered into an agreement with Dorna Sports, S.L regulating the promotion of event MotoGP 2021 - 2025. ITDC has obligation to pay the event fee for the year 2021 amounting to EUR9,000,000 (full amount). For the following year/s 2022, 2023, 2024 and 2025, such sum in indexed upwards annually by 5%. The event fee is pursuant to installment each year. The instalments shall be made 50%, sixty days before the event, and 50% in the first working day after the event.

On April 29, 2020 ITDC and Dorna Sports, S.L. has agreed to extend the promotion of event FIM World Road Racing World Championship Grand Prix until 2030.

au. On January 28, 2019, ITDC entered into an event organizer WSBK agreement with Dorna WSBK Organization SRL. ITDC has obligation to pay from 2021 to 2025 amounting EUR3,000,000, EUR3,150,000, EUR3,307,500, EUR3,472,875, and EUR3,649,518, respectively, in full amount. The event fee is pursuant to installment each year. The 50% of instalments shall be made sixty days before the event, and 50% in the first working day after the event. ITDC has organized WSBK until 2023. ITDC has terminate 2024 WSBK event through termination agreement dated October 14, 2023.

av. During 2024, ITDC sold its lands in Nusa Dua area to the third parties with details as follows:

Tanggal efektif penjualan/ ***Sales effective date***	**Pihak Ketiga/*Third Parties***	**Area/*area***
1 Agustus 2024/ *August 1, 2024*	PT Intersis Grasindo	Lot RA6 Nusa Dua
21 Oktober 2024/ *October 21, 2024*	PT Bali Destinasi Lestari	Lot S5 Extension
16 Desember 2024/ *December 16, 2024*	PT Bali Destinasi Lestari	Lot S5 Beachfront Nusa Dua

Nilai penjualan lahan tersebut di atas adalah sebesar Rp2.593,76 miliar.

Total sales of land as mentioned above are totalling to Rp2,593.76 billion.

47. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

Per 31 Desember 2024, ITDC telah memenuhi seluruh prasyarat kontrak untuk mengakui penjualan lahan.

aw. Pada tahun 2015, ITDC dan PT AAPC Indonesia menandatangani perjanjian pengelolaan hotel Pullman Mandalika Beach Resort. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan 15 tahun sejak tanggal pembukaan hotel.

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II)

a. Tagihan Denda pembayaran konsesi PNBP

Pada tanggal 15 Agustus 2023, DJPU mengirimkan tagihan denda atas keterlambatan pembayaran konsesi tahun 2017 sebesar Rp52.096 untuk AP Indonesia (dahulu AP1) dan Rp60.223 untuk AP Indonesia (dahulu AP2), sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI. Tagihan tersebut jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2023.

Pada tanggal 12 September 2023, AP Indonesia (dahulu AP1) mengajukan permohonan koreksi surat tagihan denda PNBP 2017 tersebut karena AP Indonesia (dahulu AP1) telah melakukan pembayaran segera pada saat menerima surat tagihan konsesi tahun 2017.

Pada tanggal 13 September 2023, AP Indonesia (dahulu AP2) juga mengajukan permohonan koreksi surat tagihan denda PNBP 2017 tersebut karena AP Indonesia (dahulu AP2) telah melakukan pembayaran segera pada saat menerima surat tagihan konsesi tahun 2017.

DJPU mengirimkan kembali tagihan kedua atas denda keterlambatan pembayaran konsesi tahun 2017 kepada AP Indonesia (dahulu AP1 dan AP2) pada tanggal 2 Oktober 2023.

DJPU mengirimkan kembali tagihan ketiga atas denda keterlambatan pembayaran konsesi tahun 2017 kepada AP Indonesia (dahulu AP1 dan AP2) pada tanggal 4 Desember 2023. Pada tanggal 8 Januari 2024 dan 4 Maret 2024, AP Indonesia (dahulu AP2) dan AP Indonesia (dahulu AP1) telah melakukan pembayaran denda sebesar Rp60.223 dan Rp52.096 tersebut.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

ITDC (continued)

As of December 31, 2024, ITDC has fulfilled all contract's condition precedents to recognize sales of land.

aw. In 2015, ITDC and PT AAPC Indonesia signed hotel management agreement related to Pullman Mandalika Beach Resort. The agreement is effective until 15 years since the hotel opening date.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE

AP Indonesia (formerly AP I and AP II).

a. Payment of Non-Tax State Revenue (PNBP)

On August 15, 2023, DJPU sent a bill for late payment of 2017 concession amounting to Rp52,096 to AP Indonesia (formerly AP1) and Rp60,223 to AP Indonesia (formerly AP2), as a follow-up to the findings of BPK RI. The bill is due on August 22, 2023.

On September 12, 2023, AP Indonesia (formerly AP1) submitted a request for correction of the 2017 PNBP penalty invoice because AP Indonesia (formerly AP1) had made immediate payment upon receipt of the 2017 concession invoice.

On September 13, 2023, AP Indonesia (formerly AP2) also submitted a request for correction of the 2017 PNBP penalty invoice because AP Indonesia (formerly AP2) had made immediate payment upon receipt of the 2017 concession invoice.

DJPU sent a second invoice for late payment of concession fees in 2017 to AP Indonesia (formerly AP1 and AP2) on October 2, 2023.

The DJPU sent the third invoice for late payment penalty of 2017 concession to AP Indonesia (formerly AP1 and AP2) on December 4, 2023. On January 8, 2024 and March 4, 2024, AP Indonesia (formerly AP2) and AP Indonesia (formerly AP1) has paid the fine amounting to Rp60,223 and Rp52,096.

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP I dan AP II) (lanjutan)

a. Tagihan Denda pembayaran konsesi PNBP (lanjutan)

Pada tanggal 16 Desember 2024, AP Indonesia mengirimkan Surat Pengajuan Keberatan atas Denda Keterlambatan Pembayaran Konsesi Jasa Kebandarudaraan tahun 2017 yang menyatakan keberatan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pada tanggal 13 Maret 2025, DJPU mengirimkan Surat Tanggapan Pengajuan Keberatan atas Denda Keterlambatan Pembayaran Konsesi Jasa Kebandarudaraan Tahun 2017 yang menyatakan bahwa DJPU telah memproses penundaan denda konsesi tahun 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AP Indonesia memutuskan untuk menerima surat tanggapan tersebut dan mencatat pembayaran tersebut sebagai beban pada laporan laba rugi tahun 2024.

b. PT Taurus Gemilang ("TG")

Pada tanggal 29 Juli 2020, PT Taurus Gemilang ("TG") mengajukan Gugatan kepada AP Indonesia (dahulu AP II) atas Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 638/PDT.G/2020PN.TNG tanggal 2 Agustus 2021, AP Indonesia (dahulu AP II) dinyatakan menang dan TG diminta untuk membayar ganti rugi sebesar Rp58.471. Pada tanggal 12 Oktober 2021, TG mengajukan banding atas keputusan Pengadilan tersebut.

Putusan tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2022/PT.BTN tanggal 13 April 2022 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 638/PDT.G/2020/PN.TNG tanggal 2 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut. Pada tanggal 5 Agustus 2022, TG mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut. Pada tanggal 11 Mei 2023, PN Tangerang mengabulkan permohonan Kasasi dari PT Taurus Gemilang dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2022/PT.BTN.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

AP Indonesia (formerly AP I and AP II) (continued)

a. Payment of Non-Tax State Revenue (PNBP)(continued)

On December 16, 2024, AP Indonesia submitted a Letter of Objection to the Late Payment Penalty for Airport Service Concessions for the year 2017, expressing its objections to the Directorate General of Civil Aviation.

On March 13, 2025, the DJPU sent a Response Letter regarding the Objection Submission for the Late Payment Penalty of the 2017 Airport Services Concession, stating that the DJPU has processed the deferment of the 2017 concession penalty in accordance with the applicable regulations.

AP Indonesia has decided to accept the response letter and recognize the payment as an expense in the 2024 statement of profit or loss.

b. PT Taurus Gemilang ("TG")

On July 29, 2020, PT Taurus Gemilang ("TG") filed a lawsuit against AP Indonesia (formerly AP II) in regards with the Cooperation Agreement for the Utilization of Commercial Facilities of PT Angkasa Pura II at Terminal 3 Ultimate Soekarno-Hatta Airport. Based on the decision of the Tangerang District Court No. 638/PDT.G/2020PN.TNG dated August 2, 2021, AP Indonesia (formerly AP II) was declared victorious and TG was asked to pay compensation amounting to Rp58,471. On October 1, 2021, TG filed an appeal against the Court's decision.

The appeal level decision based on the Banten High Court Decision No. 53/PDT/2022/PT.BTN dated April 13, 2022 stated that it upheld the Tangerang District Court Decision No. 638/PDT.G/2020/PN.TNG dated August 2, 2021 which was appealed on the Court. On August 5, 2022, TG filed a cassation appeal against the Banten High Court Decision. On May 11, 2023, the Tangerang District Court granted the Cassation request from PT Taurus Gemilang and revoked the verdict of the Banten High Court No. 53/PDT/2022/PT.BTN .

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP II) (lanjutan)

b. PT Taurus Gemilang ("TG") (lanjutan)

Sebagai tindak lanjut atas Putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada tanggal 25 Juli 2025 AP Indonesia dan TG telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban terkait Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta No. PJJ.04.04/00.02/03/2017/0001 tanggal 3 Maret 2017 beserta Perubahan Addendum I Nomor PJJ.04.04/00/02/2020/0097 tanggal 27 Februari 2020. Penyelesaian tersebut didasarkan pada Kesepakatan tertanggal 25 Juli 2025 dan Addendum Kesepakatan Nomor BAC.DK.1199/KU.20/2025 tertanggal 9 September 2025.

c. Klaim Kontraktor

AP Indonesia (dahulu AP II) menandatangani kontrak pengadaan jasa konstruksi dengan beberapa kontraktor.

Pada tahun 2020, Direksi AP Indonesia (dahulu AP II) menerbitkan instruksi tentang Pemberitahuan Keadaan Tidak Terduga (Force Majeure) uang dialami AP Indonesia (dahulu AP II) akibat pandemi Covid-19 kepada kontraktor diantaranya :

- Menghentikan sementara waktu seluruh kegiatan perencanaan dan kontruksi yang sedang berjalan.
- Mengajukan permohonan penundaan pembayaran.

Para pihak sepakat untuk melakukan penghentian sementara waktu pelaksanaan pekerjaan namun hingga saat ini belum ada keputusan dari AP Indonesia (dahulu AP II) terkait kelanjutan pelaksanaan kontrak sehingga AP Indonesia (dahulu AP II) menerima klaim dari beberapa kontraktor.

Atas klaim tersebut di atas, AP Indonesia (dahulu AP II) meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia – Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (''Jamdatun'') terkait dengan penyesuaian harga, biaya kompensasi dan material on site di mana para pihak dapat melakukan kesepakatan dan melakukan renegosiasi kontrak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola AP Indonesia (dahulu AP II) yang baik serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

AP Indonesia (formerly AP II) (continued)

b. PT Taurus Gemilang ("TG") (continued)

Following the Supreme Court Decision that has obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde), on July 25, 2025, AP Indonesia and TG agreed to settle all rights and obligations related to the Cooperation Agreement for the Utilization of Commercial Facilities at Terminal 3 of Soekarno-Hatta International Airport, Agreement No. PJJ.04.04/00.02/03/2017/0001 dated March 3, 2017, including its Amendment I No. PJJ.04.04/00/02/2020/0097 dated February 27, 2020. The settlement was made based on the Agreement dated July 25, 2025, and the Addendum to the Agreement No. BAC.DK.1199/KU.20/2025 dated September 9, 2025.

c. Contractor Claim

AP Indonesia (formerly AP II) has signed a contract for construction services with multiple contractors.

In 2020, AP Indonesia's (formerly AP II) Board of Directors issued instructions regarding the Notification of Force Majeure circumstances experienced by AP Indonesia (formerly AP II) due to the Covid-19 pandemic to its contractors, which include:

- *Temporarily halting all ongoing planning and construction activities.*
- *Applying for a payment deferral.*

The parties have agreed to temporarily suspend the work, but so far, there has been no decision from AP Indonesia (formerly AP II) regarding the continuation of the contract implementation, resulting in AP Indonesia (formerly AP II) receiving claims from several contractors.

Regarding the aforementioned claims, AP Indonesia (formerly AP II) has requested legal advice from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia - Deputy Attorney General for Civil and State Administrative Affairs ("Jamdatun") regarding price adjustments, compensation costs, and on-site materials, where the parties can reach an agreement and renegotiate the contract based on the applicable laws and regulations, good corporate governance, and the principle of prudence in decision-making.

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP II) (lanjutan)

c. Klaim Kontraktor (lanjutan)

Pada tanggal 17 Mei 2023, Jamdatun memberikan pendapat hukum melalui surat No. R-041/G/Gph.1/05/2023 kepada AP Indonesia (dahulu AP II) yang menyatakan bahwa AP Indonesia (dahulu AP II) berkewajiban untuk memastikan faktor faktor yang diajukan kompensasi berdasarkan fakta yang benar dan nilai harga yang diminta adalah benar, tepat dan wajar. Namun untuk prinsip kehati-hatian dan *fairness*, Jamdatun menyarankan AP Indonesia (dahulu AP II) untuk melewati proses pembuktian atau verifikasi melalui pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak guna memperoleh nilai yang wajar.

Menindaklanjuti pendapat hukum yang diberikan oleh Jamdatun, AP Indonesia (dahulu AP II) melakukan permohonan bantuan audit sehubungan dengan penyesuaian harga dan kompensasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") untuk melakukan penilaian atas kewarjaran nilai penyesuaian harga dan kompensasi pada proyek yang sedang mengalami perlambatan.

d. Klaim Ahli Waris Mewar

Pada bulan Januari 2026, AP Indonesia menerima gugatan perdata dengan register No. 692/Pdt.G/2025/PN Jakarta Pusat terkait klaim atas tanah ex Erfpacht No. 5 yang berlokasi di wilayah Bandar Udara Pattimura, Ambon. Gugatan diajukan oleh Penggugat: Mohammad Novi Mawar, mewakili ahli waris Mewar, dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- Tergugat I: PT Angkasa Pura Indonesia
- Tergugat II: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- Tergugat III: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Turut Tergugat I: Kementerian Pertanahan Republik Indonesia
- Turut Tergugat II: Pemerintah Provinsi Maluku
- Turut Tergugat III: Kanwil BPN Provinsi Maluku
- Turut Tergugat IV: BPN Kota Ambon

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

AP Indonesia (formerly AP II) (continued)

c.. Contractor Claim (continued)

On May 17, 2023, Jamdatun provided a legal opinion via letter No. R-041/G/Gph.1/05/2023 to AP Indonesia (formerly AP II) stating that AP Indonesia (formerly AP II) is obliged to ensure the factors proposed for compensation are based on true facts and the price requested is correct, accurate, and fair. However, for the principle of prudence and fairness, Jamdatun advises AP Indonesia (formerly AP II) to undergo a verification process through a third party agreed upon by both parties to obtain a fair value.

Following the legal opinion provided by Jamdatun, AP Indonesia (formerly AP II) applied for audit assistance in relation to price adjustment and compensation to the Financial and Development Supervisory Agency ("BPKP") to assess the fairness of the price adjustment and compensation value on a project that is experiencing a slowdown.

d.. Mewar Heirs' Claim

In January 2026, AP Indonesia received a civil lawsuit registered under No. 692/Pdt.G/2025/PN Central Jakarta, related to claims over land formerly under Erfpacht No. 5 located in the Pattimura Airport area, Ambon. The lawsuit was filed by Plaintiff: Mohammad Novi Mawar, representing the heirs of Mewar. The parties to the case are:

- *Defendant I: PT Angkasa Pura Indonesia*
- *Defendant II: Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia*
- *Defendant III: Ministry of Finance of the Republic of Indonesia*
- *Co-Defendant I: Ministry of Agrarian Affairs/National Land Agency*
- *Co-Defendant II: Provincial Government of Maluku*
- *Co-Defendant III: BPN Regional Office of Maluku*
- *Co-Defendant IV: Ambon City Land Office*

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

AP Indonesia (dahulu AP II) (lanjutan)

d. Klaim Ahli Waris Mewar (lanjutan)

Penggugat menuntut Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp383.210 dan kerugian immateriil sebesar Rp90.000, sehingga total nilai gugatan yang diajukan mencapai Rp473.210.

Proses persidangan dimulai melalui tahap mediasi pada 27 Januari 2026, namun tidak mencapai kesepakatan. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan pada 2 Februari 2026, diikuti dengan penyampaian jawaban para tergugat pada 22 Februari 2026 melalui e-Court.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses persidangan, dan telah memasuki agenda Replik dari Penggugat, yang dijadwalkan pada 31 Maret 2026.

ITDC

a. Penyelesaian Persidangan Gugatan dari PT Jaya Makmur Bersama

Dalam rangka mengembangkan usahanya, Grup berupaya melakukan kerja sama dengan investor dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan lahan LOT C-5 (kantor ITDC), yang terletak di atas lahan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (“HPL”) ITDC No. 4/Desa Benoa, ITDC mencari investor yang mampu mengoperasikan sarana pariwisata tersebut di bidang *Accomodation, Recreation dan Entertainment Center*. ITDC telah mengundang calon-calon investor, termasuk salah satunya adalah PT Jaya Makmur Bersama (“JMB”), untuk mengikuti seleksi (beauty contest) calon pengembang lahan Lot C-5. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2008, ITDC menetapkan PT Jaya Makmur Bersama sebagai investor terpilih.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

AP Indonesia (formerly AP II) (continued)

d.. Mewar Heirs’ Claim (continued)

The Plaintiff demands that Defendants I, II, and III be held jointly and severally liable to pay material damages amounting to Rp383,210 and immaterial damages amounting to Rp90,000, bringing the total claim to Rp473,210.

Court proceedings began with mediation on January 27, 2026, which did not result in a settlement. The lawsuit was formally read on February 2, 2026, followed by submission of responses from the defendants on February 22, 2026 via e-Court.

As of the date of the consolidated financial statements, the case remains ongoing, and the Court is proceeding with the Plaintiff's Rejoinder, scheduled for March 31, 2026.

ITDC

a. Settlement of Claim Trial from PT Jaya Makmur Bersama

In developing its business, ITDC seeks cooperation with investors in for the purpose of land use and development of LOT C-5 land (ITDC’s office), located on the Right to Manage Certifcate ("HPL") of ITDC No. 4/Desa Benoa; ITDC is looking for investors who are able to operate the tourism facilities in the field of Accomodation, Recreation and Entertainment Center. ITDC has invited potential investors, including PT Jaya Makmur Bersama (“JMB"), to follow the potential developer selection (beauty contest) for Lot C-5 land. On August 15, 2008, ITDC decided that PT Jaya Makmur Bersama as the appointed investor.

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC

a. Penyelesaian Persidangan Gugatan dari PT Jaya Makmur Bersama (lanjutan)

ITDC dan JMB telah menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/"MoU") pada tahun 2008 yang direncanakan untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan LUDA. Namun dalam pembahasan lanjutan, Pemegang Saham ITDC memberikan arahan untuk renegosiasi nilai kerja sama. JMB tidak sepakat dengan adanya renegosiasi nilai kerja sama dan tetap menginginkan kesepakatan sesuai MoU.

JMB kemudian mengajukan gugatan dengan duduk perkara bahwa ITDC tanpa alasan yang wajar dan tanpa adanya itikad baik tidak memperpanjang MoU dan oleh karenanya telah melakukan wanprestasi, atas pokok gugatan yang diajukan oleh JMB dikabulkan untuk seluruhnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Februari 2013.

Pada tanggal 7 Maret 2013, ITDC mengajukan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dari Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukum mewakili ITDC sebagai Tergugat/ Terbanding melawan PT Jaya Makmur Bersama. Tanggal 4 Desember 2013 telah dijatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

Pada tanggal 5 Februari 2014 Tim Kuasa Hukum ITDC (Kejaksaan Tinggi Bali dan Ihza & Ihza Law Firm) mengajukan Memori Kasasi.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC

a. Settlement of Claim Trial from PT Jaya Makmur Bersama (continued)

ITDC and JMB signed a Memorandum of Understanding (MoU) in 2008, which was planned to be followed up with the signing of the LUDA. However, during further discussions, ITDC's Shareholders directed a renegotiation of the cooperation value. JMB did not agree to the renegotiation and insisted on maintaining the agreement as per the MoU.

JMB then filed a lawsuit alleging that ITDC without reasonable cause and in the absence of good faith does not extend the MoU and therefore has defaulted on the agreement. The principal lawsuit filed by JMB was granted for all by the judge based on the Denpasar District on February 12, 2013.

On March 7, 2013, ITDC submitted Appeal to the Chairman of Denpasar District Court from the Attorney of the State as Legal Counsel representing ITDC as Defendant against PT Jaya Makmur Bersama. On December 4, 2013, Bali High Court decided to reinforce the previous decision of Denpasar District Court.

On 5 February 2014, ITDC's Legal Team (Bali Attorney General and Ihza & Ihza Law Firm) filed Cassation.

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

a. Penyelesaian Persidangan Gugatan dari PT Jaya Makmur Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 28 Januari 2015, Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan Kasasi yang pada amarnya menyatakan menolak Memori Kasasi dari ITDC dan menguatkan Putusan Banding dan Putusan Tingkat Pertama di PN Denpasar:

a. ITDC untuk menandatangani LUDA dengan JMB berdasarkan MoU;
b. Deposit uang sejumlah Rp1.500.000.000 tetap sebagai jaminan penawaran yang diubah menjadi deposit Pembayaran Kompensasi sebagaimana diatur dalam MoU;
c. Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000/hari keterlambatan pemenuhan putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Atas Putusan Kasasi ITDC telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai dengan surat No.18/ZP/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016. Namun sampai dengan laporan keuangan konsolidasian ini disusun, ITDC dan/atau kuasa hukum ITDC belum menerima Salinan Resmi atas Putusan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Pihak JMB belum mengupayakan atau mengajukan bentuk eksekusi apapun atas Putusan ini. ITDC telah mengupayakan negosiasi kembali dengan JMB untuk kelanjutan kerja sama dan ITDC telah menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan mediasi sehubungan dengan mediasi ini. Bahwa Putusan perkara a quo terkait hukuman pokok masih belum terlaksana dan/atau dilaksanakan serta masih diperlukan proses hukum lain untuk pelaksanaan Putusan perkara a quo yaitu permohonan pelaksanaan atau penetapan eksekusi yang harus diajukan oleh JMB.

Berdasarkan Pendapat Hukum dari Konsultan Hukum Eksternal ITDC, dwangsom adalah hukuman yang bersifat *accesoir* yang baru dapat dilaksanakan apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan setelah penetapan eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara a quo sehingga sampai dengan saat ini, dwangsom (uang paksa) belum berlaku.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC (continued)

a. Settlement of Claim Trial from PT Jaya Makmur Bersama (continued)

On January 28, 2015, the Supreme Court refuses the Cassation Memory of ITDC and reinforces the Appeal Decision and First Level Decision in Denpasar District as follows:

a. ITDC and JMB to sign the LUDA under the terms of the MoU.
b. Deposit money amounting to Rp1,500,000,000 remains as a bid security, which is converted into a Compensation Payment deposit as stipulated in the MoU.
c. Forced money (dwangsom) amounting to Rp10,000,000/day of delay in the fulfillment of the decision from the time this decision has a permanent legal effect;

On the Decission of the Cassation, ITDC has submitted a judicial review to the Supreme Court in accordance with letter No.18/ZP/X/2016 dated October 26, 2016. However, up to the consolidated financial statements date, ITDC and/or ITDC's attorneys have not received an official copy of the Judicial Review Effort ("PK") decision. JMB has not submitted any action in the context of executing the Decision. ITDC has made efforts to renegotiate with JMB for the continuation of the cooperation and has appointed the State Attorney to conduct mediation in relation to this matter. JMB also has not submitted any action in the context of executing the Decision. Whereas the a quo decision regarding with the main sentence has not yet been done and/or implemented and other legal processes are still required for the implementation of the a quo decisions, viz. the request or determination of execution that must be submitted by JMB.

Based on the Legal Opinions from ITDC's External Legal Consultants, dwangsom (forced money) is an accesoir punishment that can only be carried out if the main sentence is not carried out after the execution determination is issued by the Head of the District Court who decides on the a quo case so up to this moment, dwangsom (forced money) still not applied.

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

a. Penyelesaian Persidangan Gugatan dari PT Jaya Makmur Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, ITDC mencatat provisi untuk perkara ini sebesar Rp22.650 (Catatan 39).

Pada tanggal 8 Juli 2025 pihak JMB menandatangani Berita Acara Mediasi di Kejaksaan Tinggi Bali yang menyatakan sepakat untuk melanjutkan kerja sama dengan tarif baru berdasarkan penilaian KJPP. Namun pada tanggal 19 September 2025, JMB mengirimkan surat kepada Kejaksaan Tinggi Bali yang menyatakan menganulir kesepakatan dalam Berita Acara.

Atas hal tersebut saat ini Perusahaan dengan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Bali masih melakukan upaya hukum, antara lain meminta pendapat hukum terkait Putusan yang tidak dapat dilakukan eksekusi atau non executable termasuk mengelaborasi upaya hukum lainnya termasuk PK 2.

ITDC telah mendapatkan opini legal dari Baraka Law Office pada 17 Desember 2025 yang menyatakan beberapa opini hukum sebagai berikut:

- Uang paksa (dwangsom) merupakan hukuman alternatif untuk menggantikan eksekusi riil, dan bukan pula untuk mengatasi eksekusi riil dalam pelaksanaan putusan pokok.
- Putusan pengadilan yang menghukum ITDC untuk menandatangani LUDA merupakan putusan pokok (condemnatoir), sedangkan hukuman uang paksa (dwangsom) merupakan putusan yang bersifat accesoir. Oleh karenanya, hukuman dwangsom akan gugur apabila hukuman pokok telah dilaksanakan.
- ITDC belum berkewajiban untuk melakukan penandatanganan LUDA maupun pembayaran uang paksa yang disebabkan karena belum adanya eksekusi oleh pengadilan. ITDC juga tidak dapat melakukan eksekusi secara sukarela.
- ITDC tetap dapat melakukan upaya negosiasi dengan JMB terkait dengan Nota Kesepahaman maupun LUDA.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC (continued)

a. Settlement of Claim Trial from PT Jaya Makmur Bersama (continued)

As of December 31, 2024, ITDC has recorded provision for this case amounted to Rp22,650 (Note 39).

On July 8, 2025, JMB signed the Minutes of Mediation at the Bali High Prosecutor's Office, stating its agreement to continue the cooperation with a new tariff based on the valuation conducted by a Public Appraisal Service Office (KJPP). However, on September 19, 2025, JMB sent a letter to the Bali High Prosecutor's Office declaring the cancellation of the agreement as stated in the Minutes of Mediation.

In relation to this matter, the Company, with the assistance of the State Attorneys at the Bali High Prosecutor's Office, continues to undertake legal measures, including requesting legal opinions regarding the Decision which is considered non-executable, as well as exploring other available legal remedies, including the possibility of submitting a second Judicial Review ("PK 2").

ITDC obtained a legal opinion from Baraka Law Office on December 17, 2025, which provided the following legal conclusions:

- *Dwangsom (penalty payment) is an alternative sanction intended to replace real execution, and is not meant to override or enforce real execution of the principal judgment.*
- *The court decision ordering ITDC to sign the LUDA constitutes a principal (condemnatoir) judgment, whereas the dwangsom penalty is accessory in nature. Therefore, the dwangsom penalty becomes void once the principal judgment has been fulfilled.*
- *ITDC is not yet obligated to sign the LUDA or to pay the dwangsom, as the court has not initiated execution proceedings. ITDC also cannot carry out execution voluntarily.*
- *ITDC may continue to pursue negotiations with JMB regarding the Memorandum of Understanding and the LUDA.*

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

a. Penyelesaian Persidangan Gugatan dari PT Jaya Makmur Bersama (lanjutan)

Pada tahun 2024 dan 2025, ITDC telah beberapa kali melakukan koordinasi maupun mengirimkan surat kepada JMB, dimana hal ini sebagai bentuk upaya ITDC melaksanakan putusan secara sukarela sehingga ITDC tidak dapat dikategorikan sebagai lalai untuk memenuhi isi keputusan pengadilan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, ITDC telah melakukan pembalikan atas provisi yang telah dilakukan pada tahun 2024 sebesar Rp22.650.

b. Penyelesaian Perkara Pembatalan HPL 8 dan 9 Desa Kuta, Nusa Tenggara Barat

Pada tanggal 21 April 2011, terdapat Gugatan Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2011/PTUN.MTR dari Nurhuda (Penggugat) kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) dan ITDC (Tergugat II Intervensi) terhadap objek sengketa:

- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah No. SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 m² yang terletak di Kuta Pujut.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah No. SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 m2 yang terletak di Kuta Pujut.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah No.SK.03/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 m² yang terletak di Kuta Pujut.
- Sertifikat HPL No. 08/Desa Kuta, surat ukur No. 14/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010 seluas 9.895 m2 atas nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC (continued)

a. Settlement of Claim Trial from PT Jaya Makmur Bersama (continued)

Throughout 2024 and 2025, ITDC has engaged in several coordination efforts and correspondence with JMB as part of its voluntary efforts to comply with the court decision. These actions demonstrate that ITDC cannot be deemed negligent in fulfilling the contents of the court ruling.

As of December 31, 2025, ITDC has reversed the provision recognized in 2024 amounting to Rp22,650.

b. Completion of HPL Revocation Case 8 and 9 Desa Kuta, Nusa Tenggara Barat

On April 21, 2011, there was a State Administration Lawsuit with Case Register Number 19/G/ 2011/PTUN.MTR from Nurhuda (Plaintiff) to the Land Office of Central Lombok (Defendant) and ITDC (Defendant II Intervention) against the object of dispute:

- *Decision of the Head of the Land Office of Central Lombok Regency No. SK.01/TIKBPN/ 052.02/2011 dated April 12, 2011 regarding the rejection of the request for property rights on behalf of Nurhuda on land of 3.350 sqm located in Kuta Pujut.*
- *Decision of the Head of the Land Office of Central Lombok Regency No. SK.02/TIKBPN/052.02/ 2011 dated April 12, 2011 regarding the rejection of the request for property rights on behalf of Nurhuda on the land area of 17,960 sqm located in Kuta Pujut.*
- *Decision of the Head of the Land Office of Central Lombok Regency No. SK.03/TIKBPN/052.02/2011 dated April 12, 2011 regarding the rejection of the request for property rights on behalf of Nurhuda on the land area of 8,930 sqm located in Kuta Pujut.*
- *Right to Manage Certificate No. 08/ Desa Kuta, Measurement Letter No. 14/KTA/2010 dated January 30, 2010 covering an area of 9,895 sqm on behalf of PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) based in Nusa Dua Denpasar.*

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

b. Penyelesaian Perkara Pembatalan HPL 8 dan 9 Desa Kuta, Nusa Tenggara Barat (lanjutan)

Pada tanggal 21 April 2011, terdapat Gugatan Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2011/PTUN.MTR dari Nurhuda (Penggugat) kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) dan ITDC (Tergugat II Intervensi) terhadap objek sengketa (lanjutan):

- Sertifikat HPL No. 09/Desa Kuta, surat ukur No. 15/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010 seluas 45.884 m^2 atas nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar.

Terhadap Perkara tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan memerintahkan Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah) untuk mencabut Keputusan (SK dan Sertifikat HPL) sebagaimana disebut di atas.

Atas Putusan tersebut, ITDC mengajukan Banding, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, amarnya berbunyi menerima permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Atas Putusan tingkat Banding tersebut Nurhuda mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, amarnya berbunyi mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Nurhuda), membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Atas Putusan Kasasi tersebut, ITDC mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (“PK”) namun Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 25 PK/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014 menolak Peninjauan Kembali dari ITDC.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC (continued)

b. Completion of HPL Revocation Case 8 and 9 Desa Kuta, Nusa Tenggara Barat (continued)

On April 21, 2011, there was a State Administration Lawsuit with Case Register Number 19/G/ 2011/PTUN.MTR from Nurhuda (Plaintiff) to the Land Office of Central Lombok (Defendant) and ITDC (Defendant II Intervention) against the object of dispute (continued):

- *Right to Manage Certificate No. 09/Desa Kuta, letter No. 15/KTA/2010 dated January 30, 2010 covering 45,884 sqm on behalf of PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) based in Nusa Dua Denpasar.*

With regard to the Case, the Panel of Judges granted the plaintiff's claim in whole, and ordered the Defendant (Head of the Land Office of Central Lombok Regency) to revoke the Decree (Decision of the Head of the Land Office of Central Lombok Regency and Right to Manage Certificate) as mentioned above.

On the verdict, ITDC submitted an Appeal, and the Decision of the State Administrative High Court of Surabaya, states that it accepts the Defendant's Appeal and Defendant II Intervention/Complaint, and cancels the Decision of the State Administrative Court of Mataram.

On the Appeal decision, Nurhuda filed a Cassation Law Effort. The Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, states that it grants the request of the Cassation of the Cassation Appealant (Nurhuda), to cancel the Decision of the State Administrative High Court of Surabaya.

On the Decision of the Cassation, ITDC filed a Judicial Review Effort ("PK") but the Supreme Court through its decision No. 25/PK/TUN/2014 dated May 21, 2014 rejected ITDC's Judicial Review.

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

b. Penyelesaian Perkara Pembatalan HPL 8 dan 9 Desa Kuta, Nusa Tenggara Barat (lanjutan)

Berdasarkan Putusan PK tersebut telah dilakukan eksekusi dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, tentang Pembatalan Sertifikat HPL No. 08 dan 09/Desa Kuta Atas Nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Denpasar, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 21 September 2015.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 282/B/2016/ PT.TUN.SBY tanggal 17 Januari 2017, ITDC telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi namun Putusan Kasasi Nomor 246 PK/TUN/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang menolak Kasasi dari ITDC.

Per 3 Desember 2024, ITDC telah menyampaikan Surat Kuasa untuk pengajuan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali atau Upaya Hukum lainnya, berdasarkan Surat Kuasa No. 062/S.Ku/ITDC.01/X/2024 kepada Kejaksaan Tinggi NTB, untuk dapat bertindak mewakili kepentingan hukum ITDC dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.

Pada tanggal 8 Mei 2025, ITDC melalui Kejaksaan Tinggi NTB mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Nurhuda dan Abdullah Jufri sehubungan dengan kasus HPL 8 dan 9.

Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, proses persidangan masih berlangsung.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, ITDC mencatat provisi untuk perkara ini sebesar Rp1.458.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC (continued)

b. Completion of HPL Revocation Case 8 and 9 Desa Kuta, Nusa Tenggara Barat (continued)

Based on the Decision of the PK, execution has been conducted based on the Decree of the Head of the Regional Office of the National Land Agency of West Nusa Tenggara Province on the cancellation of Right to Manage certificates No. 08 and 09/Kuta Village on behalf of PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) based in Denpasar, located in Kuta Village, District Pujut, Central Lombok regency, West Nusa Tenggara Province, dated September 21, 2015.
Upon the Decision of the State Administrative High Court of Surabaya No. 282/B/2016/ PT.TUN.SBY dated January 17, 2017, ITDC has filed a Cassation Appeal Effort but the Decision of Cassation No. 246/PK/TUN/2017 dated June 19, 2017 rejected ITDC's Cassation.

As of December 3, 2024, ITDC has submitted a Power of Attorney for the filing of legal remedies in the form of Judicial Review or other legal efforts, based on Power of Attorney No. 062/S.Ku/ITDC.01/X/2024, to the High Prosecutor's Office of NTB, to act on behalf of ITDC's legal interests in resolving the said issue.

On 8 May 2025, ITDC, through the Prosecutor's Office of NTB, filed a tort claim against Nurhuda and Abdullah Jufri in connection with the HPL 8 and 9 case.

Until the completion date of these consolidated financial statements, the court proceedings are still ongoing.

As of December 31, 2025 and 2024, ITDC has recorded provision for this case amounted to Rp1,458.

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

c. Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Usin

Gugatan Perdata Nomor 31/PDT.G/2016/PN.Pya tanggal 20 Juni 2016 Penggugat atas nama Bapak Usin, pada Pengadilan Negeri Praya, terkait sengketa kepemilikan sebidang tanah dengan luas 16.934 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 178, Surat Ukur Nomor 47/SKD/2009 Tanggal 23 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tercatat atas nama Usin (Penggugat) terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tumpang tindih (overlapping) dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No.68/Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama ITDC yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar.

Atas Perkara tersebut Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah dengan luas 16.934 m2 bedasarkan sertifikat Hak Milik No. 178, Surat ukur Nomor 47/SKD/2009 tanggal 23 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok tengah, tercatat atas nama USIN (Penggugat) terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  Sebelah Utara: Tanah H. Ilham
  Sebelah Selatan: Tanah ITDC
  Sebelah Timur: Tanah ITDC
  Sebalah Barat: Tanah Kebango dan Tanah ITDC
- Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik atas tanah objek sengketa.
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sampai hari ini sejumlah Rp2.245.000 (nilai penuh).
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC (continued)

c. Settlement of Civil Lawsuit of Usin

Civil Lawsuit Number: 31/PDT.G/2016/PN.Pya dated June 20, 2016 plaintiff on behalf of Mr Usin, at the Praya District Court, over a land ownership dispute of 16,934 sqm based on the Certificate of Property Right No. 178, Measurement Letter Number 47/SKD/2009 dated May 23, 2009, issued by the Land Office of Central Lombok Regency, recorded on behalf of Usin (Plaintiff) located in Sukadana Village, Pujut Sub-district, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, overlapping with Hak Pengelolaan Lahan No.68/ Sengkol Village, Pujut Sub-district, Central Lombok District, West Nusa Tenggara Province, on behalf of ITDC domiciled in Nusa Dua, Denpasar.

On the Case the Panel of Judges gave the verdict with the following decision:

- *Declared the Plaintiff's claim to be partially granted;*
- *To declare a plot of land with an area of 16,934 sqm based on the Freehold Title No. 178, Measurement Letter Number 47/SKD/2009 dated May 23, 2009, issued by the National Land Affairs Office of Central Lombok, registered on behalf of USIN (Plaintiff) located in Sukadana Village, Pujut District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province with boundaries as follows:*
  North side: Land of H. Ilham
  South side: Land of ITDC
  South side: Land of ITDC
  West side: Kebango Land and ITDC Land
- *Declared the Plaintiff is the sole owner of the land of the disputed object.*
- *Punished the defendant to pay jointly of up to Rp2,245,000 (full amount).*
- *Refused the Plaintiff's claim aside and rest.*

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

c. Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Usin (lanjutan)

Atas putusan Pengadilan Negeri Praya Tersebut, ITDC melalui Kuasa Hukum Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengajukan Banding. Putusan Banding No.31/Pdt.G/2016/ PN.Pya dengan amar sebagai berikut:
Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;

- Menguatkan Putusan pengadilan Negeri Praya Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Pya, tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (nilai penuh).

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut, ITDC telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi namun Mahkamah Agung menolak kasasi ITDC berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2513 K/PDT/2017 tanggal 5 Maret 2018.

ITDC mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 November 2023. Mahkamah Agung telah memutus perkara memenangkan ITDC sebagai pemilik sah HPL 68 Desa Kuta melalui putusannya tanggal 29 April 2024 yang sekaligus membatalkan seluruh Putusan pengadilan di tingkat sebelumnya

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC (continued)

c. Settlement of Civil Lawsuit of Usin (continued)

Upon the verdict of the Praya District Court, ITDC through the Attorney of the State Attorney of Nusa Tenggara Barat, filed an appeal. Appeal Decision No.31/Pdt.G/2016/ PN.Pya with decision as follows:

Accepting an appeal from the appealant, originally the Defendant;

- *Strengthening the Decision of the Praya District Court Number 31/Pdt.G/2016/PN.Pya, dated December 15, 2016 appealed;*
- *Punishing the Appealant, originally Defendant, to pay a court fee on both levels of the court, which in the Appeals Level is set at Rp150,000 (full amount).*

Upon the Decision of the High Court of Mataram, ITDC has filed a Cassation Law Effort. However, Supreme Court rejected ITDC's Cassation based on the Decision of Cassation No. 2513K/PDT/2017 dated March 5, 2018.

ITDC filed a Judicial Review (PK) to the Supreme Court on November 24, 2023. The Supreme Court has issued verdict in favor of ITDC as the rightful owner of HPL 68 in Desa Kuta through its decision dated April 29, 2024, which also annulled all previous court decisions at lower levels.

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

d. Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Saye alias Amaq Maye/H. Maye

Gugatan Perdata Nomor 21/PDT.G/2023/PN.Pya tanggal 21 Juli 2023 Penggugat atas nama Bapak Saye alias Amaq Maye/H.Maye, pada Pengadilan Negeri Praya, terkait sengketa kepemilikan bidang tanah dengan luas 9.705 m2 yang merupakan sisa tanah milik Penggugat yang tidak pernah dipindahtangankan kepada ITDC atau pihak lainnya, terdaftar dalam SPPT NOP: 52.02.020.014.066.0003 atas nama Amaq Maye yang terletak di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No.74/Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama ITDC yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar.

Atas Perkara tersebut Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (nilai penuh).

Atas putusan Pengadilan Negeri Praya Tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Banding. Putusan Banding No. 222/PDT/2023/PT/MTR dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 20 November 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) (nilai penuh).

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC (continued)

d. Settlement of Civil Lawsuit of Saye alias Amaq Maye / H.Maye

Civil Lawsuit Number 21/PDT.G/2023/PN.Pya dated July 21, 2023. Plaintiff on behalf of Mr. Saye a.k.a Amaq Maye/H.Maye, at the Praya District Court, regarding a dispute over ownership of a plot of land with an area of 9,705 m2 which is the remaining land owned by The plaintiff, who was never transferred to ITDC or another party, is registered in SPPT NOP: 52.02.020.014.066.0003 in the name of Amaq Maye located in Songgong Hamlet, Mertak Village, Pujut District, Central Lombok Regency, which overlaps with the Certificate of Rights Management No.74/ Kuta Village, Pujut Sub-district, Central Lombok District, West Nusa Tenggara Province, on behalf of ITDC domiciled in Nusa Dua, Denpasar.

On the Case the Panel of Judges gave the verdict with the following decision:

- *Reject the Plaintiff's claim in its entirety;*
- *Sentenced the Plaintiff to pay court costs in the amount of Rp2,940,000 (two million nine hundred and forty thousand rupiah) (full amount).*

Upon the verdict of the Praya District Court's decision, the plaintiff's attorney filed an appeal. Appeal Decision No. 222/PDT/2023/PT/MTR with decision as follows:

- *Accept the appeal request from the original Appellant, the Plaintiff;*
- *Strengthen the decision of the Praya District Court Number 21/Pdt.G/2023/PN Pya dated 20 November 2023, which is requested to be appealed;*
- *Sentenced the original Appellant to the Plaintiff to pay court costs at both levels of court, which at the appeal level was determined at Rp 150,000 (one hundred and fifty thousand rupiah) (full amount).*

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

d. Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Saye alias Amaq Maye/H. Maye (lanjutan)

Atas putusan banding, Kuasa Hukum Amaq Maye kembali mengajukan Kasasi melalui Pengadilan Negeri Praya. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, berkas-berkas Para Pihak masih dalam tahap pemeriksaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa ITDC memiliki peluang yang besar untuk dimenangkan di dalam proses kasasi, dikarenakan ITDC memiliki bukti yang berbasis dokumen legal formal serta telah memenangkan proses hukum di tingkat Pengadilan Negeri Praya maupun banding di Pengadilan Tinggi Mataram. Oleh karenanya, ITDC tidak mencatakan provisi atas kasus ini per 31 Desember 2025.

e. Penyelesaian Perkara LUDA Lot H3 The Mandalika dengan PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika

PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika ("PRIA") bekerja sama dengan ITDC sejak tanggal 26 April 2016 berdasarkan LUDA dan amandemennya pada tanggal 9 April 2018.

Hingga waktu yang disepakati sesuai LUDA, PRIA tidak melaksanakan pembangunan di Lot H3, Mandalika. PRIA juga mengajukan surat pemberitahuan tidak sanggup untuk melanjutkan LUDA, sehingga ITDC memutuskan pengakhiran LUDA. Namun atas pengakhiran tersebut, tanggal 12 Januari 2023, PRIA mengajukan Gugatan Arbitrase ke Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") terkait pengakhiran LUDA yang dilakukan oleh ITDC.

Dalam *Notice of Arbitration* tanggal 12 Januari 2023, PRIA menuntut ITDC untuk mengganti semua pengeluarannya selama pelaksanaan LUDA termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya pengembangan, konstruksi dan operasional, ditambah bunga dan ganti rugi akibat kelalaian, wanprestasi, pelanggaran perjanjian dan kesalahan representasi yang dilakukan oleh ITDC.

Pada 7 September 2023, ITDC menyampaikan Preliminary Response terhadap Notice of Arbitration, dan pada 4 Maret 2024, SIAC menetapkan Theodoor Bakker sebagai Ketua Tribunal Arbitrase.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC (continued)

d. Settlement of Civil Lawsuit of Saye alias Amaq Maye / H.Maye (continued)

Following the appeal decision, Amaq Maye's Legal Counsel filed a Cassation through the Praya District Court. Until the issuance date of the consolidated financial statements, the case files of the Parties are still under review.

Management believes that ITDCy has a strong position to prevail in the cassation process, supported by formal legal documentary evidence and the ITDC's prior success in the legal proceedings at both the Praya District Court and the appeal level at the Mataram High Court. Accordingly, ITDCs has not recognized a provision for this case as of December 31, 2025.

e. Case Settlement of LUDA Lot H3 The Mandalika with PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika

PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika ("PRIA") enterd into cooperation with ITDC since April 26, 2016 based on LUDA and its amendment dated April 9, 2018.

Until the time agreed on LUDA, PRIA has not commence construction in Lot H3, Mandalika. PRIA also has submitted notification letter in which they are unable to continue LUDA, thus ITDC decided to terminate LUDA. Yet, due to such termination, on January 12, 2023, PRIA submitted arbitration claim to Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") related to termination of LUDA conducted by ITDC,

Based on its Notice of Arbitration dated January 12, 2023, PRIA demand ITDC to reimburse all expenditures during the course of LUDA including but not limited to development cost, construction and operation, added by interest and compensation due to negligence, default, breach of agreement and representation error conducted by ITDC.

On September 7, 2023, ITDC submitted a Preliminary Response to the Notice of Arbitration, and on March 4, 2024, SIAC appointed Theodoor Bakker as the Chairman of the Arbitral Tribunal.

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

e. Penyelesaian Perkara LUDA Lot H3 The Mandalika dengan PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika (lanjutan)

Sesuai dengan *Statement of Claim* PRIA tanggal 29 Mei 2024, PRIA menggugat ITDC sebesar:

- AS$2.825.723,51 (nilai penuh) atas biaya yang telah dikeluarkan PRIA.
- Ganti rugi sebesar AS$14.000.000 (nilai penuh) atas hilangnya keuntungan PRIA.
- Pengakhiran LUDA; dan/atau
- Ganti rugi lain yang dianggap tepat oleh Majelis.

SIAC telah memerintahkan para pihak (ITDC dan PRIA) untuk membayar deposit arbitrase sebesar SGD20.000 (nilai penuh). Namun ITDC dan PRIA tidak melakukan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan. Atas hal tersebut, pada 12 Juni 2025, Tribunal SIAC menghentikan proses arbitrase dan menganggap klaim dari Penggugat (PRIA) telah dicabut.

f. Penyelesaian Perkara LUDA Lot IC1 The Mandalika dengan PT Perusahaan Air Indonesia Amerika

PT Perusahaan Air Indonesia Amerika ("PAIA") merupakan mitra kerjasama ITDC pada Lot IC1 The Mandalika untuk membangun Fasilitas dan infrastruktur SWRO, berdasarkan LUDA tanggal 26 April 2016.

Pada 21 Maret 2023, PAIA menyampaikan *Notice of Arbitration* kepada ITDC yang menyampaikan bahwa ITDC tidak mendukung PAIA dalam mencari calon investor untuk masuk ke PAIA.

Dalam *Notice of Arbitration*, PAIA menuntut agar ITDC mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PAIA dalam rangka pelaksanaan LUDA, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh biaya pengembangan, pembangunan dan operasional, ditambah dengan bunga dan ganti rugi.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC (continued)

e. Case Settlement of LUDA Lot H3 The Mandalika with PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika (continued)

Based on PRIA's Statement of Claim dated May 29, 2024, PRIA demand ITDC amounted to:

- *US$2,825,723.51 (full amount) related to PRIA's sunk cost.*
- *Compensation amounted to US$14,000,000 (full amount) related to PRIA's loss of income.*
- *Termination of LUDA; and/or*
- *Other compensation deemed appropriate by the tribunal.*

SIAC ordered the parties (ITDC and PRIA) to pay an arbitration deposit in the amount of SGD20,000 (full amount). However, neither the ITDC nor PRIA made the payment within the prescribed deadline. Accordingly, on 12 June 2025, the SIAC Tribunal terminated the arbitration proceedings and deemed the Claimant's (PRIA's) claim to have been withdrawn.

f. Settlement of LUDA Case IC1 The Mandalika with PT Perusahaan Air Indonesia Amerika

PT Perusahaan Air Indonesia Amerika ("PAIA") is ITDC's cooperation partner on Lot IC1 The Mandalika to develop SWRO Infrastructure and Facility based on LUDA dated April 26, 2016.

On March 21, 2023, PAIA submitted Notice of Arbitration to ITDC expressing that ITDC did not support PAIA to find potential investor to join PAIA.

In the Notice of Arbitration, PAIA demands ITDC to reimburse all PAIA costs in relation to the implementation of LUDA, including but not limited to development cost, construction and operation, added by interest and compensation.

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

ITDC (lanjutan)

f. Penyelesaian Perkara LUDA Lot IC1 The Mandalika dengan PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (lanjutan)

SIAC telah memerintahkan para pihak (ITDC dan PAIA) untuk membayar deposit arbitrase sebesar SGD11.909 (nilai penuh). Namun ITDC dan PRIA tidak melakukan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan. Atas hal tersebut, pada 23 April 2025, Tribunal SIAC menghentikan proses arbitrase dan menganggap klaim dari Penggugat (PRIA) telah dicabut..

g. Penyelesaian Perkara penghentian perjanjian kerja sama pembangunan infrastruktur antara INU dengan PAIA

Pada tahun 2025, INU menghadapi Perkara Perdata No. 86/Pdt.G/2025/PN Dps yang diajukan oleh PAIA terkait penghentian Perjanjian Kerja Sama pembangunan infrastruktur antara PAIA dan INU. PAIA meminta pengadilan mewajibkan INU melanjutkan pembangunan serta menuntut pembayaran kerugian sebesar Rp217.343.438.042 (nilai penuh). Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 September 2025, majelis hakim telah menolak gugatan PAIA tersebut dan memenangkan INU.

Sarinah

Perkara hukum bidang tanah

Sarinah memiliki perkara hukum atas bidang tanah miliknya dengan dengan berbagai pihak. Upaya hukum oleh masing-masing pihak telah dilakukan.

Gugatan atas kepemilikan tanah milik Sarinah yang berasal dari SHGB No. 250/Gondangdia telah dimenangkan oleh Sarinah berdasarkan salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 191 PKlPdt/2004.

Gugatan atas kepemilikan tanah milik Sarinah dengan Ny. Meta Situmorang Tobing Cs (sebagai penggugat) masih dalam proses perkara hukum yang terakhir dimenangkan penggugat di tingkat kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 8 Maret 2024. Selanjutnya, pada tanggal 4 September 2024, Sarinah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

ITDC (continued)

f. Settlement of LUDA Case IC1 The Mandalika with PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (continued)

SIAC ordered the parties (ITDC and PAIA) to pay an arbitration deposit in the amount of SGD11,909 (full amount). However, neither the ITDC nor PRIA made the payment within the prescribed deadline. Accordingly, on April 23, 2025, the SIAC Tribunal terminated the arbitration proceedings and deemed the Claimant's (PRIA's) claim to have been withdrawn.

g. Settlement of the termination of the infrastructure development cooperation agreement between INU and PAIA

In 2025, INU faced Civil Case No. 86/Pdt.G/2025/PN Dps filed by PAIA in relation with the termination of the Cooperation Agreement for infrastructure development between PAIA and INU. PAIA requested the court to order INU to resume the construction works and claimed damages amounting to Rp217,343,438,042 (full amount). Based on the decision of the Denpasar District Court dated September 15, 2025, the panel of judges rejected PAIA's claims and ruled in favor of INU.

Sarinah

Legal case of land

Sarinah has a legal case regarding her land with various parties. Legal efforts by each party have been made.

The lawsuit regarding the ownership of land belonging to Sarinah, originating from SHGB No. 250/Gondangdia, has been won by Sarinah based on the copy of the Supreme Court Review Decision No. 191 PKlPdt/2004.

The lawsuit regarding the ownership of land belonging to Sarinah against Mrs. Meta Situmorang Tobing and others (as the plaintiffs) is still in the legal process, with the plaintiffs having won at the cassation level in the Supreme Court on March 8, 2024. Subsequently, on September 4, 2024, Sarinah filed a Review Petition with the Supreme Court

48. KONTINJENSI DAN KASUS HUKUM (lanjutan)

HIN

Perkara Perdata No. 363/PDT.G/ 2012/PN.JKT.UT atas objek tanah sesuai Sertifikat HGB No.4480 dan No.4481 di Kelapa Gading Jakarta Utara milik HIN sudah diputus pada tingkat kasasi, tetapi saat ini amar/salinan putusannya masih belum dikeluarkan. Perkara ini bermula dari rencana Dinas Bina Marga (PU) Provinsi DKI Jakarta akan memberikan ganti rugi atas tanah milik HIN yang terkena rencana jalan koridor busway. Pembayaran ganti rugi tersebut belum dapat dibayarkan karena objek tanah tersebut masih dalam sengketa/perkara No. 577/PDT/2009/PT.DKI tanggal 2 Agustus 2010 antara HIN dengan Ahli waris Alm H. Hanafi. Oleh karena itu, diajukan Permohonan Penetapan Konsinyasi atau penitipan ganti rugi di Pengadilan Negeri. Perkara ini sebenarnya telah selesai dengan adanya Putusan Kasasi No. 1459 k/Pdt/2013 tanggal 26 Agustus 2016 karena objek konsinyasi adalah HGB No. 4480 dan No. 4481, namun karena adanya Perkara No. 588/Pdt.G/ 2015/PN.JKT.UT maka status hukum atas objek tanah sesuai SHGB No. 4480 dan No. 4481 di Kelapa Gading masih sengketa dan saat ini menunggu putusan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

48. CONTINGENCIES AND LAW CASE (continued)

HIN

Civil Case No. 363/PDT.G/2012/PN.JKT.UT regarding Land Objects According to HGB Certificates No.4480 and No.4481 in Kelapa Gading, North Jakarta, belonging to HIN have been decided at the cassation, but at this time the order/decision has not been issued. It starts from DKI Jakarta Provincial Toll Road (PU) plans to provide compensation for owned land HIN was affected by the planned busway corridor road. Compensation payment has not been received because the land object is still in dispute/case No. 577/PDT/2009/PT.DKI dated August 2, 2010, between HIN and the heirs of the late H. Hanafi. Therefore handed over an application for Determination of Consignment or Compensation in the District Court. This matter has been equipped with the Decision of Cassation No. 1459 k/Pdt/2013 dated August 26, 2016, because the object of the deposit is HGB No. 4480 and No. 4481, but because of Case No. 588/Pdt.G/2015/ PN.JKT.UT, the legal status of the land object is SHGB No. 4480 and No. 4481 in Kelapa Gading is still a dispute and is currently pending at the Cassation level in the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL

Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

i. Risiko kredit

Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, investasi jangka pendek, dan investasi jangka panjang. Grup mengelola risiko kredit terkait penempatan saldo rekening di bank hanya dengan menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.

Grup mengendalikan eksposur risiko kredit terkait dengan piutang dengan menetapkan kebijakan, dimana persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru dan kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Hal ini dikarenakan seluruh pendapatan usaha Grup dapat ditagihkan secara tepat waktu.

49. FINANCIAL AND CAPITAL RISKS MANAGEMENTS

Financial Risk Management Policy

i. Credit risk

The Group's credit risk is inherent in cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, other receivables, contract assets, short-term investment, and long-term investment. The Group manages credit risk related to placement of bank account balances only in reputable banks and has good predicate to reduce the possibility of losses due to bank bankruptcy.

The Group manages credit risk exposure related to trade receivables by implement policies whereby the approval or rejection of new credit contracts and compliance with these policies is monitored by the Board of Directors. As part of the process of approval or rejection, the customer's reputation and track record are taken into consideration. Currently, there are no significant credit risks. This is because of all the Group's revenues can be collected on time.

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (lanjutan)

49. FINANCIAL AND CAPITAL RISKS MANAGEMENTS (continued)

Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risk Management Policy (continued)

i. Risiko kredit (lanjutan)

i. Credit risk (continued)

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statements of financial position.

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Kas dan setara kas	9.517.234	12.092.579	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya - bagian lancar	422.140	2.730.444	*Restricted cash- current portion*
Investasi jangka pendek	131.431	142.374	*Short-term investments*
Piutang usaha	2.879.396	2.614.627	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	190.735	104.626	*Other receivables*
Aset kontrak	630.766	719.210	*Contract assets*
Investasi jangka panjang	79.879	74.837	*Long term investments*
Kas yang dibatasi penggunaannya - bagian tidak lancar	129.500	129.500	*Restricted cash - non-current portion*
Jumlah	**13.981.081**	**18.608.197**	***Total***

ii. Risiko likuiditas

ii. Liquidity risk

Pada saat ini, Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Grup memiliki kas dan setara kas (Catatan 4) yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Currently, the Group expect able to pay all liabilities at due date. To fulfill commitments on cash, the Group Expect its operating activities to generate sufficient cash inflows. In addition, the Group has cash and cash equivalents (Note 4) which are sufficient to meet liquidity requirements.

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (lanjutan)

Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

ii. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

49. FINANCIAL AND CAPITAL RISKS MANAGEMENTS (continued)

Financial Risk Management Policy (continued)

ii. Liquidity risk (continued)

The following table analyzes financial liabilities measured at amortized cost based on their remaining maturity:

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*				
	< 1 tahun/ *< 1 year*	**1-2 tahun/ *1-2 years***	**> 2 tahun/ *> 2 years***	**Jumlah/ *Total***	
Utang usaha	1.388.501	-	-	1.388.501	*Trade payables*
Utang lain-lain	2.182.359	-	-	2.182.359	*Other payables*
Beban akrual	4.549.174	-	-	4.549.174	*Accrued expenses*
Utang bank dan lembaga lembaga keuangan lainnya jangka pendek	73.946	-	-	73.946	*Short-term bank and other financial institutions*
Utang bank dan lembaga lembaga keuangan lainnya jangka panjang	4.747.011	9.838.670	22.916.408	37.502.089	*Long-term bank and other financial institutions*
Utang obligasi dan sukuk	2.302.000	1.942.405	4.756.481	9.000.886	*Bonds payable and sukuk*
Liabilitas sewa	166.773	186.482	876.878	1.230.133	*Lease liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	318.331	318.331	*Other non-current liabilities*
Jumlah	**15.409.764**	**11.967.557**	**28.868.098**	**56.245.419**	***Total***

	31 Desember 2024//*December 31, 2024*				
	< 1 tahun/ *< 1 year*	**1-2 tahun/ *1-2 years***	**> 2 tahun/ *> 2 years***	**Jumlah/ *Total***	
Utang usaha	1.380.663	-	-	1.380.663	*Trade payables*
Utang lain-lain	2.807.726	-	-	2.807.726	*Other payables*
Beban akrual	3.811.539	-	-	3.811.539	*Accrued expenses*
Utang bank dan lembaga lembaga keuangan lainnya jangka pendek	193.047	-	-	193.047	*Short-term bank and other financial institutions*
Utang bank dan lembaga lembaga keuangan lainnya jangka panjang	4.491.948	3.049.396	34.540.669	42.082.013	*Long-term bank and other financial institutions*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	159.000	3.897.932	5.007.155	9.064.087	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Liabilitas sewa	141.165	229.493	587.465	958.123	*Lease liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	522.212	449.052	971.264	*Other non-current liabilities*
Jumlah	**12.985.088**	**7.699.033**	**40.584.341**	**61.268.462**	***Total***

iii. Risiko mata uang

Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 .

Grup mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan pengawasan secara periodik terhadap pergerakan nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan.

iii. Currency risk

There was no currency hedging activity as of December 31, 2025 and 2024.

The Group manages its exposure to foreign currencies by periodically monitoring movements in foreign currency exchange rates so that it can take necessary actions.

iv. Risiko suku bunga

Grup terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Untuk meminimalkan risiko tingkat suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Grup.

iv. Interest rate risk

The Groups is exposed to interest rate risk primarily related to financial liabilities. To minimize interest rate risk, the Group manages interest expense by monitoring the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on the Group.

49. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (lanjutan)

49. FINANCIAL AND CAPITAL RISKS MANAGEMENTS (continued)

Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risk Management Policy (continued)

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan sebagai berikut:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably changes of interest rate on loans, with all other variable held constant, with the effect to the consolidated income before corporate tax expense:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan			*Effect on income (loss) before income tax*
Perubahan tingkat suku bunga (1%)	465.769	513.391	*Changes in interest rates (1%)*
Perubahan tingkat suku bunga (-1%)	(465.769)	(513.391)	*Change in interest rates (-1%)*

Manajemen Permodalan

Capital Management

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Grup mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

The Group's objective when managing capital is to protect the Group's ability to maintain business continuity, so the entity can provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to manage an optimal capital structure to minimize the cost of capital effectively. In order to manage the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends, issue new shares or increase / decrease the amount of debt.

50. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

50. SUPPLEMENTARY INFORMATION OF CASH FLOWS

Transaksi Non Kas

Non Cash Transaction

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas investasi dan pendanaan adalah sebagai berikut:

Supporting information for the statement of cash flows in connection with investing and financing activities is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Penambahan penyertaan saham melalui inbreng	5.664.112	-	*Addition of invesment in shares through inbreng*
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	851.016	20.077	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*
Penambahan aset tetap melalui kapitalisasi biaya pinjaman	83.640	171.652	*Additional fixed assets through capitalization of borrowing costs*

50. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

50. SUPPLEMENTARY INFORMATION OF CASH FLOWS (continued)

Transaksi Non Kas (lanjutan)

Non Cash Transaction (continued)

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas investasi dan pendanaan adalah sebagai berikut:

Supporting information for the statement of cash flows in connection with investing and financing activities is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Pengurangan aset hak-guna melalui penyesuaian liabilitas sewa	(19.935)	-	*Deductions of right-of-use assets throught lease liabilities adjustment*
Modifikasi kontrak liabilitas sewa	(226.125)	-	*Contract modifications of lease liabilities*
Perolehan entias HIPRO melalui pertukaran saham	-	1.214.750	*Acquisition of HIPRO through share swap*

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, *termasuk* perubahan kasnya. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below detail changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

			Non-arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2025/ *January 1, 2025*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Selisih kurs/ *Foreign exchange difference***	**Lainnya/ *Other***	**31 Desember 2025/ *December 31, 2025***	
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya – jangka pendek	193.047	(119.101)	-	-	73.946	*Short-terms bank and other financial institutions loans*
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya – jangka panjang	42.082.013	(4.579.924)	-	-	37.502.089	*Long-terms bank and other financial institutions loans*
Utang obligasi dan sukuk	9.064.087	(159.000)	-	95.799	9.000.886	*Bonds payable and sukuk*
Liabilitas sewa	958.123	(438.092)	-	710.102	1.230.133	*Lease liabilities*
Jumlah	**52.297.270**	**(5.296.117)**	**-**	**805.901**	**47.807.054**	***Total***

			Non-arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Selisih kurs/ *Foreign exchange difference***	**Lainnya/ *Other***	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya – jangka pendek	333.920	(188.204)	-	47.331	193.047	*Short-terms bank and other financial institutions loans*
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya – jangka panjang	43.129.579	(1.270.821)	-	223.255	42.082.013	*Long-terms bank and other financial institutions loans*
Utang obligasi dan sukuk	7.893.748	1.222.260	-	(51.921)	9.064.087	*Bonds payable and sukuk*
Liabilitas sewa	996.785	(380.457)	-	341.795	958.123	*Lease liabilities*
Jumlah	**52.354.032**	**(617.222)**	**-**	560.460	**52.297.270**	***Total***

51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

a. Penambahan Modal di HIN

Berdasarkan Akta No. 44 tanggal 31 Desember 2025 oleh notaris Dwitya Aziza, SH, M.Kn, sebagai pengganti Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H. para Pemegang Saham HIN menyetujui:

1) Peningkatan modal dasar pada HIN dari semula Rp400.000 menjadi Rp2.500.000.
2) Penambahan/peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp586.000 yang bersumber dari konversi piutang pokok yaitu pinjaman/shareholder loan (SHL) Perusahaan sebesar Rp432.858 dan setoran uang sebesar Rp153.142 oleh Perusahaan.

Pemberitahuan perubahaan-perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0002865.AH.01.02 Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026.

b. Penambahan Modal di TWC

Berdasarkan Akta No. 153 tanggal 31 Desember 2025 oleh notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., M.Hum., para Pemegang Saham TWC menyetujui penambahan/peningkatan modal ditempatkan dan disetor TWC yang diteruskan kepada BHIVA sebesar Rp60.500 yang bersumber dari setoran uang Perusahaan.

Pemberitahuan perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0018861 tahun 2026 tanggal 23 Januari 2026.

c. Penambahan Modal di Sarinah

Berdasarkan Akta No. 44 tanggal 31 Desember 2025 oleh notaris Dwitya Aziza, SH, M.Kn, sebagai pengganti Notaris Titiek Irawati Sugianto, S.H. para Pemegang Saham HIN menyetujui:

1) Peningkatan modal dasar pada Sarinah dari semula Rp100.000 menjadi Rp700.000.
2) Penambahan/peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp529.279 yang bersumber dari konversi piutang pokok yaitu pinjaman/shareholder loan (SHL) Perusahaan

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Capital addition in HIN.

Based on Deed No. 44 dated December 31, 2025 of notary Dwitya Aziza, SH, M.Kn, as a replacement of notary Titiek Irawati Sugianto, S.H, the Shareholders of HIN approved:

1) The increase in authorized capital of Sarinah from Rp400,000 to Rp2,500,000.
2) The increase in issued and paid up capital amounted to Rp586,000 from converting the principle receivable/shareholder loan (SHL) of the Company amounted to Rp432,858 and cash injection of Rp153,142 by the Company.

The said amendments notification were approved by the Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0002865.AH.01.02 Year 2026 dated January 21, 2026.

b. Capital addition in TWC

Based on Deed No. 153 dated December 31, 2025 of notary Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., M.Hum., the Shareholders of TWC approved the increase in TWC's issued and paid up capital which also to be transfer to BHIVA amounted to Rp60,500 from cash injection by the Company.

The said amendments notification were received by the Minister of Law and Human Rights in its Letter No. AHU-AH.01.03-0018861 Year 2026 dated January 23, 2026.

c. Capital addition in Sarinah

Based on Deed No. 44 dated December 31, 2025 of notary Dwitya Aziza, SH, M.Kn, as a replacement of notary Titiek Irawati Sugianto, S.H, the Shareholders of HIN approved:

1) The increase in authorized capital of Sarinah from Rp100,000 to Rp700,000.
2) *The increase in issued and paid up capital amounted to Rp529,279 from converting the principle receivable/shareholder loan (SHL) of the Company.*

51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

c. Penambahan Modal di Sarinah (lanjutan)

Pemberitahuan perubahaan-perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0003260.AH.01.02 Tahun 2026 tanggal 23 Januari 2026.

d. Penambahan Modal di ITDC

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tentang Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor serta Perubahan Anggaran Dasar ITDC yang disahkan dengan Akta Notaris Desman S.H, M.Hum No. 91 tanggal 31 Desember 2025, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp275.000 yang bersumber dari konversi piutang pokok yaitu pinjaman/*shareholder loan* (SHL) Perusahaan (Persero) kepada ITDC.

Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0019462 tahun 2026 tanggal 23 Januari 2026.

e. Pembiayaan Fasilitas Kredit Sindikasi Injourney Group Financial Solution ("IGFS")

Perusahaan telah menetapkan Mandiri selaku Mandated Lead Arranger ("MLA") untuk pembentukan fasilitas kredit sindikasi pada tanggal 6 Februari 2025 dan telah menandatangani Surat Mandat pada tanggal 15 April 2025.

Mandiri melalui surat tanggal 23 Februari 2026 menyampaikan alokasi partisipasi pembiayaan final sebesar Rp48.427.950 kepada Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

c. Capital addition in Sarinah (continued)

The said amendments notification were approved by the Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0003260.AH.01.02 Year 2026 dated January 23, 2026.

d. Capital addition in ITDC

Based on the Resolution of the Company's Shareholders regarding the Approval of the Increase in Issued and Paid-up Capital and the Amendment of the ITDC's Articles of Association, which was legalized by Notarial Deed of Desman, S.H., M.Hum No. 91 dated December 31, 2025, the shareholders approved an increase in issued and paid-up capital amounting to Rp275,000, sourced from the conversion of principal receivables, namely the shareholder loan (SHL) of the Company to the ITDC (Note 19).

The said amendments notification were received by the Minister of Law and Human Rights in its Letter No. AHU-AH.01.03-0019462 Year 2026 dated January 23, 2026.

e. Syndicate Credit Facility Refinancing Injourney Group Financial Solution ("IGFS)

The Company has appointed Mandiri as the Mandated Lead Arranger ("MLA") for the establishment of the syndicated credit facility on February 6, 2025, and has signed the Mandate Letter on April 15, 2025.

Mandiri through a letter dated February 23, 2026, communicated the final financing participation allocation of Rp48,427,950 to the Company with the following details:

51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

e. Pembiayaan Fasilitas Kredit Sindikasi Injourney Group Financial Solution ("IGFS") (lanjutan)

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

e. Syndicate Credit Facility Refinancing Injourney Group Financial Solution ("IGFS) (continued)

Bank Peserta/ ***Participant Banks***	**Alokasi Porsi Pembiayaan Fasilitas Kredit Sindikasi dan Nama Fasilitas Kredit per Entitas/** ***Allocation of Financing Portions for Syndicated Credit Facilities and Credit Facility Names per Entity***						
	Perusahaan	**AP Indonesia**	**ITDC**	**TWC**	**HIN**	**Sarinah**	**Subjumlah per Bank Peserta/** ***Subtotal per Participant Banks***
Mandiri	Rp258.430 (TL I Refinancing) dan Rp225.000 (TL II CDR)	Rp3.066.546 (TL I Repackaging), Rp7.506.000 (TL II Repackaging) dan Rp4.625.000 (TL II Capex)	Rp400.000 (TL I Refinancing), Rp75.000 (TL II Capex), dan Rp117.876 (Non-Cash Loan)	-	Rp291.753 (KI I Refinancing) dan Rp100.000 (KI II Capex)	Rp41.001 (KI Refinancing)	**Rp16.706.606**
BRI	Rp48.130 (TL I Refinancing)	Rp571.142 (TL I Repackaging), Rp1.459.177 (TL II Repackaging), dan Rp625.000 (TL II Capex)	Rp50.000 (TL I Refinancing) dan Rp147.345 (Non-Cash Loan)	-	-	-	**Rp2.900.794**
BNI	-	Rp1.336.121 (TL I Repackaging), Rp1.918.900 (TL II Repackaging), dan Rp1.474.000 (TL II Capex)	-	-	-	Rp25.999 (KI Refinancing)	**Rp4.755.021**
BSI	-	Rp396.804 (TL I Repackaging) dan Rp1.502.734 (TL II Repackaging)	-	-	-	-	**Rp1.899.538**
SMI	Rp41.680 (TL I Refinancing) dan Rp115.000 (TL II CDR)	Rp918.964 (TL I Repackaging), Rp3.206.381 (TL II Repackaging), dan Rp2.333.000 (TL II Capex)	-	Rp200.000 (TL Capex)	-	-	**Rp6.815.025**
SMI Syariah	-	Rp500.000 (TL II Capex)	-	-	-	-	**Rp500.000**

51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

e. Pembiayaan Fasilitas Kredit Sindikasi Injourney Group Financial Solution ("IGFS") (lanjutan)

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

e. Syndicate Credit Facility Refinancing Injourney Group Financial Solution ("IGFS) (continued)

Bank Peserta/ ***Participant Banks***	**Alokasi Porsi Pembiayaan Fasilitas Kredit Sindikasi dan Nama Fasilitas Kredit per Entitas/** ***Allocation of Financing Portions for Syndicated Credit Facilities and Credit Facility Names per Entity***						
	Perusahaan	**AP Indonesia**	**ITDC**	**TWC**	**HIN**	**Sarinah**	**Subjumlah per Bank Peserta/** ***Subtotal per Participant Banks***
BTN	Rp403.240 (TL I Refinancing)	Rp328.100 (TL I Repackaging), Rp2.168.096 (TL II Repackaging), dan Rp488.000 (TL II Capex)	Rp88.407 (Non-Cash Loan)	Rp214.000 (TL Capex)	-	-	**Rp3.689.843**
BSN	-	Rp560.171 (TL I Repackaging)	-	-	-	-	**Rp560.171**
BCA	Rp51.371 (TL I Refinancing) dan Rp110.000 (TL II CDR)	Rp302.315 (TL I Repackaging), Rp2.148.995 (TL II Repackaging), dan Rp277.000 (TL II Capex)	-	-	-	Rp13.000 (KI Refinancing)	**Rp2.902.681**
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	Rp1.111.451 (TL I Repackaging), Rp443.475 (TL II Repackaging), dan Rp200.000 (TL II Capex)	-	-	-	-	**Rp1.754.926**
Mega	Rp29.083 (TL I Refinancing) dan Rp25.000 (TL II CDR)	Rp140.844 (TL I Repackaging), Rp282.763 (TL II Repackaging), dan Rp203.000 (TL II Capex)	Rp194.000 (TL II Capex)	-	Rp385.000 (KI II Capex)	-	**Rp1.259.689**
Mega Syariah	-	Rp23.675 (TL I Repackaging) dan Rp98.850 (TL II Repackaging)	Rp650.000 (TL I Refinancing) dan Rp23.000 (TL II Capex)	-	-	-	**Rp795.524**
Allo Bank	Rp29.083 (TL I Refinancing) dan Rp25.000 (TL II CDR)	Rp319.452 (TL II Repackaging) dan Rp100.000 (TL II Capex)	Rp81.000 (TL II Capex)	-	Rp300.000 (KI II Capex)	-	**Rp854.535**

51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

e. Pembiayaan Fasilitas Kredit Sindikasi Injourney Group Financial Solution ("IGFS") (lanjutan)

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

e. Syndicate Credit Facility Refinancing Injourney Group Financial Solution ("IGFS) (continued)

Bank Pesertal *Participant Banks*	**Alokasi Porsi Pembiayaan Fasilitas Kredit Sindikasi dan Nama Fasilitas Kredit per Entitas/ *Allocation of Financing Portions for Syndicated Credit Facilities and Credit Facility Names per Entity***						
	Perusahaan	**AP Indonesia**	**ITDC**	**TWC**	**HIN**	**Sarinah**	**Subjumlah per Bank Peserta/ *Subtotal per Participant Banks***
Maybank	-	Rp352.875 (TL I Repackaging), Rp199.780 (TL II Repackaging), dan Rp350.000 (TL II Capex)	-	-	Rp97.578 (KI I Refinancing)	-	**Rp1.000.232**
Muamalat	-	Rp71.026 (TL I Repackaging), Rp129.216 (TL II Repackaging), dan Rp200.000 (TL II Capex)	Rp100.000 (TL I Refinancing)	-	-	-	**Rp500.242**
Bank DKI	-	Rp89.260 (TL I Repackaging), Rp604.553 (TL II Repackaging), dan Rp252.000 (TL II Capex)	-	-	-	-	**Rp945.812**
BPD DIY	-	Rp151.448 (TL II Repackaging)	-	-	Rp58.788 (KI I Refinancing)	-	**Rp210.236**
BPD Papua	-	Rp299.504 (TL II Repackaging)	-	-	-	-	**Rp299.504**
BPD Jawa Tengah	-	Rp66.688 (TL I Repackaging)	-	-	Rp10.880 (KI I Refinancing)	-	**Rp77.568**
JUMLAH	**Rp861.017 (TL I Refinancing) dan Rp500.000 (TL II CDR)**	**Rp9.335.982 (TL I Repackaging), Rp22.439.323 (TL II Repackaging), dan Rp11.627.000 (TL II Capex)**	**Rp1.200.000 (TL I Refinancing), Rp373.000 (TL II Capex), dan Rp353.628(Non-Cash Loan)**	**Rp414.000 (TL Capex)**	**Rp459.000 (KI I Refinancing) dan Rp785.000 (KI II Capex)**	**Rp80.000 (KI Refinancing)**	**Rp48.427.950**

51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

e. Pembiayaan Fasilitas Kredit Sindikasi Injourney Group Financial Solution ("IGFS") (lanjutan)

Pada tanggal 27 Februari 2026, HIN telah melakukan penarikan fasilitas pinjaman sebesar Rp450.000 dan telah digunakan untuk pelunasan atas fasilitas pinjaman eksisting.

Pada tanggal 3 Maret 2026, API Indonesia telah melakukan penarikan fasilitas pinjaman sebesar Rp31.775.305 dan telah digunakan untuk pelunasan atas fasilitas pinjaman eksisting.

Pada Tanggal 9 Maret 2026, Perusahaan telah melakukan penarikan fasilitas pinjaman sebesar Rp861.017 dan telah digunakan untuk pelunasan atas fasilitas pinjaman eksisting.

f. Pengalihan Kepemilikan 1% Saham seri A Dwiwarna kepada BP BUMN

Pada tanggal 5 Januari 2026, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Nomor 28 Tahun 2026 dan Nomor SK.025/DI-DAM/DO/2026, para Pemegang Saham Perusahaan memutuskan antara lain hal-hal berikut:

a. Menyetujui pengalihan 786.567 lembar saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh), atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp786.567 milik PT Danantara Asset Management (DAM) pada Perseroan kepada Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN yang klasifikasinya diubah menjadi Saham Seri A Dwiwarna sehingga kepemilikan saham BP BUMN pada Perseroan menjadi 1%.
b. Kepala BP BUMN dalam kedudukannya selaku wakil Negara RI, menyatakan menerima pengalihan saham milik DAM pada Perseroan, dengan jumlah kepemilikan BP BUMN sebesar 1%.

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

e. Syndicate Credit Facility Refinancing Injourney Group Financial Solution ("IGFS) (continued)

On February 27, 2026, HIN has drawdown the loan facility amounting to Rp450,000, which has been utilized for the repayment of their existing loan facility.

On March 3, 2026, AP Indonesia has drawdown the loan facility amounting to Rp31,775,305, which has been utilized for the repayment of their existing loan facility.

On March 9, 2026, the Company has drawdown the loan facility amounting to Rp861,017, which has been utilized for the repayment of the existing loan facility.

f. Transfer of 1% Seri A Dwiwarna shares ownership to BP BUMN

On January 5, 2026, based on the Company's Shareholders' Resolutions Number 28 Tahun 2026 and Decree Number SK.025/DI-DAM/DO/2026, the Shareholders of the Company resolved the following, among others:

a. Approving the transfer of 786,567 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000,(full amount) or a total nominal value of Rp786,567, owned by PT Danantara Asset Management (DAM) in the Company to the Republic of Indonesia through BP BUMN, with the classification changed to Series A Dwiwarna Shares, thereby increasing BP BUMN's ownership in the Company to 1%.

b. The Head of BP BUMN, in their capacity as the representative of the Republic of Indonesia, declares acceptance of the transfer of shares owned by DAM in the Company, resulting in a total BP BUMN ownership of 1%.

51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

f. Pengalihan Kepemilikan 1% Saham seri A Dwiwarna kepada BP BUMN (lanjutan)

Pada tanggal 5 Januari 2026, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Nomor 28 Tahun 2026 dan Nomor SK.025/DI-DAM/DO/2026, para Pemegang Saham Perusahaan memutuskan antara lain hal-hal berikut: (lanjutan)

c. Sehubungan dengan pengalihan saham pada huruf a diatas, menyetujui perubahan struktur kepemilikan modal Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:
   1. 786.568 lembar Saham Seri A Dwiwarna, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp786.568; dan
   2. 77.870.190 lembar Saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp77.870.190

Pada tanggal 4 Februari 2026, perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah dinyatakan dalam Akta Notaris Desman, S.H., M. Hum., No. 08 atas Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham. Persetujuan dan/atau pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") atas Akta Notaris tersebut di atas masih menunggu proses verifikasi dari Kemenkumham.

g. Pembayaran Dividen Interim AP Indonesia kepada Perusahaan

Pada tanggal 23 Februari 2026, Perusahaan melalui surat No. INJ.12/05.03/23.02/2026/DU-B perihal Informasi Penyetoran Dividen Interim PT Angkasa Pura Indonesia Tahun Buku 2025 menetapkan penarikan dividen interim untuk tahun buku 2025 sebesar Rp300.000. AP Indonesia telah melakukan pembayaran dividen tersebut kepada Perusahaan pada tanggal 5 Maret 2026.

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

f. Transfer of 1% Seri A Dwiwarna shares ownership to BP BUMN (continued)

On January 5, 2026, based on the Company's Shareholders' Resolutions Number 28 Tahun 2026 and Decree Number SK.025/DI-DAM/DO/2026, the Shareholders of the Company resolved the following, among others: (continued)

c. In relation to the share transfer mentioned in point a above, approving the change in the Company's capital ownership structure as follows:
   1. 786,568 Series A Dwiwarna Shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount), totaling Rp786,568; and
   2. 77,870,190 Series B Shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount), totaling Rp77,870,190.

On February 4, 2026, the amendment to the Company's articles of association was formalized in Notarial Deed No. 08 by Notary Desman, S.H., M. Hum., regarding the Statement of Shareholders' Resolutions. Approval and/or notification by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Kemenkumham") for the aforementioned Notarial Deed is still pending verification by Kemenkumham.

g. Interim Dividend Payment AP Indonesia to the Company

On February 23, 2026, the Company, through Letter No. INJ.12/05.03/23.02/2026/DU-B regarding Information on Interim Dividend Deposit of PT Angkasa Pura Indonesia for Fiscal Year 2025, determined the withdrawal of an interim dividend for fiscal year 2025 amounting to Rp300,000. AP Indonesia made the payment of the dividend to the Company on March 5, 2026.

51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

h. Pelepasan Lahan Lot S-5 Tenis di Nusa Dua

Pada tanggal 12 Maret 2026, ITDC telah melakukan pelepasan lahan Lot S-5 Tenis yang berlokasi di Nusa Dua berdasarkan Akta Jual Beli No. 31 dari Dewi Eka Koreati, S.H.. Pembayaran atas penjualan lahan tersebut sejumlah Rp314.053 telah diterima ITDC pada tanggal 29 Desember 2025 dan dicatat sebagai liabilitas kontrak pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 25).

i. Perkembangan Geopolitik di Timur Tengah

Setelah tanggal pelaporan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat menyusul tindakan militer di kawasan tersebut pada akhir Februari 2026. Perkembangan ini menyebabkan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan volatilitas di pasar keuangan dan energi global.

Kelompok Usaha menilai potensi dampak terhadap operasi, posisi keuangan, dan kinerja keuangan Kelompok Usaha yang dapat timbul melalui beberapa faktor, termasuk:

- volatilitas harga komoditas dan energi global,
- gangguan pada rantai pasokan dan logistik global,
- ketidakpastian makroekonomi yang lebih luas yang memengaruhi permintaan pelanggan, dan
- volatilitas di pasar valuta asing dan pasar keuangan.

Saat ini Kelompok Usaha tidak memiliki operasi langsung yang signifikan di negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun, dampak ekonomi yang lebih luas akibat situasi geopolitik tersebut dapat memengaruhi operasi dan kinerja keuangan Kelompok Usaha secara tidak langsung.

Pada tanggal otorisasi atas laporan keuangan ini, tidak memungkinkan untuk mengestimasi secara andal dampak keuangan yang mungkin timbul akibat potensi eskalasi lebih lanjut dari konflik tersebut pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Manajemen akan terus memonitor perkembangan terkait konflik ini dan menilai potensi dampaknya pada periode pelaporan berikutnya.

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

h. Transfer of Land Ownership of Lot S-5 Tenis in Nusa Dua

On March 12, 2026, ITDC has transferred its land ownership of the Lot S-5 Tenis located in Nusa Dua area to PT Bali Destinasi Lestari based on Sales and Purchase Deed No. 31 of Dewi Eka Koreati, S.H. Payment for the land ownership transfer amounting to Rp314,053 has been received by ITDC on December 29, 2025 and recorded as a contract liability in the consolidated statement of financial position (Note 25).

i. Geopolitical Developments in the Middle East

Subsequent to the reporting date, geopolitical tensions in the Middle East escalated following military actions in the region at the end of February 2026. These developments have resulted in heightened geopolitical uncertainty and increased volatility in global financial and energy markets.

The Group assesses the potential implications on the results of the Group's operations, financial position and financial performance which may arise through several factors, including:

- *volatility in global commodity and energy prices,*
- *disruptions in global supply chains and logistic,.*
- *broader macroeconomic uncertainty affecting customer demand, and*
- *volatility in foreign exchange and financial markets.*

The Group does not currently have significant direct operations in the countries directly involved in the conflict. However, the broader economic effects resulting from the geopolitical situation may indirectly affect the Group's operations and financial performance.

At the date of authorization of these financial statements, it is not possible to reliably estimate the financial impact that further escalation of the conflict may have on the Group's consolidated financial statements.

Management will continue to monitor developments relating to the conflict and assess potential implications in future reporting periods.

52. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK

Berikut ini adalah Informasi Keuangan terpisah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (Entitas Induk), terdiri dari laporan posisi keuangan Entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2025 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan arus kas Entitas Induk terkait untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

52. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY

The following is separate PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (the Parent Entity)'s Financial Information, consisting of the statement of financial position of the Parent Entity as of December 31, 2025 and statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Parent Entity for the year ended December 31, 2025 and a summary of significant accounting policies. The Parent Entity's Financial Information is presented as supplementary information to the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2025 and for the year then ended.

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
LAPORAN POSISI KEUANGAN			***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	83.735	132.101	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya - bagian lancar	3.578	21.736	*Restricted cash - current portion*
Investasi jangka pendek	400	400	*Short-term investment*
Piutang usaha	61.028	61.843	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	1.377	1.242.311	*Other receivablest*
Uang muka	2.723	2.749	*Advances*
Aset kontrak	70.393	62.070	*Contract assets*
Pajak dibayar di muka	2.237	2.213	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka	3.956	8.208	*Prepaid expenses*
JUMLAH ASET LANCAR	**229.427**	**1.533.631**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Estimasi tagihan pajak	21.439	21.218	*Estimated claims for tax refund*
Investasi pada entitas anak dan ventura bersama	34.599.714	33.362.577	*Investment in associates and joint venture*
Aset tetap	6.925	7.009	*Fixed assets*
Aset hak-guna	12.359	24.339	*Right-of-use assetst*
Kas yang dibatasi penggunaannya - bagian tidak lancar	125.000	125.000	*Restricted cash - non-current portion*
Aset tidak lancar lainnya	2.101.154	2.006.278	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**36.866.591**	**35.546.421**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET	**37.096.018**	**37.080.052**	***TOTAL ASSETS***

52. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *52. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (continued)*

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) / ***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)***

	31 Desember 2025/ ***December 31, 2025***	**31 Desember 2024/** ***December 31, 2024***	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	133.454	113.184	*Trade payables*
Utang lain-lain	81.078	10.671	*Other payables*
Beban akrual	241.626	66.332	*Accrued expenses*
Utang pajak	10.602	41.635	*Taxes payable*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	175.360	246.688	*Short-term employee benefits liabilities*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	511.016	-	*Long-term bank and other financial institutions loans*
Liabilitas sewa	8.788	20.731	*Lease liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**1.161.924**	**499.241**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			*Long-term liabilities - net of current maturities:*
Utang bank jangka panjang	350.000	972.033	*Long-term bank loans*
Sukuk	2.091.640	2.000.000	*Sukuk*
Liabilitas sewa	3.941	11.543	*Lease liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	-	3.092	*Other long-term liabilities*
Utang jangka panjang lainnya	3.212	-	*Other long-term liabilities*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	19.280	9.688	*Employee benefits liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**2.468.073**	**2.997.082**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS	**3.629.997**	**3.496.323**	***TOTAL LIABILITIES***

52. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *52. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (continued)*

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) / ***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B Modal dasar - 260.000.000 saham, terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 259.999.999 saham Seri B (2024:260.000.000, saham tanpa seri)			*Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively Authorized capital - 260,000,000 shares, consist of 1 A Series Dwiwarna share and 259,999.999 B Series shares (2024: 260,000,000 shares)*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 78.656.758 saham, terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 78.656.757 saham Seri B (2024: 78.656.758 saham tanpa seri)	78.656.758	78.656.758	*Issued and fully paid capital - 78,656,758 shares, consist of 1 A Series Dwiwarna share and 78,656,757 B Series share (2024: 78,656,758 shares)*
Tambahan modal disetor	(45.281.234)	(45.281.234)	*Addition paid in capital*
Penghasilan komprehensif lain	(96)	425	*Other comprehensive income*
Saldo laba			*Retained earnings*
Dicadangkan	2.111	2.111	*Appropiated*
Tidak dicadangkan	88.482	205.669	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS	**33.466.021**	**33.583.729**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**37.096.018**	**37.080.052**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

52. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *52. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2025	**2024**	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***STATEMENT OF PROFIT OR LOSS OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
PENDAPATAN USAHA	**1.133.228**	**1.109.343**	***OPERATING REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	**-**	**(75.697)**	***COST OF REVENUES***
LABA KOTOR	**1.133.228**	**1.033.646**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	(375.007)	(376.279)	*General and administrative expenses*
Beban pegawai	(152.649)	(115.670)	*Employees expenses*
Beban pemasaran	(21.311)	(13.977)	*Marketing expenses*
Pendapatan lain-lain	107.233	53.596	*Other income*
Beban lain-lain	(124.785)	(7.749)	*Other expenses*
LABA USAHA	**566.709**	**573.567**	***OPERATING PROFIT***
Penghasilan keuangan	189.398	91.026	*Finance income*
Beban keuangan	(225.186)	(89.482)	*Finance costs*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	**530.921**	**575.111**	***PROFIT BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak final	**-**	**(769)**	***Final tax expense***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**530.921**	**574.342**	***PROFIT BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
Pajak kini	-	-	*Current tax*
Pajak tangguhan	2.404	(31.740)	*Deffered tax*
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN, NETO	**2.404**	**(31.740)**	***CORPORATE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT, NET***
LABA TAHUN BERJALAN	**533.325**	**542.602**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi			*Items that will not be reclassified to profit or loss*
Rugi komprehensif liabilitas imbalan kerja	(521)	423	*Loss comprehensive income from employee benefit*
Laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	**(521)**	**423**	***Other comprehensive income (loss) for the year after tax***
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	**532.804**	**543.025**	***Total comprehensive income for the year***

52. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

52. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (continued)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

	Modal saham/ *Capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Modal disetor lainnya/*Other paid-in capital*	Penghasilan komprehensif lain/*Other comprehensive income*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
					Dicadangkan/ *Appropriated*	Belum dicadangkan/ *Unappropriated*		
Saldo tanggal 1 Januari 2024	**76.843.739**	**(38.485.457)**	**1.813.019**	**2**	**2.111**	**(235.933)**	**39.937.481**	***Balance as of January 1, 2024***
Efek perubahan metode valuasi tanah di entitas anak	-	(6.795.777)	-	-	-	-	(6.795.777)	*The effect on changes in valuation method of land in subsidiary*
Penambahan penyertaan modal negara	1.813.019	-	(1.813.019)	-	-	-		*Proceed of penyertaan modal negara*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain								*Other comprehensive income (loss)*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	423	-		423	*Re-measurement of employee benefits liability*
Pembayaran dividen	-	-	-	-	-	(101.000)	(101.000)	*Dividend paid*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	542.602	542.602	*Profit for the year*
Saldo tanggal 31 Desember 2024	**78.656.758**	**(45.281.234)**	**-**	**425**	**2.111**	**205.669**	**33.583.729**	***Balance as of December 31, 2024***
Penghasilan (rugi) komprehensif lain								*Other comprehensive income (loss)*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	(521)	-	-	(521)	*Re-measurement of employee benefits liability*
Pembayaran dividen	-	-	-	-	-	(650.512)	(650.512)	*Dividend paid*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	533.325	533.325	*Profit for the year*
Saldo tanggal 31 Desember 2025	**78.656.758**	**(45.281.234)**	**-**	**(96)**	**2.111**	**88.482**	**33.466.021**	***Balance as of December 31, 2025***

52. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *52. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31*		
	2025	**2024**	
LAPORAN ARUS KAS			***STATEMENT OF CASH FLOWS***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	386.484	259.673	*Receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya	(153.244)	(294.660)	*Payment to suppliers and other third parties*
Pembayaran kepada karyawan	(396.216)	(183.221)	*Payments to employees*
Penerimaan (pembayaran) pajak	(39.930)	(45.403)	*Tax receipt (payment)*
Penerimaan pendapatan bunga	189.398	122.784	*Receipt of interest income*
Pembayaran bunga	(141.124)		*Payment of interest expense*
Pembayaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan lainnya	-	(1.306)	*Partnership and Community Development Program Payments and others*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi	**(154.632)**	**(142.133)**	***Net cash used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penambahan penyertaan saham entitas asosiasi	-	(53)	*Payment for investment in associate*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**-**	**(53)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY***
Penerimaan dividen kas dari entitas anak	855.897	778.339	*Cash dividend from subsidiaries*
Pembayaran dividen	(650.512)	(101.000)	*Dividens payment*
Penerimaan (pembayaran) utang bank jangka panjang	(111.017)	34.733	*Proceed (payment) of long-term bank loans*
Pembayaran liabilitas sewa	(7.564)	(3.417)	*Payments of lease liabilities*
Penerimaan (pembayaran) pinjaman dari anak perusahaan	(6.274)	256.456	*Receipt of loan payments from subsidiaries*
Penerimaan (pembayaran) dari sukuk	7.578	2.000.000	*Proceeds (payment) from sukuk*
Ijarah ke anak perusahaan	-	(2.000.000)	*Ijarah to subsidiaries*
Pelepasan (penempatan) kas yang dibatasi penggunaannya	18.158	(146.736)	*Release (placement) of restricted cash*
Pinjaman ke anak perusahaan	-	(592.858)	*Funding in subsidiary company*
Penambahan penyertaan saham pada entitas anak	-	(1.014.200)	*Addition of equity participation in subsidiary entities*
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**106.266**	**(788.683)**	***Net cash provided by (used in) financing activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(48.366)**	**(930.869)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**132.101**	**1.062.970**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**83.735**	**132.101**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

52. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 227: "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK 227 menyatakan bahwa ketika sebuah entitas induk memilih untuk menyajikan laporan keuangan terpisah, laporan keuangan tersebut seharusnya hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan tersendiri yang disajikan oleh entitas induk, di mana investasi dalam entitas anak, entitas asosiasi dan entitas dikendalikan bersama dicatat berdasarkan kepemilikan langsung dan bukan berdasarkan hasil yang dilaporkan dan aset neto entitas investasi.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan informasi keuangan entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak dan entitas asosiasi.

Penyertaan saham pada entitas anak dicatat pada biaya perolehan. Entitas induk mengakui dividen dari entitas anak pada perkiraan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

52. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (continued)

SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity

The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") 227: "Separate Financial Statements".

PSAK 227 provides that when a parent entity chose to present the separate financial statements, such financial statements should only be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent, in which the investments in the subsidiary, associate entity and jointly controlled entity are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries and associates.

Investments in shares of stock of subsidiaries are accounted for at acquisition cost. The parent entity recognizes dividends from subsidiaries in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends was established.

52. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

52. *FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (continued)*

INVESTASI JANGKA PANJANG

LONG-TERM INVESTMENTS

a. Penyertaan saham

a. *Investment in shares*

Informasi mengenai entitas anak dan asosiasi yang dimiliki Grup diungkapkan dalam Catatan 1d dan 15 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Information pertaining to subsidiaries and associates owned by the Group is disclosed in Notes 1d and 15 to the Consolidated Financial Statements.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Entitas Induk memiliki penyertaan saham sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the Parent Entity has investment in shares as follow:

	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan 31 Desember 2025/ *Acquisition cost December 31, 2025*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan 31 Desember 2024/ *Acquisition cost December 31, 2024*
Entitas Anak/*Subsidiaries*				
PT Angkasa Pura Indonesia (dahulu PT Angkasa Pura II)	99,99%	28.313.957	99,99%	28.313.957
PT Hotel Indonesia Natour	99,99%	1.970.178	99,99%	1.537.320
PT Sarinah	99,99%	605.394	99,99%	76.115
PT Taman Wisata Candi Prambanan dan Ratu Boko	99,99%	548.004	99,99%	548.004
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	99,99%	3.162.127	99,99%	2.887.127
PT Integrasi Aviasi Solusi	0,0001%	3	0,0001%	3
Jumlah/Total		**34.599.663**		**33.362.526**

INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

SUPPLEMENTAL INFORMATION TO THE STATEMENT OF CASH FLOW

Transaksi non-kas terdiri dari:

Non-cash transaction consists of:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Konversi pinjaman kepada entitas anak sebagai tambahan penyertaan pada entitas anak (Catatan 47)	1.237.137	-	*Conversion of loan to subsidiary as additional investment in the subsidiaries (Note 47)*

52. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

52. *FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (continued)*

INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

SUPPLEMENTAL INFORMATION TO THE STATEMENT OF CASH FLOW (continued)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut :

Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

			Non-arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Selisih kurs/ *Foreign exchange difference***	**Lainnya/ *Other***	**31 Desember 2025/ *December 31, 2025***	
Pinjaman bank jangka panjang	972.033	(111.017)	-	-	861.016	*Long-term bank loans*
Sukuk	2.000.000	7.578	-	84.062	2.091.640	*Sukuk*
Jumlah	**2.972.033**	**(103.439)**	**-**	**84.062**	**2.952.656**	***Total***

			Non-arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Selisih kurs/ *Foreign exchange difference***	**Lainnya/ *Other***	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Pinjaman bank jangka panjang	937.300	34.733	-	-	972.033	*Long-term bank loans*
Sukuk	-	2.000.000	-	-	2.000.000	*Sukuk*
Jumlah	**937.300**	**2.034.733**	**-**	**-**	**2.972.033**	***Total***